



**BAPPENAS**



# **RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN RISIKO BENCANA 2010 - 2012**



World Bank



SC-DRR

with Commitment through  
Disaster Risk Reduction





**Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SAMBUTAN**

Penyusunan Buku Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) 2010-2012 dilaksanakan dengan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, selain sebagai lanjutan berakhirnya pelaksanaan RAN-PRB 2006-2009. Selain itu penyusunan RAN-PRB 2010-2012 merupakan kelanjutan komitmen Pemerintah terhadap Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Tahun 1999 yang menyerukan kepada pemerintah di setiap negara untuk menjaga dan memperkuat realisasi Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana untuk mendukung dan penjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan, serta dalam penjabaran Kerangka Aksi Hyogo untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Hyogo Framework for Action*) 2005-2015, yang menekankan bagi semua negara di dunia untuk menyusun mekanisme terpadu pengurangan risiko bencana yang didukung kelembagaan dan kapasitas sumber daya yang memadai.

Berbagai kejadian bencana dalam kurun waktu lima tahun terakhir, semakin mendorong dan memperkuat komitmen Pemerintah dalam melaksanakan perubahan paradigma penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif kearah upaya preventif. Bukti lain dari keseriusan Pemerintah terhadap upaya penanggulangan bencana adalah ditetapkannya penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, khususnya pada prioritas nomor 9 tentang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

Penyusunan RAN-PRB 2010-2012 dilaksanakan melalui beberapa tahapan proses yang konsultatif dan partisipatif melalui koordinasi, konsultasi serta konsolidasi di antara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah selama enam bulan terakhir. **Hasilnya telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala BNPB No 5 Tahun 2010.**


Diharapkan dokumen RAN-PRB 2010-2012 akan menjadi dasar dan acuan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana sesuai yang diharapkan. Selanjutnya dari sisi Pemerintah, utamanya kementerian/lembaga, dokumen RAN-PRB 2010-2012 dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga setiap tahun. Selain itu, diharapkan pemerintah daerah dapat menindaklanjuti RAN-PRB ini dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan para pemangku kepentingan yang telah mendukung tersusunnya Buku Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2012 ini, terutama kepada pihak UNDP dan Bank Dunia, yang telah mendukung pembiayaan penyusunan rancangan RAN-PRB ini.

Semoga buku ini dapat menjadi dokumen bersama baik pemerintah maupun lembaga-lembaga nonpemerintah, yang selanjutnya menjadi pedoman dan acuan bersama dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia.

Jakarta, Januari 2010

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Armida S. Alisjahbana



**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
(BNPB)**

**SAMBUTAN**

Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) 2006-2009 telah berakhir masa berlakunya dan sebagai kelanjutannya disusun Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2012, yang telah disahkan melalui Peraturan Kepala BNPB No. 5 tahun 2010. RAN-PRB disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disusun bersama oleh suatu forum yang mencakup Kementerian/Lembaga terkait di tingkat nasional, LSM, perguruan tinggi, dunia usaha dan para pemangku kepentingan terkait lainnya, yang dikoordinasikan bersama oleh BNPB dan Bappenas.

Dokumen ini juga merupakan wujud dari komitmen Indonesia terhadap pelaksanaan Kerangka Aksi Hyogo untuk Pengurangan Risiko Bencana 2005-2015, *Building the resilience of nations and communities to disaster* (Membangun ketangguhan bangsa dan masyarakat terhadap bencana).

Diharapkan program dan kegiatan dalam RAN-PRB 2010-2012 dapat dijadikan dasar dan acuan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana. Bagi instansi pemerintah, terutama Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat dan instansi-instansi pemerintah daerah yang bekerja dalam penanggulangan bencana, diharapkan RAN-PRB 2010-2012 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif Kementerian/Lembaga, LSM, perguruan tinggi, dunia usaha dan pihak-pihak lain yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan dokumen ini. Semoga RAN-PRB 2010-2012 dapat menjadi dokumen yang disepakati bersama antara pemerintah dan para pemangku kepentingan di luar pemerintah dalam melaksanakan upaya-upaya pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dan daerah.

Kepala

**Dr. Syamsul Maarif, M.Si.**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**  
**RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN RISIKO BENCANA**  
**(RAN-PRB) TAHUN 2010-2012**

**PENDAHULUAN**

Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi semua pihak dalam penjabaran kebijakan pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dalam periode yang ditetapkan dalam 3 (tiga) tahun anggaran, dan memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaan dalam implementasi rencana aksi. RAN-PRB menjadi dasar pelaksanaan yang kuat dan sistematis bagi prioritas yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah dalam mengurangi risiko dari beragam ancaman bencana.

Dokumen RAN-PRB 2010-2012 memuat kepentingan dan tanggung jawab semua pihak terkait dalam penjabaran dan implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana di tingkat nasional, yang penyusunannya dilakukan proses koordinasi, konsultasi dan partisipasi sebagaimana kesepakatan global pengurangan risiko bencana dalam *Hyogo Framework for Action (HFA)* tahun 2005-2015.

RAN-PRB 2010-2012 merupakan kelanjutan RAN-PRB 2006-2009 yang disusun melalui koordinasi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, serta berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti perguruan tinggi, lembaga/negara donor dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan pengurangan risiko bencana.

RAN-PRB disusun berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang secara hierarkis merupakan penjabaran Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas-PB).

## **KONDISI KEBENCANAAN DI INDONESIA**

Berdasarkan data kejadian dan dampak bencana yang mengacu pada data historis selama dua dekade terakhir, menunjukkan terdapat beberapa ancaman bencana yang dominan di Indonesia, yaitu: (1) gempa bumi; (2) tsunami; (3) tanah longsor/gerakan tanah; (4) letusan gunung api; (5) banjir; dan (6) kekeringan.

Untuk menghadapi ancaman bencana yang beragam dan semakin tinggi intensitasnya dalam lima tahun terakhir ini, diperlukan penilaian dan analisis risiko bencana. Penilaian atau analisis risiko bencana bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah berdasarkan tingkat risikonya terhadap bencana. Hasil analisis menjadi acuan dalam perumusan tindakan prioritas pengurangan risiko bencana. Salah satu komponen analisis risiko bencana adalah kemampuan kelembagaan, baik pemerintah maupun non pemerintah, pusat, dan daerah dalam menangani bencana.

## **LANDASAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

Pengurangan risiko bencana di Indonesia merupakan bagian dari upaya pengurangan risiko bencana di tingkat internasional yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk masyarakat internasional. Sebagai bagian dari komitmen bangsa dan negara Indonesia, maka landasan yang mendasari penyusunan RAN-PRB mengacu pada kesepakatan-kesepakatan internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Seiring perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen penanggulangan bencana, diperlukan upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Utamanya melalui pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam prioritas pembangunan nasional lima tahun ke depan, salah satunya adalah memasukkan pengurangan risiko bencana sebagai salah satu aspek kebijakan dalam pencapaian sasaran bidang pembangunan.

## **PEMBELAJARAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

Terdapat beberapa pembelajaran dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana di Indonesia, di antaranya: reformasi kerangka peraturan dan kebijakan, reformasi kelembagaan, penguatan koordinasi dan jejaring, partisipasi masyarakat, pembelajaran

penanganan bencana alam, penggunaan penilaian kerusakan dan kerugian, proses pelaksanaan pemulihan pascabencana, dan pendanaan penanggulangan bencana yang lebih memadai.

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RAN PRB 2006-2009**

Untuk memperoleh gambaran kemajuan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan tahunan RAN-PRB 2006-2009 telah dilakukan pemantauan dan evaluasi. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-PRB 2007-2008 yang dilakukan Bappenas pada 2008 lalu, telah dijadikan masukan utama dalam melihat gambaran menyeluruh implementasi RAN-PRB 2006-2009. Hasil evaluasi ini menjadi masukan dan saran terhadap proses penyusunan RAN-PRB 2010-2012.

Dalam evaluasi pelaksanaan RAN-PRB 2006-2009 tersebut, digunakan beberapa indikator penilaian, yaitu konsistensi, koordinasi, kapasitas, konsultasi, dan keberlanjutan.

Berdasarkan deskripsi hasil evaluasi pelaksanaan RAN-PRB 2006-2009, telah dirumuskan beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut baik yang bersifat umum maupun khusus, yang selanjutnya dijadikan masukan dan saran bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana.

### **GAMBARAN RAN-PRB 2010-2012**

Prioritas penanganan ancaman bencana dalam RAN-PRB 2010-2012 ini didasarkan atas penanganan bencana yang telah dilakukan selama ini dan perkiraan ancaman bencana berdasarkan hasil analisis risiko bencana. Analisis risiko tersebut merupakan analisis yang didasarkan pada analisis ancaman (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*) dan kemampuan (*capacity*) dalam menangani bencana. Selanjutnya analisis ini akan memberikan gambaran atas kemungkinan terjadinya bencana pada beberapa tahun yang akan datang di Indonesia, terutama untuk tiga tahun ke depan.

Pendekatan penyusunan RAN-PRB 2010-2012 dikaitkan terhadap prioritas pengurangan risiko bencana yang tercantum di Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015, serta program dan kegiatan yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

RAN-PRB 2010-2012 ini merupakan gambaran secara menyeluruh rencana aksi dari semua *stakeholders* terkait, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat internasional, serta dunia usaha. RAN-



PRB 2010-2012 disajikan dalam bentuk matriks, yang dijabarkan dalam kelompok 5 (lima) prioritas HFA, dan diturunkan ke dalam 7 (tujuh) program utama dan 33 kegiatan prioritas.

### **PELAKSANAAN DAN EVALUASI RAN-PRB 2010-2012**

Mekanisme pelaksanaan RAN-PRB 2010-2012 merupakan satu kesatuan dengan Renas-PB yang memiliki jangka waktu lima tahun, sedangkan RAN-PRB merupakan dokumen teknis yang lebih operasional dan berjangka waktu tiga tahun. Melalui koordinasi BNPB dan Bappenas setiap tahun, RAN-PRB 2010-2012 akan dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sedangkan bagi kalangan nonpemerintah, RAN-PRB merupakan komitmen berbagai pemangku kepentingan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan dalam periode tiga tahun. Mekanisme kegiatan tahunan baik dalam pelaksanaan maupun evaluasinya akan dikoordinasikan oleh Bappenas, BNPB, dan *Platform* Nasional yang mewakili kalangan nonpemerintah.

Pengaturan terhadap kelembagaannya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, bahwa RAN-PRB akan ditetapkan melalui Peraturan Kepala BNPB setelah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional. Sementara *Platform* Nasional, merupakan forum *multistakeholders* yang memiliki jejaring sehingga akan memperkuat pelaksanaan rencana aksi RAN-PRB ini. Masyarakat sipil akan dilibatkan dalam tatanan kelembagaan dan mekanisme pengurangan risiko bencana di semua tataran pemerintahan. Untuk dapat lebih meningkatkan hasil guna dan daya guna pelaksanaan RAN-PRB ini, BNPB dan Bappenas akan membentuk Sekretariat Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan RAN-PRB. Pelaksanaan penanggulangan bencana yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian dilakukan melalui partisipasi masyarakat

Sumber pendanaan pelaksanaan RAN-PRB diperoleh dari APBN, dukungan swasta, dan lembaga donor internasional. Anggaran yang bersumber dari dana APBN dialokasikan secara reguler melalui anggaran dari setiap kementerian/lembaga untuk menjamin agar upaya pengurangan risiko bencana dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan.

Untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan pengurangan risiko bencana sebagaimana tertuang dalam dokumen RAN-PRB 2010-2012 diperlukan arahan dan pedoman pelaksanaan dimaksud. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk memastikan dan menjamin pencapaian pelaksanaan prioritas, program, dan kegiatan yang ditetapkan dalam RAN-PRB 2010-2012.

Di dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi RAN-PRB akan dikombinasikan berbagai indikator dalam RAN-PRB ini. Terdapat tiga kelompok indikator yang dapat dipergunakan dalam pemantauan dan evaluasi ini, yaitu indikator berdasarkan prioritas aksi HFA, indikator kinerja pelaksanaan pengurangan risiko bencana, dan indikator berdasarkan aspek 5-K (konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan).

Ketiga kelompok indikator ini saling mengisi dan saling mendukung. Indikator HFA menekankan kepada penilaian hasil (*outcome*), indikator 5-K akan menekankan kepada prosesnya, sedangkan indikator kinerja lebih menekankan kepada keluaran (*output*).

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMBUTAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS .....</b>	i
<b>SAMBUTAN KEPALA BNPB .....</b>	iii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	iv
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	xiii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xiv
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xviii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1 - 1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	1 - 1
1.3. Lingkup Kegiatan.....	1 - 2
1.4. Kedudukan RAN-PRB Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya .....	1 - 2
1.4.1. Tingkat Nasional .....	1 - 2
1.4.2. Tingkat Daerah .....	1 - 6
1.5. Metodologi Penyusunan RAN-PRB .....	1 - 7
1.6. Sistematika Penulisan .....	1 - 7
<b>BAB II. KONDISI KEBENCANAAN DI INDONESIA</b>	
2.1. Jenis Bencana Di Indonesia dan Pengelompokkannya.....	2 - 1
2.2. Ancaman Bencana .....	2 - 2
2.2.1. Gempa Bumi dan Tsunami .....	2 - 2
2.2.2. Tanah longsor/ Gerakan Tanah .....	2 - 8
2.2.3. Letusan Gunung Api .....	2 - 10
2.2.4. Banjir .....	2 - 13
2.2.5. Kekeringan .....	2 - 16
2.3. Kerentanan .....	2 - 19
2.4. Kemampuan Menangani Bencana/Kapasitas .....	2 - 21

2.5.	Analisis Risiko Bencana .....	2 - 22
2.5.1.	Peta Risiko Gempa Bumi dan Tsunami .....	2 - 22
2.5.2.	Peta Risiko Letusan Gunung Api .....	2 - 24
2.5.3.	Peta Risiko Longsor .....	2 - 24
2.5.4.	Peta Risiko Banjir .....	2 - 25
2.5.5.	Peta Risiko Kekeringan .....	2 - 26

### **BAB III. LANDASAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

3.1.	Landasan Internasional .....	3 - 1
3.1.1.	Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) .....	3 - 1
3.1.2.	Strategi Yokohama ( <i>Yokohama Strategy</i> ) .....	3 - 2
3.1.3.	Kerangka Aksi Hyogo ( <i>Hyogo Framework for Action</i> ) .....	3 - 3
3.1.4.	Kerangka Aksi Beijing .....	3 - 4
3.2.	Landasan Nasional .....	3 - 5
3.2.1.	Undang -undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .....	3 - 5
3.2.2.	Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana .....	3 - 6
3.2.3.	Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang .....	3 - 7
3.2.4.	Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. ....	3 - 7
3.2.5.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana .....	3 - 8
3.2.6.	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana . ....	3 - 9
3.3.	Pengurangan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim .....	3 - 10
3.4.	Pengurangan Risiko Bencana dalam Konteks Pembangunan .....	3 - 11
3.4.1.	Bencana Alam dan Pengurangan Kemiskinan .....	3 - 11
3.4.2.	Aspek Pengurangan Risiko Bencana dalam Penataan Ruang .....	3 - 12
3.4.3.	Pengurangan Risiko Bencana dalam Pengembangan Wilayah Perkotaan .....	3 - 13

3.4.4. Aspek PRB dalam Pembangunan Bidang Pertanian.....	3- 14
3.4.5. Pengarusutamaan Gender dalam PRB.....	3 - 14

#### **BAB IV. PEMBELAJARAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

4.1. Reformasi Kerangka Peraturan dan Kebijakan .....	4 - 1
4.2. Reformasi Aspek Kelembagaan .....	4 - 4
4.3. Aspek Koordinasi dan Jejaring .....	4 - 5
4.4. Partisipasi Masyarakat Sipil .....	4 - 6
4.5. Pembelajaran Penanganan dan Praktik-praktik yang Baik dalam PRB .....	4 - 8
4.5.1. Pembelajaran Penilaian Kerugian dan Kerusakan Bencana .....	4 - 8
4.5.2. Praktik yang Baik dalam Penanganan PRB di Indonesia .....	4 - 12
4.5.3. Praktik yang Baik dalam Penanganan PRB di Negara Lain .....	4 - 15
4.6. Aspek Pendanaan .....	4 - 18

#### **BAB V. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RAN-PRB TAHUN 2006-2009**

5.1. Pengantar Evaluasi RAN-PRB 2006-2009 .....	5 - 1
5.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RAN PRB 2006-2009 .....	5 - 2
5.2.1. Konsistensi .....	5 - 2
5.2.2. Koordinasi .....	5 - 5
5.2.3. Kapasitas .....	5 - 6
5.2.4. Konsultasi .....	5 - 6
5.2.5. Keberlanjutan .....	5 - 7
5.3. Keberhasilan dan Kekurangan.....	5 - 7
5.3.1. Keberhasilan .....	5 - 7
5.3.2. Kekurangan .....	5 - 9
5.4. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	5 - 9
5.4.1. Beberapa Rekomendasi Umum .....	5 - 9
5.4.2. Rekomendasi Berdasarkan Prioritas .....	5 - 11

<b>BAB VI. RENCANA AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA</b>	
6.1. Prioritas Penanganan Berdasarkan Hasil Analisis Risiko Bencana .....	6 - 1
6.2. Pendekatan Penyusunan Prioritas, Program dan Kegiatan.....	6 - 1
6.3. RAN-PRB 2010-2012 .....	6 - 4
6.4. Pengelompokan Rencana Aksi Nasional PRB .....	6 - 9
6.5. Matriks Kegiatan RAN PRB yang belum Terindikasi dana dan Pelaksanaannya .....	6 - 10
 <b>BAB VII PELAKSANAAN</b>	
7.1. Mekanisme .....	7 - 1
7.2. Kelembagaan .....	7 - 2
7.3. Peran Serta Masyarakat.....	7 - 3
7.4. Pendanaan.....	7 - 4
 <b>BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RAN PRB TAHUN 2010-2012</b>	
8.1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi .....	8 - 1
8.2. Metodologi.....	8 - 2
8.2.1. Tahapan Proses Evaluasi dan Kerangka Kerja Logis .....	8 - 2
8.2.2. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi .....	8 - 4
8.2.3. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi .....	8 - 5
8.2.4. Kerangka Waktu .....	8 - 6
8.3. Indikator Evaluasi .....	8 - 7
8.3.1. Indikator Program Prioritas Berdasarkan HFA .....	8 - 7
8.3.2. Indikator Kinerja Pelaksanaan RAN-PRB .....	8 - 9
8.3.3. Indikator Pelaksanaan RAN-PRB Berdasarkan 5-K .....	8 - 10
8.4. Pelaksana dan Pembagian Peran .....	8 - 12
 <b>BAB IX PENUTUP</b> .....	9 - 1

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB).....	1 - 3
Gambar 1.2. Kerangka Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Bencana.....	1 - 4
Gambar 1.3. Posisi RAN-PRB terhadap UU 24 Tahun 2007 dan Platform Nasional .....	1 - 5
Gambar 2.1. Peta Zonasi Bahaya Gempa Indonesia .....	2 - 5
Gambar 2.2. Peta Bahaya Tsunami di Kabupaten/Kota Pesisir ...	2 - 8
Gambar 2.3. Peta Bahaya Gerakan Tanah Di Indonesia .....	2 - 10
Gambar 2.4. Peta Sebaran Gunung Api di Indonesia .....	2 - 12
Gambar 2.5. Peta Indeks Ancaman Bencana Banjir Indonesia .....	2 - 15
Gambar 2.6. Peta Indeks Ancaman Bencana Kekeringan Di Indonesia.....	2 - 18
Gambar 2.7. Peta Kerentanan Sosial Ekonomi Wilayah di Indonesia .....	2 - 20
Gambar 2.8. Peta Risiko Gempa Bumi Wilayah Indonesia .....	2 - 23
Gambar 2.9. Peta Risiko Tsunami Wilayah Indonesia .....	2 - 23
Gambar 2.10. Peta Risiko Letusan Gunung Api Wilayah Indonesia .....	2 - 24
Gambar 2.11. Peta Risiko Longsor Wilayah Indonesia.....	2 - 25
Gambar 2.12. Peta Risiko Banjir Wilayah Indonesia .....	2 - 26
Gambar 2.13. Peta Risiko Kekeringan Wilayah Indonesia .....	2 - 27
Gambar 4.1. Skema Penilaian Kebutuhan Pemulihan .....	4 - 10
Gambar 8.1. Kerangka Kerja Logis Pemantauan dan Evaluasi RAN-PRB .....	8 - 4

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Keterkaitan RAN-PRB, RTRW, RAN PI dan RAN PK .....	1 - 6
Tabel 2.1. Kejadian Gempa Bumi di Indonesia dengan magnitudo di Atas 8 (PVMBG, 2008) .....	2 - 4
Tabel 2.2. Korban Jiwa Signifikan Beberapa Kejadian Gempa Bumi di Indonesia (PVMBG, 2008) .....	2 - 4
Tabel 2.3. Daftar Tsunami di Indonesia, Periode 1980- 2002 .....	2 - 7
Tabel 2.4. Kategori Kering-basah Berdasarkan Nilai SPI .....	2 - 18
Tabel 2.5. Jumlah dan persentase Kabupaten/Kota di Indonesia yang Memiliki Risiko Bencana dengan Klasifikasi Tinggi .....	2 - 27
Tabel 4.1. Daftar Bencana Alam di Indonesia Pada Kurun Waktu 5 Tahun Terakhir .....	4 - 9
Tabel 4.2. Penilaian Kerusakan dan Kerugian di Indonesia .....	4 - 11
Tabel 5.1. Alokasi Program PRB dalam RKP .....	5 - 3
Tabel 5.2. Persandingan Usulan Program RAN-PRB 2006-2009 dengan Alokasi Anggaran Pemerintah .....	5 - 4
Tabel 5.3. Persandingan Usulan Program RAN-PRB 2006-2009 dengan Kontribusi Donor/NGO .....	5 - 5
Tabel 5.4. Pemetaan Peran Pelaku Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia .....	5 - 11
Tabel 6.1. Penjelasan Matriks RAN PRB .....	6 - 4
Tabel 6.2. Rekapitulasi Kegiatan RAN-PRB 2010-2012 .....	6 - 6
Tabel 8.1. Indikator untuk Prioritas Aksi HFA .....	8 - 8
Tabel 8.2. Evaluasi RAN-PRB Berdasarkan Aspek 5-K .....	8 - 11



## DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASEAN	: Association of South East Asian Nations
AUSAID	: Australian Agency for International Development
AWS	: Automatic Weather Station
BAKORNAS PB	: Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
BAKOSURTANAL	: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BMKG	: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CBDRM	: Community-Based Disaster Risk Management
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DIBI	: Data dan Informasi Bencana Indonesia
DITJEN	: Direktorat Jenderal
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DMIS	: Disaster Management Information System
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPDR	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DRR	: Disaster Risk Reduction
DRRMP	: Disaster Risk Reduction Management Plan
EOC	: Emergency Operating Center
EWS	: Early Warning System
GIS	: Geographical Information System
GPS	: Global Positioning System
GTZ	: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
HFA	: Hyogo Framework for Action
HOPE	: Hospital Preparedness of Emergency and Disaster
IDEP	: Indonesian Development of Education and Permaculture
IFRC	: International Federation of Red Cross
ISDR	: International Strategy for Disaster Reduction
ITB	: Institut Teknologi Bandung
ITS	: Institut Teknologi 10 November Surabaya
JATENG	: Jawa Tengah

JATIM	: Jawa Timur
KALTIM	: Kalimantan Timur
KEMENEG LH	: Kementerian Negara Lingkungan Hidup
KEMENKOKESRA	: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
KEMDAGRI	: Kementerian Dalam Negri
KEM.	: Kementerian
KESDM	: Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
KEPPRES	: Keputusan Presiden
KKN	: Kuliah Kerja Nyata
KOGAMI	: Komunitas Siaga Tsunami
KRB	: Kawasan Rawan Bencana
KSR	: Korps Sukarelawan Remaja
LAPAN	: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LPND	: Lembaga Pemerintah Non-Departemen
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MPBI	: Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
NGO	: Non-Government Organizations
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTT	: Nusa Tenggara Timur
NU	: Nahdlatul Ulama
OXFAM	: Oxford Committee for Famine Relief
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PEMKOT	: Pemerintah Kota
PEM PROV	: Pemerintah Provinsi
PERDA	: Peraturan Daerah
PERPRES	: Peraturan Presiden
PIRBA	: Pusat Informasi Riset Bencana Alam
PMB	: Pusat Mitigasi Bencana
PMI	: Palang Merah Indonesia
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PPK	: Pusat Penanggulangan Krisis
PRB	: Pengurangan Risiko Bencana
PVMBG	: Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
RAD-PRB	: Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana
RAN-PRB	: Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana
RAPBD	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RISTEK	: Riset dan Teknologi

RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SAR	: Search And Rescue
SATGANA	: Satuan Siaga Bencana
SATGAS	: Satuan Tugas
SATLAK	: Satuan Pelaksana
SD	: Sekolah Dasar
SDA	: Sumber Daya Alam
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMU	: Sekolah Menengah Umum
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SOP	: Standard Operating Procedure
SUMBAR	: Sumatera Barat
TAGANA	: Taruna Siaga Bencana
TEWS	: Tsunami Early Warning System
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TOT	: Training of Trainers
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UNAND	: Universitas Andalas
UNDP	: United Nations Development Programme
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
UNICEF	: United Nations Children’s Fund
UN ISDR	: United Nations International Strategy for Disaster Reduction
UNOCHA	: United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
UNSYIAH	: Universitas Syiah Kuala
UNTWG	: United Nations Technical Working Group
UPN	: Universitas Pendidikan Nasional
USA	: United States of America
USAID	: United States Agency for International Development
UU	: Undang-Undang
VCA	: Vulnerability and Capacity Assessments
WFP	: World Food Programme

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman bencana
- Lampiran 2 Matriks induk kegiatan RAN-PRB 2010-2012
- Lampiran 3 Matriks kegiatan RAN-PRB 2010-2012 dari Kementerian dan Lembaga
- Lampiran 4 Matriks Usulan Kegiatan RAN-PRB 2010-2012





# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Kesadaran akan upaya pengurangan risiko bencana telah dimulai pada dekade 1990-1999 yang dicanangkan sebagai Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Sedangkan di tingkat nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan landasan dari Pengurangan Risiko Bencana.

Pada periode 2006-2009 Indonesia telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB). RAN-PRB 2006-2009 tersebut disusun sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015 (HFA 2005-2015) yang merupakan penjabaran dari lima kelompok prioritasnya. RAN-PRB tersebut disusun secara nasional melalui proses yang melibatkan berbagai pihak terkait di tingkat pusat dan daerah, baik dari pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Selain itu RAN-PRB juga disusun sejalan dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia. Ada tiga hal penting yang terkait dengan perubahan paradigma ini, yaitu :

- (1). Penanganan bencana tidak hanya menekankan pada tanggap darurat, melainkan pada keseluruhan manajemen risiko;
- (2). Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud dari hak asasi rakyat, dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah; dan
- (3). Penanganan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.

Dengan berakhirnya RAN-PRB 2006-2009 dan untuk menjaga konsistensi dan komitmen pemerintah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, perlu disusun RAN-PRB untuk periode 2010-2012.

### 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi semua pihak karena memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaannya. RAN-PRB menjadi dasar pelaksanaan yang kuat dan

sistematis bagi prioritas yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah, serta mencakup beragam ancaman.

Dokumen ini diharapkan menghasilkan rencana aksi pengurangan risiko bencana yang telah diintegrasikan dan disinergikan dengan dokumen perencanaan pembangunan, seperti: perencanaan tata ruang, program perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, dan program nasional lainnya.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Aksi PRB yang merupakan penjabaran Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB), adalah untuk mendukung perumusan kebijakan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana.

### **1.3. LINGKUP KEGIATAN**

Dokumen RAN-PRB 2010-2012 memuat kepentingan dan tanggung jawab semua pihak terkait yang penyusunannya melalui proses koordinasi dan partisipasi sebagaimana telah disepakati dalam kesepakatan *Hyogo Framework for Action*.

### **1.4. KEDUDUKAN RENCANA AKSI PRB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**

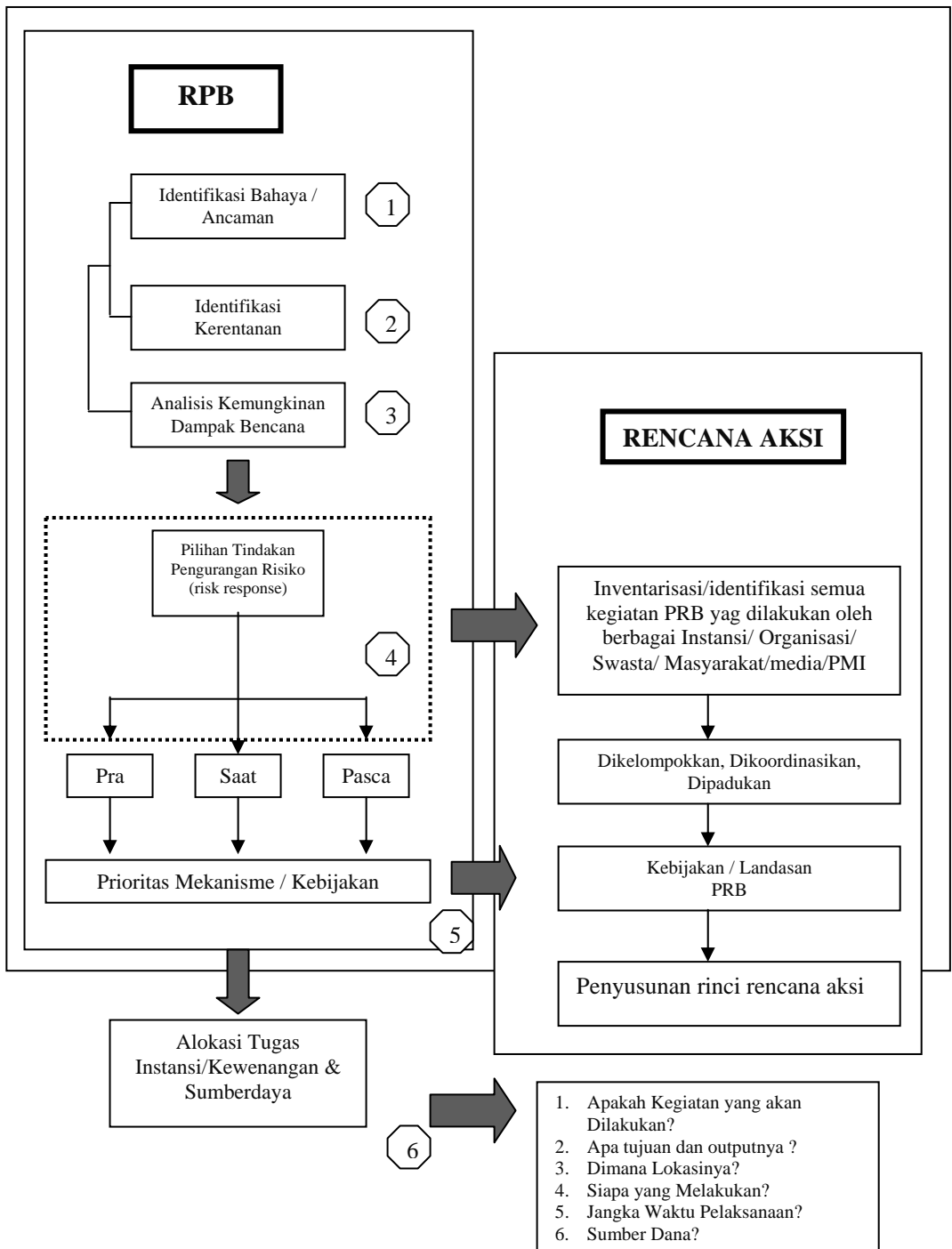
#### **1.4.1. Tingkat Nasional**

RAN-PRB merupakan penjabaran dari Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dengan kerangka waktu RPB lima tahun sedangkan RAN-PRB tiga tahun.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kedudukan RPB dan RAN-PRB merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Nasional sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1.1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kerangka hukum (*legal framework*) sistem perencanaan di Indonesia.

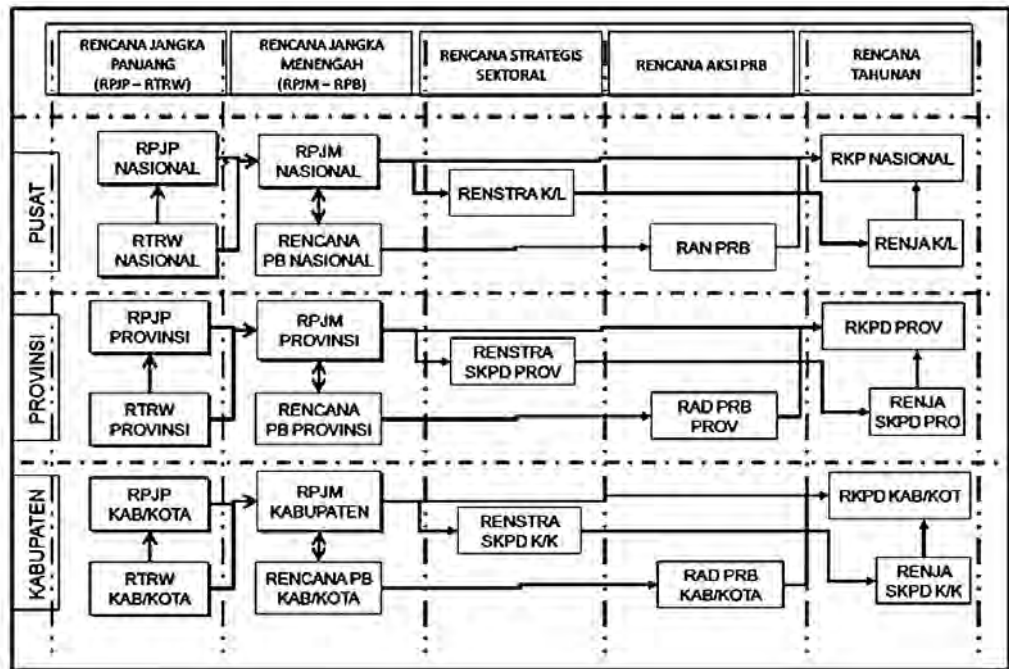
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 juga menjadi acuan bagi penyusunan RAN-PRB terutama untuk kawasan-kawasan rawan bencana.





**Gambar 1.1** Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (RA-PRB)

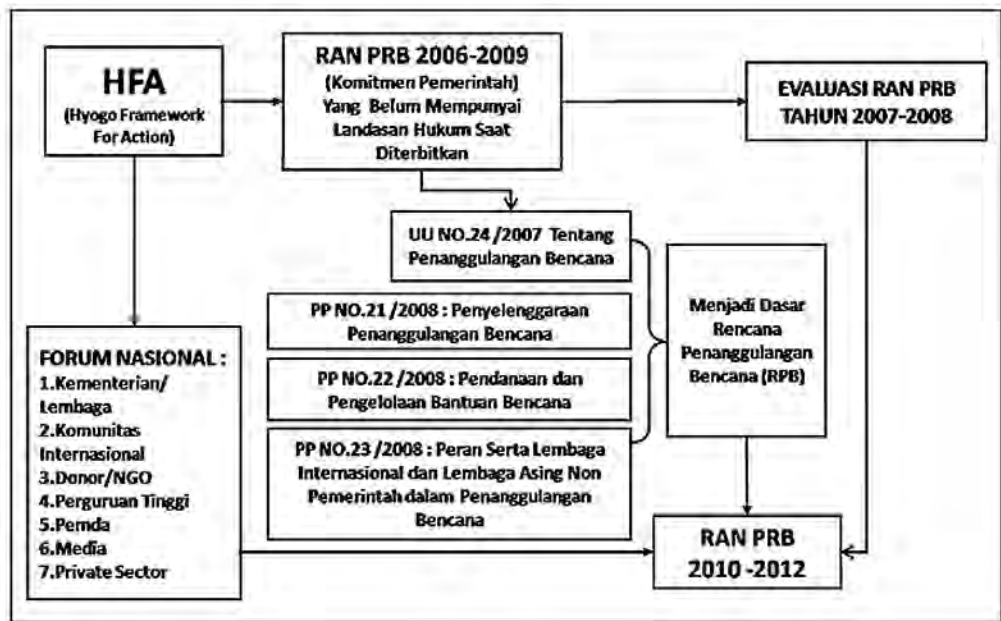
Terkait dokumen RPJPN, RPJMN, dan RTRWN, maka kedudukan RPB, RAN-PRB dapat dikerangkakan sebagaimana Gambar 1.2. Dalam kerangka tersebut, kedudukan RPB dan RAN-PRB adalah bentuk operasionalisasi dari RPJMN.



**Gambar 1.2. Kerangka Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Bencana**

Peraturan Pemerintah Nomor 21, 22, dan 23 Tahun 2008 yang merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 menjadi landasan hukum bagi penyusunan RAN-PRB. Pada saat yang sama, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 jelas mengamanatkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempunyai kewajiban untuk menjamin tersusunnya RAN-PRB yang sifatnya lintas sektor dan lintas wilayah yang dilakukan oleh forum nasional (*national platform*) PRB.

Substansi RAN-PRB akan mengacu pada dua hal, pertama ada program yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dan kelompok prioritas dari *Hyogo Framework for Action* (HFA).



Gambar 1.3. Posisi RAN-PRB terhadap UU 24 tahun 2007 dan Platform Nasional

Dalam kerangka perencanaan RAN-PRB terkait dengan beberapa kerangka kerja yang relevan (*other relevant action frame*) baik tingkat internasional maupun regional, di antaranya adalah aspek (1). tata ruang; (2). Lingkungan; (3). perubahan iklim; dan (4). pengurangan kemiskinan. Keempat aspek tersebut telah memiliki konsep Rencana Aksi Nasional dan saling berkaitan. Kaitan antara keempat aspek tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1. Keterkaitan RAN-PRB, RTRW, RAN-PI dan RAN-PK**

Instrumen Kebijakan	Tata Ruang/ RTRWN	Perubahan Iklim	PRB dan PB	Strategi Pengurangan Kemiskinan	Skema Integrasi
Peraturan/ Perencanaan / Institusi	RTRWN 2007; RTRW Pulau; RTRW Prov; RTRW Kawasan strategis; BKTRN; Dep PU	RAN PI tengah dalam proses, namun membutuhkan dukungan kerangka hukum; KLH, Kehutanan, DKP, Pertanian, Bappenas	Peraturan PB: PP 21, 22, 23 th 2008, RPB dan RAN-PRB BNPB/BPBD, Bappenas, BPPT, LIPI	PRSSP di bawah koordinasi Menko Kesra; PU, Koperasi, MPDT	RPJP dan RPJM; RKP/Program Tahunan; Bappenas dan BNPB akan menjadi leading dalam koordinasi dengan berbagai para pihak
Intervensi Langsung (program dan proyek)	Perhatian khusus pada daerah rentan; proteksi daerah	LULU fs; Proteksi Hutan/Konser vasi/Management Air	Pemetaan daerah yang rawan/DRR Assesment untuk daerah yang rawan bencana, Pembuatan Sistem peringatan dini di area yang rawan bencana	Sosial/Sistem Hutan Kerakyatan, PNPMP	Koordinasi diantara program/proyek, Integrasi perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana dalam PNPMP
Peningkatan Kapasitas dan Penguatan	Peningkatan peran masyarakat dalam R&D, tata ruang. Peningkatan peran kontrol masyarakat dalam R & D	R&D: peningkatan dalam pendidikan, kesadaran masyarakat dan partisipasi dalam Perubahan Iklim	R&D: peningkatan dalam pendidikan, kesadaran masyarakat dan partisipasi dalam sistem peringatan dini dan pengurangan risiko bencana	Penguatan kapasitas CBO's	Integrasi penguatan masyarakat bersama CBO's

### 1.4.2. Tingkat Daerah

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) merupakan turunan dari Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD). Kerangka waktu RPBD dan RAD-PRB sama dengan di tingkat nasional. Dalam Konteks ini proses

penyusunan RAD-PRB juga dilakukan setelah penyusunan RPBD. Dalam kaitannya dengan dokumen RPJPD dan RPJMD, kedudukan RPBD dan RAD-PRB adalah penjabaran dari dokumen perencanaan tersebut khususnya yang menyangkut penanggulangan risiko bencana.

Pada tingkat daerah dokumen yang dijadikan acuan adalah adanya RTRWP/K karena dokumen tersebut juga mengindikasikan kawasan-kawasan rawan bencana.

## **1.5. METODOLOGI PENYUSUNAN RAN-PRB**

Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) tahun 2010–2012 merupakan forum *multi-stakeholders* utama untuk membangun konsesus dalam proses penyusunan RAN-PRB. Mekanisme penyusunan RAN-PRB ini, dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut:

- (1). Pengumpulan Data (data sekunder dan data primer);
- (2). Diskusi/FGD Penyusunan Outline;
- (3). Penyusunan *Draft* RAN-PRB;
- (4). Konsultasi Publik (pemerintah/LPND dan masyarakat/swasta);
- (5). Penyusunan *Draft* Final RAN-PRB;
- (6). Legalitas RAN-PRB melalui Keputusan Kepala BNPB.

## **1.6. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan rencana aksi ini dibagi ke dalam sembilan bab. Pada bagian akhir dokumen ini dilampirkan matriks RAN-PRB yang dilaksanakan pemerintah, maupun nonpemerintah.

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab 1 menjelaskan perlunya penyusunan RAN-PRB 2010-2012, mengingat masa berlaku RAN-PRB 2006-2009 sudah berakhir. Selain itu memuat maksud dan tujuan penyusunan dokumen rencana aksi, lingkup kegiatan, serta hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya.

### **BAB 2 : KONDISI KEBENCANAAN DI INDONESIA**

Bab 2 menjelaskan lima jenis bencana yang paling sering terjadi di Indonesia. Ancaman kebencanaan, kerentanan, dan kapasitas penanganan bencana juga dielaborasi bab ini.

### **BAB 3 : LANDASAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

Bab 3 menjelaskan kebijakan kerangka regulasi, pedoman atau berbagai komitmen lainnya yang menjadi landasan, baik pada level internasional, regional maupun nasional.

### **BAB 4: PEMBELAJARAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

Bab 4 menyampaikan beberapa pembelajaran dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana di Indonesia. Pembelajaran yang dielaborasi yaitu terkait reformasi kerangka peraturan dan kebijakan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 beserta peraturan turunan lainnya, termasuk di dalamnya reformasi kelembagaan untuk penanganan pengurangan risiko bencana.

### **BAB 5 : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RAN-PRB TAHUN 2006 - 2009**

Bab 5 menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan RAN-PRB 2006-2009. Pada bagian ini dijelaskan latar belakang pelaksanaan evaluasi 2006-2009. Evaluasi yang telah dilakukan dianalisis dari aspek konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan. Selanjutnya dijelaskan berbagai keberhasilan dan kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan hingga pemberian rekomendasi dan upaya tindak lanjutnya.

### **BAB 6 : RENCANA AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA TAHUN 2010 - 2012**

Bab 6 menyajikan rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana untuk 2010-2012. Terdapat penjelasan prioritas penanganan pengurangan risiko bencana yang didasarkan kepada hasil analisis risiko bencana. Dasar penyusunan program dan kegiatan dalam rencana aksi didasarkan kepada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008. Gambaran matriks RAN-PRB secara lengkap dilampirkan. Terdapat dua jenis matriks yaitu matriks induk RAN-PRB dan matriks rinci RAN-PRB yang dikelompokkan berdasarkan ancaman bencana, aspek geografis (provinsi) dan pelaksana program/kegiatan dari Kementerian/Lembaga (K/L) dan nonKementerian/Lembaga (non KL).

### **BAB 7 : PELAKSANAAN**

Bab 7 diuraikan tentang pelaksanaan pengurangan risiko bencana yang diawali dengan gambaran mekanisme penyusunan RAN-PRB. Setelah itu diberikan informasi terkait kelembagaannya. Selanjutnya dijelaskan aspek partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengurangan risiko bencana, serta gambaran aspek pendanaannya.

## **BAB 8 : PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Bab 8 menjelaskan mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-PRB tahun 2010-2012. Bagian pertama menjelaskan tentang maksud dan tujuan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Berikutnya berisikan metodologi dan indikator yang diterapkan dalam pemantauan dan evaluasi.

## **BAB 9 : PENUTUP**

Pada bab 9 disampaikan kata penutup yang memberikan informasi umum mengenai proses penyusunan RAN-PRB, beserta langkah-langkah yang harus dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun para pihak lainnya.









2006年9月29日 星期五

2006年9月29日 星期五



# BAB 2 KONDISI KEBENCANAAN DI INDONESIA

## 2.1. JENIS BENCANA DI INDONESIA DAN PENGELOMPOKKANNYA

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB) dalam Bab I Pasal 1, mengelompokkan bencana ke dalam bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah bencana yang disebabkan peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang mengakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan manusia, yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas, dan teror.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 menegaskan, yang dimaksud dengan ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan bencana. BNPB sebagai badan yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana mengidentifikasi jenis ancaman bencana sebagai berikut: (1) gempa bumi; (2) tsunami; (3) letusan gunung api; (4) banjir; (5) tanah longsor/gerakan tanah; (6) kebakaran hutan dan lahan; (7) kekeringan; (8) gelombang ekstrem; (9) cuaca ekstrem (angin puting beliung, topan, dan badai tropis); (10) erosi; (11) abrasi; (12) epidemi dan wabah penyakit; (13) kebakaran hutan; (14) kegagalan teknologi; dan (15) konflik sosial.

Dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia dilanda berbagai bencana baik skala besar maupun skala kecil. BNPB mendokumentasikan berbagai jenis bencana yang melanda Indonesia, yaitu aksi teror/sabotase, angin topan, banjir, tanah longsor karena banjir, epidemik, gelombang pasang/abrasi, gempa bumi, hama tanaman, kebakaran hutan, kegagalan teknologi, kekeringan, konflik sosial, letusan gunung api, dan tanah longsor.

Sementara itu, jenis bencana skala besar yang terjadi dalam lima tahun terakhir di Indonesia adalah:

- (1). Gempa bumi dan tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara pada Desember 2004 yang menelan korban 165.708 jiwa dan kerugian harta benda Rp 4,45 triliun;
- (2). Gempa bumi yang menerjang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Mei 2006 yang menelan korban 5.667 jiwa dan rumah rusak 156.662 buah, dengan kerugian harta benda Rp 3,134 triliun;
- (3). Gempa dan tsunami di Pangandaran yang terjadi Juli 2006 menelan korban 658 jiwa dan kerugian harta benda Rp 137,8 miliar;
- (4). Bencana Banjir Jakarta pada Februari 2007 yang menggenangi 145.774 rumah dan mengakibatkan kerugian Rp 967 miliar.

Bencana alam dapat dibedakan antara bencana yang tidak dapat diprediksi, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi dan bencana yang dapat diprediksi, seperti longsor dan banjir. Sementara itu, bencana sosial biasanya terjadi karena perilaku dan pola hidup yang tidak terkontrol ketika aktivitas masyarakat berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Bencana sosial seringkali terkait adanya ancaman keamanan dan keterjaminan mata pencaharian maupun yang terkait aspek SARA. Bencana ini umumnya melanda masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan atau pada lingkungan yang memiliki tingkat strata sosial sangat rendah. Jenis bencana lainnya adalah bencana non-alam, contohnya adalah epidemi dan wabah penyakit seperti kejadian luar biasa demam berdarah *dengue*, flu burung, dan flu babi.

## **2.2. ANCAMAN BENCANA**

Data kejadian dan dampak bencana menunjukkan terdapat beberapa ancaman bencana yang dominan di Indonesia, yaitu (1) gempa bumi dan tsunami; (2) tanah longsor/gerakan tanah; (3) letusan gunung api; (4) banjir; dan (5) kekeringan.

### **2.2.1. Gempa bumi dan Tsunami**

Gempa bumi diakibatkan aktivitas zona penunjaman yang terdapat di laut dan sesar aktif yang terdapat di darat maupun di laut. Daerah rawan gempa bumi di Indonesia tersebar pada daerah yang terletak dekat zona penunjaman maupun sesar aktif. Daerah di Indonesia yang terletak dekat zona penunjaman adalah pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, pantai selatan Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, pantai utara

dan timur Sulawesi dan pantai utara Papua. Sedangkan daerah di Indonesia yang terletak dekat dengan zona sesar aktif adalah daerah sepanjang Bukit Barisan di Pulau Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua. Beberapa sesar aktif yang telah dikenal di Indonesia antara lain adalah Sesar Sumatera, Cimandiri, Lembang, Baribis, Opak, Busur Belakang Flores, Palu-Koro, Sorong, Ransiki, sesar aktif di daerah Banten, Bali, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan sistem sesar aktif lainnya yang masih belum terungkap.

Peristiwa gempa bumi yang terjadi di Indonesia tercatat di beberapa daerah. Seperti pada 1629 di Kepulauan Maluku (PVMBG, 2008), di Flores (1992 dan 1996), Kerinci (Pulau Sumatera, 1995), Banyuwangi (Pulau Jawa, 1994), Liwa (1994), Halmahera (1995), Biak dan Papua Jaya (1996), Bengkulu (2000). Semua gempa bumi tersebut menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Gempa bumi yang paling besar yang terjadi 4 tahun ini terjadi di Aceh (Desember 2004,  $M_w=9.3$ ); gempa bumi yang disertai tsunami di Nias (Maret 2005,  $M_w=8.7$ ); di Yogyakarta (Mei 2006,  $M_w=6.3$ ); di Pangandaran (Juli 2006,  $w=7.2$ ); gempa bumi disertai tsunami di Bengkulu (September 2007,  $M_w=8.4$ ), di Manokwari (Januari 2009,  $M_w=7.3-7.6$ ); dan terakhir gempa bumi di Jawa Barat ( $M_w=7,3$ ) dan di Sumatera Barat ( $M_w=7,3$ ) pada September 2009. Menurut Supartoyo, dkk (2009), bencana gempa bumi atau gempa bumi merusak (*destructive earthquake*) di Indonesia selama 2000 hingga 2008 setiap tahun berkisar antara 5 hingga 12 kejadian.

Tercatat beberapa peristiwa gempa bumi dengan magnitude di atas 8  $M_w$  di Indonesia (Tabel 2.1.), Sedangkan Tabel 2.2. menggambarkan jumlah korban jiwa yang signifikan dari beberapa kejadian bencana gempa bumi di Indonesia.

Tabel 2.1. Kejadian gempa bumi di Indonesia dengan *magnitude* di atas 8 (PVMBG, 2008)

No.	Tahun	Magnitude (Mw)	MMI	Daerah
1.	1833	8,8	IX	Bengkulu & Sumatera Barat
2.	1998	8,3	IX	Mangole & Taliabu,
3.	2004	9	VIII	Maluku
4.	2005	8,7	VIII	Aceh & Sumatera Utara
5.	2007	8,4	VIII	Pulau Nias Bengkulu

Tabel 2.2. Korban jiwa signifikan beberapa kejadian gempa bumi di Indonesia (PVMBG, 2008)

No.	Tahun	Magnitude (Mw)	MMI	Korban Jiwa (org)	Daerah
1.	1896	-	VIII	250	Pulau Timor
2.	1926	7,8	IX	354	Sumatera Barat
3.	1943	-	IX	213	Yogyakarta & Jawa Tengah
4.	1994	7	IX	1207	Liwa, Lampung
5.	2000	7,9	X	100	Bengkulu
6.	2005	8,7	VIII	lebih 1.000	Pulau Nias
7.	2006	6,2	VIII	lebih 5.700	Yogyakarta
8.	2009	7,9	X	lebih 1.000	Padang

Peta zonasi potensi bahaya (*hazard*) gempa bumi untuk Indonesia telah dikembangkan berdasarkan kompilasi pemetaan keberadaan lempeng tektonik serta patahan-patahan dangkal, sejarah kejadian gempa bumi, pencatatan instrumental Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), serta analisis bahaya gempa secara probabilistik. Peta zonasi gempa ini juga didasarkan pada Standar Nasional Indonesia (SNI-03-1726-2002) untuk bangunan gedung yang selanjutnya disempurnakan lebih jauh dengan hasil kajian terkini (2009) oleh Pusat Mitigasi Bencana-Institut Teknologi Bandung untuk Pulau Sumatera dan beberapa kawasan lainnya dengan acuan dasar 10% kemungkinan terjadi gempa bumi yang sama atau lebih besar dalam kurun waktu 50 tahun ke depan, atau

setara dengan periode ulang gempa 500 tahun. Peta zonasi gempa ini ditunjukkan pada Gambar 2.1. dengan distribusi intensitas besarnya percepatan (getaran) gempa di permukaan tanah dalam rasio terhadap percepatan gravitasi bumi ( $g$ ), yang selanjutnya dinyatakan dalam tiga klasifikasi intensitas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Peta zonasi gempa ini telah dicoba disederhanakan untuk diklasifikasikan berdasarkan kabupaten dan kota.



Gambar 2.1. Peta zonasi bahaya gempa Indonesia

Dari peta zonasi bahaya gempa bumi Indonesia, terlihat bahwa hampir seluruh kawasan di Indonesia berpotensi mengalami gempa bumi di masa mendatang dengan intensitas gempa yang bervariasi dari rendah sampai tinggi. Gempa berintensitas tinggi berpotensi terjadi di kawasan sepanjang daratan pantai barat Sumatera dan kawasan selatan Jawa, seluruh Nusa Tenggara, sebagian Pulau Papua bagian tengah sampai utara, kepulauan Maluku, serta Sulawesi bagian tengah sampai utara. Sedangkan potensi gempa dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di kawasan Pulau Sumatera sepanjang bagian tengah ke arah timur, Pulau Jawa bagian tengah ke arah utara, Papua bagian tengah ke arah Selatan, dan Sulawesi Tengah ke arah selatan. Potensi gempa dengan intensitas rendah diperkirakan hanya di Provinsi Riau, Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian utara, Papua bagian

selatan, dan kawasan Pulau Kalimantan. Peta zonasi gempa Indonesia ini dapat digunakan sebagai acuan umum untuk masukan potensi bahaya gempa dalam suatu kajian risiko bencana gempa di kabupaten-kabupaten dan kota-kota di Indonesia.

Gempa dangkal dan besar yang terjadi di bawah laut dapat membangkitkan tsunami. Tsunami adalah gelombang panjang yang timbul karena perubahan dasar laut atau perubahan badan air yang terjadi secara tiba-tiba dan impulsif, akibat gempa bumi, erupsi gunung api bawah laut, longsoran bawah laut, atau runtuhnya gunung es bahkan akibat terjangan benda-benda angkasa ke permukaan laut.

Selain dapat dibangkitkan oleh gempa, tsunami disebabkan oleh fenomena geofisi seperti gempa bumi, gunung api, longsor di bawah laut dan dampak meteor. Berdasarkan *database* tsunami yang terintegrasi, paling sedikit 1963 kejadian tsunami dari tahun 1628 hingga 2005 (ITDB/WRL, 2005). Dari 110 bencana tsunami terjadi di Indonesia, 100 kejadian di antaranya disebabkan oleh gempa bumi, 9 kejadian disebabkan letusan gunung berapi dan 1 kejadian disebabkan tanah longsor. Data historis tsunami di Indonesia pada periode 1960 sampai dengan 1998 telah dikompilasi oleh Latief, dkk (2000) sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3.

Kejadian tsunami yang menyebabkan besarnya korban jiwa di antaranya tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara pada 26 Desember 2004 yang menyebabkan korban meninggal lebih dari 250.000 jiwa dan tsunami Selat Sunda (Krakatau) terjadi pada tahun 1883 akibat meletusnya Gunung Krakatau yang mengakibatkan terjadinya gelombang tsunami setinggi 36 meter di kawasan Selat Sunda dan menewaskan kurang lebih 36.000 jiwa.

Peta zonasi potensi bahaya (*hazard*) tsunami untuk Indonesia telah dikembangkan berdasarkan kompilasi sejarah tsunami kemudian diasimilasikan dengan data hasil simulasi sehingga didapatkan potensi bahaya tsunami disepanjang pantai (Gambar 2.2). Beberapa wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan pertemuan lempeng, antara lain barat Sumatera, selatan Jawa, Nusa Tenggara, utara Papua, Sulawesi dan Maluku, serta timur Kalimantan merupakan wilayah yang rawan terhadap tsunami.

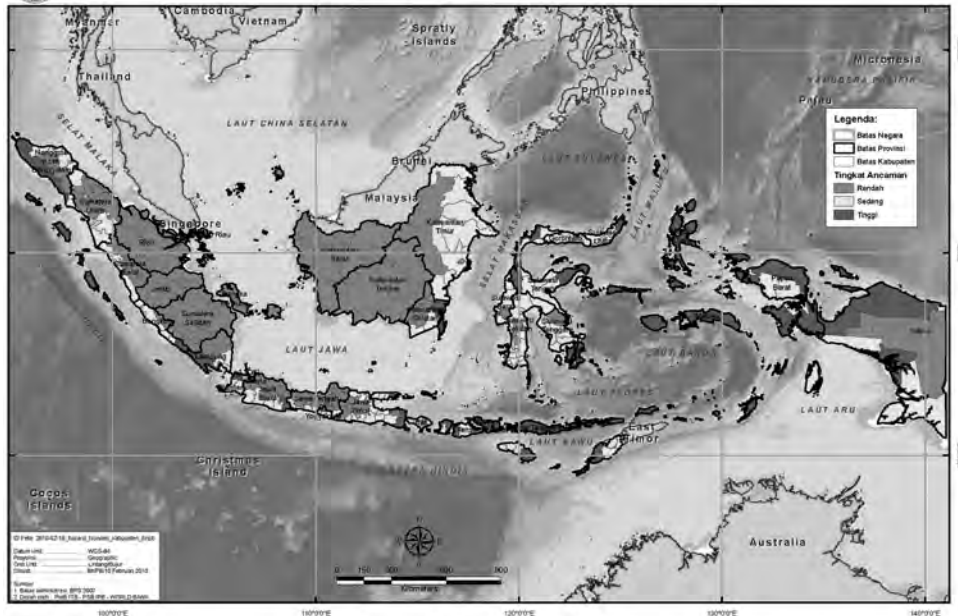


Tabel 2.3. Daftar tsunami di Indonesia, periode tahun 1980- 2002  
(dimodifikasi dari Latief, 2000)

Tanggal/Jam	M/Dp	Waktu (menit)	Tinggi (m)	Korban	Lokasi
1961-03-16/13:45	6.3	no		2/6	NTT: Midle Flores
1964-04-02/01:11U	7.0			110/479	Sumatra:
1965-01-24/ 00:11U	7.5/33	2?		71	Maluku: Seram Sea, Sanana
1967-04-11/05:09	4.9/51			58/100	S. Sulawesi; Tinambung
1967-04-12/-	6.5		Big		N Sumatera: Sigli
1968-08-14/22:14U	7.3/23		8-10	392	C Sulawesi; Tambu
1969-02-23/00:36U	6.1/13		10	64/97	S. Sulawessi: Majene
1975-01-15/09:42	5.9		-	0	Maluku: Banda Naera
1975-03-05/-	6.5	1	1.2	0	Maluku: Sula Island, Sanana
1975-07-30/09:17	6.1	no			NTT: Timor: Kupang
1977-08-19/06:08U	7.0/33	3		316	NTB; Sumbawa Is.
1977-08-27/07:12	6.8	no		2/25	NTT; Flores: Atauro Is
1979-07-18/night	LS	1.5		620	NTT: Flores: Lomblen,
1979-12-17/19:58U	6.6			27/200	NTB: Sumbawa, Bali, Lombok
1982/03/12/-	5.8				Maluku: Ambon
1982-08-19/-	5.2				N. Sulawesi; Tomini Bay
1982-12-25/-	5.6	1?		13/400	NTT; Larantuka, (Landslide)
1983-03-12/00:54	5.8/33			0	Maluku; Ambon
1984-01-08/-	5.9				S. Sulawesi: Mamuju
1987-11-26/01:43U	5.8/28	1		83/108	NTT; East Flores Pantar Is.
1989-07-14/20:42	6.2	0		7	NTT; Alor Is
1989-07-31/17:07	6.3	0?		2-3	NTT; Flores: Maumere
1992-06-20/-	6.2	0			N Sulawesi: Kwandang
1991-07-04/11:43	6.2	?		23/181	NTT; Alor Is: , Kalabahi
1992-12-12/05:29U	7.5	3	11.2-26.2	1952/2126	NTT: Flores, Babi Is.
1994-01-21/02:24U	7.2			7	Maluku: Halmahera
1994-06-02/18:17U	7.2		19.1	238/400	E. Jawa: Banyuwangi
1995-05-14/-			4	8	Timor: Eastern part
1996-01-01/16:05L	7.8		3/63	9	C. Sulawesi:, Palu
1996-02-17/05:59U	8.0		13.7	107	Papua Jaya: Biak Is.
1998-11-28/23:11L	7.7		2.75	34	Maluku: Tabona, Taliabu



## PETA INDEKS ANCAMAN BENCANA TSUNAMI DI INDONESIA



Gambar 2.2. Peta bahaya tsunami di kabupaten/kota pesisir

### 2.2.2. Tanah Longsor/ Gerakan Tanah

Istilah tanah longsor (*landslide*) antara lain didefinisikan sebagai pergerakan suatu massa batuan, tanah atau bahan rombakan material penyusun lereng bergerak ke bawah atau keluar lereng di bawah pengaruh gravitasi. Tanah longsor atau longsoran sering disamakan dengan gerakan tanah oleh masyarakat awam karena merupakan salah satu jenis gerakan tanah akibat terganggunya kestabilan tanah dari penyusun lereng. Istilah gerakan tanah akan digunakan dalam pembahasan paragraf-paragraf selanjutnya.

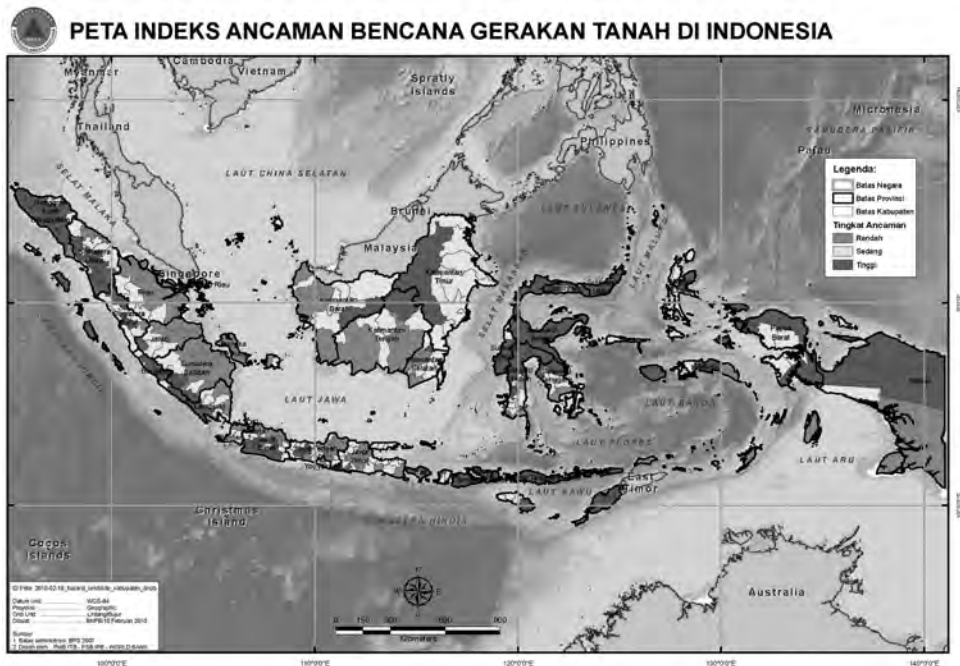
Gerakan tanah dapat terjadi akibat adanya gangguan kestabilan pada lereng. Lereng bersifat stabil apabila gaya yang bekerja untuk mempertahankan kestabilan pada lereng (yaitu gaya penahan gerakan massa tanah/ batuan) lebih dominan daripada gaya - gaya penggerak massa tanah/ batuan pada lereng. Gaya penahan gerakan terutama didukung oleh kekuatan batuan, sedangkan gaya penggerak massa tanah/batuan dapat berupa pengaruh gravitasi, kenaikan tekanan air pori dalam tanah ataupun getaran. Di samping dipicu curah hujan, kejadian gerakan tanah dapat juga dipicu getaran gempa bumi. Beberapa kejadian gempa bumi di Indonesia yang memicu terjadinya gerakan tanah, antara lain gempa bumi Palolo (2005), gempa bumi Bantul (2006), gempa bumi

Solok (2007), gempa bumi Muko-Muko (2007), gempa bumi Painan (2007), dan lain-lain.

Jenis gerakan tanah menurut Varnes (1978) dibagi menjadi lima, yaitu, runtuhan, robohan, longsoran, pancaran lateral, dan aliran. Sedangkan berdasarkan kecepatannya, gerakan tanah dapat dibagi menjadi enam, yaitu, amat sangat cepat, sangat cepat, cepat, menengah, lambat, dan sangat lambat. Sedangkan PVMBG (2007) mengklasifikasikan gerakan tanah menjadi enam, yaitu, longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, runtuh batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis longsoran translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Sedangkan longsoran yang paling banyak memakan korban jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan.

Kejadian gerakan tanah di Indonesia dapat dikatakan setiap tahun pasti terjadi dan beberapa di antaranya mengakibatkan bencana. Kejadian gerakan tanah di Bohorok Sumatera Utara (2005), Banjarnegara (2006) dan Karanganyar (2007) telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang signifikan. Beberapa contoh kejadian gerakan tanah dalam dekade terakhir ini adalah kejadian gerakan tanah berjenis utama aliran bahan rombakan di Desa Walahir, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada 21 April 2004, yang mengakibatkan 15 korban jiwa, 21 rumah roboh dan 22 lainnya rusak berat, lebih dari 60 Ha sawah dan 85 Ha perkebunan rusak. Kejadian lain yaitu longsohnya timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Leuwigajah, Kabupaten Cimahi, Jawa Barat pada 21 Februari 2005 pukul 2 pagi saat kebanyakan penduduk tidur. Tidak kurang dari 70 rumah diterjang oleh longsoran ini yang menewaskan 123 penduduk di dalamnya. Gerakan tanah di Bukit Pawinihan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, pada 4 Januari 2006 telah mengakibatkan lebih dari 58 korban jiwa. Pada tahun yang sama, gerakan tanah di desa Kemiri, Suci, dan Panti, Kabupaten Jember, Jawa Timur telah menelan 98 korban jiwa dan menerjang lebih dari 140 rumah. Kejadian gerakan tanah pada bulan Februari 2009 yang memutuskan jalur kereta api selatan Jawa di Kabupaten Garut, Jawa Barat telah memberikan kerugian secara tidak langsung terhadap faktor sosial dan ekonomi di wilayah ini. Dari kejadian ini semua, potensi kejadian bencana longsoran di wilayah Tanah Air sangat perlu mendapatkan perhatian.

Penilaian bahaya gerakan tanah pada tingkat nasional dilakukan dengan melakukan penilaian bahaya gerakan tanah secara relatif untuk setiap kabupaten/kota, yaitu dengan melakukan penilaian kembali luas setiap zona kerentanan terhadap luas yang terdapat di wilayah kabupaten/kota secara proporsional (Gambar 2.3).



Gambar 2.3. Peta Bahaya Gerakan Tanah di Indonesia

### 2.2.3. Letusan Gunung api

Gunung api adalah tempat keluarnya magma, gas atau material cairan lainnya dari dalam bumi ke permukaan bumi. Material yang keluar ke permukaan bumi membentuk kerucut raksasa seperti terpancung yang terlihat sebagai sebuah gunung api. Pada umumnya di bagian puncak berbentuk kubah atau bukit atau lubang besar yang disebut kawah dan kadang-kadang terisi air dan membentuk sebuah danau.

Indonesia memiliki 129 gunung api aktif yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara dan Kepulauan Maluku, atau sekitar 13% dari sebaran gunung api aktif dunia. Berdasarkan sejarah aktivitas gunung api pada masa lampau, gunung api di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

- (1). Gunung api aktif tipe A, yaitu gunung api yang pernah meletus minimal sekali setelah tahun 1600, sebanyak 80 gunung api;
- (2). Gunung api tipe B, yaitu gunung api aktif yang catatan sejarah letusan tidak ditemukan setelah tahun 1600 tetapi masih memperlihatkan aktivitasnya seperti *sofatara* (hembusan belerang) dan *fumarola* (hembusan air panas), sebanyak 28 gunung api;
- (3). Gunung api aktif tipe C, yaitu gunung api yang tidak pernah tercatat aktivitasnya, baik letusan maupun *sofatara* dan *fumarola* (hembusan air panas). Gunung api tipe ini di beberapa gunung api aktif tipe C tersebut masih memperlihatkan kegiatan masa lampau berupa lapangan *sofatara/fumarola* pada tingkat lemah, sebanyak 21 gunung api.

Berdasarkan kejadian letusan gunung api di masa lampau, Indonesia memiliki sejarah beberapa letusan yang berdampak signifikan, yaitu:

- (1). Pada 1815 Gunung Tambora yang terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, meletus dan mengeluarkan sekitar  $1,4 \times 10^{11}$  ton abu dan material vulkanik. Sebagian material vulkanik tersebut membentuk lapisan di atmosfer yang memantulkan sinar matahari dan menimbulkan gelombang hawa dingin. Gelombang hawa dingin tersebut membuat 1816 menjadi "tahun tanpa musim panas" dan menyebabkan gagal panen hampir di seluruh dunia serta kelaparan yang meluas;
- (2). Pada 1883 Gunung Krakatau yang terletak di Selat Sunda meletus dan letusannya diperkirakan setara dengan 200 megaton TNT, kira-kira 13.000 kali kekuatan ledakan bom atom yang menghancurkan Hiroshima dalam Perang Dunia II. Letusan Gunung Krakatau ini mengakibatkan runtuhnya sebagian tubuh gunung tersebut dan memicu terjadinya tsunami di wilayah Selat Sunda dan sekitarnya hingga mencapai Jakarta. Kejadian tsunami tersebut mengakibatkan 36.000 korban jiwa.

Berdasarkan data dari PVMBG (2006) tercatat beberapa kejadian letusan gunung api lainnya yang mengakibatkan korban jiwa besar, antara lain, adalah :

- (1). Letusan Gunung Kie Besi di Kabupaten Maluku Utara pada 22 September 1760 mengakibatkan 2.000 korban jiwa;

- (2). Letusan Gunung Galunggung di Jawa Barat pada 1822 mengakibatkan 4.011 korban jiwa dan letusan Gunung Papandayan pada 1772 mengakibatkan 2.951 korban jiwa;
- (3). Letusan Gunung Kelud di Jawa Timur pada 1919 mengakibatkan 5.190 korban jiwa dan letusan pada 1966 mengakibatkan 210 korban jiwa;
- (4). Letusan Gunung Colo di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah pada 23 Juli 1983 yang mengakibatkan hancurnya sumbat lava serta membumihanguskan sekitar 2/3 wilayah Pulau Una-Una tempat lokasi Gunung Colo;
- (5). Letusan Gunung Merapi 928 di Yogyakarta, mengakibatkan Kerajaan Mataram hancur, letusan 1930 mengakibatkan 1.369 jiwa meninggal dunia dan letusan pada 1972 lebih dari 3.000 jiwa meninggal dunia.

Penilaian bahaya gunung api pada tingkat nasional dilakukan dengan penilaian bahaya gunung api secara relatif untuk setiap kabupaten/kota di sekitarnya, terutama didasarkan pada distribusi KRB dan lingkaran bahaya abu vulkanik (Gambar 2.4).



Gambar 2.4. Peta sebaran Gunung api di Indonesia

Potensi aktivitas gunung api pada masa datang yang perlu mendapat perhatian adalah Gunung Merapi, Semeru, Soputan, Karangetang, Ibu, Talang, Batur, dan Lokon. Gunung Merapi di Yogyakarta mempunyai perulangan letusan cukup pendek

berdasarkan sejarah letusannya yaitu pada 1994, 1997, 1998, 2001 dan 2006. Letusan tersebut memiliki pola yang sama yaitu pertumbuhan kubah lava, kubah lava runtuh dan menghasilkan awan panas yang melanda daerah sekitarnya pada jarak tertentu.

Kawah gunung api yang berpotensi mengakibatkan bencana yang perlu mendapat perhatian pada masa akan datang adalah kawah Gunung Ijen di Kabupaten Situbondo dan Gunung Dempo. Gunung Ijen terletak di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Gunung Ijen merupakan gunung api aktif yang mempunyai keunikan danau kawahnya karena airnya paling asam di dunia. Letusan terbesar Gunung Ijen terjadi pada tahun 1817 mengakibatkan danau kawahnya menghasilkan aliran lumpur yang mengarah ke utara (Kecamatan Asembagus), ke timur (Desa Wongsorejo) dan ke selatan (Desa Genteng) dan merusakkan 3 desa dan 90 rumah. Tidak ada korban jiwa pada letusan tersebut. Sedangkan kawah Gunung Dempo berpotensi untuk mematikan ikan di sungai yang berhulu di G. Dempo.

#### **2.2.4. Banjir**

Banjir merupakan bahaya alam yang setidaknya dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu curah hujan dan kondisi topografi. Curah hujan yang tinggi tidak akan menyebabkan banjir apabila terjadi pada wilayah yang cukup tinggi dan mampu menyalurkan atau mendistribusikan air di wilayah itu.

Banjir sering terjadi di Indonesia yang beriklim tropis, terutama pada wilayah dengan kemiringan lereng landai atau dataran. Masalah ini mulai muncul sejak manusia bermukim dan melakukan berbagai kegiatan di kawasan yang berupa dataran banjir (*flood-plain*). Kondisi lahan di kawasan ini pada umumnya subur serta menyimpan berbagai potensi dan kemudahan sehingga mempunyai daya tarik yang tinggi untuk dibudidayakan. Oleh karena itu, di kota-kota besar serta pusat-pusat perdagangan dan kegiatan-kegiatan penting lainnya seperti kawasan industri, pariwisata, prasarana perhubungan dan sebagainya sebagian besar tumbuh dan berkembang di kawasan ini.

Pada prinsipnya masalah bencana banjir disebabkan dua hal, yaitu:

- (1). Peristiwa alam atau kondisi alam yang tidak dapat dikendalikan atau dihindari manusia sehingga bersifat probabilistik; dan

- (2). Kegiatan/aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi dan memperbesar intensitas atau tingkat keparahan bencana sehingga bersifat deterministik karena dapat dikendalikan/dikontrol. Banjir yang terjadi di Indonesia pada umumnya disebabkan gabungan antara buruknya kondisi jaringan drainase mikro dan makro karena berbagai sebab (kurang memadainya dimensi dan kemiringan saluran drainase karena sampah dan sedimentasi, dan sebagainya) dengan meluapnya aliran sungai melebihi palung sungai karena tingginya intensitas hujan dan pendangkalan sungai karena sedimentasi dan sumbatan sampah atau sebab lainnya (air pasang).

Di seluruh Indonesia, terdapat 5.590 sungai induk, dan 600 di antaranya berpotensi menimbulkan banjir. Daerah rawan banjir yang dicakup sungai-sungai induk ini mencapai 1,4 juta ha. Banjir pada dasarnya disebabkan tiga hal. *Pertama*, kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam. *Kedua*, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, badai, dan sebagainya. *Ketiga*, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah pada *catchment area*, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penyempitan alur sungai dan sebagainya.

Masalah banjir cenderung meningkat dari tahun ke tahun terutama disebabkan oleh adanya perubahan watak banjir serta pesatnya pembangunan berbagai kegiatan manusia di dataran banjir. Luas dataran banjir pada Pelita I baru meliputi 250.000 ha, namun pada Pelita V telah berkembang menjadi 750.000 ha. Perkembangan tersebut sejalan dengan penambahan jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan di daerah dataran banjir.

Di Indonesia, kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Medan, Padang, Palembang, Pekanbaru, Jambi, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Ujungpandang, Ambon, masing-masing terletak di dataran banjir satu atau beberapa sungai. Demikian pula daerah pertanian/irigasi yang luas dan subur sebagian terletak pada dataran banjir, contohnya di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Bencana Banjir Bengawan Solo/Brantas akibat meluapnya Bengawan Solo/Brantas hampir terjadi setiap musim hujan. Kerugian yang ditimbulkan sangat besar dan melanda 14 kabupaten yang dilewatinya. Demikian





### 2.2.5. Kekeringan

Negara kepulauan Indonesia yang terletak di khatulistiwa dan di antara dua benua dan dua samudra memiliki iklim yang unik serta rentan terhadap perubahan iklim regional dan global. Kejadian *el niño* dahsyat pada 1997 serta beberapa kejadian setelahnya, membawa peningkatan risiko kekeringan iklim yang berdampak pada pertanian, kehutanan, perikanan dan sektor kehidupan lainnya. Untuk menyamakan persepsi di pusat dan daerah akan sebuah pendekatan analisis terhadap risiko bencana iklim kekeringan maka perlu diadakan sebuah kajian analisa risiko bencana kekeringan.

Kekeringan diartikan sebagai berkurangnya persediaan air di bawah normal bersifat sementara baik di atmosfer dan di permukaan. Penyebab terjadinya kekeringan adalah menurunnya curah hujan pada periode yang lama (beberapa dasarian) disebabkan oleh interaksi atmosfer dan laut serta akibat ketidakteraturan suhu permukaan laut seperti akibat yang ditimbulkan oleh fenomena *el niño*. Kekeringan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat alamiah di mana intervensi manusia atas penyebab bencana kekeringan sangat minimal. Dalam hal ini manusia dan aktivitasnya menerima dampak dari kekeringan tersebut. Kekeringan membawa akibat serius pada pola tanam, pola pengairan, pola pengoperasian irigasi serta pengelolaan sumber daya air di permukaan lainnya. Diperlukan sebuah penanganan strategis seperti manajemen kekeringan (pengelolaan kekeringan) untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan.

Kekeringan merupakan kejadian biasa dan menggambarkan iklim yang senantiasa berulang, meskipun sering disalahartikan sebagai kejadian acak dan sangat jarang. Dalam kenyataannya terjadi pada semua jenis iklim meskipun karakteristiknya sangat berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain. Kekeringan merupakan penyimpangan temporer dan sangat berbeda dengan kegersangan (*aridity*) yang lebih bersifat permanen di mana curah hujan yang turun senantiasa kecil seperti contohnya di NTT. Kekeringan harus selalu diperhitungkan secara relatif terhadap kondisi rata-rata jangka panjang dari neraca antara curah hujan dan evapotranspirasi di suatu wilayah, di mana kondisi seperti ini disebut normal.

*El niño* merupakan fenomena alam global yang ditandai dengan memanasnya suhu permukaan laut (*Sea Surface Temperature/SST*) di perairan wilayah *Equatorial Pasific* atau anomali suhu permukaan laut di wilayah tersebut bernilai positif. Fenomena *el niño* dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan tinggi rendahnya nilai anomali positif suhu permukaan laut (*SSTA*), yaitu:

- (1). *El niño* Lemah (*Weak el niño*);
- (2). *El niño* Sedang (*Moderate el niño*);
- (3). *El niño* Kuat (*Strong el niño*).

Dalam 15 tahun terakhir, *el niño* kuat (*Strong el niño*) terjadi pada tahun 1997 yang berdampak hampir di seluruh wilayah Indonesia mengalami curah hujan yang sangat kurang (Bawah Normal), sedangkan fenomena alam *el niño* yang terakhir terjadi pada 2002 adalah *el niño* lemah (*Weak el niño*). Kejadian *el niño* akan berdampak kuat terhadap wilayah Indonesia apabila fenomena tersebut bersamaan dengan Dipole Mode Positif.

Dari 43 kejadian kekeringan di Indonesia, hanya enam kejadian yang tidak berkaitan dengan kejadian *el niño*. Namun, dampak kejadian *el niño* terhadap keragaman hujan di Indonesia beragam menurut lokasi. Pengaruh *el niño* kuat pada wilayah yang dipengaruhi sistem *monsoon* kuat, pengaruh *el niño* lemah pada wilayah yang dipengaruhi sistem equatorial lemah, dan tidak jelas pada wilayah yang pengaruh lokal yang kuat.

Peta ancaman bencana kekeringan di Indonesia (Gambar 2.6) berdasarkan perhitungan indeks kekeringan yang paling sederhana yaitu menggunakan SPI (*Standardized Precipitation Index*) yang dihitung dari data pengamatan curah hujan global yang dikeluarkan GPCP (*Global Precipitation Climatology Centre*) dengan rentang waktu dari 1951-2007. SPI adalah indeks yang menunjukkan besarnya penyimpangan curah hujan dari nilai normalnya yang dapat dibagi menjadi tujuh kelas kategori seperti terlihat dalam Tabel 2.4. SPI dapat dihitung untuk skala waktu 3 bulanan, 6 bulanan, 12 bulanan, dst. yang berkaitan dengan fenomena dan dampak kekeringan tertentu.



Gambar 2.6. Peta indeks Ancaman Bencana Kekeringan di Indonesia

Peta ancaman kekeringan dibuat berdasarkan frekuensi kejadian SPI dengan kategori Sangat Kering dan Ekstrem Kering. Untuk mengakomodasi fenomena kekeringan jangka maupun jangka menengah (seperti yang disebabkan oleh *el niño*), maka indeks ancaman bencana kekeringan dihitung berdasarkan kombinasi SPI 3 bulan dan 6 bulan.

Tabel 2.4. Kategori Kering-Basah Berdasarkan Nilai SPI

Nilai SPI	Kategori
2.0+	Ekstrem Basah
1.5 to 1.99	Sangat Basah
1.0 to 1.49	Agak Basah
-.99 to .99	Mendekati Normal
-1.0 to -1.49	Agak Kering
-1.5 to -1.99	Sangat Kering
-2 and less	Ekstrem Kering

Peta indeks ancaman bencana kekeringan menunjukkan bahwa ancaman bencana kekeringan terdapat di hampir seluruh daerah di Indonesia. Tingkat ancaman bencana kekeringan yang tinggi secara cukup dominan terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan

Jawa. Di wilayah lain lebih banyak daerah dengan tingkat ancaman sedang. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa kekeringan (*drought*) berbeda dengan kondisi iklim kering (*aridity*). Ancaman bencana kekeringan pada umumnya akan lebih tinggi pada daerah-daerah dengan variasi curah hujan yang besar, tetapi bukan daerah beriklim kering. Sebaliknya, untuk daerah-daerah dengan iklim yang setengah kering (*semi-arid*) seperti beberapa daerah di Nusa Tenggara, tingkat ancaman bencana kekeringan relatif rendah karena penyimpangan dari kondisi kering yang biasa dialami mungkin tidak terlalu besar.

### 2.3. KERENTANAN

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 tidak ditemukan istilah kerentanan. Dalam ilmu sosial, kerentanan (*vulnerability*) merupakan kebalikan dari ketangguhan (*resilience*), kedua konsep tersebut laksana dua sisi mata uang. Konsep ketangguhan merupakan konsep yang luas, termasuk kapasitas dan kemampuan merespons dalam situasi krisis/konflik/darurat (*emergency response*). Kerentanan, ketangguhan, kapasitas, dan kemampuan merespons dalam situasi darurat, bisa diimplementasikan baik pada tingkat individu, keluarga, masyarakat, dan institusi (pemerintah maupun LSM).

Kerentanan wilayah dan penduduk terhadap ancaman meliputi kerentanan fisik, kerentanan sosial, dan kerentanan ekonomi. Kerentanan sosial ekonomi dapat bersifat generik berlaku untuk semua jenis ancaman. Sementara itu kerentanan fisik bersifat spesifik sesuai dengan jenis ancaman.

Kerentanan yang bersifat generik dapat digunakan untuk semua ancaman, terkait dengan aspek sosial ekonomi wilayah dan penduduk di suatu wilayah. Indikator kerentanan sosial ekonomi terkait dengan tingkat kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, densitas dan penyebaran penduduk, lama pendidikan formal, tingkat pengangguran, beban tanggungan, dan indikator sosial ekonomi lainnya.

Data menunjukkan masih tingginya tingkat kemiskinan (data BPS tahun 2008 sebesar 37.168.300 penduduk miskin), tidak meratanya penyebaran penduduk (58,3% di Pulau Jawa dan Madura pada tahun 2008), rendahnya lama pendidikan formal (rata-rata 7,47 tahun). Data lainnya adalah usia harapan hidup orang Indonesia baru mencapai 68,7 tahun, angka kematian bayi pada 2005 adalah 32 kematian per 1000 kelahiran.

Kerentanan sosial dan ekonomi yang digunakan dalam penghitungan indeks kerentanan pada setiap jenis *hazard* relatif sama dengan indikator utama di antaranya, pendapatan asli daerah, laju pertumbuhan ekonomi, dan densitas populasi. Peta kerentanan sosial ekonomi yang bersifat generik untuk semua jenis bencana di seluruh wilayah Indonesia disajikan pada Gambar 2.7.



Gambar 2.7. Peta Kerentanan Sosial Ekonomi Wilayah di Indonesia

Kerentanan sosial ekonomi penduduk terhadap bencana meliputi aspek ekonomi (laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, PDRB), dan aspek sosial (kependudukan seperti densitas dan jumlah penduduk, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, tenaga kerja). Peta kerentanan sosial ekonomi wilayah Indonesia menunjukkan bahwa komponen densitas penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penentu kerentanan wilayah.

Kerentanan fisik bersifat spesifik tergantung jenis bencana. Indikator kerentanan fisik untuk masing-masing jenis *hazard* menggunakan indikator yang spesifik. Sebagai contoh adalah penggunaan indikator *tsunami code* untuk tsunami, indikator *building code* untuk gempa bumi, indikator penduduk yang tinggal di area yang tidak aman untuk ancaman letusan gunung api. Secara umum wilayah Indonesia memiliki kerentanan fisik yang tinggi karena pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana yang ada belum memenuhi prasyarat yang dibutuhkan wilayah yang memiliki potensi ancaman yang tinggi seperti Indonesia. Indikator kerentanan fisik terkait dengan jenis ancaman

Fakta tersebut menunjukkan bahwa Indonesia baik dari segi fisik maupun sosial ekonomi memiliki kerentanan yang relatif tinggi dalam menghadapi ancaman bencana. Hal tersebut menunjukkan masih lemahnya upaya pengurangan risiko bencana baik melalui peningkatan ketanggungan masyarakat terhadap ancaman bahaya atau pengurangan kerentanan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat.

#### **2.4. KEMAMPUAN MENANGANI BENCANA/KAPASITAS**

Salah satu komponen analisis risiko bencana adalah kemampuan kelembagaan, baik pemerintah maupun non pemerintah, pusat, dan daerah dalam menangani bencana. Dengan demikian komponen analisis risiko bencana ini menilai kapasitas seluruh lembaga penanggulangan bencana seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam PB, Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Saat ini telah terbentuk sejumlah BPBD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yakni di Jawa Tengah, Lampung, Bengkulu, Sumatra Barat, NTT dan Maluku. Sementara di tingkat kabupaten/kota telah terbentuk di Cilacap, Alor, Sikka, Kota Kupang dan Kota Palu, Kabupaten Muko-Muko dan Bengkulu Utara.

Saat ini sejumlah Perguruan Tinggi telah memiliki Pusat Studi Bencana (PSB) dan sejenisnya antara lain di Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Universitas Pembangunan Nasional (UPN), Universitas Andalas (Unand), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Syiahkuala (Unsyiah). Sementara di tingkat masyarakat terdapat sejumlah Masyarakat Madani/LSM yang memiliki fokus kegiatan dalam hal kebencanaan di antaranya Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Perkumpulan Masyarakat Peduli Bencana (PMPB) di NTT, Komunitas Siaga Tsunami (Kogami) di Sumatra Barat, dan sejumlah LSM yang memiliki kegiatan terkait dengan bencana. Di tingkat nasional telah diprakarsai pembentukan *Platform Nasional (PLANAS)* yang dideklarasikan pada 20 November 2008, Konsorsium Pendidikan

Kebencanaan, dan Simposium yang mengarah kepada forum tentang Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK).

Terdapat beberapa isu pokok yang perlu segera ditangani terkait dengan kapasitas pemangku kepentingan penanggulangan bencana di antaranya:

- (1). Belum tersosialisasinya Peraturan Perundangan terkait PB;
- (2). Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) terkait penanganan kebencanaan;
- (3). Masih minimnya daerah yang memiliki Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan RAD-PRB;
- (4). Masih terbatasnya upaya pengarusutamaan PRB dalam perencanaan pembangunan seperti RTRW dan pengarusutamaan dalam pembangunan sektoral; dan
- (5). Belum terintegrasinya PRB dalam pendidikan dan pelatihan kepegawaian/aparat.

## **2.5. ANALISIS RISIKO BENCANA**

Penilaian atau analisis risiko bencana bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah berdasarkan tingkat risikonya terhadap bencana. Hasil analisis menjadi acuan dalam perumusan tindakan prioritas pengurangan risiko bencana.

### **2.5.1. Peta Risiko Gempa bumi dan Tsunami**

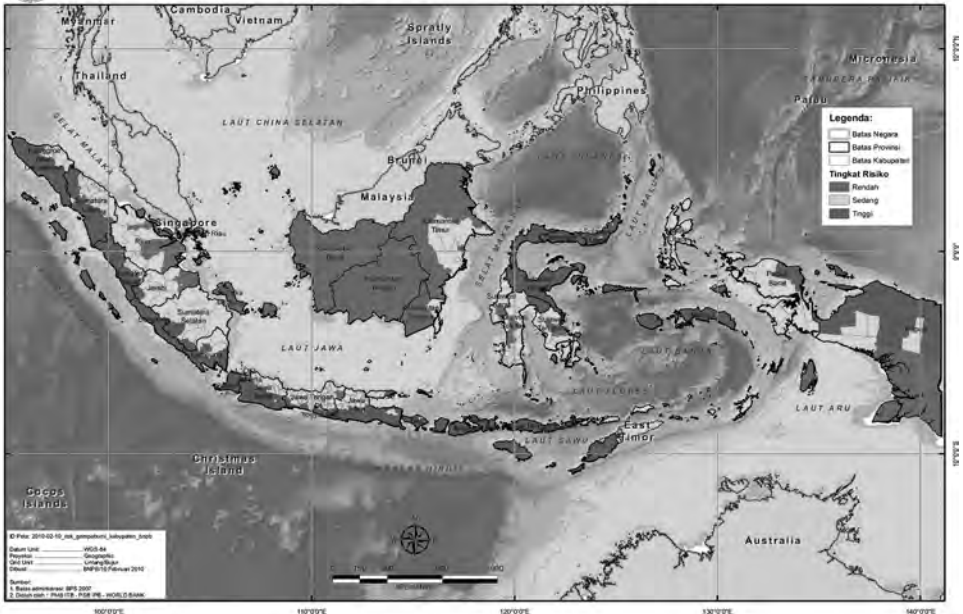
Peta risiko gempa bumi untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia disajikan pada Gambar 2.8. Peta tersebut menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap gempa bumi berada di wilayah barat Pulau Sumatera, wilayah selatan Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, dan Sulawesi bagian tengah dan utara, serta sebagian wilayah Papua.

Peta risiko wilayah Indonesia terhadap tsunami disajikan pada Gambar 2.9. Peta tersebut menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap tsunami adalah kota dan kabupaten bagian barat Provinsi Sumatera Barat, sebagian wilayah selatan Pulau Jawa, Aceh bagian utara, dan Lampung.





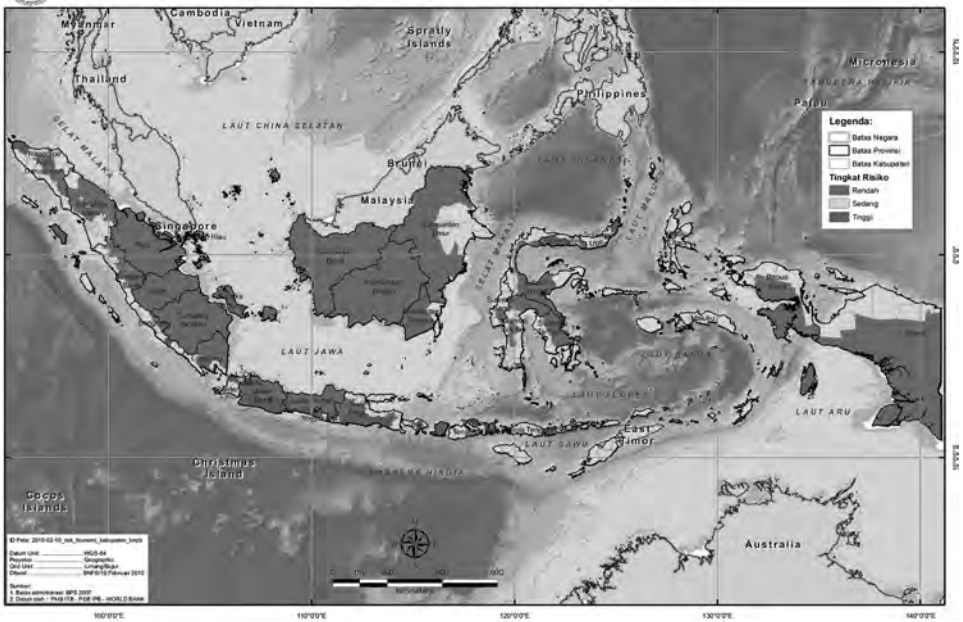
### PETA INDEKS RISIKO BENCANA GEMPABUMI DI INDONESIA



Gambar 2.8. Peta Risiko Gempa bumi Wilayah Indonesia



### PETA INDEKS RISIKO BENCANA TSUNAMI DI INDONESIA



Gambar 2.9. Peta Risiko Tsunami Wilayah Indonesia

### 2.5.2. Peta Risiko Letusan Gunung api

Peta risiko wilayah Indonesia terhadap letusan gunung api disajikan pada Gambar 2.10. Peta tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi terhadap letusan gunung api berada di Pulau Jawa. Namun terdapat juga banyak kabupaten yang memiliki risiko tinggi yang terdapat di Pulau Sumatera, sebagian wilayah di NTB dan NTT, dan Sulawesi bagian utara.



Gambar 2.10. Peta Risiko Letusan Gunung api Wilayah Indonesia

### 2.5.3. Peta Risiko Longsor

Peta risiko wilayah Indonesia terhadap longsor disajikan pada Gambar 2.11. Peta tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi terhadap longsor menyebar di wilayah bagian barat Pulau Sumatera, wilayah bagian selatan Jawa Barat, sebagian besar wilayah Papua dan Papua Barat, Sulawesi bagian tengah dan bagian utara, wilayah Pulau Kalimantan bagian timur, Nusa Tenggara Barat bagian barat, dan Sulawesi bagian tengah dan tenggara, serta di sebagian Provinsi Maluku.



Gambar 2.11. Peta Risiko Longsor Wilayah Indonesia

#### 2.5.4. Peta Risiko Banjir

Peta risiko wilayah Indonesia terhadap banjir disajikan pada Gambar 2.12. Peta tersebut menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi terhadap banjir menyebar di lima pulau besar di Indonesia. Jakarta Utara dan Jakarta Barat merupakan wilayah di DKI Jakarta berisiko tinggi terhadap banjir, demikian pula Indramayu yang sudah dikenal sebagai wilayah banjir di Provinsi Jawa Barat. Terdapat 18 Kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur yang berisiko tinggi terhadap banjir, seperti Sidoarjo dan Bojonegoro. Kabupaten/kota lainnya yang berisiko tinggi menyebar di antaranya di Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan Papua.



Gambar 2.12. Peta Risiko Banjir Wilayah Indonesia

### 2.5.5. Peta Risiko Kekeringan

Peta risiko wilayah Indonesia terhadap kekeringan disajikan pada Gambar 2.13. Peta tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi terhadap kekeringan berada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Di Pulau Jawa, jumlah kabupaten/kota yang berisiko tinggi terhadap kekeringan berada di Provinsi Jawa Tengah (25 kabupaten/kota), Provinsi Jawa Barat (15 Kabupaten/kota), Provinsi Jawa Timur (14 kabupaten/kota), sedangkan di Pulau Sumatera, wilayah yang berisiko tinggi terhadap kekeringan terutama terdapat di Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, dan Kepulauan Riau.



Tabel 2.5. menunjukkan besar dan luasnya risiko bencana di Indonesia. Dari enam jenis bencana yang dianalisis, satu dari dua kabupaten/kota di Indonesia memiliki risiko tinggi terhadap gempa bumi. Empat dari sepuluh kabupaten/kota di Indonesia memiliki risiko tinggi terhadap longsor, kekeringan, dan banjir. Lebih dari 15 persen kabupaten/kota di Indonesia memiliki risiko tinggi terhadap gunung api, sementara itu hampir seperenam kabupaten/kota memiliki risiko tinggi terhadap tsunami. Dibandingkan dengan beberapa pulau besar lainnya, Pulau Jawa merupakan yang paling tinggi risikonya terhadap berbagai bencana.

Hasil analisis risiko bencana dengan unit analisis kabupaten/kota, hendaknya ditindaklanjuti dengan upaya pengurangan risiko bencana melalui upaya-upaya antara lain, melalui Dokumen Petunjuk Pelaksana (Juklak) RT/RW, Dokumen Peraturan Daerah (Perda) RT/RW kabupaten/kota, izin lokasi, izin peruntukan lahan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat layak fungsi (khusus untuk bangunan gedung) dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), sesuai dengan karakteristik potensi bencana.

Hasil analisis indeks risiko serta peta risiko bencana hendaknya semakin mendorong semua pihak untuk meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana di seluruh sektor, yaitu pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana hendaknya bersinergi saling mengisi, melengkapi, dan menguatkan seluruh komponen program pengurangan risiko bencana.



Hand Tool (H)



Hand Tool (H)







# BAB 3

## LANDASAN

### PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia merupakan bagian dari upaya pengurangan risiko bencana di tingkat internasional yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk masyarakat internasional. Sebagai bagian dari komitmen Indonesia maka landasan yang mendasari penyusunan RAN-PRB mengacu pada kesepakatan-kesepakatan internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

#### 3.1. LANDASAN INTERNASIONAL

Sejak lebih dari dua dekade lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui beberapa resolusinya secara aktif menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk memprioritaskan upaya pengurangan risiko bencana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program pembangunan berkelanjutan. Beberapa resolusi internasional dan regional yang menjadikan landasan bagi upaya pengurangan risiko bencana.

##### 3.1.1. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Upaya pengurangan risiko bencana merupakan isu lintas wilayah dan sektoral dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Pada 30 Juli 1999 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB menerbitkan Resolusi Nomor 63 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa dekade 1990 menjadi Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional (*International Decade for Natural Disaster Reduction/IDNDR*).

Dalam resolusi ini direkomendasikan agar PBB memfokuskan tindakan bagi pelaksanaan strategi internasional pengurangan risiko bencana. Dua sasaran utama strategi internasional pengurangan risiko bencana tersebut adalah:

- (1). Mewujudkan ketahanan masyarakat terhadap dampak bencana alam, teknologi, dan lingkungan;
- (2). Mengubah pola perlindungan terhadap bencana menjadi manajemen risiko bencana dengan memberlakukan integrasi strategi pengurangan risiko bencana ke dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari resolusi tersebut, Majelis Umum PBB menerbitkan Resolusi Nomor 56/195 Tanggal 21 Desember 2001 yang menetapkan Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional dalam rangka mendorong agar upaya-upaya berkelanjutan pengurangan risiko bencana menjadi agenda tahunan negara-negara yang meratifikasi resolusi tersebut.

Selanjutnya pada 22 Desember 2005 diterbitkan Resolusi Nomor 60/195 tentang Strategi Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (*International Strategy for Disaster Reduction/ISDR*). Dalam resolusi ini PBB mengingatkan negara-negara di dunia bahwa pengurangan risiko bencana menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan serta mendorong seluruh negara untuk membuat komitmen yang kuat terhadap Deklarasi Hyogo, Kerangka aksi Hyogo, dan Strategi Yokohama.

*International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)* adalah suatu pendekatan global untuk mengurangi risiko bencana dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk mengurangi kehilangan kesempatan akan kehidupan, kerugian di sektor sosial ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana alam. Fokus ISDR adalah:

- (1). Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya PRB;
- (2). Mewujudkan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dan upaya PRB;
- (3). Mendorong kerja sama antarkomponen dalam rangka PRB;
- (4). Meningkatkan penggunaan ilmu pengetahuan untuk PRB.

### **3.1.2. Strategi Yokohama (*Yokohama Strategy*)**

Strategi Yokohama untuk Dunia yang Lebih Aman; Pedoman untuk Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi terhadap Bencana Alam dan Rencana Aksi (*The Yokohama Strategy for a Safer World; Guidelines for Natural Disaster Prevention, Preparedness and Mitigation and its Plan of Action*) yang diadopsi pada 1994 memberikan suatu panduan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana.

Tinjauan terhadap kemajuan dalam pelaksanaan Strategi Yokohama menekankan pentingnya pengurangan risiko bencana yang diperkuat dengan suatu pendekatan yang lebih proaktif dalam memberikan informasi, memotivasi, dan melibatkan masyarakat di semua aspek pengurangan risiko bencana dalam komunitas lokal. Penekanan lainnya adalah pada aspek

kelangkaan sumber daya yang dialokasikan khusus dari anggaran pembangunan untuk mewujudkan tujuan-tujuan pengurangan risiko, baik pada tingkat nasional maupun regional atau melalui kerjasama internasional dan mekanisme finansial.

Kesenjangan dan tantangan khusus yang diidentifikasi dari Strategi Yokohama terhadap tinjauan pelaksanaan yang masih cukup relevan untuk dijadikan acuan dalam pengembangan kerangka aksi 2005-2015, yaitu;

- (1). Tata kelola, kelembagaan, kerangka kerja legal dan kebijakan;
- (2). Identifikasi risiko, pengkajian, monitoring dan peringatan dini;
- (3). Pengembangan pengetahuan dan pendidikan;
- (4). Pengurangan faktor-faktor risiko mendasar;
- (5). Kesiapsiagaan untuk respons dan pemulihan yang efektif.

### **3.1.3. Kerangka Aksi Hyogo (*Hyogo Framework for Action*)**

Konferensi sedunia tentang Pengurangan Risiko Bencana diselenggarakan di Kobe, Hyogo, Jepang pada 18-22 Juni 2005 menghasilkan suatu Kerangka Kerja Aksi 2005-2015 untuk membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana. Konferensi mengadopsi lima prioritas aksi, yaitu:

- (1). Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana merupakan sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya;
- (2). Mengidentifikasi, mengkaji dan memonitor risiko-risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini;
- (3). Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat;
- (4). Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar;
- (5). Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respons yang efektif di semua tingkat.

Kerangka Aksi Hyogo ditindaklanjuti beberapa negara dan kawasan, termasuk Indonesia. Negara-negara Kepulauan Pasifik menetapkan *Framework for Action 2005-2015: An Investment for Sustainable Development in Pacific Island Countries*; kawasan Afrika membentuk *Africa Advisory Group on Disaster Risk Reduction* dan menetapkan *African Regional Platform on National Platform for Disaster Risk Reduction*.

#### 3.1.4. Kerangka Aksi Beijing

Konferensi Asia pertama tentang pengurangan risiko bencana diadakan di Beijing, China pada 27-29 September 2005. Konferensi diikuti 385 peserta dari 42 negara di Asia dan Pasifik Selatan, 13 Badan PBB dan organisasi internasional dalam rangka mengimplementasikan hasil dari konferensi negara-negara di dunia tentang pengurangan risiko bencana, yaitu Kerangka Aksi Hyogo. Pada akhir konferensi dicapai suatu kesepakatan yang tertuang didalam Kerangka Aksi Beijing untuk Pengurangan Risiko Bencana di Asia (*Beijing Action for Disaster Risk Reduction in Asia*).

Lembaga-lembaga regional yang mempunyai peran terkait dengan pengurangan risiko bencana diimbau untuk melakukan tugas-tugas di bawah ini sesuai dengan mandat, prioritas dan sumber daya yang dimiliki. Tugas-tugas tersebut adalah:

- (1). Meningkatkan program-program regional, termasuk program untuk kerja sama teknis, pengembangan kapasitas, pengembangan metodologi dan standar untuk monitoring dan penjagaan bahaya dan kerentanan, pertukaran informasi dan mobilisasi sumber daya secara efektif, bertujuan untuk mendukung upaya-upaya nasional dan regional guna mencapai tujuan-tujuan kerangka aksi ini;
- (2). Melakukan dan mempublikasikan penjajagan *baseline* tingkat regional dan subregional tentang status pengurangan risiko bencana, sesuai dengan kebutuhan yang teridentifikasi dan sesuai dengan mandat mereka;
- (3). Melakukan koordinasi dan menerbitkan kajian berkala tentang kemajuan dalam kawasan dan tentang hambatan dan dukungan yang diperlukan, dan membantu negara, jika diminta, dalam penyiapan ringkasan nasional berkala tentang program dan kemajuannya;
- (4). Membangun atau memperkuat pusat-pusat kerja sama regional khusus yang sudah ada sebagaimana mestinya, untuk melakukan penelitian, pelatihan, pendidikan dan peningkatan kapasitas dibidang pengurangan risiko bencana; dan
- (5). Mendukung pengembangan mekanisme regional dan kapasitas untuk peringatan dini terhadap bencana, termasuk tsunami.

Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan HFA pada tingkat Regional Asia dilakukan pertemuan 2 tahunan yang dihadiri oleh pejabat setingkat

menteri. (Asia Ministerial Meeting on Disaster Risk Reduction – AMM DRR) yang telah diselenggarakan antara lain :

- (1). AMM-DRR I diadakan di Beijing, China;
- (2). AMM-DRR II diadakan di New Delhi, India;
- (3). AMM-DRR III diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia; dan
- (4). AMM-DRR IV diadakan di Incheon, Korsel.

Sebagai puncak pertemuan yang membahas PRB ini adalah Global Platform yang diselenggarakan di Genewa, yakni yang pertama pada 2007 dan pertemuan kedua pada 2009.

### **3.2. LANDASAN NASIONAL**

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas, terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera. Kondisi alam Indonesia memiliki berbagai potensi dari segi geografis, geologis, hidrologis dan demografis. Kondisi tersebut menyebabkan kerawanan terhadap bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Perencanaan pengurangan risiko bencana harus berdasar pada pemenuhan hak-hak dasar manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Undang-undang Dasar 1945 menyatakan, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga, dan harta bendanya serta berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu.

#### **3.2.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)**

Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan agar :

- (1). Tercipta koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antarpelaku pembangunan, baik di tingkat pusat maupun dengan daerah;
- (2). Menjamin keterkaitan dan konsistensi antarperencanaan, penanggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- (3). Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta
- (4). Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Undang-undang SPPN ini mengatur tahapan perencanaan pembangunan nasional yang meliputi:

- (1). Penyusunan rencana;
- (2). Penetapan rencana;
- (3). Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4). Evaluasi perencanaan.

Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/ lembaga dan perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, yang menghasilkan RPJP, RPJM; dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Perencanaan ini disusun melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan mengikutsertakan masyarakat. Secara diagramatis sinkronisasi dan koordinasi dari perencanaan ini telah digambarkan pada Bab I, RPB dan RAN-PRB harus mengikuti kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

### **3.2.2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**

Pengelolaan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional dalam serangkaian kegiatan baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi prabencana, saat tanggap, dan pascabencana. Materi muatan undang-undang ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok penyelenggaraan penanggulangan bencana, di antaranya:

- (1). Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- (2). Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh BNPB dan BPBD;
- (3). Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;
- (4). Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional;
- (5). Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana agar tidak terjadi

penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana;

- (6). Pemerintah bertanggung jawab dalam pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan yang dilaksanakan.

**3.2.3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang** Mengingat Indonesia berada pada kawasan rawan bencana yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa, maka diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Penataan ruang harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah untuk mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan agar terwujud keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Strategi implementasi penyelenggaraan penataan ruang sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana:

- (1). Penerapan peraturan zonasi secara konsisten yang merupakan kelengkapan dari rencana detail tata ruang;
- (2). Penekanan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara sistemik melalui penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penganan sanksi;
- (3). Penegakan hukum yang ketat dan konsisten untuk mewujudkan tertib tata ruang.

**3.2.4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.**

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa dalam menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan upaya mitigasi bencana yaitu upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik. Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 secara jelas mengatur bahwa upaya pengurangan risiko bencana harus

diintegrasikan dalam rencana pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan dengan melibatkan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan mitigasi bencana ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

### **3.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Sampai saat ini telah terbit tiga Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu:

- (1). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- (2). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; dan
- (3). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Terbitnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 beserta ketiga Peraturan Pemerintah tersebut di atas merupakan salah satu upaya untuk memberikan kerangka hukum (*legal framework*) bagi penyusunan RPB, RAN-PRB dan RAD-PRB.

Pasal 33 sampai dengan pasal 35 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas tiga tahap yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Pada tahap prabencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana dibedakan dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diamanatkan bahwa untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana, terdiri dari rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana dan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana. RAN-PRB disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari pemerintah, non-pemerintah, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BNPB. RAN-PRB ditetapkan kepala BNPB setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga



yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan nasional yang ditetapkan untuk jangka waktu tiga tahun dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan.

### **3.2.6. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB)**

Penyusunan rencana nasional penanggulangan bencana diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu lima tahun, yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BNPB untuk tingkat nasional serta BPBD provinsi untuk tingkat provinsi dan BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota. Perencanaan penanggulangan bencana meliputi:

- (1). Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- (2). Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- (3). Analisis kemungkinan dampak bencana;
- (4). Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- (5). Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
- (6). Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan pengurangan risiko bencana dalam hal ini merupakan bagian dari perencanaan penanggulangan bencana. Dengan demikian, rencana aksi pengurangan risiko bencana merupakan penjabaran lebih rinci dari kebijakan dan strategi rencana penanggulangan bencana untuk aspek pengurangan risiko bencana. Hal ini jelas terlihat dalam kerangka koordinasi perencanaan penanggulangan bencana yang digambarkan pada Bab Pendahuluan.

Pada kondisi saat ini, rencana penanggulangan bencana nasional baru mulai dilaksanakan sejalan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dengan pertimbangan bahwa RAN-PRB 2006-2009 akan segera berakhir, maka penyusunan RAN-PRB periode 2010-2012 dilakukan secara paralel dengan penyusunan rencana penanggulangan bencana nasional (Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014). Namun, kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam RAN-PRB tetap mengacu pada prinsip-prinsip kebijakan yang digariskan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana.

### 3.3. PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*) mendefinisikan perubahan iklim adalah perubahan yang dapat dikatakan “*secara langsung atau tidak langsung berasal dari kegiatan manusia yang merubah komposisi atmosfer dan yang teramati selama periode waktu tertentu, yang menambah pada variabilitas iklim alamiah*”. Secara khusus, Panel AntarPemerintah untuk Perubahan Iklim (*Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC*) mendefinisikan “perubahan iklim” sebagai “*sebuah perubahan pada keadaan iklim yang dapat diidentifikasi melalui perubahan-perubahan pada rerata dan/atau variabilitas dari sifat-sifatnya, dan yang berlangsung untuk waktu yang lama, biasanya dalam beberapa dasawarsa atau bahkan lebih lama lagi*”. Kedua definisi ini sangat relevan dan penting untuk diingat.

Penyebab perubahan iklim di masa lampau tidak selalu jelas, tetapi secara umum berkaitan dengan perubahan-perubahan pada arus laut, aktivitas matahari, letusan gunung berapi, dan faktor-faktor alam lainnya. Akan tetapi, selama beberapa dekade terakhir telah terjadi peningkatan suhu global yang sangat cepat. Hal ini dapat terlihat dari indikasi peningkatan rata-rata suhu udara dan air laut global, meluasnya salju dan lapisan es yang mencair serta meningkatnya rata-rata tinggi permukaan laut secara global.

Secara umum konsekuensi yang muncul dari perubahan iklim dapat diperkirakan sebagai berikut ini:

- (1). Banyak terjadi gelombang panas yang dapat mempertinggi jumlah kematian, terutama di kalangan kelompok rentan, seperti para lanjut usia, anak-anak kecil, atau mereka yang sakit kronis, terisolasi secara sosial;
- (2). Meningkatnya kekeringan di beberapa daerah yang dapat menyebabkan degradasi lahan, kerusakan tanaman pangan atau berkurangnya panen, meningkatnya kematian hewan ternak dan meningkatnya risiko kebakaran hutan;
- (3). Meningkatnya frekuensi curah hujan tinggi di beberapa daerah yang akan memicu banjir dan tanah longsor, dengan potensi korban jiwa serta kerugian aset yang lebih besar;
- (4). Meningkatnya jumlah dan intensitas siklon yang sangat kuat (topan dan badai) yang akan mempengaruhi wilayah-wilayah di kawasan pesisir pantai, dengan potensi korban jiwa serta kerugian aset yang lebih besar lagi;

- (5). Meningkatnya permukaan air laut (*sea level rise*), yang berpadu dengan badai-badai di pesisir pantai, yang akan meningkatkan dampak-dampak gelombang badai dan banjir sungai serta menghancurkan sistem-sistem penghidupan dan perlindungan masyarakat.

### **3.4. PENGURANGAN RISIKO BENCANA DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN**

Seiring perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, penanganan bencana tidak lagi menekankan aspek tanggap darurat, tetapi lebih pada keseluruhan manajemen risiko bencana, maka diperlukan upaya mengarusutamakan penanggulangan bencana. Utamanya, yaitu pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam prioritas pembangunan nasional dalam kurun waktu lima tahun ke depan, salah satunya adalah memasukkan pengurangan risiko bencana sebagai salah satu aspek kebijakan dalam pencapaian sasaran bidang pembangunan.

#### **3.4.1. Bencana Alam dan Pengurangan Kemiskinan**

Walaupun fenomena alam tidak membedakan apakah terjadi di negara maju atau di negara berkembang, namun konsekuensinya dapat sangat berbeda. Contohnya pada 1998, 95% kematian karena bencana alam di seluruh dunia terjadi di negara-negara berkembang. Di sini bencana alam mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk dan prospek pembangunan ekonomi negara. Sebaliknya, di negara maju bencana alam umumnya hanya berdampak marjinal pada perekonomian.

Perkembangan ekonomi cukup terkait erat dengan bencana alam. Jika tidak menyiapkan diri menghadapi bencana alam, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan akan tidak tercapai jika terjadi bencana alam. Pemerintah perlu mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang rentan terhadap bencana alam. Selain itu, untuk mengurangi penderitaan penduduk miskin karena bencana, maka kondisi penduduk miskin perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan. Di wilayah-wilayah yang rawan bencana alam, kondisi penduduk paling miskin perlu diketahui. Perhatian khusus dibutuhkan untuk memantau kondisi penduduk miskin dan penduduk yang tidak beruntung lainnya. Selanjutnya dilakukan upaya perbaikan perumahan dan permukiman serta lahan atau tempat mencari nafkah guna mengurangi kerentanan terhadap bencana.

Dengan pertimbangan tersebut, maka rencana pembangunan perumahan dan permukiman perlu mempertimbangkan aspek kebencanaan, baik bencana akibat kejadian alam maupun akibat perbuatan manusia (seperti kebakaran yang sering terjadi di perumahan padat penduduk). Kebijakan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana perlu diarahkan pada perumusan dan penerapan standar bangunan yang tahan bencana khususnya di wilayah yang rentan terhadap bahaya alam dan di permukiman yang padat penduduk serta membantu dan mendorong masyarakat untuk membangun perumahan dan permukiman yang tahan terhadap bencana.

#### **3.4.2. Aspek Pengurangan Risiko Bencana dalam Penataan Ruang**

Setelah suatu bencana alam terjadi, pemerintah daerah perlu mengambil manfaat dari kesadaran masyarakat yang sedang terfokus pada bagaimana agar bahaya alam tidak menyebabkan bencana lagi. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan RTRW yang ada dengan menambahkan aspek ketahanan bencana dalam rencana tata ruang itu. Informasi tentang bahaya alam (dan juga bahaya karena hasil perbuatan manusia) perlu dipetakan. Pemetaan bahaya ini dilakukan untuk kawasan yang sudah terbangun dan yang dicadangkan untuk dibangun di kemudian hari.

Di wilayah yang sudah terbangun, peta bahaya perlu dibuat untuk menunjukkan wilayah yang struktur bangunan dan prasarananya perlu diperkuat agar tahan terhadap bencana. Di wilayah yang direncanakan untuk pembangunan baru, kemungkinan adanya bahaya harus menjadi faktor penting dalam menentukan lokasi permukiman, perdagangan, pendidikan, dan lain-lainnya. Tsunami dan gempa bumi adalah bencana alam yang sangat mencekam setelah kejadian tsunami di Aceh pada 2004 dan gempa bumi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Namun, bahaya-bahaya lain, seperti badai, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan lain-lain juga harus dipertimbangkan dalam penilaian bahaya dan dalam menentukan aspek mitigasi dalam RTRW.

Unsur penting dari pengurangan risiko selain penentuan zonasi, adalah penerapan standar konstruksi dan penegakan peraturan terkait. Jika informasi mitigasi dan bahaya telah tersedia dan masyarakat telah dilatih untuk melaksanakan rekonstruksi secara aman, penting untuk memastikan bahwa standar-standar tata

ruang dan tata bangunan diterapkan. Ini membutuhkan kemampuan aparat pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tata ruang yang ada dan untuk mengawasi konstruksi di lapangan agar sesuai dengan rencana tata ruang itu. Pemetaan bahaya untuk membuat keputusan lokasi yang aman adalah sesuatu yang penting, dan masyarakat yang akan menghuni kawasan itu harus didengar pendapatnya.

Insentif untuk pengurangan risiko perlu diberikan oleh pemerintah. Mitigasi bencana memerlukan pembiayaan di muka, sedang manfaatnya baru datang kemudian secara tidak pasti, maka insentif yang tepat waktu untuk investasi mitigasi merupakan kunci. Insentif itu dapat berupa subsidi langsung untuk mengganti biaya tambahan yang dikeluarkan penduduk untuk tindakan mitigasi atau pengurangan pajak terkait dengan investasi mitigasi. Insentif-insentif seperti itu akan dapat mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam melakukan mitigasi bencana. Dengan upaya-upaya itu maka penataan ruang akan memberikan kontribusi besar dalam pengurangan risiko bencana di negara yang berpotensi banyak bencana ini.

### **3.4.3. Pengurangan Risiko Bencana dalam Pengembangan Wilayah Perkotaan**

Perkembangan kota-kota di Indonesia, sebagaimana di negara-negara lain, akan terus berlangsung dengan pesat. Kota-kota besar akan tumbuh sejalan dengan perkembangan ekonomi yang diharapkan tumbuh minimal 7% per tahun, setidaknya sampai 2014. Perkembangan kota itu perlu diimbangi dengan upaya-upaya pencegahan bencana yang masif karena sebagian besar wilayah Indonesia terletak pada wilayah rawan gempa. Berbagai upaya pengurangan kerentanan fisik dari bangunan dan struktur di kota-kota besar perlu dilakukan untuk mencegah kerusakan kota skala besar yang akibatnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada saat yang sama pemerintah perlu meningkatkan kemampuan penduduk kota, khususnya mereka yang paling rentan, untuk siap menghadapi bencana apapun yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Kota-kota besar pantai mempunyai berbagai risiko bahaya terkait dengan perubahan iklim. Pemerintah kota-kota besar pantai perlu melakukan berbagai upaya untuk mencegah dampak merusak jika terjadi bencana akibat perubahan iklim itu. Kenaikan

permukaan laut merupakan proses yang kemungkinan besar akan terjadi. Untuk itu kota-kota besar perlu membatasi perkembangan yang mengarah ke laut, sebaliknya mendorong pembangunan ke arah daratan yang tentunya juga harus tidak rawan bencana.

#### **3.4.4. Aspek PRB dalam Pembangunan Bidang Pertanian**

Perencanaan pembangunan sektor pertanian perlu mempertimbangkan karakteristik dari fenomena alam yang menjadi penyebab bencana karena hanya dengan cara itulah perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara tepat. Perencanaan pembangunan sektor pertanian juga harus mempertimbangkan dampak bencana pada asal dan tujuan serta mekanisme pengangkutan hasil produksi pertanian. Pembangunan sektor pertanian juga harus mempertimbangkan dampak bencana pada kehidupan sosial masyarakat.

Informasi yang lebih terperinci mengenai dampak bencana dan kemungkinan terjadinya di kemudian hari akan sangat bermanfaat untuk mencegah kerugian yang diderita di suatu daerah jika suatu bencana alam terjadi. Hal itu juga memungkinkan dilakukannya perkiraan mengenai penurunan produksi pada masa mendatang sehingga dampak negatif bencana dapat dikendalikan.

Berkurangnya lapangan pekerjaan dan pendapatan di sektor pertanian ini juga berbeda menurut jenis kelamin sehingga perlu memperkirakan pengaruhnya secara khusus pada kaum wanita. Informasi tentang hilangnya pekerjaan dan pendapatan karena bencana yang mempengaruhi sektor pertanian perlu dijadikan pertimbangan dalam memperkirakan menurunnya kesejahteraan masyarakat dan untuk memberikan masukan dalam merencanakan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi yang sekaligus dapat mempekerjakan tenaga kerja yang menganggur.

#### **3.4.5. Pengarusutamaan Gender dalam PRB.**

Mengintegrasikan pertimbangan gender dalam tindakan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana secara keseluruhan memerlukan kebijakan pemerintah untuk memperluas peluang ekonomi, sosial dan politik bagi wanita dalam masyarakat. Beberapa upaya yang perlu diterapkan untuk meningkatkan peran wanita dalam penanggulangan bencana adalah antara lain:

- (1). Mengenalkan cara-cara mengutamakan gender dalam program-program pengurangan risiko bencana;
- (2). Membuka peluang peran kepemimpinan wanita dalam organisasi penanggulangan bencana;
- (3). Menjamin akses yang setara bagi pria dan wanita terhadap upaya pengurangan risiko bencana, termasuk hak-hak mendapatkan bantuan pemulihan;
- (4). Meningkatkan akses wanita untuk mendapatkan informasi manajemen risiko bencana;
- (5). Melakukan upaya penyadaran publik terhadap perspektif gender dalam pengurangan risiko bencana; dan
- (6). Melakukan kajian terhadap aspek-aspek gender dalam penanggulangan bencana.









山崩の被害を受けた家々



# **BAB 4**

## **PEMBELAJARAN**

### **PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

#### **4.1. REFORMASI KERANGKA PERATURAN DAN KEBIJAKAN**

Reformasi kerangka perundangan penanggulangan bencana digerakkan di tingkat internasional dan nasional. Secara nasional, reformasi peraturan dan perundangan dipicu berbagai bencana besar yang terjadi secara beruntun sejak akhir 2004, seperti gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias, gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah, tsunami di Pangandaran, Jawa Barat. Bahkan sampai saat ini berbagai bencana besar terjadi secara beruntun seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. Keempat jenis bencana yang terakhir ini (banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan) dapat dikatakan terjadi rutin setiap tahun dan cenderung menjadi lebih intensif karena dipicu perubahan iklim global.

Komitmen global untuk memprioritaskan upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana tercantum di HFA 2005-2015 dengan lima prioritas aksi utama merupakan dasar bagi advokasi terhadap isu pentingnya pengurangan risiko bencana di Indonesia, termasuk pengarusutamaan kedalam sistem perencanaan pembangunan. RAN-PRB 2006-2009, yang disusun Bappenas dan Bakornas PB, merupakan suatu dokumen perencanaan terkait aspek PRB yang diterbitkan untuk membuktikan komitmen Indonesia dan sebagai pendorong reformasi kerangka peraturan dan kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia.

Pasca peristiwa tsunami 2004 masyarakat sipil telah mengadvokasi lahirnya reformasi peraturan perundangan penanganan bencana. DPR dengan menggunakan hak inisiatifnya dan didukung aktor-aktor kunci nonpemerintah berhasil menetapkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini mengubah paradigma penanganan bencana dari semula hanya ditangani pemerintah secara sentralistis, sektoral, dan lebih memfokuskan pada upaya responsif, menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan yang didesentralisasikan di segala tingkatan secara multisektor serta penekananan pada pengurangan risiko bencana.

Bidang penataan ruang pada saat yang hampir bersamaan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang merupakan payung hukum dalam upaya mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana. Walaupun dalam Undang-undang tersebut belum secara eksplisit menyebutkan bagaimana penataan ruang yang memperhatikan aspek kebencanaan terutama di kawasan lindung dan strategis, pada Pasal 6 ayat 1 huruf (a) menyebutkan bahwa “penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana”.

Di bidang kelautan dan perikanan, terbitnya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur aspek mitigasi bencana yang secara spesifik dicantumkan dalam Bab X. Pengaturan dimulai dari penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan memperhatikan aspek mitigasi bencana. Penyelenggaraan mitigasi bencana wilayah pesisir selain melibatkan semua *stakeholders* juga harus memperhatikan aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektivitas serta lingkup luas wilayah.

Ditetapkannya peraturan dan perundangan di atas, mendorong aktor-aktor kunci di aspek kebencanaan, termasuk organisasi nonpemerintah, Palang Merah Indonesia, Federasi Palang Merah Internasional (IFRC) secara bersama-sama atau pun sendiri-sendiri berupaya memberikan partisipasi secara aktif dalam merealisasikan perubahan paradigma penanggulangan bencana. Keterlibatan aktor-aktor kunci ini tercermin dari aktifnya penyelenggaraan koordinasi yang intensif dan solid melalui serangkaian lokakarya dan seminar untuk saling berbagi pengalaman dan pembelajaran (*lessons learned*) dan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengurangan risiko bencana. Kegiatannya adalah:

- (1). Penyusunan kebijakan dan peraturan turunan dari Undang-undang Penanggulangan Bencana;
- (2). Penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana;
- (3). Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di berbagai tingkatan sampai dengan di tingkat lokal;
- (4). Peningkatan kesadaran masyarakat dan pendidikan kebencanaan; serta
- (5). Implementasi pengurangan risiko bencana di tingkat komunitas yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap

bencana dan mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang mendasari bencana.

Kebijakan dan payung hukum terkait pengurangan risiko bencana sebagai turunan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sangat diperlukan dengan alasan sebagai berikut:

- (1). Menjamin ketersediaan sumber daya dan kontinuitas PRB. Seluruh sumber daya merupakan investasi bagi pembangunan berkelanjutan. Melalui RAN-PRB pemerintah akan memberikan komitmennya dalam mendorong semua pemangku kepentingan di semua tingkatan untuk melakukan investasi sumber daya yang memadai bagi PRB;
- (2). Pemerintah memandang bahwa pengkajian risiko bencana merupakan suatu isu utama dalam menyusun kebijakan bagi pengurangan risiko bencana, termasuk dalam aspek pengembangan kelembagaan dan kapasitas teknis dalam PRB;
- (3). Mengatur sistem peringatan dini guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana. Terselenggaranya sistem peringatan dini yang efektif akan sangat penting untuk memastikan bahwa penduduk yang menghadapi risiko mampu dan mau untuk menerima, memahami dan bertindak untuk melindungi diri. Diperlukan peraturan agar dapat memobilisasi semua sumber-sumber utama dan aktor-aktor utama guna mengembangkan sistem peringatan dini yang diperlukan, termasuk para politisi, ilmuwan, penyedia informasi dan penduduk yang menghadapi risiko bencana;
- (4). Memberikan dasar bagi pepaduan PRB ke dalam sistem pendidikan formal dan nonformal dalam upaya mengubah pola pikir, sikap dan perilaku dalam upaya mengurangi risiko bencana serta menjadikan upaya pengurangan risiko bencana menjadi budaya masyarakat;
- (5). Menjamin pengutamaan PRB ke dalam pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini memerlukan pemahaman, pengetahuan dan keahlian yang memadai dari para pembuat kebijakan, para praktisi dan komunitas yang menghadapi bencana;
- (6). Menggalakkan sinkronisasi PRB dan adaptasi perubahan iklim mulai dari tingkat nasional sampai dengan komunitas guna membantu meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya yang berkesinambungan. Adaptasi perubahan iklim dan PRB merupakan isu pembangunan yang mempunyai tujuan sama dalam membangun ketangguhan masyarakat;
- (7). Sebagai suatu negara hukum, maka apapun yang telah dan akan dilaksanakan untuk PRB harus dapat dipertanggung jawabkan

secara hukum. Disamping itu segala urusan PB dan PRB, termasuk pelanggaran terhadap penyelenggaraan PB, akan semakin mudah diselesaikan melalui jalur hukum dengan makin tumbuhnya keyakinan masyarakat akan keberadaan hukum positif;

- (8). Undang-undang tentang kebencanaan di Indonesia masih relatif baru dan belum lengkap sehingga diperlukan upaya untuk penyempurnaan agar hukum dan kebijakan tidak menjadi hambatan dan kendala bagi penyelenggaraan PRB.

## **4.2. REFORMASI ASPEK KELEMBAGAAN**

Di samping Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, peraturan lain yang merupakan tonggak reformasi kelembagaan penanggulangan bencana adalah:

- (1). Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- (2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (3). Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Mengacu pada peraturan di atas telah dibentuk kelembagaan formal di tingkat pusat yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai pengganti dari Bakornas PB melalui Perpres Nomor 8 Tahun 2008. BNPB terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. Unsur Pengarah terdiri dari sepuluh anggota yang diwakili oleh pejabat eselon 1 dari instansi terkait dan sembilan anggota masyarakat profesional. Adanya unsur pengarah dan pelaksana dalam BNPB mencerminkan penyelenggaraan PB yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Melalui serangkaian pertemuan dan kesepakatan dari pemangku kepentingan telah berhasil dibentuk kelembagaan pengurangan risiko bencana di Indonesia yang dikenal dengan *Platform* Nasional Pengurangan Risiko Bencana, atau disingkat dengan PLANAS-PRB. PLANAS-PRB diresmikan bulan November 2008 yang merupakan suatu forum multipemangku kepentingan yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi nonpemerintah, lembaga donor internasional, media, perguruan tinggi, dan lembaga usaha. PLANAS-PRB merupakan wadah multi pemangku kepentingan yang dapat memberikan advokasi PRB pada berbagai tingkatan. Selain itu, PLANAS-PRB juga membantu dalam koordinasi, memberikan rekomendasi kebijakan dalam perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan yang terkait PRB melalui serangkaian proses yang melibatkan partisipasi multipemangku kepentingan.

Pembentukan PLANAS-PRB dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan konsultasi publik. Pembentukan dan pengaturan PLANAS-PRB dilakukan para pihak yang menjadi anggota Platform Nasional. PLANAS-PRB mendapat perhatian dan apresiasi dari UN-ISDR dalam pertemuan internasional *Platform Global* yang kedua di Genewa (Swiss) Juni 2009. *Platform* PLANAS-PRB ini menjadi contoh bagi pembelajaran pembentukan forum PRB di dunia internasional.

Forum pengurangan risiko yang lain misalnya Forum Mitigasi Bencana yang dimotori Kementerian Kelautan dan Perikanan yang di bentuk pada 2008 dengan anggota terdiri dari berbagai kementerian/lembaga pemerintah terkait dan beberapa organisasi nonpemerintah serta lembaga donor internasional. Forum ini dipandang sebagai suatu bentuk reformasi kelembagaan sebagai wadah koordinasi dan partisipasi berbagai institusi dalam aspek mitigasi bencana. Juga Forum Perguruan Tinggi untuk PRB yang beranggotakan 33 Perguruan Tinggi se-Indonesia.

Di tingkat pemerintah daerah, reformasi kelembagaan PB didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi maupun BPBD kabupaten/kota dibentuk menggantikan kelembagaan PB yang selama ini bersifat *ad hoc*. Saat ini, telah dibentuk BPBD di 23 provinsi dan di 49 kabupaten/kota. Pembentukan BPBP provinsi dan kabupaten/kota baik melalui peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah difasilitasi Kementerian Dalam Negeri.

Forum daerah untuk PRB juga sudah terbentuk antara lain di Yogyakarta, NAD, Sumbar, dan NTT, di samping forum lokal seperti Forum Merapi, Forum Bengawan Solo, dan lain-lain.

### **4.3. ASPEK KOORDINASI DAN JEJARING**

Sejak proses penyusunan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah dibentuk Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari LSM, Lembaga Nonpemerintah Internasional (INGO), UN/PBB, Pemerintah dan unsur Palang Merah. Dari koalisi ini berhasil didorong penetapan undang-undang tersebut yang kemudian menjadi landasan bagi pelaksanaan dan sistem penanggulangan bencana di Indonesia.

Pada Hari Peringatan Pengurangan Risiko Bencana Internasional tahun 2006 telah di inisiasi pembentukan Konsorsium Pendidikan Kebencanaan Indonesia (*CDE=Consorsium Disaster Education*) oleh 22 LSM, baik nasional maupun internasional. Konsorsium Pendidikan Kebencanaan Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar anggota yang telah aktif serta mereka yang tertarik untuk bekerja sama dalam pendidikan bencana.

PLANAS-PRB yang bertindak sebagai penganjur PRB di berbagai tataran menjadi suatu jejaring lintas pelaku di tingkat nasional yang memfasilitasi pertukaran informasi, program dan kegiatan PRB yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk memonitor keterkaitannya dengan Kerangka Aksi Hyogo (HFA). Selain itu PLANAS-PRB dapat mendorong pencarian kiat-kiat adaptasi, pelaksanaan dan penguatan komitmen terhadap HFA serta melaksanakan konsensus dan konsultasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tantangan PLANAS-PRB adalah memastikan apakah dapat berfungsi seperti diharapkan serta menjaga keanggotaannya secara aktif dalam menggalakkan upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia. Mengingat PLANAS-PRB baru dibentuk, maka diperlukan upaya untuk membangun mekanisme koordinasi dengan forum-forum yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal. PLANAS-PRB juga perlu memprioritaskan program kerja, termasuk mengupayakan pengutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan nasional.

#### **4.4. PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL**

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Banyak pengalaman menunjukkan bahwa masyarakat sipil mengintegrasikan diri, menjadi bagian tak terpisahkan dalam pengurangan risiko. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kegiatan di antaranya adalah:

- (1). Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam kebijakan pembangunan;
- (2). Kegiatan penanggulangan bencana berbasis komunitas;
- (3). Proses penyadaran masyarakat; dan
- (4). Kegiatan peringatan dini.

Beberapa hal penting terkait dengan partisipasi masyarakat sipil, adalah:

- (1). Karakteristik Indonesia ditinjau dari berbagai aspek seperti geografi, geologi, hidrologi, demografi adalah negara yang rawan bencana;



- (2). Salah satu komponen bencana adalah kerentanan yang melekat pada karakteristik masyarakat, termasuk kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, jumlah penduduk yang besar, dan kerusakan lingkungan, sehingga gejala alam yang ekstrem cenderung menimbulkan dampak negatif dan merusak secara meluas;
- (3). Konsekuensi kejadian bencana juga terbukti selalu berakibat kepada kelompok masyarakat yang paling lemah dan paling miskin.

Partisipasi hak dan kewajiban masyarakat sipil sudah banyak dilakukan dalam bentuk keikutsertaannya menentukan kebutuhan, solusi, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap program pengurangan risiko bencana melalui forum yang berbasis masyarakat. Selain itu, telah dilaksanakan pelatihan dan kesiapsiagaan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

Daerah yang banyak melakukan upaya pengurangan risiko bencana adalah daerah yang sudah mengalami dan berpotensi terjadinya bencana. Kesadaran akan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana cukup meningkat di daerah tersebut. Di tingkat nasional berbagai kelompok pemangku kepentingan secara kolaboratif mengadakan suatu rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Pengurangan Risiko Bencana ini.

Tantangan dalam memastikan adanya partisipasi masyarakat dan desentralisasi di tingkat lokal adalah sulitnya mendapatkan informasi dan data dari kalangan masyarakat sipil dan lembaga usaha terkait pengurangan risiko bencana. Kesulitan tersebut disebabkan oleh kurangnya data dan informasi yang lengkap, tidak mutakhir, dan sering berbeda antarberbagai sumber.

Pendelegasian kewenangan di tingkat lokal juga sering membingungkan pelaku pengurangan risiko bencana dalam mengintegrasikan kegiatannya ke dalam rencana tersebut. Kontribusi masyarakat sipil dan dunia usaha masih belum jelas karena penyebaran informasi yang selama ini dilakukan masih bersifat berita bukan informasi mengenai pengurangan risiko bencana. Untuk mengatasinya perlu dilakukan upaya koordinasi pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data secara berkala oleh pihak yang terkait. Standardisasi, ketersediaan, dan kemudahan akses untuk mendapatkan data dan informasi tersebut merupakan komponen dasar dalam penyusunan pengurangan risiko bencana. Selain itu, dalam rangka meningkatkan penyebarluasan informasi perlu dilakukan kerja sama dengan media untuk memberikan pemahaman mengenai PRB kepada masyarakat.

## **4.5. PEMBELAJARAN PENANGANAN DAN PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

### **4.5.1. Pembelajaran Penilaian Kerugian dan Kerusakan Bencana**

Dalam beberapa tahun terakhir bencana alam terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti banjir, longsor, gempa bumi dan tsunami, angin puting beliung, kekeringan, dan lain-lain. Pada setiap kejadian bencana selalu menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda serta kerusakan fasilitas-fasilitas umum, sosial, ekonomi maupun infrastruktur. Kondisi ini membawa dampak yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat yang terkena bencana.

Kegiatan penanganan bencana selalu diawali dengan tanggap darurat yang fokus pada penyelamatan jiwa. Masa tanggap darurat biasanya selama satu hingga tiga bulan, kecuali kejadian bencana di Aceh pada 2004 yang berlangsung enam bulan. Setelah itu dilaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi hingga dua tahun.

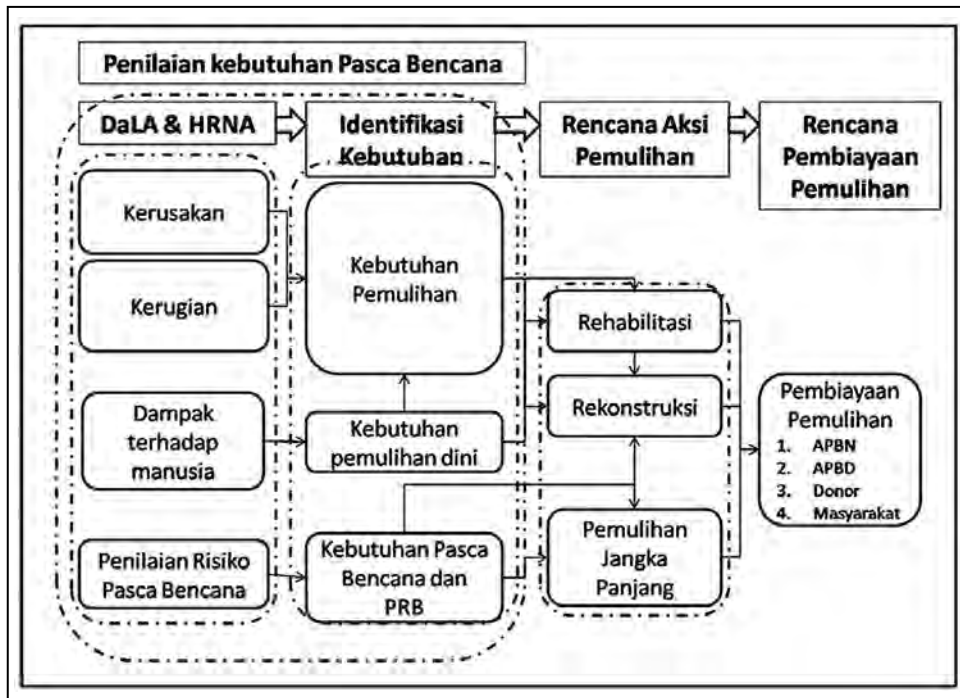
Masa rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh sangat berbeda dengan beberapa daerah lainnya, dimana kejadian bencananya sangat besar sehingga pemerintah membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Badan ini mengkoordinasikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Kehadiran BRR dalam rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan pembelajaran yang sangat berharga bagi Indonesia dan dunia luar. Kejadian bencana yang luar biasa tersebut memberikan pesan moral lahirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengubah paradigma dalam penanganan bencana yang tidak hanya berupa respons tetapi lebih kepada pengurangan risiko bencana.

Tabel 4.1. Daftar Bencana Alam di Indonesia pada Kurun Waktu 5 tahun Terakhir

No	Jenis/lokasi	Provinsi	Waktu Kejadian
1	Gempa bumi di Alor dan Nabire	NTT dan Papua Barat	November 2004
2	Gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias, Disusul gempabumi Nias	Aceh dan Sumut	Desember 2004 dan Maret 2005
3	Gempa bumi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah	DIY dan Jateng	Mei 2006
4	Tsunami Pangandaran	Jabar	Juli 2006
5	Gempa bumi di Bengkulu dan Sumatera Barat	Bengkulu dan Sumbar	Maret 2007
6	Semburan lumpur panas Porong Sidoarjo, hingga kini	Jawa Timur	Mulai Maret 2007
7	Gempa bumi Bengkulu dan Sumatera Barat	Bengkulu dan Sumbar	September 2007
8	Gempa bumi di selatan Jawa Barat	Jawa Barat	2 September 2009
9	Gempa bumi di Sumatera Barat	Sumbar	30 September 2009

Penanganan pascabencana di Yogyakarta mencatat pengalaman lain. Berbeda dengan di Aceh yang dalam penanganannya melalui pembentukan BRR tetapi sudah memasukan faktor pengurangan risiko bencana. Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilaksanakan selama dua tahun terfokus pada empat hal yaitu : perumahan dan pemukiman, pemulihan sarana dan prasarana, revitalisasi perekonomian serta dukungan peraturan. Skema koordinasi dan pelibatan masyarakat diungkap dengan jelas, sehingga dapat mengurangi berbagai konflik yang ada dalam masyarakat.

Di beberapa kejadian bencana, seperti gempa di Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, banjir di Jakarta selalu dilakukan perkiraan kerusakan dan kerugian (*Damage and Loss Assessment*) dengan menggunakan metoda ECLAC (*European Commission for Latin America and Caribbean*) yang menjadikan dasar penyusunan rencana pemulihan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (Gambar 4.1.).



Gambar 4.1. Skema Penilaian Kebutuhan Pemulihan

Metoda ECLAC digunakan untuk memperkirakan dampak bencana terhadap kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, yang kemudian dituangkan kedalam dampak kerugian langsung dan kerugian tidak langsung terhadap kondisi makroekonomi wilayah yang terkena bencana. Ada tiga tujuan dari penilaian tersebut yaitu:

- (1). Menilai kerusakan yang terjadi pada prasarana dan sarana publik dan nonpublik;
- (2). Menilai kerugian yang terjadi dan dampaknya terhadap masyarakat, daerah dan negara;
- (3). Menilai pengaruh kerusakan terhadap kelembagaan pemerintahan, sekaligus mengantisipasi risiko terjadinya konflik, pelanggaran hukum dan penyimpangan.

Dari berbagai kejadian bencana, proses pelaksanaan pemulihannya meliputi tiga 3 fase besar yaitu fase tanggap darurat, fase rehabilitasi dan rekonstruksi, dan fase pemulihan jangka panjang berkelanjutan. Pengalaman dari Penilaian Kerusakan dan Kerugian disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.  
Penilaian Kerusakan dan Kerugian di Indonesia

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Gempa Bumi DIY - Jateng Mei 2006 (Milyar Rp)		Banjir dan Longsor Jateng- Jatim Januari 2008 (Milyar Rp)		Gempa Bumi Jabar - Jateng September 2009 (Milyar Rp)		Gempa Bumi Sumbar September 2009 (Milyar Rp)	
		Kerusakan	Kerugian	Kerusakan	Kerugian	Kerusakan	Kerugian	Kerusakan	Kerugian
<b>1</b>	<b>PERUMAHAN</b>	<b>13,915.00</b>	<b>1,382.00</b>	<b>333.32</b>	<b>-</b>	<b>8,060.77</b>	<b>133.73</b>	<b>13,450.00</b>	<b>1,960.00</b>
1	Perumahan			282.75	-				
2	Prasarana Permukiman			50.57	-				
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTUR</b>	<b>397.00</b>	<b>154.00</b>	<b>418.37</b>	<b>-</b>	<b>2.71</b>	<b>4.26</b>	<b>930.10</b>	<b>32.80</b>
1	Transportasi	90.00		273.29	-	0.05		327.60	19.70
2	Energi	225.00	150.00	0.71	-	0.45	4.26	46.30	6.00
3	Pos dan Telekomunikasi			-	-			33.60	19.70
4	Air dan Sanitasi			0.68	-			556.20	7.10
5	Infrastruktur Sumber Daya Air	82.00	4.00	143.70	-	2.22			
<b>3</b>	<b>SOSIAL</b>	<b>3,906.00</b>	<b>77.00</b>	<b>49.93</b>	<b>3.08</b>	<b>402.67</b>	<b>11.34</b>	<b>1,454.10</b>	<b>72.30</b>
1	Kesehatan	1,569.00	21.00	7.67	-	12.46		569.10	42.40
2	Pendidikan	1,683.00	56.00	39.40	3.08	153.42	11.34	563.70	25.00
3	Agama	654.00		2.86	0.0004	236.79		304.20	3.10
4	Lembaga Sosial			-	-			17.10	1.80
<b>4</b>	<b>EKONOMI</b>	<b>4,348.00</b>	<b>4,676.00</b>	<b>165.90</b>	<b>800,996.67</b>	<b>0.10</b>		<b>773.80</b>	<b>1,519.00</b>
1	Pertanian	66.00	640.00	150.84	782.19			56.10	223.00
2	Perikanan			14.09	17.30				
3	Peternakan								
4	Perindustrian	4,063.00	3,899.00					10.90	114.80
5	Perdagangan	184.00	120.00	0.96	1.51	0.10		567.80	574.70
6	Pariwisata	36.00	18.00					68.00	230.20
<b>5</b>	<b>LINTAS SEKTOR</b>	<b>185.00</b>	<b>110.00</b>	<b>3.95</b>		<b>174.65</b>		<b>660.60</b>	<b>14.00</b>
1	Lingkungan Hidup		110.00					0.10	0.10
2	Pemerintahan	137.00				174.65		660.50	13.90
3	Keuangan dan Perbankan	48.00							
	<b>Nilai Total</b>	<b>22,751.00</b>	<b>6,399.00</b>	<b>971.47</b>	<b>800,999.75</b>	<b>8,640.90</b>	<b>149.32</b>	<b>17,268.60</b>	<b>3,598.10</b>

Tabel 4.2. menunjukkan bahwa kerusakan pada infrastruktur menempati ranking tertinggi, sehingga diperlukan kerja sama dan pelibatan departemen terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, dan lain-lain.

Dari semua kejadian bencana diatas, terdapat beberapa isu dalam penilaian kerusakan dan kerugian, yaitu :

- (1). Penilaian kerusakan dan kerugian sering dilakukan dalam waktu yang sangat singkat karena harus segera disusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksinya;
- (2). Sumber dan keakurasian data sering sulit diperoleh;
- (3). Pemahaman terhadap kriteria dan nilai kerusakan serta kerugian setiap sektor belum seragam, sehingga diperlukan verifikasi jenis kerusakan serta validasi nilai kerusakan berdasarkan satuan harga yang mengacu pada peraturan di tingkat pemerintah pusat dan tingkat pemerintah daerah;

- (4). Data yang terkumpul pada saat tanggap darurat hanya data fisik (rusak total/berat, rusak sedang, rusak ringan) sedangkan data sosial-ekonomi berupa data sekunder;
- (5). Kajian dampak ekonomi belum akurat karena tidak tersedianya *baseline data* bencana; dan
- (6). Koordinasi pengumpulan data menjadi tantangan karena sebagian besar SKPD di daerah sedang melaksanakan kegiatan tanggap darurat.

#### **4.5.2. Praktik yang baik dalam Penanganan PRB di Indonesia**

Berbagai pengalaman dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dan internasional dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi program-program sejenis di Indonesia. Di bawah ini akan dibahas beberapa pengalaman penerapan PRB di Indonesia.

##### **1. Pengalaman Perencanaan di Sumatera Barat**

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerahnya. Tanggung jawab Pemerintah Daerah tersebut meliputi pemenuhan hak masyarakat terkena bencana, melindungi dari dampak bencana dan melakukan pembangunan baik dalam bentuk fisik dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana dengan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam konteks perencanaan, Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyusunan rencana pengurangan risiko bencana dalam pembangunan.

Adapun yang sudah dilakukan di antaranya menyusun dan mensahkan sebuah Perda yang memang secara khusus mengatur tentang penanggulangan bencana, yaitu Perda Provinsi No.5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, melakukan revisi RTRW dengan menyesuaikan dengan perubahan yang ada serta memperhitungkan berbagai faktor yang belum diperhitungkan selama ini seperti kerentanan, hazard, peta geologi dan sebagainya, membentuk BPBD Propinsi yang merupakan implementasi dari Perda No 5 Tahun 2007 tentang Perda Penanggulangan Bencana. Pemda Sumatera Barat juga telah melakukan Kebijakan di Bidang Penganggaran dengan mengalokasikan dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang dialokasikan secara rutin setiap tahun anggaran. Selain itu pemerintah Sumatera

Barat telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana. Semua pengalaman dalam perencanaan dari Sumatera Barat merupakan pengalaman berharga untuk menjadi *lesson learn* bagi daerah lain di tanah air kita.

## **2. Proyek RADIUS (Risk Assessment for Tools for Diagnosis of Urban Areas against Seismic Disasters) di Kota Bandung**

Bandung sebagai kota yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan juga kota yang memiliki ancaman kegempaan tingkat menengah dikombinasikan dengan kondisi perkembangan dan pembangunannya menyebabkan risiko bencana gempa bumi yang cukup besar. Antara 1999-2000 telah dilaksanakan upaya perencanaan pengurangan risiko terhadap gempa bumi, melalui Proyek RADIUS (*Risk Assessment for Tools for Diagnosis of Urban Areas against Seismic Disasters*) yang disponsori oleh Sekretariat UN-IDNDR, serta kesiapan berbagai fasilitas kesehatan, sistem pengadaan air, listrik, telekomunikasi, infrastruktur, dan lain-lain. Rencana tindak yang dibuat diharapkan akan meningkatkan kemampuan sektor-sektor vital di Kota Bandung melalui perencanaan tanggap darurat yang lengkap dan terintegrasi. Beberapa kegiatan PRB yang direkomendasikan Proyek RADIUS telah diadopsi pihak pengambil keputusan di Kota Bandung antara lain dengan memasukkan beberapa aspek PRB ke dalam pembangunan jangka menengah dalam RTRW untuk periode 20 tahun (2010-2030), dengan memanfaatkan peta-peta bahaya yang telah dihasilkan sebagai masukan dalam penetapan peraturan bangunan.

## **3. Kesiapsiagaan Masyarakat di Gunung Merapi**

Gunung Merapi terletak di dua propinsi yaitu Daerah Istimewa Jogjakarta dan Jawa Tengah. Ancaman Gunung Merapi bisa terjadi kapan saja dan sudah beberapa kali terjadi. Masyarakat yang didukung DREAM UPN kemudian berinisiatif untuk membentuk Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat dengan melakukan serangkaian kegiatan diantaranya adalah advokasi, pelatihan, gladi, sampai pada bagaimana meningkatkan kesadaran akan hidup bersama bencana.

Inisiatif tersebut terus berkembang dengan berbagai pengalaman penanganan yang sudah ada hingga saat ini dan terus dikembangkan menjadi budaya siaga bencana dan menjadi bagian kehidupan mereka sehari - hari. Kiprah masyarakat dalam kesiapsiagaan di lereng gunung Merapi mengembangkan . Hingga

saat ini pengalaman penanganan bencana oleh masyarakat dari Gunung Merapi telah di replikasi di beberapa daerah misalnya di Gunung Kelud, Jawa Timur, Gunung Tambora dan banyak lagi.

#### **4. Peringatan Dini Mencegah Kekurangan Makanan di NTT**

Bagian Timur Nusa Tenggara memiliki tiga-bulan musim hujan dan sembilan bulan musim kemarau. Kondisi seperti ini telah berlangsung lebih dari 100 tahun, masyarakat kekurangan pangan hal ini disebabkan oleh musim kemarau kurangnya pengetahuan yang berhubungan dengan iklim yang menyebabkan kegagalan panen. PMPB (Perhimpunan Masyarakat Peduli Bencana) dan Yayasan PIKUL melakukan inisiatif pengurangan risiko berbasis masyarakat dengan fokus petani di pedesaan dengan fokus membangun sistem keamanan pangan dan mata pencaharian untuk mencegah kekurangan makanan. Inisiatif ini berlangsung 305 tahun dan kemudian masuk menjadi program di Kabupaten Sikka. Dengan kegiatan tersebut mereka berhasil mengatasi kekurangan pangan dengan mekanisme yang telah mereka bangun sendiriyaitu dengan meningkatkan kesadaran untuk mengembangkan indikator dan memonitor keamanan pangan dan mata pencaharian, membuat sistem peringatan dini dengan penyiapan stik makanan serta melakukan advokasi kepada pemerintah. Kegiatan cocok tanam dengan menggunakan kearifan masyarakat seperti sistem menanam di sela bebatuan, melakukan analisis risiko dengan sistem kalender serta penyimpanan makanan. Kunci keberhasilan dari kegiatan ini adalah kombinasi baik ilmu pengetahuan modern dan pengetahuan adat.

#### **5. Pengalaman Pembangunan Rumah Tahan Gempa dari Yogyakarta**

Pembangunan rumah paska Gempa di Yogyakarta merupakan salah satu pengalaman rehabilitasi dan rekonstruksi yang didalamnya mengandung upaya mengurangi risiko bencana. Pembangunan perumahan yang dilaksanakan diawali dengan pembangunan shelter (rumah sementara) yang bertujuan untuk menampung korban, namun setelah masa tanggap darurat selesai masyarakat harus segera memiliki rumah. Provinsi DIY kemudian membangun rumah tahan gempa. Bangunan tersebut mengandung beberapa prinsip diantaranya adalah yakni kuda-kuda, pondasi, kolom, balok, sloof, yang semua itu bisa membuat rumah tahan akan gempa pada kekuatan tertentu. Pada tahap rekonstruksi tahun 2006, Provinsi DIY telah membangun 570 unit rumah per hari dan selama 253 hari telah berhasil menyiapkan 144.034 unit rumah.



## **6. Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kabupaten Demak**

Kabupaten Demak yang memiliki daerah pesisir rawan terhadap ancaman bahaya erosi, banjir pasang, dan gelombang pasang. Pertanian sebagai sektor utama bagi perekonomian Kabupaten Demak juga terkena dampak intrusi air laut yang berdampak negative terhadap pertanian dan terganggunya tambak-tambak ikan di daerah pesisir.

Guna mengatasi masalah tersebut, beberapa kegiatan PRB yang bersifat adaptif terhadap kondisi di atas telah dikembangkan dalam bentuk rencana tindak pengelolaan pesisir yang terintegrasi (*Integrated Coastal Zone Management/ICZM*) sejak 2003, yang didukung Departemen Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten Demak, masyarakat setempat dan NGO donor dari Jepang.

Rencana tindak ICZM tersebut terbagi menjadi empat kegiatan strategis sebagai berikut:

- (1). Proses rehabilitasi dari ekosistem pesisir, terutama mangrove, dan implementasi dari langkah-langkah penanggulangan perlindungan pesisir.
- (2). Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove bagi ekosistem pesisir.
- (3). Rehabilitasi sarana dan infrastruktur pedesaan, termasuk sarana sosial, publik, dan pendidikan
- (4). Mengembangkan kesempatan usaha mandiri melalui beberapa inisiatif..

### **4.5.3. Praktik yang baik dalam Penanganan PRB di Negara Lain**

#### **1. Pengalaman Argentina**

Argentina telah menginisiasi pembentukan Platform Nasional di antara Negara Amerika Latin lainnya, dengan memasukkan tiga tujuan strategis dari HFA, yaitu: integrasi pengurangan risiko bencana kedalam kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, membangun ketahanan dalam menghadapi bencana, dan memasukkan pendekatan-pendekatan pengurangan risiko ke dalam program-program kesiapsiagaan; tanggap darurat, dan pemulihan. Salah satu alat yang telah digunakan Argentina dalam kegiatan PRB di negaranya adalah membuat model solidaritas yang dijuluki Inisiatif Helm Putih (*White Helmet Initiative*) sebagai suatu kelompok

bantuan kemanusiaan yang juga telah telah diakui oleh PBB, dengan tujuan untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan; memberikan bantuan pada saat bencana di tahap mitigasi dan pencegahan. Pola *White Helmet* dalam memobilisasi relawan setempat secara intensif, dan juga penekanan pada pengelolaan bencana secara komprehensif dapat dilihat sebagai strategi yang baik guna memitigasi kemiskinan dan menghilangkan kelaparan serta gizi buruk, yang bagi sebagian penduduk merupakan faktor kerentanan utama yang dihadapi dalam keadaan darurat.

## **2. Pengalaman Bangladesh**

Pemerintah Bangladesh, negara yang terus menerus menghadapi ancaman banjir dan siklon, telah melakukan suatu pendekatan PRB yang proaktif. Caranya melalui pendefinisian ulang pengelolaan lingkungan yang berisiko dan menanggapi ancaman secara langsung, dalam bentuk program 5 tahunan pemerintah untuk Pengurangan Risiko Bencana bagi Masyarakat Termiskin melalui Pengembangan Mata pencaharian yang Berkelanjutan (*Reducing Disaster Risks of the Poorest through Sustainable Livelihood Development*). Program ini ditekankan pada pembangunan ketahanan pangan untuk penduduk yang sangat miskin dan rentan bencana dalam bentuk *Disaster Resistant Sustainable Livelihoods/DRSL*, menggunakan pendekatan berbasis pengembangan mata pencaharian untuk melakukan mitigasi dan pengelolaan bencana pada tingkat masyarakat yang sangat praktis dan efektif.

Melalui *Bangladesh Disaster Preparedness Centre (BDPC)*, program *Reducing Disaster Risks of the Poorest through Sustainable Livelihood Development*, merupakan perpaduan yang menarik dari upaya Pemerintah (*Ministry of Food and Disaster Management Bangladesh* mengeluarkan dana langsung untuk proyek rehabilitasi korban banjir) dan NGO yang telah berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi penduduk.

## **3. Pengalaman Filipina**

*Program Integrating Disaster Risk Reduction in Urban Planning dari Makati City*, suatu unit pemerintahan di Metro Manila, yang berisiko tinggi terhadap gempa bumi, melalui kerja sama dengan *Earthquakes and Megacities Initiative (EMI)* dan didukung oleh *German Disaster Reduction Committee (DKKV)* dan *German Federal Foreign Office*, telah menginisiasi urban redevelopment planning project yang bertujuan mengurangi risiko bencana gempa bumi, meliputi:

- (1). Pendekatan proaktif, sistematis, pragmatik, dan konkret untuk mengurangi risiko gempa dengan memasukkan PRB ke dalam tata guna lahan dan pembangunan sosio-ekonomi.
- (2). Proses perencanaan yang *locally-driven* dan inklusif, yang melibatkan lintas sektor dan *stakeholder* setempat.
- (3). Dukungan yang kuat dan jelas dari pemerintah kota.
- (4). Investasi jangka panjang dalam PRB yang dapat direplikasi unit pemerintahan lainnya.

#### **4. Pengalaman Iran**

Sesudah *Great Manjil Earthquake* pada 1990, *International Institute of Earthquake and Engineering and Seismology (IEES)* di Teheran memulai pekerjaan dengan institusi teknik lainnya dalam mengembangkan sebuah penelitian masalah-masalah strategis yang berskala nasional secara multidisipliner dan rencana mitigasi untuk pengurangan risiko gempa.

Sebagai hasilnya, *Iran Earthquake Mitigation Program (IERMP)* telah diimplementasikan oleh *IEES, Building and Housing Research Centre, Geophysics Institute of Teheran University, dan Geological Survey of Iran* dengan dukungan dari Komite Gempa Bumi dari Dewan Riset Iran (*Earthquake Committee of the Iran Research Council*) serta Iran's National IDNDR committee.

Secara singkat beberapa aksi PRB melalui IERMP yang termasuk ke dalam wilayah kebijakan pembangunan adalah:

- (1). Mengubah pendekatan dari kegiatan tanggap kerusakan akibat gempa bumi ke pemahaman cara-cara dalam mengurangi risiko kerusakan struktur dan jaringan vital yang rentan sebelum gempa bumi terjadi.
- (2). Menetapkan dana khusus pemerintah untuk perkuatan bangunan publik yang penting, termasuk sekolah, rumah sakit, infrastruktur publik dan fasilitas jaringan vital.
- (3). Menyediakan dana insentif untuk sektor swasta dan komersil yang tertarik pada perbaikan struktur mereka yang sudah ada.
- (4). Mendorong industrialisasi yang lebih baik pada bidang konstruksi untuk menjamin kualitas pengawasan yang lebih baik.

#### **5. Pengalaman Vietnam**

Vietnam telah memformulasikan rencana strategis 20 tahun untuk PRB, termasuk menetapkan strategi-strategi bagi penduduk delta Sungai *Mekong* untuk hidup berdampingan dengan banjir. Berbagai

kegiatan PRB telah dilakukan, mulai dari relokasi penduduk rentan ke daerah yang lebih aman sampai dengan perubahan kalender panen. Upaya-upaya usaha yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang positif dan mendorong lebih lanjut pemerintah dan masyarakat untuk terus bekerjasama ke arah tersebut. Usaha-usaha PRB di Vietnam telah melibatkan berbagai tenaga ahli baik dalam dan luar negeri serta lintas sektor, bahkan lintas kementerian.

Provinsi-provinsi di Vietnam yang rawan banjir diharuskan membuat perencanaan tata guna lahan yang tepat dan harus memperhitungkan jadwal panen yang cocok dengan kejadian banjir. Pendekatan tersebut merupakan contoh pendekatan yang sangat baik dengan memanfaatkan kombinasi kegiatan pengelolaan sumber daya alam dengan inisiatif di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam pengurangan risiko banjir dan pada saat yang bersamaan meningkatkan produksi setempat, kehidupan berkelanjutan dan pembangunan.

#### **4.6. ASPEK PENDANAAN**

Hasil evaluasi pelaksanaan RAN-PRB 2006-2009 mengindikasikan kurangnya dukungan pendanaan terhadap pelaksanaan pengurangan risiko bencana, sehingga banyak sasaran RAN-PRB 2006-2009 yang belum tercapai. Namun demikian, sudah banyak mengalami perubahan sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengubah paradigma dari responsif menuju pengurangan risiko. Keadaan ini mendorong bergesernya pendanaan dari respons (*spending*) menjadi pendanaan pengurangan risiko bencana yang sifatnya investasi (*investment*). Kenaikan alokasi anggaran dari APBN terkait PRB dari RKP 2007 ke 2008 diilustrasikan sebagai berikut:

- (1). Penguatan kelembagaan di nasional dan daerah terkait mitigasi dan sistem peringatan dini meningkat dari Rp 49,8 miliar menjadi Rp 1,028 triliun;
- (2). Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana dari Rp 94 miliar, meningkat menjadi Rp 127,3 miliar ;
- (3). Pengarusutamaan PRB dalam tata ruang yang awalnya belum ada dana yang dialokasikan, meningkat menjadi Rp 277 miliar ;
- (4). Sedangkan total dana untuk pencegahan bencana (*disaster preparedness*) yang masuk dalam kegiatan pengurangan risiko bencana pada tahun 2007 adalah Rp 78 miliar.

Sehubungan dengan itu dukungan dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan RAN-PRB 2010-2012, sangat diperlukan baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun pendanaannya guna dapat melanjutkan kegiatan pengurangan risiko bencana di Indonesia.

Aspek pendanaan PRB ini akan terus ditingkatkan antara lain, melalui upaya meningkatkan komitmen pemerintah dengan mengalokasikan dana PB dalam APBN/APBD. Sebagaimana direkomendasikan dalam global fórum kedua di Genewa, yaitu 1% dari APBN/APBD dialokasikan untuk Dana PB yang 10% nya dialokasikan untuk kegiatan PRB.









# **BAB 5**

## **HASIL EVALUASI**

### **PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL**

### **PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

### **TAHUN 2006-2009**

#### **5.1 PENGANTAR EVALUASI RAN-PRB 2006-2009**

Bab ini menguraikan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAN-PRB 2006-2009. RAN-PRB merupakan dokumen kebijakan pertama tentang pengurangan risiko bencana di Indonesia. Pada waktu penyusunan RAN-PRB ini belum ada landasan peraturan yang menjadi acuan. Upaya penyusunannya semata-mata merujuk langsung kepada Kerangka Kerja Aksi Hyogo atau *Hyogo Framework for Action* (HFA) yang merupakan komitmen global dalam rangka pengurangan risiko bencana pada tingkat internasional. Langkah ini sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap pengurangan risiko bencana.

Setahun setelah peluncuran dokumen *HFA*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana (Bakornas PB)---sekarang menjadi BNPB, menyusun dokumen RAN-PRB 2006-2009. Peluncuran dokumen RAN-PRB dilaksanakan pada 24 Januari 2007 di Jakarta, dihadiri para pihak, baik dari pusat maupun daerah. Langkah dan upaya ini sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap Resolusi PBB Nomor 63 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan *HFA* dan *Beijing Action*. Penyusunan RAN-PRB ini bertujuan mengubah paradigma dalam penanganan bencana yang selama ini lebih bersifat responsif dalam menangani bencana menjadi suatu kegiatan yang bersifat preventif sehingga bencana alam itu selain mungkin dapat dicegah atau diminimalkan (mitigasi), juga risikonya dapat dikurangi atau malah ditiadakan.

Untuk memperoleh gambaran kemajuan dan permasalahan pelaksanaan untuk kegiatan tahunan RAN-PRB ini dilakukan pemantauan dan evaluasi. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-PRB 2007-2008 dijadikan sebagai masukan utama dalam melihat gambaran menyeluruh dari implementasi RAN-PRB 2006-2009. Di samping itu, untuk memperoleh gambaran RAN-PRB 2006-2009 dikaji dan dianalisis berbagai dokumen dan laporan lainnya yang relevan. Hasil evaluasi ini

menjadi masukan dan saran terhadap proses penyusunan RAN-PRB selanjutnya.

Dalam evaluasi ini digunakan beberapa aspek penilaian, yaitu konsistensi, koordinasi, kapasitas, konsultasi, dan keberlanjutan. Penjelasan secara definitif adalah sebagai berikut :

- (1). *Aspek Konsistensi*, yaitu proses penelaahan kesesuaian antara perencanaan yang tercantum dalam kebijakan RAN-PRB dengan rencana kerja yang disusun oleh para pihak yang terlibat.
- (2). *Aspek Koordinasi*, yaitu suatu interaksi dan komunikasi antarpara pihak dalam mendorong tercapainya kesepahaman, kebersamaan, kesepakatan, dan komitmen dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan RAN-PRB;
- (3). *Aspek Kapasitas*, yaitu kemampuan kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan sumber pendanaan yang didayagunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan RAN-PRB;
- (4). *Aspek Konsultasi*, yaitu keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Berbagai media komunikasi dan informasi yang dapat digunakan dalam menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kegiatan PRB. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai forum untuk menyerap aspirasi dan masukan pada saat sebelum bencana, saat terjadi bencana, dan setelah peristiwa bencana;
- (5). *Aspek Keberlanjutan* dalam kerangka kebijakan pembangunan yang terkait dengan pengurangan risiko bencana baik dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang.

## 5.2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RAN-PRB 2006-2009

Hasil evaluasi lima aspek pelaksanaan RAN-PRB yaitu koordinasi, kapasitas, dan konsultasi.

### 5.2.1. Konsistensi

- (1). Konsistensi antara dokumen perencanaan kementerian/ lembaga (K/L) sebagai hasil proses Musrenbang Nasional dengan dokumen perencanaannya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007, 2008, dan 2009;
- (2). Alokasi pendanaan dalam RKP 2007-2009 menunjukkan berorientasi PRB, sebagaimana secara umum dapat dilihat pada Tabel 5.1.
- (3). Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian/ lembaga yang dikelompokkan ke

dalam 5 program utama dalam RAN-PRB, diperoleh gambaran sebagaimana disajikan pada Tabel 5.2;

- (4). Perbandingan program dalam RAN-PRB dengan kontribusi Donor dan NGO dalam jangka waktu 2007-2009 tidak semua program utama tersedia datanya. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel 5.3.
- (5). Terdapat *missing link* yang mengaitkan antara analisa risiko dengan matriks program karena lemahnya visi dan misi rencana aksi sehingga RAN-PRB masih seperti media informasi atau daftar aktivitas kegiatan PRB yang dilakukan berbagai lembaga dan belum menjadi sarana kolaborasi atau integrasi program/kegiatan PRB antarlembaga;
- (6). Konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan secara umum telah konsisten. Namun, ada beberapa para pihak yang kurang berperan aktif, dan ada juga yang sangat aktif, yang meskipun tidak tercantum dalam RAN-PRB, tetapi melaksanakan kegiatan;
- (7). Kurangnya dukungan di bidang pengembangan *science, engineering*, dan manajemen risiko kebencanaan (terutama pada pengembangan peta *hazard* nasional, *risk assessment*, dan *action planning*);
- (8). Beberapa para pihak tidak merujuk kepada RAN-PRB, tetapi memiliki dasar yang kuat dalam melaksanakan PRB.
- (9). Untuk memperoleh pemetaan persandingan antara kebijakan PRB dengan berbagai perencanaan dan penganggaran pada instansi kementerian/lembaga dan Donor/NGO dapat diperhatikan pada 3 tabel berikut ini;

Tabel 5.1. Alokasi Program PRB dalam RKP

Tahun	Prioritas Nasional dan Fokus Kegiatan	Budget (Juta Rp)
<b>RKP 2007</b>	Prioritas VII: Mitigasi dan PB (Fokus 3,4 dan 5)	221,80
<b>RKP 2008</b>	Prioritas VIII: PB, PRB, dan Penanggulangan Penyakit (Fokus 2,3 dan 4)	1.433,00
<b>RKP 2009</b>	Prioritas II: Percepatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Ketangguhan Ekonomi yang Didukung oleh Pengembangan Pertanian (Fokus 5)	1.736,40

Sumber : Diolah dari RKP 2007-2009 oleh Tim P3B Bappenas, 2009

Tabel 5.2. Persandingan Usulan Program RAN-PRB 2006-2009 dengan Alokasi Anggaran Pemerintah

No	PROGRAM UTAMA RAN-PRB	2007		2008		2009	
		Usulan	Alokasi	Usulan	Alokasi	Usulan	Alokasi
1.	Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini	2,290.30	76,650.20	2,131.26	65,460.53	3,186.18	120,075.62
2.	Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini	79,108.04	85,218.99	62,306.33	79,781.69	66,605.76	74,970.91
3.	Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat	2,199.40	19,497.30	2,502.10	30,564.36	3,649.33	16,201.69
4.	Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana	127,385.93	127,385.93	93,161.39	93,161.39	47,855.40	47,855.40
5.	Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respon yang dilakukan lebih efektif	138,564.14	2,176,622.12	128,177.11	518,235.07	38,867.49	441,735.77
	<b>Total</b>	<b>349,547.82</b>	<b>2,485,374.56</b>	<b>288,278.20</b>	<b>787,837.76</b>	<b>160,164.17</b>	<b>700,839.42</b>

Sumber : Diolah dari berbagai data para pihak oleh Tim P3B Bappenas, 2009

Tabel 5.3. Persandingan Usulan Program RAN-PRB 2006-2009 dengan Kontribusi Donor/NGO

NO	PROGRAM UTAMA RAN-PRB	2007		2008		2009	
		Usulan	Alokasi	Usulan	Alokasi	Usulan	Alokasi
1.	Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini	-	212,587.22	3,000.00	25,314.18	-	73,901.06
2.	Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini	-	2,500.00	16,500.00	34,015.30	-	36,450.00
3.	Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat	7,400.00	33,600.00	4,630.00	34,630.00	59,400.00	59,400.00
4.	Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana	-	-	-	-	-	-
5.	Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yang dilakukan lebih efektif	2,000.00	182,441.14	18,771.72	22,522.29	-	--
	<b>Total</b>	<b>9,400.00</b>	<b>431,128.36</b>	<b>32,901.72</b>	<b>116,481.77</b>	<b>59,400.00</b>	<b>169,751.06</b>

Sumber : Diolah dari berbagai data para pihak oleh Tim P3B Bappenas, 2009

### 5.2.2. Koordinasi

- (1). Pemetaan koordinasi pelaksanaan bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan RAN-PRB dapat dikelompokkan ke dalam dua kuadran, yaitu berkomitmen dan melaksanakan kegiatan PRB, serta berkomitmen dan tidak melaksanakan kegiatan PRB;
- (2). Mekanisme koordinasi yang baik telah menghasilkan pelaksanaan kegiatan PRB yang saling mendukung, melengkapi, dan menghindari terjadinya tumpang tindih program/kegiatan PRB antarpara pihak.

### 5.2.3. Kapasitas

- (1). **Kapasitas Kelembagaan.** Dalam kurun waktu tahun 2007-2009, masih sangat sedikit para pihak yang fokus dalam melaksanakan kegiatan PRB. Terdapat keberagaman aturan, mekanisme, dan tindak lanjut dalam menyusun perencanaan sampai pelaksanaan. Beberapa K/L memiliki unit khusus atau struktur yang menangani kegiatan PRB, tetapi ada K/L yang tidak memiliki unit khusus atau struktur pelaksanaan kegiatan PRB;
- (2). **Kapasitas SDM.** Hasil evaluasi menunjukkan masih terbatasnya kapasitas SDM baik secara kuantitas maupun secara kualitas. SDM pada tingkat K/L dan Pemda yang menangani kegiatan PRB hanya mengandalkan yang ada di unit khusus/struktural. Pada donor/komunitas internasional/NGO berperan secara variatif seperti unit khusus, koordinator, dan *implementing agency*. SDM di perguruan tinggi lebih banyak mengandalkan kepada tenaga-tenaga pengajar/dosen yang latar belakangnya terdiri dari berbagai disiplin keilmuan;
- (3). **Kapasitas Pendanaan.** Keterbatasan kemampuan pendanaan dari berbagai para pihak menyebabkan minimnya kegiatan PRB yang dilaksanakan dengan sumber pendanaan K/L yang berasal dari APBN dan PHLN. Sumber pendanaan donor/komunitas internasional/NGO berasal dari dana internal dan mengupayakan bantuan dana dari sumber lain. Sumber pendanaan perguruan tinggi sangat mengandalkan pada kerja sama dan bantuan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama untuk melaksanakan kegiatan PRB. Pendanaan untuk pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh Pemda berasal dari APBN, APBD maupun kerja sama dengan pihak-pihak lainnya. Pada anggaran APBD, belum ada nomenklatur untuk kegiatan PRB, tetapi secara substansi program/kegiatan dalam APBD sudah terakomodasi.

### 5.2.4. Konsultasi

- (1). Media partisipasi masyarakat dilaksanakan melalui forum pertemuan yang diadakan untuk mengakomodasi permasalahan dan pengawasan. Terdapat fasilitasi pendampingan yang dilakukan oleh para pihak dalam melaksanakan RAN-PRB, misalnya dalam penyusunan rencana kontijensi;
- (2). Adanya ketersediaan akses informasi dan kemudahan akses informasi publik dalam mendukung PRB melalui media elektronik dan cetak seperti, film, video, radio, TV, buku,

brosur, pamflet, *leaflet*, dan stiker. Selain itu, melalui *website* dan internet. Banyak kegiatan teknis yang dipergunakan untuk menyebarkan PRB melalui seminar, konferensi, sosialisasi, dialog publik, *workshop* dan bentuk kegiatan lainnya.

#### 5.2.5. Keberlanjutan

- (1). Untuk mendukung kesinambungan kebijakan pelaksanaan program/kegiatan pengurangan risiko bencana pasca tahun 2009, pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010. Prioritas yang mendukung kepada kebijakan PRB mengacu pada prioritas lima RKP Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim. Kebijakan ini merupakan landasan perencanaan tahunan yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai arahan kebijakan pembangunan;
- (2). Seiring dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, maka pemerintah telah mempersiapkan rancangan RPJMN 2010-2014. Di dalam konsep kebijakan ini diusulkan pengutamaan arah kebijakan yang terkait dengan isu pengurangan risiko bencana. Kerangka kebijakan ini sangat penting dan strategis bagi penanganan kebencanaan di Indonesia khususnya sebagai payung kebijakan pengurangan risiko bencana.

### 5.3. KEBERHASILAN DAN KEKURANGAN

Hasil evaluasi pelaksanaan RAN-PRB, terlihat adanya keberhasilan dan kekurangan.

#### 5.3.1. Keberhasilan

Beberapa hal yang sudah dicapai dari hasil kegiatan pelaksanaan evaluasi RAN-PRB 2006-2009 adalah sebagai berikut :

- (1). Upaya yang dilakukan dalam rangka penyusunan RAN-PRB menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dalam meresponss komitmen global terkait dengan pengurangan risiko bencana;
- (2). Manfaat yang diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan RAN-PRB, yaitu laporan yang tajam, teliti, komprehensif, menunjukkan komitmen kuat pemerintah yang serius dengan adanya RAN-PRB. Selain itu, memberikan *feedback* kepada pihak-pihak yang berkepentingan, memungkinkan perbaikan

dan *updating* RAN-PRB periode berjalan dan pijakan bagi RAN-PRB selanjutnya. Mengupayakan untuk mengadvokasi bahwa PRB adalah urusan bersama;

- (3). Aspek analisis dalam kegiatan evaluasi RAN-PRB dengan menggunakan aspek konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan dalam evaluasi RAN-PRB dinilai sangat menarik dari lensa pemerintah sebagai regulator dan fasilitator;
- (4). Membuat perencanaan merupakan sesuatu hal yang sulit, tetapi lebih sulit lagi membuat evaluasi seperti yang telah dilakukan terhadap RAN-PRB. Bappenas sebagai lembaga perencana sudah baik membuat RAN-PRB ini. Bappenas harus mendorong agar RAN-PRB mempunyai produk hukum yang kuat dengan melibatkan para pihak yang lebih nyata;
- (5). Adanya harapan yang cukup banyak dari para akademisi supaya perguruan tinggi dapat dijadikan mitra yang potensial bersama pemangku kepentingan lainnya dalam PRB;
- (6). Dengan adanya RAN-PRB berarti sudah ada pemetaan kegiatan. Daftar kegiatan yang tercantum dalam RAN-PRB disandingkan dengan implementasi pada setiap para pihak maka dapat dinilai bagus dan sudah dijelaskan dalam dokumen evaluasi RAN-PRB;
- (7). Dokumen evaluasi sudah memenuhi criteria HFA, dan hal ini bisa dikaji-silang. Hasil evaluasi HFA yang disusun dapat juga ditambahkan ke dalam dokumen evaluasi RAN-PRB;
- (8). Setelah dilakukan evaluasi RAN-PRB ini ada refleksi keberhasilan terhadap implementasi kebijakan RAN-PRB;
- (9). Dalam evaluasi dapat dilakukan ekstrapolasi terhadap peristiwa bencana, misalnya jika tsunami terjadi lagi di Aceh, maka apakah korbannya berkurang dibandingkan tahun 2004. Analisis ekstrapolasi ini dapat ditambahkan ke dalam pelaksanaan evaluasi RAN-PRB;
- (10). Pelibatan para pihak sudah banyak untuk isu pengurangan risiko bencana. Untuk RAN-PRB banyak dibantu beberapa donor terkait. Untuk RAN-PRB harus dioptimalkan dari berbagai sumber dana;
- (11). Instrumen pemerintah dalam rangka kebijakan pengurangan risiko bencana berdasarkan kepada RPJMN yang merupakan milik bersama;
- (12). Platform Nasional dapat menjadi Komite Pengarah yang berfungsi untuk membahas dan menyusun RAN-PRB.



### 5.3.2. Kekurangan

Kekurangan yang masih ada dari proses pelaksanaan kegiatan evaluasi RAN-PRB dapat digambarkan sebagai berikut :

- (1). Pada saat penyusunan RAN-PRB 2006-2009, belum terdapat payung hukum atau kerangka regulasi yang menjadi landasan dalam proses penyusunan tersebut;
- (2). Di dalam dokumen RAN-PRB 2006-2009 masih tampak hanya daftar-daftar kegiatan pengurangan risiko bencana yang berasal dari berbagai para pihak;
- (3). Antara evaluasi RAN-PRB terdahulu dengan HFA *reporting* menunjukkan, tidak adanya kaitan antara laporan kemajuan dan kendala pelaksanaan HFA. Sedangkan hasil HFA *report* bisa dimasukkan untuk menggambarkan kondisi masing-masing subprioritas;
- (4). Dilihat dari metodologinya, disarankan agar evaluasi RAN-PRB ini tidak saja fokus kepada kegiatan yang tercantum di dalam RAN-PRB, melainkan pada dampaknya di masyarakat. Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan RAN-PRB tahun ini masih belum menjangkau pada aspek dampak karena pelaksanaan kegiatan evaluasi pengurangan risiko bencana masih terus berjalan sesuai dengan kerangka waktu RAN-PRB 2006-2009. Dokumen evaluasi RAN-PRB ini pada prinsipnya belum sampai pada dampak tingkatan. Evaluasi dampak terhadap masyarakat memang sulit dilaksanakan untuk tingkat nasional perlu indikator perkiraan;
- (5). Masyarakat memiliki agenda atau kegiatan untuk melihat risiko bencana di daerahnya, tetapi hal ini tidak tercantum di dalam dokumen evaluasi RAN-PRB;

## 5.4 . REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan deskripsi hasil evaluasi dapat dirumuskan beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut baik yang bersifat umum maupun khusus.

### 5.4.1. Beberapa Rekomendasi Umum

Terdapat beberapa rekomendasi yang bersifat umum dari hasil evaluasi RAN-PRB antara lain :

- (1). Hendaknya RAN-PRB menjadi dokumen strategis dan menjadi basis perencanaan bagi para pihak dalam melakukan penyusunan kegiatan pengurangan risiko bencana serta penyusunan kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat

- maupun di daerah. Dengan demikian, dokumen tersebut dapat dijadikan barometer dalam mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan pengurangan risiko bencana;
- (2). Dokumen RAN-PRB dirasakan masih perlu menjabarkan lebih dalam tentang risiko bencana secara nasional yang dihadapi, kemudian disusun prioritas program/kegiatan serta tidak hanya menulis ulang HFA sehingga para pihak dapat menyesuaikan tidak hanya merupakan daftar kegiatan dan komitmen;
  - (3). Pembentukan *National Platform* hendaknya dapat dilakukan melalui proses yang partisipatif dan konsultatif dengan melibatkan berbagai lapisan para pihak antara lain K/L, donor/komunitas internasional/NGO, perguruan tinggi, pemerintah daerah, media massa, sektor swasta serta kelompok-kelompok sosial lainnya yang mempunyai komitmen dan perhatian terhadap isu pengurangan risiko bencana di Indonesia;
  - (4). Hendaknya *National Platform* dapat menjadi Komite Pengarah yang berfungsi untuk membahas dan menyusun RAN-PRB sehingga nantinya RAN-PRB itu merupakan subsistem RPB;
  - (5). Mendorong terbentuknya pelebagaan evaluasi yang dibentuk secara khusus pada masing-masing para pihak pelaksana RAN-PRB sehingga mendorong para pihak untuk 'mengisi' RAN di samping juga ikut melakukan 'self-evaluation' dengan merujuk pada laporan evaluasi ini;
  - (6). Mendukung untuk penggunaan metodologi *impact* dan *stock opname* yang dilakukan melalui sensus pada evaluasi RAN-PRB berikutnya sehingga hasil yang didapatkan tidak hanya fokus pada kegiatan yang tercantum dalam dokumen RAN-PRB melainkan pada dampaknya yang ada di masyarakat luas;
  - (7). Pentingnya penetapan Hari Penanggulangan Bencana di Indonesia, seperti penetapan 26 Desember sebagai Hari Kesiapsiagaan Tsunami sehingga akan semakin rutinnya dilaksanakan kegiatan PRB dalam masyarakat;
  - (8). Hendaknya RAN-PRB 2010-2012 merupakan turunan dari RPB dan menjadi rujukan utama bagi para pihak dalam melaksanakan kegiatan PRB;
  - (9). Pelaksana program/kegiatan pengurangan risiko bencana di Indonesia terdiri dari berbagai para pihak, antara lain, kementerian/lembaga, donor/komunitas internasional, NGO, perguruan tinggi, media massa dan korporat. Secara umum dan proritas, pemetaan aktor pelaku pengurangan risiko bencana dapat digambarkan, pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4. Pemetaan Peran Pelaku Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia

Kementerian/ Lembaga	Donor/ Komunitas Internasional	NGO	Perguruan tinggi	Media Massa	Korporat
Membuat dan memfasilitasi berbagai kerangka kebijakan dan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan PRB di Indonesia sehingga dapat dijadikan sebagai arahan strategis bagi semua para pihak	Mendorong peran dan kiprah dunia internasional dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan PRB di Indonesia sehingga dapat diperoleh akses dan membangun kerja sama yang sinergis pada tingkat global	Mengawal dan melakukan pendampingan pelaksanaan program/kegiatan PRB sampai pada tingkat bawah melalui pendekatan berbasis masyarakat	Mengembangkan kajian akademis dari berbagai disiplin keilmuan terhadap program/kegiatan PRB	Melakukan penyebarluasan informasi mengenai program/kegiatan PRB secara masif dan terstruktur kepada seluruh lapisan sosial	Mendukung kebijakan PRB melalui program perusahaan yang dialokasikan dari keuntungan, seperti keberadaan program CSR

#### 5.4.2. Rekomendasi Berdasarkan Prioritas

Terdapat beberapa rekomendasi yang didasarkan pada hasil evaluasi RAN-PRB, yaitu :

##### 1. Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat.

- (1). Diperlukannya percepatan penyusunan kebijakan turunan dan pedoman teknis yang merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PRB;
- (2). Perlu memasukkan urusan penanggulangan bencana menjadi urusan wajib bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah agar konsisten dengan Undang-undang PB. Segera merumuskan pedoman, ketentuan-ketentuan/persyaratan teknis, SNI secara kelembagaan untuk proses PRB oleh daerah, serta sosialisasinya ke daerah untuk realisasi Undang-undang PB;
- (3). Perlunya keseriusan K/L dalam mengintegrasikan program/kegiatan PRB ke dalam salah satu prioritas kebijakan kelembagaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- (4). Mendorong komitmen donor/komunitas internasional/ NGO dalam perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PRB dengan memperhatikan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional;

- (5). Meningkatkan kemampuan aparaturnya pemerintah dalam penyusunan program/kegiatan PRB pada masing-masing instansi melalui beberapa bentuk kegiatan antara lain, pelatihan manajemen bencana, pengolahan data bencana, TOT serta mendirikan program studi lanjut atau pascasarjana mitigasi/manajemen bencana dan menjadikan kegiatan mitigasi/manajemen bencana sebagai profesi yang setara dan lain sebagainya;
- (6). Pentingnya Rencana Penanggulangan Bencana yang berupa rencana induk dengan landasan regulasi yang kuat, dapat menjadi acuan program/kegiatan PRB termasuk oleh lembaga BPBD di daerah;
- (7). Perlu dirintis suatu proses/mechanisme kontrol dan jaminan kualitas terhadap aktivitas komponen-komponen dalam PRB secara lebih profesional karena PRB merupakan suatu investasi;
- (8). Pentingnya penyelenggaraan kegiatan PRB yang berbasis masyarakat secara berkelanjutan dan berkesinambungan, misalnya kelompok kerja masyarakat dan kelompok belajar masyarakat;
- (9). Perlu disusun panduan dalam penyusunan RAD-PRB seperti halnya rencana tata ruang wilayah dalam rangka menunjukkan tingkat komitmen dan perencanaan antara pusat dan daerah.

## **2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini.**

- (1). Meningkatkan penguasaan pengembangan aplikasi pengkajian risiko bencana pada seluruh para pihak di tingkat pusat dan daerah melalui riset secara terpadu untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- (2). Percepatan terhadap proses pelaksanaan agar setiap daerah melakukan kajian risiko dan menyusun DRRMP sesuai arahan dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007;
- (3). Mengembangkan inovasi dan mengintensifkan kegiatan pengembangan dan pengenalan terhadap berbagai sistem peringatan dini yang berbasis teknologi tepat guna dalam rangka kesiapsiagaan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam menghadapi bencana di tingkat nasional dan lokal;
- (4). Mengoptimalkan kegiatan pemetaan dan sosialisasi program/kegiatan RAN-PRB terutama pada daerah rawan bencana;
- (5). Meningkatkan peran BNPB dalam analisis risiko bencana

dan perlunya segera menyusun pedoman yang tepat untuk analisis risiko bencana, karena pemangku kepentingan lainnya (K/L, donor/NGO, perguruan tinggi, dan masyarakat) menggunakan metodologi yang berbeda-beda;

- (6). Meningkatkan profesionalisme dan penguatan kapasitas aparatur di tingkat pusat dan daerah dalam pengelolaan sistem peringatan dini ;
- (7). Perlunya pelaksanaan standardisasi yang dilakukan para pihak terhadap sistem evakuasi yang aman, identifikasi jalur penyelamatan, pelatihan dan dilengkapi dengan simulasi dalam menghadapi risiko regional darurat;
- (8). Perlunya prioritas dalam pengembangan peringatan bencana seperti peta rawan bencana sebagai acuan secara nasional dan dikembangkan secara terintegrasi dengan mengintegrasikan komponen-komponen/data yang ada di berbagai K/L untuk menjadi input dasar bagi daerah dalam pengembangan peta risiko bencana di daerah. Hal ini merupakan konsensus nasional;
- (9). Pentingnya keberadaan koordinator secara nasional untuk berbagai kegiatan yang memerlukan dukungan dari berbagai K/L. Pembentukan Komite Teknis Nasional dalam penyusunan pedoman, contohnya Tim Penyusun Pedoman Analisis Risiko Bencana Alam (TPPARBA). Perlu TC lainnya seperti, Peta Rawan Bencana, *Building Codes*, serta pedoman-pedoman atau ketentuan-ketentuan teknis lainnya sehingga instansi terkait di K/L dapat terus berkoordinasi untuk pelaksanaan berbagai program/kegiatan RAN-PRB yang sudah dirumuskan dalam rangka identifikasi risiko bencana;
- (10). Perlunya penerapan dan peningkatan ilmu dan teknologi kajian risiko untuk berbagai elemen atas risiko dengan karakteristik yang spesifik dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pemetaan risiko.

### **3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat.**

- (1). Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terhadap aparatur dan masyarakat dalam merespons dan memahami aplikasi teknologi informasi terhadap risiko bencana;
- (2). Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk pengurangan risiko bencana melalui pelatihan dan pendidikan yang lebih terarah dan terstruktur;

- (3). Menciptakan variasi dalam pendidikan publik tentang risiko bencana melalui peta maupun pengembangan data dan informasi bencana untuk mengetahui grafik perkembangan bencana;
- (4). Pengarusutamaan PRB ke dalam pendidikan formal dan nonformal melalui formulasi kurikulum pendidikan sesuai dengan karakteristik multidisiplin ilmu dan lokalitas daerah masing-masing;
- (5). Banyaknya harapan dari para akademisi supaya perguruan tinggi dapat dijadikan mitra yang potensial bersama pemangku kepentingan lainnya dalam PRB;
- (6). Perguruan tinggi di daerah perlu didorong untuk melakukan analisis risiko bencana sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Analisis risiko bencana sebaiknya dibuat oleh orang yang kompeten yaitu dari akademisi perguruan tinggi;
- (7). Perlu didukung beberapa hal dalam rangka penguatan kelembagaan di bidang pendidikan antara lain, di perguruan tinggi pada jenjang S2 diperlukan mata kuliah mengenai kebencanaan. Adanya asosiasi profesi di daerah yang akan mengembangkan teknologi penilaian risiko di daerahnya masing-masing. Hal ini harus dimulai dari sekarang karena hasilnya akan terlihat pada beberapa tahun ke depan;
- (8). Mengembangkan kegiatan-kegiatan pengkajian dan penelitian yang berbasis pengurangan risiko bencana melalui pembentukan lembaga riset kebencanaan di Indonesia;
- (9). Meningkatkan kepedulian publik terhadap isu pengurangan risiko bencana melalui keterlibatan media massa dalam rangka penyebaran pemahaman dan pengetahuan publik terhadap penanganan dan penanggulangan bencana di Indonesia.

#### **4. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana**

- (1). Mempercepat penyusunan dokumen strategi nasional dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara nasional pada kawasan rawan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (2). Perlunya upaya-upaya strategis penguatan kapasitas dalam meminimalkan dampak, membangun cadangan pangan, penganekaragaman sumber produksi, penganekaragaman sumber pemasukan, membangun jaringan dukungan sosial

serta adaptasi pascakejadian;

- (3). Pengarusutamaan konsep pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan program-program pemerintah, pembangunan daerah dan masyarakat, seperti RPJMD, RKPD, RTRW, di tingkat provinsi/kabupaten/kota, peraturan-peraturan, *building codes*, pedoman, atau Manual Perencanaan dan Pelaksanaan Bangunan Tahan Gempa;
- (4). Meningkatkan mekanisme pengawasan pelaksanaan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang, *building codes*, dan hal-hal lain yang mengacu pada pengurangan risiko bencana;
- (5). Mengkaji ulang tata ruang berbasis risiko bencana setelah dilakukan kegiatan kajian risiko, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis ancaman dan risiko ;
- (6). Secara spesifik perlunya prioritas terhadap bangunan publik (rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya) yang aman terhadap berbagai bahaya (gempa, tsunami, dan lain sebagainya).

**5. Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yang dilakukan lebih efektif**

- (1). Meningkatkan kapasitas kepemimpinan lokal, serta meningkatkan kesadaran publik dan kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan, gladi tsunami, rencana kontijensi, kegiatan CBDRM, kesiapsiagaan melalui pengetahuan dan menyiapkan rumah tahan gempa, dan lain sebagainya;
- (2). Meningkatkan koordinasi antarperangkat pemerintah daerah dalam menangani bencana lintas daerah melalui kesepakatan atau kerja sama penanganan bencana antar daerah serta standardisasi kapasitas teknis para pelaku tanggap darurat melalui kerja sama dengan pusat operasional daerah-daerah rawan bencana;
- (3). Perlu sosialisasi yang terkoordinasi dan komunikasi risiko secara lebih intensif untuk keperluan perumusan rencana aksi kesiapsiagaan dan respons darurat yang lebih efektif di daerah untuk instansi pemerintah dan komunitas terkait;
- (4). Pemerintah provinsi/kabupaten/kota perlu melibatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di setiap tingkatan;

- (5). Perlunya membentuk dan mengoperasionalkan *platform* atau forum pengurangan risiko bencana baik di pusat maupun daerah yang mendampingi pelaksanaan rencana aksi;
- (6). Perlunya mekanisme khusus untuk penyaluran dana pada tahap tanggap darurat untuk menghindari keterlambatan dan adanya kesalahan prosedur;
- (7). Meningkatkan kesiapsiagaan dengan cara membangun institusi kelembagaan penanganan bencana di tingkat daerah dan peningkatan SDM.







# **BAB 6**

## **RENCANA AKSI**

### **PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

#### **6.1. PRIORITAS PENANGANAN BERDASARKAN HASIL ANALISIS RISIKO BENCANA**

Prioritas penanganan ancaman bencana dalam RAN-PRB 2010-2012 ini didasarkan atas penanganan bencana yang telah dilakukan selama ini dan perkiraan ancaman bencana berdasarkan hasil analisis risiko bencana. Analisis risiko tersebut merupakan analisis yang didasarkan pada analisis *hazard*/ancaman, kerentanan dan kemampuan menangani bencana/kapasitas. Selanjutnya analisis ini akan memberikan gambaran atas kemungkinan terjadinya bencana pada beberapa tahun yang akan datang di Indonesia, terutama untuk tiga tahun ke depan.

Berdasarkan penanganan bencana yang telah dilakukan selama ini dan hasil analisis risiko bencana tersebut, beberapa ancaman bencana yang dominan di Indonesia, yaitu :

- (1). Gempa bumi dan tsunami;
- (2). Banjir;
- (3). Tanah longsor/gerakan tanah;
- (4). Letusan gunung api; dan
- (5). Kekeringan/kebakaran hutan.

#### **6.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN PRIORITAS, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pendekatan penyusunan RAN-PRB 2010-2012 dikaitkan terhadap prioritas yang tercantum di HFA serta program dan kegiatan yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007.

##### **1. Kelompok Prioritas**

Kelompok prioritas yang dimaksud adalah lima prioritas aksi yang terdapat dalam *Hyogo Framework for Action* (HFA) atau Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015 tentang Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana. Adapun lima prioritas aksi tersebut adalah :

- (1). Pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah serta penguatan kelembagaan;

- (2). Identifikasi, pengkajian dan pemantauan risiko bencana serta penerapan sistem peringatan dini;
- (3). Pemanfaatan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan;
- (4). Pengurangan faktor-faktor penyebab risiko bencana;
- (5). Penguatan kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat.

Kelompok prioritas ini selanjutnya akan menjadi acuan dari program.

## 2. Program

Program-program yang terdapat dalam matriks RAN-PRB 2010-2012 merupakan program-program yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Adapun program-program tersebut adalah:

- (1). Penguatan peraturan perundangan dan kapasitas kelembagaan;
- (2). Perencanaan penanggulangan bencana;
- (3). Penelitian, pendidikan dan pelatihan;
- (4). Peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;
- (5). Pencegahan dan mitigasi bencana;
- (6). Peringatan dini;
- (7). Kesiapsiagaan.

## 3. Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam matriks RAN-PRB 2010-2012 juga merupakan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

- (1). Melakukan koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya;
- (2). Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- (3). Melakukan analisis risiko bencana;
- (4). Identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana;
- (5). Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan;
- (6). Pengamatan gejala bencana;
- (7). Melakukan analisis hasil pengamatan gejala bencana;

- (8). Pengambilan keputusan status ancaman bencana;
- (9). Penyebarluasan informasi peringatan bencana;
- (10). Pelaksanaan tindakan terhadap ancaman bencana;
- (11). Pengembangan budaya sadar bencana;
- (12). Pemantauan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber bencana;
- (13). Penyelenggaraan penyuluhan, dan diklat;
- (14). Pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- (15). Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan PB;
- (16). Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- (17). Melakukan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan SDA yang berpotensi menimbulkan bencana;
- (18). Pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang;
- (19). Pengelolaan lingkungan hidup;
- (20). Pengaturan pembangunan dan tata bangunan;
- (21). Pembangunan sarana dan prasarana;
- (22). Peningkatan pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- (23). Perencanaan keterlibatan dalam PB;
- (24). Peningkatan komitmen terhadap pelaku PB;
- (25). Penguatan ketahanan sosial masyarakat;
- (26). Penyusunan mekanisme kesiapan dan PRB;
- (27). Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- (28). Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- (29). Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- (30). Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat;
- (31). Penyiapan lokasi evakuasi;
- (32). Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- (33). Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Komponen/kolom matriks RAN-PRB 2010-2012 terdiri dari kelompok prioritas, program, kegiatan, sasaran, lokasi, pendanaan, dan pelaksana/koordinator.

### 6.3. RAN-PRB 2010-2012

RAN-PRB 2010-2012 ini merupakan gambaran secara menyeluruh rencana aksi dari semua para pihak, baik pemerintah, NGO/LSM, masyarakat internasional, PMI, media maupun swasta. RAN-PRB 2010-2012 disajikan dalam bentuk matriks dengan delapan kolom, yaitu:

- (1). Nomor;
- (2). Kegiatan;
- (3). Sasaran;
- (4). Lokasi;
- (5). Indikator kinerja;
- (6). Pendanaan;
- (7). Sumber Pendanaan;
- (8). Pelaksana.

Kolom-kolom di atas merupakan penjabaran dari 5 (lima) prioritas HFA dan 7 (tujuh) program yang mengacu kepada Kerangka Aksi Hyogo dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007,

Tabel 6.1. Penjelasan Matriks RAN-PRB

Nomor Kolom	PENJELASAN
1	Nomor Nomor menunjukkan jumlah kegiatan dalam satu program
2	Kegiatan Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang juga didasarkan atas UU 24/2007 dan PP 21/2008 serta kelompok prioritas HFA
3	Sasaran Sasaran merupakan perolehan yang diharapkan dari setiap program dan setiap kegiatan.
4	Lokasi Lokasi menunjukkan tempat di mana akan dilaksanakan suatu kegiatan (provinsi/kabupaten/kota)
5	Indikator Kinerja Hasil diperoleh dari setiap program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang direncanakan
6	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Anggaran kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2010, 2011, 2012 secara indikatif
7	Sumber Pendanaan Sumber pendanaan menjelaskan anggaran kegiatan berasal dari APBN atau sumber pendanaan lainnya (hibah, loan, masyarakat).
8	Pelaksana Instansi yang melaksanakan kegiatan (kementerian/lembaga, LSM, swasta, media, universitas dan masyarakat)

RAN-PRB 2010-2012 ini disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi terhadap tiga kelompok para pihak pengurangan risiko bencana yang dikoordinasikan oleh :

- (1). Bappenas dan BNPB untuk kelompok kementerian/lembaga;
- (2). Convergence Group untuk kelompok donor internasional; dan
- (3). *Platform* Nasional untuk kelompok nonpemerintah.

RAN-PRB 2010-2012 dalam bentuk matriks secara lengkap disajikan pada Lampiran 2.

Ringkasan (intisari) RAN-PRB 2010-2012, dapat diinformasikan sebagai berikut :

- (1) Jumlah kegiatan yang terdapat dalam RAN-PRB 2010-2012 adalah 654 kegiatan, dengan usulan pendanaan untuk 2010 sebesar Rp 16,427 triliun, untuk 2011 sejumlah Rp 11,753 triliun dan Rp 12,599 triliun pada 2012;
- (2) Kegiatan yang paling banyak dilakukan dengan 68 kegiatan adalah penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan, dengan total biaya pada 2010 sebesar Rp 267,257 miliar; 2011 sebesar Rp 327,578 miliar dan Rp 346,750 miliar untuk 2012. Bisa dimengerti bahwa urusan pengurangan risiko saat ini belum tersosialisasi baik, sehingga penyebaran informasi dan peningkatan kapasitas serta kemampuan menjadi sebuah prioritas. Hal ini relevan dengan rekomendasi evaluasi HFA di mana sosialisasi PRB dan peningkatan kapasitas menjadi sangat penting;
- (3) Kegiatan yang paling sedikit dilaksanakan dengan tiga kegiatan adalah pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang dan penyiapan lokasi evakuasi;
- (4) Usulan pendanaan untuk kegiatan nonfisik atau bersifat umum lebih besar dari kegiatan fisik, namun demikian dari matriks tersebut menggambarkan bahwa ada semangat untuk meletakkan pengurangan risiko dalam berbagai kegiatan para pihak. Hal ini merupakan kemajuan yang sangat baik bila di lihat dari jumlah para pihak yang terlibat pada RAN-PRB 2006-2009 dan sekaligus komitmen para pihak untuk meletakkan investasi dalam PRB yang cukup besar.

Rekapitulasi kegiatan RAN-PRB 2010-2012 dapat dilihat dalam Tabel 6.2.

Tabel 6.2. Rekapitulasi Kegiatan RAN-PRB 2010-2012

No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Koordinasi
			Th 2010	Th 2011	Th 2012	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
<b>PRIORITAS 1 : PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>						
<b>Program A : Penguatan Peraturan perundangan dan Kapasitas Kelembagaan</b>						
1	Melakukan koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya	60	204,463	393,458	255,261	BNPB, BAPPENAS, KEMDAGRI
<b>Program B: Perencanaan penanggulangan bencana</b>						
1	Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana	18	37,681	36,635	42,450	BNPB, BPPT, LIPI, KESDM, Kem. PU
2	Melakukan analisis risiko bencana	26	38,657	45,400	52,866	BNPB, KLH, LIPI, KEMDAGRI, KESDM.
3	Identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana	11	46,966	53,844	59,164	BNPB, Kem. Kelautan & Perikanan, LIPI, KEMDAGRI, Kem. Kehutanan, KESDM, Kem.PU
4	Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan	39	41,687	37,078	38,792	BNPB, BAPPENAS, KEMDAGRI, Kem. Keuangan
			<b>164,991</b>	<b>172,956</b>	<b>193,272</b>	
<b>PRIORITAS 2: PEMANFAATAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b>						
<b>Program C : Penelitian, Pendidikan, dan pelatihan</b>						
1	Pengembangan budaya sadar bencana	22	63,482	75,182	83,310	BNPB, Kem.Sosial, Kem. Diknas, LIPI, Kem. Kesehatan, Kem. Kominfo
2	Pemantauan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber bencana	10	53,425	62,455	71,785	BNPB, BMKG, LIPI, BPPT, Kem. Ristek,
3	Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan	68	267,257	327,578	346,750	BNPB, Kem. Diknas, Kem. Sosial, Kem. Kominfo
			<b>384,165</b>	<b>465,215</b>	<b>502,345</b>	



No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Koordinasi
			Th 2010	Th 2011	Th 2012	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
<b>PRIORITAS 3 : PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>						
<b>Program D: Pencegahan dan Mitigasi Bencana</b>						
1	Pengenalan dan pemantauan risiko bencana	22	723,693	730,563	739,395	BNPB, BMKG, KESDM, KLH, Kem. Kelautan & Perikanan, LAPAN, Kem. PU
2	Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana	21	3,070,187	80,742	115,425	BNPB, Kem. PU, Kem. Kesehatan, KESDM, Kem. Kelautan & Perikanan
3	Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana	26	58,994	56,711	64,077	BNPB, BMKG, KESDM, LIPI, Kem. Ristek, Kem. Kehutanan, Kem. PU, Bakosurtanal, Kem. Kelautan & Perikanan
4	Melakukan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana	6	156,900	194,550	223,100	KLH, Kem. PU, Kem. Kehutanan, Kem. Pertanian
5	Pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang	3	61,000	72,000	84,000	Kem. PU, KEMDAGRI, BAPPENAS, Kem. Kehutanan
6	Pengelolaan lingkungan hidup	30	2,059,138	1,394,651	1,310,687	KLH, Kem. Kehutanan, KESDM, Kem. Pertanian
7	Pengaturan pembangunan dan tata bangunan	9	139,517	214,968	251,712	Kem. PU, KEMDAGRI
8	Pembangunan sarana dan prasarana	65	7,179,855	4,737,526	5,330,460	Kem. PU, Kem. Perhubungan, KESDM, Kem. Kehutanan, Kem. Pertanian, Kem. Kelautan & Perikanan, Kem. Kesehatan
			<b>13,449,283</b>	<b>7,481,712</b>	<b>8,118,856</b>	
<b>PRIORITAS 4 : IDENTIFIKASI, PENGKAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b>						
<b>Program E : Peringatan dini</b>						
1	Pengamatan gejala bencana	23	69,244	75,962	79,706	BNPB, Bakosurtanal, BMKG, BPPT, Kem. Kehutanan, KESDM, LAPAN, LIPI, KLH
2	Melakukan analisis hasil pengamatan gejala bencana	20	29,609	35,993	40,536	BNPB, Bapeten, BMKG, BPPT, LAPAN dan LIPI, KESDM

No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Koordinasi
			Th 2010	Th 2011	Th 2012	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
3	Pengambilan keputusan status ancaman bencana	4	28,500	34,100	39,200	BNPB, BMKG, KESDM, KEMDAGRI
4	Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana	38	92,724	97,825	108,533	BNPB, BMKG, KLH, Kem. Kominfo, LAPAN, KESDM, Kem.PU, Kem. Kelautan & Perikanan
5	Pelaksanaan tindakan terhadap ancaman bencana	6	60,265	72,515	84,515	BNPB, BMKG, KESDM, Kem.PU, Kem.Kesehatan, Kem.Kelautan & Perikanan, KEMDAGRI, Kem. Kehutanan
			<b>280,342</b>	<b>316,395</b>	<b>352,490</b>	
<b>PRIORITAS 5 : PENGUATAN KESIAPAN MENGHADAPI BENCANA PADA SEMUA TINGKATAN MASYARAKAT</b>						
<b>Program F : Peningkatan Partisipasi dan kapasitas Masyarakat dalam PRB</b>						
1	Peningkatan pemahaman tentang kerentanan masyarakat	20	42,321	38,292	48,707	BNPB, Kem. Sosial, KESDM, Kem. Diknas, LIPI, Kem.Kominfo, KEMDAGRI
2	Perencanaan keterlibatan dalam penanggulangan bencana	11	16,381	18,601	21,594	Kemenko Kesra, BNPB, Kem.Sosial, BAPPENAS, Kem. Pertahanan
3	Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana	20	33,697	35,914	39,617	Kemenko Kesra, BNPB, KEMDAGRI, Kem. Sosial, Kem. Kominfo, Kem
4	Penguatan ketahanan sosial masyarakat	15	81,207	82,282	84,115	Kemenko Kesra, Kem. Sosial, Kem. Pertanian, KEMDAGRI, BNPB
			<b>173,606</b>	<b>175,089</b>	<b>194,033</b>	
<b>Program G: kesiapsiagaan</b>						
1	Penyusunan mekanisme kesiapan dan penanggulangan risiko bencana	17	31,142	34,102	37,286	Kemenko Kesra, BNPB, KEMDAGRI
2	Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana	9	30,245	36,145	42,145	BNPB, KEMDAGRI, Kem. Sosial, Kem. Ristek, Kem. Kelautan & Perikanan, BPPT, KESDM

No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Koordinasi
			Th 2010	Th 2011	Th 2012	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
3	Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini	7	26,500	31,800	36,800	BNPB, BPPT, KESDM, BMKG, Kem. Ristek
4	Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar	8	250,198	299,477	350,510	Kemenko Kesra, BNPB, Kem. Sosial, Kem. Diknas, Kem. Kesehatan, KEMDAGRI, Kem. PU
5	Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat	7	246,596	294,200	339,200	BNPB, KEMDAGRI, Kem. Sosial, Kem. Pertahanan, KESDM, Kem. Kelautan & Perikanan, LIPI
6	Penyiapan lokasi evakuasi	3	675,500	1,438,171	1,450,171	BNPB, Kem. PU, Kem. Perhubungan, KESDM, Kem. Sosial, Kem. Kesehatan
7	Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana	6	200,100	240,100	280,100	BNPB, Kem. Pertahanan, Kem. Sosial, Kem. Kesehatan
8	Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana	4	405,514	480,814	560,900	BNPB, Kem. Sosial, Kem. PU, Kem. Pertahanan, Kem. Perhubungan
			1,865,795	2,854,810	3,097,112	
<b>TOTAL DANA</b>			<b>16,618,149</b>	<b>11,962,113</b>	<b>12,821,514</b>	

#### 6.4. PENGELOMPOKAN RENCANA AKSI NASIONAL PRB

RAN-PRB 2010-2012 antara lain dapat dikelompokkan berdasarkan pelaksanaannya yaitu Kementerian/Lembaga. Berdasarkan pengelompokan tersebut dapat diinformasikan sebagai berikut:

- (1). Jumlah kegiatan yang terdapat dalam RAN-PRB 2010-2012 yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga adalah 323 kegiatan, dengan usulan pendanaan untuk 2010 sebesar Rp 10,556 triliun; untuk 2011 sejumlah Rp 10,782 triliun dan Rp 11,835 triliun untuk 2012;

- (2). Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana merupakan program yang paling banyak dilaksanakan Kementerian/Lembaga di antara program lainnya, dengan 105 kegiatan. Usulan pendanaan untuk 2010 sebesar Rp 7,663 triliun, untuk 2011 sebesar Rp 6,665 triliun dan pada 2012 sebesar Rp 7,298 triliun;
- (3). Kegiatan yang paling sedikit dilaksanakan Kementerian/Lembaga dalam RAN-PRB 2010-2012 dengan 1 kegiatan saja adalah kegiatan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat dan kegiatan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
- (4). Beberapa K/L belum menentukan secara pasti lokasi kegiatan/wilayah dari rencana kegiatan yang diusulkannya termasuk beberapa kegiatan juga belum terdapat indikasi pendanaannya.

Seluruh kegiatan RAN-PRB 2010-2012 ini berdasarkan kementerian/ lembaga disajikan pada Lampiran 3.

## **6.5. MATRIKS KEGIATAN PRB YANG BELUM TERINDIKASI DANA DAN PELAKSANAANNYA**

Hasil evaluasi terhadap usulan kegiatan RAN-PRB yang disampaikan K/L, pemerintah daerah, LSM, dan kelompok donor, banyak kegiatan yang semestinya penting untuk dilaksanakan pada periode 2010-2012, tetapi belum diagendakan mengingat belum menjadi rencana strategis (renstra) dari masing-masing stakeholders tersebut. Untuk itu Sub Bab ini dimaksudkan menampung :

- (1). Usulan Pemerintah daerah terhadap kegiatan PRB di wilayahnya, yang belum terindikasikan oleh kementerian/ lembaga karena belum ada dalam Renstranya;
- (2). Hasil diskusi FGD baik dalam forum K/L, PLANAS, Convergence Group, maupun forum LSM lainnya terindikasi banyak kegiatan PRB yang semestinya dilakukan dalam periode 2010-2012 tetapi belum tercantum dalam matriks RAN-PRB 2010-2012.

Mengatasi dua kondisi diatas, maka diperlukan rencana aksi untuk mengakomodasikan kegiatan PRB yang belum terindikasi dana dan kegiatannya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ruang kepada semua para pihak, termasuk para donor untuk melaksanakan kegiatan tersebut apabila dianggap penting dan pendanaannya telah diperoleh.

Matriks RAN-PRB 2010-2012 untuk kegiatan tersebut selengkapnya disajikan pada Lampiran 4.









# **BAB 7**

## **PELAKSANAAN**

RAN-PRB 2010-2012 secara garis besar berisi prioritas penanganan, rencana aksi, mekanisme pelaksanaan, kelembagaan, indikator keberhasilan, pedoman pemantauan dan evaluasi serta sumber pendanaannya.

Dokumen ini menghasilkan rencana aksi pengurangan risiko bencana dari berbagai lembaga/instansi baik pemerintah maupun non-pemerintah yang terintegrasi dalam suatu matriks rencana aksi. Rencana ini bersinergi dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RTRW, perubahan iklim (RAN-PI), dan pengurangan kemiskinan (RAN-PK) dan lain-lain. RAN-PRB yang disusun dengan tujuan mendukung perumusan kebijakan dan pengawasan dalam pelaksanaan program pengurangan risiko, merupakan penjabaran rencana nasional penanggulangan bencana yang mengacu kepada RPJM dan Renstra dari masing-masing kementerian/lembaga.

### **7.1. MEKANISME**

RAN-PRB 2010-2012 disusun sebagai upaya memberikan komitmen dan pengurangan risiko di tingkat nasional, komitmen global dalam PRB sesuai dengan HFA 2005-2015 serta berbagai komitmen internasional lainnya.

Berikut adalah mekanisme pelaksanaannya:

- (1). RAN-PRB 2010-2012 merupakan satu kesatuan dengan Renas-PB yang memiliki jangka waktu lima tahun, sedangkan RAN-PRB merupakan dokumen teknis yang lebih operasional dan berjangka waktu tiga tahun;
- (2). Melalui koordinasi BNPB dan Bappenas setiap tahun, rencana tahunan RAN-PRB 2010-2012 dibuat. Selanjutnya dalam koordinasi sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana tahunan ini akan dimasukkan sebagai bagian dari RKP dan Rencana Kerja dari kementerian/lembaga yang terkait dengan program pengurangan risiko bencana. Rencana Kerja Pemerintah merupakan acuan dan bagian yang tak terpisahkan dalam melaksanakan APBN. Karena itu, bagi kementerian/lembaga, RAN-PRB mempunyai kekuatan agar programnya konsisten dengan RAN-PRB 2010-2012;

- (3). Sedangkan bagi nonpemerintah yang meliputi PMI, media, swasta, dan LSM, RAN-PRB merupakan sebuah komitmen program PRB yang akan dilaksanakan dalam tiga tahun mendatang; dan
- (4). Mekanisme kegiatan tahunan baik dalam pelaksanaan maupun evaluasinya akan dikoordinasikan Bappenas, BNPB, dan PLANAS.

Pelaksanaan program/kegiatan dalam matriks rencana aksi ini dilakukan oleh lembaga/instansi terkait baik pemerintah maupun nonpemerintah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Penyelenggaraan perencanaan tahunan dikoordinasikan BNPB dan Bappenas, sedangkan koordinasi pelaksanaan dan evaluasinya dilakukan BNPB.

## 7.2. KELEMBAGAAN

Pengarusutamaan PRB dalam proses perencanaan pembangunan mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. RAN-PRB 2010-2012 disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam satu forum yang meliputi unsur pemerintah, nonpemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang dikoordinasikan BNPB dan Bappenas. Legalisasi RAN-PRB ditetapkan melalui Keputusan Kepada BNPB. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BNPB sedangkan implementasinya dilakukan oleh seluruh lembaga/institusi terkait baik pemerintah maupun nonpemerintah sesuai dengan matriks rencana aksinya.

Dalam melaksanakan rencana aksi ini bentuk pengaturan terhadap kelembagaannya adalah:

- (1). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, RAN-PRB akan ditetapkan kepala BNPB setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (2). PLANAS merupakan *multistakeholders* yang memiliki jejaring sehingga akan memperkuat pelaksanaan rencana aksi ini. Para pihak yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, lembaga internasional, lembaga lokal, dan organisasi sosial lainnya, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan.
- (3). Dalam memberdayakan PLANAS sebagai mekanisme pemantauan pelaksanaan RAN-PRB secara "*peer-process review*", Panitia Pengarah RAN-PRB yang sudah dibentuk untuk proses penyusunan RAN-PRB

2010-2012 berkewajiban untuk memastikan bahwa mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-PRB tersebut dilaksanakan secara berkala dan sistematis di dalam mekanisme PLANAS. Selain itu, masukan-masukan spesifik dari para pakar lintas disiplin yang tergabung dalam Dewan Pengarah BNPB dan BPBD terkait pelaksanaan RAN-PRB 2010-2012 akan dihimpun secara sistematis melalui proses komunikasi berkala antara Panitia Pengarah RAN-PRB dan Dewan Pengarah BNPB di tingkat pusat, sedangkan pada tingkat daerah, Dewan Pengarah BPBD akan memberikan masukan bagi proses sejenis melalui penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) PRB.

- (4). BNPB, Bappenas dan PLANAS membentuk sekretariat tim koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian RAN PRB dengan membentuk tim pengarah dan tim teknis.

### **7.3. PERAN SERTA MASYARAKAT**

Kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah:

- (1). Menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (2). Melakukan kegiatan penanggulangan bencana;
- (3). Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Konsep penanggulangan bencana telah mengalami perubahan cukup mendasar. Pemaknaan terhadap bencana yang secara konvensional dianggap sebagai kejadian yang tidak dapat dicegah, kemudian mengalami pergeseran. Bencana dianggap dapat diprediksi sebelumnya sehingga dapat diupayakan pencegahan dan pengurangan risikonya. Rentang waktu dan fokus bantuan awalnya hanya berorientasi pada saat tanggap darurat bencana, kemudian dengan paradigma baru pelaksanaan penanganan bencana pada RAN-PRB 2010-2012 menjadi konsep penanggulangan berbasis masyarakat.

Perubahan yang sangat mendasar dari RAN-PRB ini terlihat bahwa manajemen bencana bukan saja pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab setiap orang. Pengarusutamaan partisipasi sangat ditekankan karena pada dasarnya masyarakat lebih memahami kondisi dan bagaimana memperlakukan lingkungannya dengan kearifan yang mereka miliki.

Masyarakat yang semula diposisikan sebagai objek pasif menjadi subjek aktif dan dengan kesadaran diri bertanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana melalui berbagai kegiatan yaitu pengembangan budaya sadar bencana, penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan serta peningkatan pemahaman tentang kerentanan masyarakat.

Pelaksanaan penanggulangan bencana yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat akan mengarah kepada:

- (1). Melakukan upaya pengurangan risiko bencana bersama masyarakat di kawasan rawan bencana secara mandiri;
- (2). Menghindari munculnya kerentanan baru dan ketergantungan masyarakat di kawasan rawan bencana pada pihak luar;
- (3). Penanggulangan risiko bencana merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam untuk kelangsungan kehidupan di kawasan rawan bencana, dan
- (4). Pendekatan multisektor, multidisiplin, dan multibudaya.

Upaya penanggulangan bencana saat ini sudah menjadi perhatian banyak kalangan baik lembaga nonpemerintah, lembaga sosial, media, perusahaan, perguruan tinggi, PMI, PKPU, lembaga donor dan lembaga-lembaga internasional.

#### **7.4. PENDANAAN**

Pendanaan dan pengelolaan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber pendanaan pelaksanaan RAN-PRB diperoleh dari APBN, dukungan swasta, dan lembaga donor baik regional maupun internasional. Anggaran yang berasal dari dana APBN dialokasikan secara rutin melalui anggaran dari setiap kementerian/ lembaga untuk menjamin agar upaya pengurangan risiko bencana dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan.

Penganggaran untuk implementasi RAN-PRB ini bukan merupakan dana "on top" dari renstra kementerian/ lembaga, tetapi dapat dimungkinkan menjadi instrumen untuk pengarusutamaan anggaran yang terkait dengan kepentingan pengurangan risiko bencana. Mekanisme pendanaan yang berasal dari anggaran nonpemerintah diatur sesuai aturan dari masing-masing lembaga atau instansinya.

Pendanaan yang berasal dari APBN dalam rangka penanggulangan bencana mengacu kepada sistem penganggaran yang diatur melalui keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan. Artinya pelaksanaan program/kegiatan dalam matriks RAN-PRB 2010-2012 harus disesuaikan dengan nomenklatur anggaran yang terkait dengan penanggulangan bencana dari masing-masing kementerian/lembaga mengacu kepada dokumen RKP.

Perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari responsif menjadi preventif diharapkan akan mampu mengurangi risiko dari setiap kejadian bencana. Bagi Indonesia yang terletak di kawasan dengan risiko bencana besar yang tinggi, maka perlu dibangun ketahanan fiskal dan keuangan yang bertumpu pada adanya strategi pembiayaan yang bervariasi sesuai dengan frekuensi dan tingkat keseriusan bencana. Risiko bencana yang relatif kecil, sering terjadi dan dapat diprediksi seperti banjir, longsor dan kekeringan dapat dibiayai dari sumber-sumber dana cadangan yang dianggarkan secara rutin. Sedangkan untuk mengantisipasi risiko bencana besar seperti gempa bumi dan tsunami, maka kombinasi antara penyiapan dana siaga yang diakumulasi dari pencadangan dari anggaran secara rutin (dan dikelola di luar anggaran), serta adanya menggunakan sumber pembiayaan bencana diluar anggaran seperti skema asuransi bencana menjadi sesuatu yang sangat penting. Hal ini sekaligus sebagai bentuk kemitraan pemerintah dengan swasta dalam mengalihkan sebagian risiko ke pasar keuangan. Dalam periode 3 (tiga) tahun ke depan, pengembangan strategi pembiayaan risiko serta asuransi risiko bencana merupakan bagian dari agenda utama pembangunan pengurangan risiko bencana.





01/28/2006 11



01/28/2006 11





## **BAB 8**

# **PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RAN-PRB 2010-2012**

Untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan pengurangan risiko bencana sebagaimana tertuang dalam dokumen RAN-PRB 2010-2012 diperlukan arahan dan pedoman pelaksanaan dimaksud. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk memastikan dan menjamin pencapaian pelaksanaan prioritas, program, dan kegiatan yang terdapat dalam RAN-PRB 2010-2012. Hasil pelaksanaan kegiatan ini akan dapat memberikan masukan, saran dan rekomendasi bagi berbagai para pihak untuk melakukan pengurangan risiko bencana di Indonesia. Selain itu, dari hasil pemantauan dan evaluasi ini juga dapat dijadikan sebagai masukan kebijakan dalam rangka penyusunan RAN-PRB selanjutnya. Kegiatan pemantauan penyelenggaraan PRB diperlukan sebagai upaya untuk memantau terus-menerus proses pelaksanaan PRB di Indonesia. Sedangkan kegiatan evaluasi penyelenggaraan PRB dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja PRB.

Di dalam penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi ini tidak terlepas dari beberapa kerangka regulasi dan pedoman lainnya, di antaranya:

- (1). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- (2). Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- (3). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- (4). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- (5). Kerangka Aksi Hyogo beserta indikatornya.

### **8.1. TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan RAN-PRB 2010-2012 ini dilakukan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan PRB secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan

dampak bencana. Tujuan penyelenggaraan RAN-PRB ini pun mengacu kepada kerangka regulasi yang terkait dengan penanggulangan bencana di Indonesia.

Sejalan dengan itu, di dalam Kerangka Aksi Hyogo, terdapat tiga tujuan strategis dalam rangka PRB, yaitu:

- (1). Integrasi yang lebih efektif akan pertimbangan risiko bencana ke dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan pada semua tingkat dengan penekanan khusus pada pencegahan, penanganan, dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta pengurangan risiko kerentanan terhadap bencana;
- (2). Pengembangan dan penguatan lembaga, mekanisme dan kapasitas di semua tingkat, terutama pada tingkat masyarakat sehingga secara sistematis dapat meningkatkan ketahanan terhadap bahaya; dan
- (3). Perpaduan sistematis dalam perancangan konsep pendekatan pengurangan risiko ke dalam pelaksanaan program kesiapsiagaan dalam menghadapi keadaan darurat, tanggapan, dan proses pemulihan dalam rangka rekonstruksi masyarakat yang terkena dampak.

Di samping itu, maksud pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAN-PRB 2010-2012 untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari kelompok prioritas, program, dan kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam perencanaan para pihak terkait. Hal lain yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan RAN-PRB 2010-2012 dari aspek efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan. Evaluasi dilakukan berdasarkan sumber daya yang digunakan, indikator, dan sasaran kinerja keluaran untuk setiap kegiatan.

## **8.2. METODOLOGI**

### **8.2.1. Tahapan Proses Evaluasi dan Kerangka Kerja Logis**

Tahapan, alur dan proses dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAN-PRB tahun 2010-2012 dalam kerangka kerja logis dapat dibagi ke dalam tiga tahapan sebagai berikut:

#### **(1). Basis Evaluasi**

Rujukan atau referensi utama atas dokumen RAN-PRB didasarkan kepada HFA sebagai bentuk komitmen global dalam rangka pengurangan risiko bencana di Indonesia. Selain itu, rujukan utama lainnya didasarkan kepada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Basis evaluasi secara langsung didasarkan kepada dokumen RAN-PRB ini.

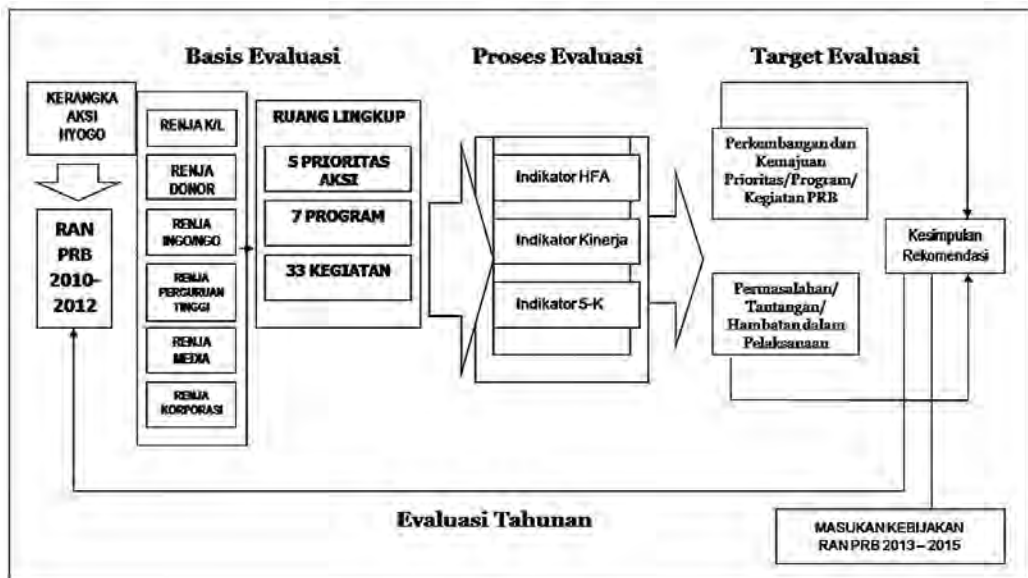
**(2). Proses Evaluasi**

Selanjutnya, basis evaluasi tersebut akan dievaluasi dengan melihat pada evaluasi kinerja yang terdiri dari efektifitas, efesiensi, *input*, *output*, *benefit* dan *outcome*. Kemudian akan dilakukan penilaian dan analisis pelaksanaan RAN-PRB dengan menggunakan lima aspek evaluasi beserta indikatornya yang terdiri dari aspek konsistensi, koordinasi, kapasitas, konsultasi dan keberlanjutan. Selain itu, akan dinilai juga dari perspektif indikator kemajuan yang terdapat dalam HFA.

**(3). Target Evaluasi**

Dari hasil proses evaluasi ini diharapkan tercapai target evaluasi yang fokus kepada kemajuan pelaksanaan RAN-PRB dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Pada akhir pelaksanaan kegiatan evaluasi akan dirumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dijadikan masukan bagi para pihak dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana. Evaluasi itu diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penyusunan RAN-PRB 2013-2015.

Dari ketiga tahapan proses pemantauan dan evaluasi yang sudah dijelaskan di atas, kerangka kerja logis untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-PRB dapat dilihat pada Gambar 8.1.



Gambar 8.1. Kerangka Kerja Logis Pemantauan dan Evaluasi RAN-PRB

### 8.2.2 Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi RAN-PRB terdiri dari ruang lingkup berdasarkan prioritas aksi dalam HFA, program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait penanggulangan bencana.

(1). Kelompok Prioritas

Kelompok prioritas yang dimaksud adalah lima prioritas aksi yang terdapat dalam *Hyogo Framework for Action* atau Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015 tentang Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana.

(2). Program

Program-program yang terdapat dalam matriks Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2012 merupakan program-program yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

(3). Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam matriks Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2012 juga merupakan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

### 8.2.3 Teknik Pengumpulan Data dan Informasi

Beberapa teknik pengumpulan data dan informasi baik yang bersumber dari data primer maupun sekunder dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi RAN-PRB 2010-2012, diuraikan sebagai berikut:

- (1). **Peninjauan terhadap dokumen perencanaan**, antara lain perencanaan kementerian/lembaga, komunitas internasional, *Nongovernmental Organization/International Non-Governmental Organization* (NGO/INGO), perguruan tinggi, media massa dan perusahaan;
- (2). **Peninjauan terhadap regulasi** yang terkait dengan kebijakan, program dan kegiatan pengurangan risiko bencana di Indonesia yang diterbitkan oleh berbagai para pihak terkait;
- (3). **Peninjauan terhadap laporan** para pihak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana di Indonesia. Beberapa bentuk laporan atau publikasi yang dijadikan sebagai sumber tinjauan, antara lain laporan tahunan lembaga, buku, majalah, *newsletter*, komik, dan lain-lain;
- (4). **Konsultasi** dengan para pihak terkait melalui proses dialog dan wawancara mendalam secara terstruktur dengan menggunakan instrumen yang sudah dirancang dan didesain sesuai dengan tujuan dan maksud konsultasi;
- (5). **Rapat/Forum Koordinasi** melalui berbagai pertemuan dengan para pihak yang melaksanakan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana dalam rangka memperoleh kemajuan, permasalahan, hambatan, kendala dan upaya tindak lanjut yang harus dilakukan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana;
- (6). **Diskusi Kelompok Terarah/Lokakarya** dalam rangka mendiskusikan dan mengkaji secara seksama dalam sebuah forum mengenai pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana di Indonesia. Kegiatan FGD atau Lokakarya ini dilakukan untuk mendapatkan umpan balik terhadap pelaksanaan kebijakan yang terdapat dalam dokumen RAN-PRB;

- (7). **Observasi** yaitu proses kunjungan dan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang terkait pengurangan risiko bencana. Melalui proses ini akan didapatkan informasi riil di lapangan sehingga diperoleh gambaran pelaksanaan yang menyangkut kemajuan pelaksanaan kegiatan dan berbagai permasalahan dalam implementasi;
- (8). **Survei** adalah suatu pendekatan kuantitatif dalam melakukan pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana. Untuk teknik *sampling* dan berbagai prosedur dalam pelaksanaan yang disesuaikan dengan karakteristik survei yang akan dilakukan.

#### 8.2.4. Kerangka Waktu

Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAN-PRB mengacu kepada prosedur dan kewenangan pada masing-masing instansi. Adapun prosedur umum yang dapat digunakan adalah:

- (1). Pimpinan masing-masing lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan RAN-PRB kepada kepala BNPB dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat dua bulan setelah tahun berjalan berakhir;
- (2). Kepala BNPB bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan RAN-PRB periode sebelumnya berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan RAN-PRB;
- (3). Kepala BNPB dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan hasil evaluasi RAN-PRB guna penyusunan rancangan RAN-PRB berikutnya;
- (4). Evaluasi pelaksanaan RAN-PRB dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun;
- (5). Evaluasi dilaksanakan berdasarkan sumber daya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan pokok; dan/atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program;
- (6). Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, objektif, dan transparan.

### **8.3. INDIKATOR EVALUASI**

Di dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi RAN-PRB akan dikombinasikan berbagai indikator dalam RAN-PRB ini. Terdapat tiga kelompok indikator yang dapat dipergunakan dalam pemantauan dan evaluasi ini, yaitu indikator berdasarkan prioritas aksi HFA, indikator kinerja pelaksanaan pengurangan risiko bencana dan indikator berdasarkan aspek 5K (konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan).

Ketiga kelompok indikator ini saling mengisi dan saling mendukung. Indikator HFA menekankan kepada penilaian hasil (outcome), Indikator 5K lebih menekankan kepada prosesnya sedangkan indikator kinerja lebih menekankan kepada keluaran (output). Dalam pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tahapannya. Dengan demikian hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAN-PRB ini dapat diperoleh dari analisis yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Unit analisis pemantauan dan evaluasi dilakukan sampai pada tingkat kegiatan, sesuai dengan penjabaran Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 yang berjumlah 33 kegiatan yang dikelompokkan ke dalam tujuh program dan lima prioritas aksi HFA.

#### **8.3.1. Indikator Program Prioritas Berdasarkan HFA**

Hasil dari indikator Prioritas Aksi HFA, dapat dijadikan alat analisis untuk melihat pada masing-masing lima prioritas dalam dokumen RAN-PRB. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1. Indikator untuk Prioritas Aksi HFA

NO	PRIORITAS AKSI	INDIKATOR
1	Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi prioritas nasional dan lokal dengan basis kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kerangka kerja kebijakan dan hukum untuk pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dengan tanggung jawab dan kapasitas yang terdesentralisasikan di semua tingkat</li> <li>2. Tersedianya sumber daya yang khusus dan memadai untuk melaksanakan perencanaan-perencanaan dan aktivitas-aktivitas pengurangan risiko bencana di semua tingkat administratif</li> <li>3. Terjaminnya partisipasi masyarakat dan desentralisasi melalui delegasi kewenangan dan sumber daya ke tingkat daerah</li> <li>4. Berfungsinya satu <i>platform</i> multisektoral di tingkat nasional untuk pengurangan risiko bencana</li> </ol>
2	Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko-risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya pengkajian risiko di tingkat nasional dan daerah yang didasarkan pada data tentang bahaya dan informasi tentang kerentanan dan mencakup pengkajian risiko untuk semua sektor kunci</li> <li>2. Terbangunnya sistem untuk memantau, menyimpan dan menyebarkan data tentang bahaya-bahaya dan kerentanan-kerentanan kunci</li> <li>3. Sistem-sistem peringatan dini untuk semua bahaya utama yang menjangkau ke komunitas-komunitas</li> <li>4. Pengkajian risiko di tingkat nasional dan daerah mempertimbangan risiko-risiko regional/lintas batas dengan mempertimbangkan kerja sama regional dalam pengurangan risiko.</li> </ol>
3	Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketangguhan di semua tingkat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya informasi tentang bencana yang relevan dan terjangkau di semua tingkat untuk semua pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem pertukaran informasi, dll).</li> <li>2. Kurikulum sekolah, bahan-bahan pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang relevan mencakup konsep dan praktik tentang pengurangan risiko bencana dan pemulihan bencana.</li> <li>3. Metode-metode dan alat-alat bantu penelitian untuk pengkajian multirisiko serta analisis biaya manfaat dikembangkan dan diperkuat</li> <li>4. Tersedianya strategi kesadaran masyarakat untuk seluruh negeri untuk mendorong budaya ketangguhan terhadap bencana yang menjangkau komunitas perkotaan dan pedesaan.</li> </ol>



NO	PRIORITAS AKSI	INDIKATOR
4	Mengurangi faktor-faktor risiko mendasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurangan risiko bencana merupakan satu tujuan tak terpisahkan dalam kebijakan dan perencanaan yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam dan tata guna lahan serta adaptasi perubahan iklim.</li> <li>2. Kebijakan-kebijakan dan perencanaan-perencanaan pembangunan sosial sedang dijalankan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko</li> <li>3. Kebijakan-kebijakan dan perencanaan-perencanaan sektor ekonomi dan produktif telah dijalankan untuk mengurangi kerentanan aktivitas-aktivitas ekonomi</li> <li>4. Perencanaan dan pengelolaan permukiman penduduk memadukan elemen-elemen pengurangan risiko bencana, termasuk penerapan aturan-aturan mendirikan bangunan.</li> <li>5. Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses pemulihan dan rehabilitasi pascabencana.</li> <li>6. Tersedia prosedur-prosedur untuk mengkaji dampak risiko yang ditimbulkan proyek-proyek pembangunan besar, khususnya proyek-proyek prasarana</li> </ol>
5.	Memperkuat kesiapsiagaan bencana untuk respons yang efektif di semua tingkat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kebijakan, kapasitas dan mekanisme teknis dan kelembagaan yang kuat untuk pengelolaan risiko bencana yang menggunakan perspektif pengurangan risiko bencana.</li> <li>2. Rencana-rencana kesiapsiagaan bencana dan rencana-rencana kontinjensi tersusun di semua tingkat administratif dan dilakukan pelatihan dan simulasi rutin untuk menguji coba dan mengembangkan program-program respons bencana.</li> <li>3. Adanya cadangan dana dan mekanisme kontinjensi untuk mendukung respons dan pemulihan yang efektif jika diperlukan.</li> <li>4. Adanya prosedur-prosedur untuk pertukaran informasi yang relevan selama peristiwa-peristiwa bahaya dan bencana dan untuk melakukan tinjauan kembali pascaperistiwa</li> </ol>

### 8.3.2. Indikator Kinerja Pelaksanaan RAN-PRB 2010-2012

Untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan dan kemajuan pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana seperti tertuang dalam dokumen rencana aksi ini maka disusun dan didesain suatu indikator kinerja. Indikator kinerja ini disusun untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan hingga tingkat kegiatan yang dilakukan instansi terkait. Pengelompokan

indikator kinerja ini disesuaikan dengan ruang lingkup dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAN-PRB 2010-2012. Indikator kinerja RAN-PRB 2010-2012 untuk setiap pelaksanaan kegiatan didasarkan kepada matriks RAN-PRB untuk masing-masing instansi pelaksanaannya.

### 8.3.3. Indikator Pelaksanaan RAN-PRB Berdasarkan 5-K

Untuk mengevaluasi implementasi pengurangan risiko bencana dalam perspektif yang lebih luas digunakan indikator berdasarkan aspek 5-K yang terdiri dari konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan. Indikator 5-K ini dapat mempertajam pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana seperti yang tertuang dalam dokumen RAN-PRB ini. Melalui evaluasi ini akan diperoleh kondisi dan situasi yang lebih konkret pelaksanaan kebijakan dokumen RAN-PRB.

Penjelasan indikator pelaksanaan RAN-PRB berdasarkan aspek 5-K yaitu sebagai berikut:

- (1). **Konsistensi** pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana dari aspek prioritas aksi, program, dan kegiatan dengan melihat kepada dokumen RAN-PRB Tahun 2010-2012;
- (2). **Koordinasi** antara lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah yang menghasilkan sinkronisasi dan harmonisasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran;
- (3). **Konsultasi** yang dilakukan dalam rangka menghimpun berbagai masukan, saran, dan kritik dari masyarakat penerima manfaat sebagai upaya partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana;
- (4). **Kapasitas** institusi pelaksana kebijakan pengurangan risiko bencana yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah baik dari aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, aspek pendanaan, aspek personel, maupun aspek pengendalian pengurangan risiko bencana;
- (5). **Keberlanjutan** dalam kerangka kebijakan pembangunan yang terkait dengan pengurangan risiko bencana baik dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang.

Berdasarkan rumusan lima aspek evaluasi yang disebutkan di atas, maka disusun beberapa indikator evaluasi yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penilaian terhadap

pelaksanaan kebijakan RAN-PRB, yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2. Evaluasi RAN-PRB Berdasarkan Aspek 5-K

ASPEK EVALUASI	INDIKATOR
KONSISTENSI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya konsistensi perencanaan dalam RAN-PRB dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah</li> <li>2. Kuantitas kegiatan dalam RAN-PRB yang tercantum dalam perencanaan lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah</li> <li>3. Adanya kesesuaian antara perencanaan dalam RAN-PRB dengan perencanaan pada masing-masing institusi pelaksana pengurangan risiko bencana</li> </ol>
KOORDINASI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya tingkat koordinasi perencanaan yang lebih baik dan lebih terarah antarberbagai lembaga pelaksana pengurangan risiko bencana yang terlibat dalam kebijakan RAN-PRB</li> <li>2. Terwujudnya tingkat koordinasi penganggaran yang lebih baik dan lebih konkret antar berbagai lembaga pelaksana pengurangan risiko bencana</li> <li>3. Terwujudnya tingkat koordinasi pelaksanaan yang lebih sinkron dan lebih harmonis antar berbagai lembaga pelaksana pengurangan risiko bencana</li> </ol>
KONSULTASI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya partisipasi masyarakat melalui penyampaian masukan, saran, kritik dan keluhan terhadap pelaksanaan kebijakan dalam RAN-PRB yang dilakukan oleh berbagai lembaga pelaksana</li> <li>2. Adanya media komunikasi dan informasi bagi masyarakat untuk penyampaian aspirasi dalam upaya mengawal dan memperbaiki pelaksanaan kebijakan RAN-PRB</li> <li>3. Adanya ketersediaan dan kemudahan akses informasi publik melalui media elektronik dan cetak, <i>website</i> dan internet, kotak pos pengaduan masyarakat dalam rangka mendorong penyebarluasan pelaksanaan kebijakan dalam RAN-PRB</li> </ol>
KAPASITAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya kapasitas kelembagaan pelaksana yang memadai dalam melaksanakan kebijakan RAN-PRB</li> <li>2. Terwujudnya kapasitas sumber daya manusia yang terkait dengan personalia yang terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana</li> <li>3. Terpenuhinya kapasitas pendanaan yang cukup untuk dipergunakan pada kegiatan pengurangan risiko bencana</li> <li>4. Adanya sumber pendanaan yang lebih beragam dan saling mendukung masing-masing institusi yang melakukan kegiatan RAN-PRB</li> <li>5. Terpenuhinya kapasitas pelaksana pengurangan risiko bencana dalam hal pengendalian dan pengawasan</li> </ol>
KEBERLANJUTAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya berbagai kebijakan pengurangan risiko bencana baik dalam jangka menengah dan panjang</li> <li>2. Terciptanya manajemen <i>exit</i> strategi program dan kegiatan bagi pelaksana kebijakan pengurangan risiko bencana</li> <li>3. Terumuskan berbagai masukan kebijakan dalam rangka penyusunan dokumen RAN-PRB untuk periode selanjutnya.</li> </ol>

#### 8.4. PELAKSANA DAN PEMBAGIAN PERAN

Pelaksana kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAN-PRB akan dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam bidang penanggulangan bencana dan instansi yang bertanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan nasional. Secara umum, gambaran pelaksana kegiatan pemantauan dan evaluasi RAN-PRB dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1). Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PRB dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BNPB dengan melibatkan lembaga perencanaan pembangunan nasional;
- (2). Pimpinan masing-masing lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah terkait melakukan evaluasi pelaksanaan RAN-PRB untuk melihat pencapaian sasaran sumber daya yang digunakan, indikator dan sasaran kinerja keluaran (*output*) bagi masing-masing prioritas aksi, program dan kegiatan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menilai pencapaian indikator dan sasaran hasil (*outcome*).

Di dalam pemantauan dan evaluasi ini melibatkan para pihak yang menjalankan kegiatan RAN-PRB. Adapun para pihak yang terlibat dalam rencana aksi ini adalah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, komunitas internasional, NGO nasional, NGO internasional, perguruan tinggi, media massa dan perusahaan. Dari berbagai institusi tersebut secara garis besar dikelompokkan ke dalam institusi pemerintah dan institusi nonpemerintah. Peran dari institusi pemerintah secara prinsip adalah memberikan arahan dan strategi kebijakan dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Selain itu, institusi pemerintah juga dapat memberikan payung hukum terkait pelaksanaan kegiatan ini. Sedangkan dari institusi nonpemerintah dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana berupa masukan dalam rangka perbaikan arahan dan strategi dalam perumusan kebijakan selanjutnya.





## BAB 9

### PENUTUP

Pelaksanaan RAN-PRB tahun 2006-2009 telah selesai. Banyak manfaat yang diperoleh dengan adanya RAN-PRB tersebut, meski masih banyak hal yang harus disempurnakan. Keadaan ini tercermin dari pelaksanaan penanggulangan bencana pada lima tahun terakhir ini yang masih berorientasi kepada tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi, serta minimnya upaya pengurangan risiko bencana. Perubahan paradigma ke arah tindakan pengurangan risiko bencana dibandingkan dengan tindakan tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi dalam penanggulangan bencana sebenarnya sudah berjalan dengan baik, tinggal memelihara momentum ini agar lebih kondusif dalam pelaksanaannya.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sangat mendukung kegiatan PRB karena ada keterkaitan yang kuat antara penggunaan ruang dengan besarnya risiko bencana.

Sejalan dengan itu dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penanggulangan bencana yang lebih baik dan berorientasi kepada PRB yang sekaligus mengurangi risiko bencana, perlu disusun RAN-PRB yang baru dengan jangka waktu tiga tahun dari tahun 2010-2012, sebagai penjabaran dari Renas PB Tahun 2010-2014. Penyusunan RAN-PRB 2010-2012 adalah sebagai kelanjutan dari RAN-PRB 2006-2009 yang pelaksanaannya sudah berakhir dan sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Di tingkat daerah perlu disusun RAD-PRB bagi provinsi dan kabupaten/kota yang rawan bencana agar RAN-PRB 2010-2012 berjalan efektif.

Dalam pelaksanaannya, RAN-PRB ini perlu dijabarkan dalam rencana tahunan yang merupakan rincian dari matriks RAN-PRB 2010-2012. Rencana tahunan akan menjadi bagian dari RKP yang merupakan acuan dari pelaksanaan APBN. Peran serta seluruh para pihak terkait dengan PRB sangat penting dimulai dari tahap perencanaan, penyediaan dana dan terutama dalam pelaksanaannya. Dengan demikian pandangan PRB sebagai investasi, serta tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi sebagai biaya (*cost*) betul-betul dapat diimplementasikan. Risiko terjadinya bencana pun akan menjadi sangat berkurang.

## SEKAPUR SIRIH

Penyusunan RAN-PRB 2010-2012 didasarkan atas 2 (dua) hal, *Pertama*, untuk menjaga konsistensi dan komitmen pemerintah seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2007. *Kedua*, RAN-PRB disusun sejalan dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia. RAN-PRB 2010-2012 menjadi dasar penyelenggaraan pengurangan PRB sebagai penjabaran dari Renas PB. Dokumen ini merupakan rencana aksi pengurangan risiko bencana yang telah diintegrasikan dan disinergikan dengan dokumen perencanaan pembangunan lain seperti : perencanaan tata ruang, program penanganan perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, dan program nasional lainnya.

Penyusunan Buku RAN-PRB 2010-2012 dilakukan dalam kurun waktu Agustus-Desember 2009 melalui berbagai tahapan kegiatan, antara lain FGD, pengumpulan data, konsultasi publik baik di daerah maupun nasional.

Pada tahap awal penyusunan, tim melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Kementerian/Lembaga untuk menjaring masukan program dan kegiatan di masing-masing K/L yang terkait dengan program PRB. Berikutnya adalah melakukan koordinasi dan sosialisasi terhadap tiga kelompok para pihak pengurangan risiko bencana yang dikoordinasikan oleh : (1) Bappenas dan BNPB untuk kelompok kementerian/lembaga; (2) UNDP untuk kelompok donor internasional yang tergabung dalam *convergence group* dan UNTWG; dan (3) PLANAS untuk kelompok nonpemerintah dan unsur Palang Merah.

Proses selanjutnya adalah melakukan konsultasi publik yang diselenggarakan di 7 wilayah yaitu, Surakarta, Surabaya, Makassar, Palembang, Banjarmasin, Kupang dan Medan. Konsultasi publik daerah dilakukan berdasarkan kelompok regional dengan tingkat kerentanan (*vulnerability*) dan tingkat ancaman (*hazard*) yang mungkin terjadi di wilayah tersebut. Konsultasi publik nasional merupakan kegiatan akhir dari rangkaian konsultasi publik dengan mempertemukan semua pihak pemangku kepentingan antara lain, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, para donor dan lembaga nonpemerintah lainnya.

Penyusunan RAN-PRB 2010-2012 difasilitasi UNDP yang dikoordinasikan Kristanto Sinandang dan World Bank melalui koordinasi



Dr. Iwan Gunawan. Sebagai penanggung jawab di tingkat pemerintah adalah melalui Bappenas yang dikoordinasikan oleh Dr. Suprayoga Hadi, Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal dan BNPB melalui Ir. Sugeng Tri Utomo DESS, Deputi Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko Bencana. Ditingkat pelaksanaan, RAN-PRB 2010-2012 ini dilakukan oleh Tim penyusun terdiri dari Prof. Dr. Ikhwanuddin Mawardi (koordinator), Ir. Kuswiyanto, M.Si, Ir. Siti Agustini M.App. Econ, Dra. Hening Parlan, Ir. Doddy Virgo Sinaga, Ir. Dian Verdiana, Sugiantoro, ST dan Khairullah S.Ag, M.Si Untuk penyelesaian Bab 2 dan peta risiko bencana dibantu oleh Tim PSB-IPB yang dikoordinasikan Dr. Euis Sunarti dan Tim PMB-ITB melalui koordinasi Dr. Wayan Sengara.



LAMPIRAN 1. DAFTAR KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI  
RISIKO TINGGI TERHADAP ANCAMAN  
BENCANA



**Tabel L1.1. Daftar Kabupaten/Kota yang Memiliki  
Risiko Tinggi Gempa Bumi.**

<b>No</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>
1	Bali	Badung
2	Bali	Buleleng
3	Bali	Gianyar
4	Bali	Jembrana
5	Bali	Karang Asem
6	Bali	Klungkung
7	Bali	Kota Denpasar
8	Bali	Tabanan
9	Banten	Kota Cilegon
10	Banten	Lebak
11	Banten	Pandeglang
12	Banten	Serang
13	Banten	Tangerang
14	Bengkulu	Bengkulu Selatan
15	Bengkulu	Bengkulu Utara
16	Bengkulu	Kaur
17	Bengkulu	Kepahiang
18	Bengkulu	Kota Bengkulu
19	Bengkulu	Lebong
20	Bengkulu	Muko-muko
21	Bengkulu	Rejang Lebong
22	Bengkulu	Seluma
23	DI. Yogyakarta	Bantul
24	DI. Yogyakarta	Gunung Kidul
25	DI. Yogyakarta	Kulon Progo
26	Gorontalo	Boalemo
27	Gorontalo	Bone Bolango
28	Gorontalo	Gorontalo
29	Gorontalo	Gorontalo Utara
30	Gorontalo	Kota Gorontalo
31	Gorontalo	Pohuwato
32	Papua Barat	Manokwari
33	Papua Barat	Raja Ampat

<b>No</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>
34	Jambi	Kerinci
35	Jawa Barat	Bandung
36	Jawa Barat	Bandung Barat
37	Jawa Barat	Bogor
38	Jawa Barat	Ciamis
39	Jawa Barat	Cianjur
40	Jawa Barat	Garut
41	Jawa Barat	Kota Bandung
42	Jawa Barat	Kota Cimahi
43	Jawa Barat	Kota Sukabumi
44	Jawa Barat	Sukabumi
45	Jawa Barat	Tasikmalaya
46	Jawa Tengah	Cilacap
47	Jawa Tengah	Kebumen
48	Jawa Tengah	Wonogiri
49	Jawa Timur	Banyuwangi
50	Jawa Timur	Blitar
51	Jawa Timur	Jember
52	Jawa Timur	Kediri
53	Jawa Timur	Lumajang
54	Jawa Timur	Malang
55	Jawa Timur	Pacitan
56	Jawa Timur	Pasuruan
57	Jawa Timur	Ponorogo
58	Jawa Timur	Probolinggo
59	Jawa Timur	Situbondo
60	Jawa Timur	Sumenep
61	Jawa Timur	Trenggalek
62	Jawa Timur	Tulungagung
63	Lampung	Kota Bandar Lampung
64	Lampung	Lampung Barat
65	Lampung	Lampung Selatan
66	Lampung	Lampung Timur
67	Lampung	Lampung Utara
68	Lampung	Tanggamus
69	Maluku	Buru
70	Maluku	Kota Ambon
71	Maluku	Maluku Tengah

<b>No</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>
72	Maluku	Maluku Tenggara
73	Maluku	Seram Bagian Barat
74	Maluku	Seram Bagian Timur
75	Maluku Utara	Kepulauan Sula
76	Maluku Utara	Tidore
77	Nanggroe Aceh Darussalam	Aceh Barat
78	Nanggroe Aceh Darussalam	Aceh Barat Daya
79	Nanggroe Aceh Darussalam	Aceh Besar
80	Nanggroe Aceh Darussalam	Aceh Jaya
81	Nanggroe Aceh Darussalam	Aceh Selatan
82	Nanggroe Aceh Darussalam	Aceh Singkil
83	Nanggroe Aceh Darussalam	Aceh Tengah
84	Nanggroe Aceh Darussalam	Aceh Tenggara
85	Nanggroe Aceh Darussalam	Bireun
86	Nanggroe Aceh Darussalam	Gayo Lues
87	Nanggroe Aceh Darussalam	Kota Banda Aceh
88	Nanggroe Aceh Darussalam	Kota Sabang
89	Nanggroe Aceh Darussalam	Nagan Raya
90	Nanggroe Aceh Darussalam	Pidie
91	Nanggroe Aceh Darussalam	Pidie Jaya
92	Nanggroe Aceh Darussalam	Simeuleu
93	Nusa Tenggara Barat	Bima
94	Nusa Tenggara Barat	Dompu
95	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima
96	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram
97	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat
98	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah
99	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur
100	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
101	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat
102	Nusa Tenggara Timur	Belu
103	Nusa Tenggara Timur	Ende
104	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur
105	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang
106	Nusa Tenggara Timur	Kupang
107	Nusa Tenggara Timur	Manggarai
108	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat
109	Nusa Tenggara Timur	Negekeo

<b>No</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>
110	Nusa Tenggara Timur	Ngada
111	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao
112	Nusa Tenggara Timur	Sikka
113	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat
114	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya
115	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah
116	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur
117	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan
118	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara
119	Papua	Biak Numfor
120	Papua	Jaya Wijaya
121	Papua	Jayapura
122	Papua	Keerom
123	Papua	Kota Jayapura
124	Papua	Nabire
125	Papua	Pegunungan Bintang
126	Papua	Sarmi
127	Papua	Supiori
128	Papua	Tolikara
129	Papua	Waropen
130	Papua	Yapen Waropen
131	Sulawesi Selatan	Luwu Timur
132	Sulawesi Tengah	Banggai
133	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan
134	Sulawesi Tengah	Buol
135	Sulawesi Tengah	Donggala
136	Sulawesi Tengah	Kota Palu
137	Sulawesi Tengah	Morowali
138	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong
139	Sulawesi Tengah	Poso
140	Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una
141	Sulawesi Tengah	Toli Toli
142	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow
143	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Utara
144	Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe
145	Sulawesi Utara	Kepulauan Sitaro
146	Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud
147	Sulawesi Utara	Kota Bitung



<b>No</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>
148	Sulawesi Utara	Kota Manado
149	Sulawesi Utara	Minahasa
150	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan
151	Sulawesi Utara	Minahasa Tenggara
152	Sulawesi Utara	Minahasa Utara
153	Sumatera Barat	Agam
154	Sumatera Barat	Kep.Mentawai
155	Sumatera Barat	Kota Bukit Tinggi
156	Sumatera Barat	Kota Padang
157	Sumatera Barat	Kota Padang Panjang
158	Sumatera Barat	Kota Pariaman
159	Sumatera Barat	Kota Solok
160	Sumatera Barat	Lima Puluh Koto
161	Sumatera Barat	Padang Pariaman
162	Sumatera Barat	Pasaman
163	Sumatera Barat	Pasaman Barat
164	Sumatera Barat	Pesisir Selatan
165	Sumatera Barat	Solok
166	Sumatera Barat	Solok Selatan
167	Sumatera Barat	Tanah Datar
168	Sumatera Selatan	Empat Lawang
169	Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam
170	Sumatera Selatan	Lahat
171	Sumatera Selatan	Oku Selatan
172	Sumatera Utara	Dairi
173	Sumatera Utara	Humbang Hasundutan
174	Sumatera Utara	Karo
175	Sumatera Utara	Kota Sibolga
176	Sumatera Utara	Langkat
177	Sumatera Utara	Mandailing Natal
178	Sumatera Utara	Nias
179	Sumatera Utara	Nias Selatan
180	Sumatera Utara	Padang Sidempuan
181	Sumatera Utara	Samosir
182	Sumatera Utara	Tapanuli Selatan
183	Sumatera Utara	Tapanuli Tengah
184	Sumatera Utara	Tapanuli Utara

**Tabel L1.2. Daftar Kabupaten/Kota yang Memiliki  
Risiko Tinggi Tsunami**

<b>No</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>
1	Bali	Badung
2	Bali	Gianyar
3	Bali	Klungkung
4	Bali	Kota Denpasar
5	Banten	Kota Cilegon
6	Banten	Serang
7	Bengkulu	Bengkulu Selatan
8	Bengkulu	Kota Bengkulu
9	DI. Yogyakarta	Bantul
10	DI. Yogyakarta	Kulon Progo
11	Jawa Barat	Ciamis
12	Jawa Barat	Cianjur
13	Jawa Barat	Garut
14	Jawa Barat	Sukabumi
15	Jawa Barat	Tasikmalaya
16	Jawa Tengah	Cilacap
17	Jawa Tengah	Kebumen
18	Jawa Tengah	Purworejo
19	Jawa Tengah	Wonogiri
20	Jawa Timur	Blitar
21	Jawa Timur	Jember
22	Jawa Timur	Kota Surabaya
23	Jawa Timur	Lumajang
24	Jawa Timur	Malang
25	Jawa Timur	Trenggalek
26	Jawa Timur	Tulungagung
27	Lampung	Kota Bandar Lampung
28	Lampung	Tanggamus
29	Maluku	Kota Ambon
30	Maluku Utara	Ternate
31	Maluku Utara	Tidore Kepulauan
32	Nanggroe Aceh Darussalam	Aceh Besar
33	Nanggroe Aceh Darussalam	Kota Banda Aceh
34	Nanggroe Aceh Darussalam	Kota Lhoksumawe

<b>No</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>
35	Nanggroe Aceh Darussalam	Kota Sabang
36	Nanggroe Aceh Darussalam	Pidie
37	Nusa Tenggara Barat	Bima
38	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima
39	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram
40	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat
41	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah
42	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur
43	Nusa Tenggara Timur	Ende
44	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang
45	Sulawesi Selatan	Bulukumba
46	Sulawesi Selatan	Jeneponto
47	Sulawesi Selatan	Kota Makassar
48	Sulawesi Selatan	Selayar
49	Sulawesi Tengah	Kota Palu
50	Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe
51	Sulawesi Utara	Kepulauan Sitaro
52	Sulawesi Utara	Kota Bitung
53	Sulawesi Utara	Kota Manado
54	Sulawesi Utara	Minahasa
55	Sulawesi Utara	Minahasa Tenggara
56	Sulawesi Utara	Minahasa Utara
57	Sumatera Barat	Kota Padang
58	Sumatera Barat	Kota Pariaman
59	Sumatera Utara	Nias
60	Sumatera Utara	Nias Selatan

**Tabel L1.3. Daftar Kabupaten/Kota yang Memiliki  
Risiko Tinggi Letusan Gunung Api**

No	PROVINSI	KABUPATEN
1	Bali	Bangli
2	Bali	Karang Asem
3	Banten	Pandeglang
4	Banten	Serang
5	Bengkulu	Bengkulu Utara
6	Bengkulu	Rejang Lebong
7	DI. Yogyakarta	Sleman
8	Jambi	Kerinci
9	Jambi	Merangin
10	Jawa Barat	Bandung
11	Jawa Barat	Bandung Barat
12	Jawa Barat	Bogor
13	Jawa Barat	Cianjur
14	Jawa Barat	Garut
15	Jawa Barat	Kuningan
16	Jawa Barat	Majalengka
17	Jawa Barat	Sukabumi
18	Jawa Barat	Tasikmalaya
19	Jawa Tengah	Banjarnegara
20	Jawa Tengah	Banyumas
21	Jawa Tengah	Batang
22	Jawa Tengah	Boyolali
23	Jawa Tengah	Brebes
24	Jawa Tengah	Karanganyar
25	Jawa Tengah	Kendal
26	Jawa Tengah	Klaten
27	Jawa Tengah	Magelang
28	Jawa Tengah	Pemalang
29	Jawa Tengah	Purbalingga
30	Jawa Tengah	Tegal
31	Jawa Tengah	Temanggung
32	Jawa Tengah	Wonosobo
33	Jawa Timur	Banyuwangi
34	Jawa Timur	Blitar

<b>No</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>
35	Jawa Timur	Bondowoso
36	Jawa Timur	Jember
37	Jawa Timur	Kediri
38	Jawa Timur	Lumajang
39	Jawa Timur	Madiun
40	Jawa Timur	Magetan
41	Jawa Timur	Malang
42	Jawa Timur	Mojokerto
43	Jawa Timur	Nganjuk
44	Jawa Timur	Pasuruan
45	Jawa Timur	Ponorogo
46	Jawa Timur	Probolinggo
47	Lampung	Lampung Barat
48	Lampung	Lampung Selatan
49	Lampung	Tanggamus
50	Maluku	Maluku Tengah
51	Nanggroe Aceh Darussalam	Aceh Besar
52	Nanggroe Aceh Darussalam	Bener Meriah
53	Nusa Tenggara Barat	Bima
54	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur
55	Nusa Tenggara Timur	Ende
56	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur
57	Nusa Tenggara Timur	Manggarai
58	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat
59	Nusa Tenggara Timur	Negekeo
60	Nusa Tenggara Timur	Ngada
61	Nusa Tenggara Timur	Sikka
62	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow
63	Sulawesi Utara	Kota Bitung
64	Sulawesi Utara	Minahasa
65	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan
66	Sulawesi Utara	Minahasa Utara
67	Sumatera Barat	Agam
68	Sumatera Barat	Pasaman Barat
69	Sumatera Barat	Solok
70	Sumatera Barat	Tanah Datar
71	Sumatera Selatan	Lahat
72	Sumatera Selatan	Muara Enim

<b>No</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>
73	Sumatera Selatan	Musi Rawas
74	Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam
75	Sumatera Utara	Karo
76	Sumatera Utara	Mandailing Natal
77	Sumatera Utara	Padang Sidempuan
78	Sumatera Utara	Tapanuli Selatan
79	Sumatera Utara	Tapanuli Utara

**Tabel L1.4. Daftar Kabupaten/Kota yang memiliki  
Risiko Tinggi Kekeringan**

<b>No</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>
1	Bali	Karang Asem
2	Bangka Belitung	Bangka
3	Bangka Belitung	Bangka Barat
4	Bangka Belitung	Bangka Tengah
5	Bangka Belitung	Belitung Timur
6	Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang
7	Banten	Kota Cilegon
8	Banten	Kota Tangerang
9	Banten	Pandeglang
10	Banten	Serang
11	Banten	Tangerang
12	DI. Yogyakarta	Kulon Progo
13	DI. Yogyakarta	GunungKidul
14	DKI Jakarta	Kota Jakarta Barat
15	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat
16	DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur
17	DKI Jakarta	Kota Jakarta Utara
18	Jambi	Kota Jambi
19	Jawa Barat	Bandung
20	Jawa Barat	Bandung Barat
21	Jawa Barat	Bekasi
22	Jawa Barat	Bogor
23	Jawa Barat	Cianjur
24	Jawa Barat	Cirebon
25	Jawa Barat	Karawang
26	Jawa Barat	Kota Bandung
27	Jawa Barat	Kota Banjar
28	Jawa Barat	Kota Bekasi
29	Jawa Barat	Kota Bogor
30	Jawa Barat	Kota Cimahi
31	Jawa Barat	Kota Cirebon
32	Jawa Barat	Kota Depok
33	Jawa Barat	Kota Sukabumi
34	Jawa Barat	Kota Tasikmalaya

No	PROVINSI	KABUPATEN
35	Jawa Barat	Majalengka
36	Jawa Barat	Purwakarta
37	Jawa Barat	Subang
38	Jawa Barat	Sukabumi
39	Jawa Barat	Sumedang
40	Jawa Barat	Tasikmalaya
41	Jawa Tengah	Banjarnegara
42	Jawa Tengah	Banyumas
43	Jawa Tengah	Batang
44	Jawa Tengah	Blora
45	Jawa Tengah	Boyolali
46	Jawa Tengah	Brebes
47	Jawa Tengah	Cilacap
48	Jawa Tengah	Demak
49	Jawa Tengah	Grobogan
50	Jawa Tengah	Jepara
51	Jawa Tengah	Karanganyar
52	Jawa Tengah	Kebumen
53	Jawa Tengah	Kendal
54	Jawa Tengah	Klaten
55	Jawa Tengah	Kota Magelang
56	Jawa Tengah	Kota Pekalongan
57	Jawa Tengah	Kota Salatiga
58	Jawa Tengah	Kota Semarang
59	Jawa Tengah	Kota Surakarta
60	Jawa Tengah	Kota Tegal
61	Jawa Tengah	Kudus
62	Jawa Tengah	Magelang
63	Jawa Tengah	Pati
64	Jawa Tengah	Pekalongan
65	Jawa Tengah	Pemalang
66	Jawa Tengah	Purbalingga
67	Jawa Tengah	Purworejo
68	Jawa Tengah	Rembang
69	Jawa Tengah	Semarang
70	Jawa Tengah	Sragen
71	Jawa Tengah	Sukoharjo
72	Jawa Tengah	Tegal



No	PROVINSI	KABUPATEN
73	Jawa Tengah	Temanggung
74	Jawa Tengah	Wonogiri
75	Jawa Tengah	Wonosobo
76	Jawa Timur	Bojonegoro
77	Jawa Timur	Jombang
78	Jawa Timur	Kediri
79	Jawa Timur	Kodya Blitar
80	Jawa Timur	Kota Kediri
81	Jawa Timur	Kota Madiun
82	Jawa Timur	Kota Malang
83	Jawa Timur	Madiun
84	Jawa Timur	Magetan
85	Jawa Timur	Nganjuk
86	Jawa Timur	Ngawi
87	Jawa Timur	Pacitan
88	Jawa Timur	Pamekasan
89	Jawa Timur	Pasuruan
90	Jawa Timur	Ponorogo
91	Jawa Timur	Probolinggo
92	Jawa Timur	Sumenep
93	Jawa Timur	Trenggalek
94	Jawa Timur	Tuban
95	Jawa Timur	Tulungagung
96	Kalimantan Barat	Kota Pontianak
97	Kalimantan Selatan	Hulu Sei Tengah
98	Kalimantan Selatan	Kota Baru
99	Kalimantan Selatan	Tabalong
100	Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu
101	Kalimantan Selatan	Tanah Laut
102	Kalimantan Tengah	Barito Selatan
103	Kalimantan Tengah	Barito Timur
104	Kalimantan Tengah	Kota Waringin Barat
105	Kalimantan Tengah	Kota Waringin Timur
106	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan
107	Kalimantan Timur	Kota Bontang
108	Kalimantan Timur	Kota Samarinda
109	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara
110	Kalimantan Timur	Kutai Timur

No	PROVINSI	KABUPATEN
111	Kepulauan Riau	Bintan
112	Kepulauan Riau	Karimun
113	Kepulauan Riau	Kota Batam
114	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang
115	Lampung	Kota Bandar Lampung
116	Lampung	Kota Metro
117	Lampung	Lampung Selatan
118	Lampung	Lampung Tengah
119	Lampung	Lampung Timur
120	Lampung	Lampung Utara
121	Lampung	Tanggamus
122	Lampung	Tulangbawang
123	Lampung	Way Kanan
124	Maluku Utara	Halmahera Barat
125	Maluku Utara	Kota Tidore
126	Maluku Utara	Tidore
127	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat
128	Nusa Tenggara Timur	Ngada
129	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat
130	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya
131	Papua Barat	Kota Sorong
132	Riau	Indragiri Hilir
133	Riau	Pekan Baru
134	Riau	Pelalawan
135	Riau	Siak
136	Sulawesi Barat	Majene
137	Sulawesi Barat	Mamuju
138	Sulawesi Barat	Polewali Mandar
139	Sulawesi Selatan	Kota Makassar
140	Sulawesi Selatan	Pangkajene Kepulauan
141	Sulawesi Selatan	Pinrang
142	Sulawesi Selatan	Takalar
143	Sulawesi Utara	Kota Manado
144	Sumatera Barat	Kota Padang
145	Sumatera Barat	Padang Pariaman
146	Sumatera Selatan	Banyuasin
147	Sumatera Selatan	Kota Palembang
148	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin

No	PROVINSI	KABUPATEN
149	Sumatera Selatan	Musi Rawas
150	Sumatera Selatan	Oku Selatan
151	Sumatera Selatan	Oku Timur
152	Sumatera Utara	Kota Sibolga

**Tabel L1.5. Daftar Kabupaten/Kota yang Memiliki  
Risiko Tinggi Banjir**

<b>No.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>
1	Bali	Klungkung
2	Bali	Kota Denpasar
3	Bangka Belitung	Belitung
4	Bangka Belitung	Belitung Timur
5	Banten	Kota Tangerang
6	Banten	Serang
7	Banten	Tangerang
8	DI. Yogyakarta	Bantul
9	DI. Yogyakarta	Kulon Progo
10	DKI Jakarta	Kota Jakarta Barat
11	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat
12	DKI Jakarta	Kota Jakarta Selatan
13	DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur
14	DKI Jakarta	Kota Jakarta Utara
15	Gorontalo	Boalemo
16	Papua Barat	Kota Sorong
17	Papua Barat	Sorong
18	Papua Barat	Sorong Selatan
19	Jambi	Batanghari
20	Jambi	Kota Jambi
21	Jambi	Muaro Jambi
22	Jambi	Tanjung Jabung Barat
23	Jambi	Tanjung Jabung Timur
24	Jawa Barat	Bandung
25	Jawa Barat	Bekasi
26	Jawa Barat	Ciamis
27	Jawa Barat	Cirebon
28	Jawa Barat	Indramayu
29	Jawa Barat	Karawang
30	Jawa Barat	Kota Banjar
31	Jawa Barat	Kota Bekasi
32	Jawa Barat	Majalengka
33	Jawa Barat	Purwakarta
34	Jawa Barat	Subang

No	PROVINSI	KABUPATEN
35	Jawa Barat	Sukabumi
36	Jawa Barat	Sumedang
37	Jawa Tengah	Banyumas
38	Jawa Tengah	Brebes
39	Jawa Tengah	Cilacap
40	Jawa Tengah	Demak
41	Jawa Tengah	Grobogan
42	Jawa Tengah	Jepara
43	Jawa Tengah	Kebumen
44	Jawa Tengah	Kendal
45	Jawa Tengah	Kota Pekalongan
46	Jawa Tengah	Kota Semarang
47	Jawa Tengah	Kota Tegal
48	Jawa Tengah	Kudus
49	Jawa Tengah	Pati
50	Jawa Tengah	Pekalongan
51	Jawa Tengah	Pemalang
52	Jawa Tengah	Purworejo
53	Jawa Tengah	Semarang
54	Jawa Tengah	Tegal
55	Jawa Timur	Bangkalan
56	Jawa Timur	Banyuwangi
57	Jawa Timur	Bojonegoro
58	Jawa Timur	Gresik
59	Jawa Timur	Jombang
60	Jawa Timur	Kodya Pasuruan
61	Jawa Timur	Kota Mojokerto
62	Jawa Timur	Kota Surabaya
63	Jawa Timur	Lamongan
64	Jawa Timur	Lumajang
65	Jawa Timur	Malang
66	Jawa Timur	Mojokerto
67	Jawa Timur	Pasuruan
68	Jawa Timur	Sidoarjo
69	Jawa Timur	Situbondo
70	Jawa Timur	Tuban
71	Kalimantan Barat	Bengkayang
72	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu

<b>No</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>
73	Kalimantan Barat	Kayong Utara
74	Kalimantan Barat	Ketapang
75	Kalimantan Barat	Kota Pontianak
76	Kalimantan Barat	Kota Singkawang
77	Kalimantan Barat	Pontianak
78	Kalimantan Barat	Sambas
79	Kalimantan Barat	Sanggau
80	Kalimantan Barat	Sekadau
81	Kalimantan Barat	Sintang
82	Kalimantan Selatan	Banjar
83	Kalimantan Selatan	Barito Kuala
84	Kalimantan Selatan	Hulu Sei Selatan
85	Kalimantan Selatan	Kota Banjar Baru
86	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin
87	Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu
88	Kalimantan Selatan	Tanah Laut
89	Kalimantan Selatan	Tapin
90	Kalimantan Tengah	Kota Waringin Timur
91	Kalimantan Tengah	Sukamara
92	Kalimantan Timur	Bulungan
93	Kalimantan Timur	Kota Tarakan
94	Lampung	Lampung Tengah
95	Lampung	Tulangbawang
96	Maluku	Maluku Tengah
97	Maluku	Maluku Tenggara Barat
98	Maluku	Seram Bagian Barat
99	Nanggroe Aceh Darussalam	Aceh Besar
100	Nanggroe Aceh Darussalam	Aceh Tamiang
101	Nanggroe Aceh Darussalam	Aceh Timur
102	Nanggroe Aceh Darussalam	Aceh Utara
103	Nanggroe Aceh Darussalam	Bireun
104	Nanggroe Aceh Darussalam	Kota Banda Aceh
105	Nanggroe Aceh Darussalam	Kota Langsa
106	Nanggroe Aceh Darussalam	Kota Lhoksumawe
107	Nanggroe Aceh Darussalam	Nagan Raya
108	Nusa Tenggara Barat	Bima
109	Nusa Tenggara Barat	Dompu
110	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima

<b>No</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>
111	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram
112	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat
113	Nusa Tenggara Timur	Belu
114	Nusa Tenggara Timur	Ende
115	Nusa Tenggara Timur	Kupang
116	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat
117	Nusa Tenggara Timur	Negekeo
118	Nusa Tenggara Timur	Ngada
119	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan
120	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara
121	Papua	Asmat
122	Papua	Boven Digoel
123	Papua	Kota Jayapura
124	Papua	Mappi
125	Papua	Merauke
126	Papua	Mimika
127	Papua	Nabire
128	Papua	Waropen
129	Riau	Kampar
130	Riau	Kuantan Singingi
131	Riau	Pekan Baru
132	Riau	Pelalawan
133	Riau	Rokan Hulu
134	Riau	Siak
135	Sulawesi Barat	Polewali Mandar
136	Sulawesi Selatan	Bone
137	Sulawesi Selatan	Gowa
138	Sulawesi Selatan	Kota Makassar
139	Sulawesi Selatan	Kota Palopo
140	Sulawesi Selatan	Luwu
141	Sulawesi Selatan	Luwu Timur
142	Sulawesi Selatan	Luwu Utara
143	Sulawesi Selatan	Maros
144	Sulawesi Selatan	Pangkajene Kepulauan
145	Sulawesi Selatan	Pinrang
146	Sulawesi Selatan	Sidenreng Rappang
147	Sulawesi Selatan	Soppeng
148	Sulawesi Selatan	Takalar

<b>No</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>
149	Sulawesi Selatan	Tana Toraja
150	Sulawesi Selatan	Wajo
151	Sulawesi Tenggara	Buton
152	Sulawesi Tenggara	Buton Utara
153	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan
154	Sulawesi Tenggara	Kota Baubau
155	Sulawesi Utara	Kota Manado
156	Sumatera Barat	Agam
157	Sumatera Barat	Pasaman Barat
158	Sumatera Selatan	Kota Palembang
159	Sumatera Selatan	Kota Prabumulih
160	Sumatera Selatan	Lahat
161	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin
162	Sumatera Selatan	Musi Rawas
163	Sumatera Selatan	Ogan Ilir
164	Sumatera Utara	Asahan
165	Sumatera Utara	Batubara
166	Sumatera Utara	Deli Serdang
167	Sumatera Utara	Kota Medan
168	Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai
169	Sumatera Utara	Labuhan Batu
170	Sumatera Utara	Langkat
171	Sumatera Utara	Mandailing Natal
172	Sumatera Utara	Serdang Bedagai
173	Sumatera Utara	Tapanuli Selatan
174	Sumatera Utara	Tapanuli Tengah



**Tabel L1.6. Daftar Kabupaten/Kota yang Memiliki Risiko Tinggi Gerakan Tanah**

<b>No</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>
1	Bali	Bangli
2	Bali	Buleleng
3	Bali	Jembrana
4	Bali	Karang Asem
5	Bali	Tabanan
6	Banten	Lebak
7	Bengkulu	Bengkulu Utara
8	Bengkulu	Kaur
9	Bengkulu	Kepahiang
10	Bengkulu	Lebong
11	Bengkulu	Rejang Lebong
12	Gorontalo	Bone Bolango
13	Gorontalo	Gorontalo
14	Papua Barat	Kaimana
15	Papua Barat	Kota Sorong
16	Papua Barat	Manokwari
17	Papua Barat	Raja Ampat
18	Papua Barat	Sorong
19	Papua Barat	Teluk Wondama
20	Jambi	Kerinci
21	Jawa Barat	Bandung
22	Jawa Barat	Bandung Barat
23	Jawa Barat	Bogor
24	Jawa Barat	Ciamis
25	Jawa Barat	Cianjur
26	Jawa Barat	Garut
27	Jawa Barat	Kota Sukabumi
28	Jawa Barat	Kuningan
29	Jawa Barat	Sukabumi
30	Jawa Barat	Sumedang
31	Jawa Barat	Tasikmalaya
32	Jawa Tengah	Banjarnegara
33	Jawa Tengah	Banyumas
34	Jawa Tengah	Pekalongan

No	PROVINSI	KABUPATEN
35	Jawa Tengah	Purbalingga
36	Jawa Tengah	Wonosobo
37	Jawa Timur	Kota Batu
38	Jawa Timur	Pacitan
39	Jawa Timur	Pasuruan
40	Jawa Timur	Probolinggo
41	Jawa Timur	Sumenep
42	Jawa Timur	Trenggalek
43	Kalimantan Tengah	Murung Raya
44	Kalimantan Timur	Malinau
45	Lampung	Kota Bandar Lampung
46	Lampung	Lampung Barat
47	Lampung	Lampung Utara
48	Lampung	Tanggamus
49	Maluku	Buru
50	Maluku	Maluku Tengah
51	Maluku Utara	Tidore
52	Nanggroe Aceh Darussalam	Aceh Barat Daya
53	Nanggroe Aceh Darussalam	Aceh Besar
54	Nanggroe Aceh Darussalam	Aceh Jaya
55	Nanggroe Aceh Darussalam	Aceh Tengah
56	Nanggroe Aceh Darussalam	Aceh Tenggara
57	Nanggroe Aceh Darussalam	Aceh Timur
58	Nanggroe Aceh Darussalam	Bener Meriah
59	Nanggroe Aceh Darussalam	Bireun
60	Nanggroe Aceh Darussalam	Gayo Lues
61	Nanggroe Aceh Darussalam	Kota Sabang
62	Nanggroe Aceh Darussalam	Nagan Raya
63	Nanggroe Aceh Darussalam	Pidie
64	Nanggroe Aceh Darussalam	Pidie Jaya
65	Nusa Tenggara Barat	Bima
66	Nusa Tenggara Barat	Dompu
67	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima
68	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat
69	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur
70	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
71	Nusa Tenggara Timur	Belu
72	Nusa Tenggara Timur	Ende

<b>No</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>
73	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur
74	Nusa Tenggara Timur	Kupang
75	Nusa Tenggara Timur	Manggarai
76	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat
77	Nusa Tenggara Timur	Negekeo
78	Nusa Tenggara Timur	Ngada
79	Nusa Tenggara Timur	Sikka
80	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur
81	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan
82	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara
83	Papua	Jaya Wijaya
84	Papua	Jayapura
85	Papua	Keerom
86	Papua	Kota Jayapura
87	Papua	Nabire
88	Papua	Paniai
89	Papua	Pegunungan Bintang
90	Papua	Puncak Jaya
91	Papua	Sarmi
92	Papua	Tolikara
93	Papua	Yahukimo
94	Papua	Yapen Waropen
95	Sulawesi Barat	Majene
96	Sulawesi Barat	Mamasa
97	Sulawesi Barat	Mamuju
98	Sulawesi Barat	Polewali Mandar
99	Sulawesi Selatan	Bone
100	Sulawesi Selatan	Enrekang
101	Sulawesi Selatan	Gowa
102	Sulawesi Selatan	Kota Palopo
103	Sulawesi Selatan	Luwu
104	Sulawesi Selatan	Luwu Timur
105	Sulawesi Selatan	Luwu Utara
106	Sulawesi Selatan	Pinrang
107	Sulawesi Selatan	Sinjai
108	Sulawesi Selatan	Soppeng
109	Sulawesi Selatan	Tana Toraja
110	Sulawesi Tengah	Banggai

<b>No</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>
111	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan
112	Sulawesi Tengah	Buol
113	Sulawesi Tengah	Donggala
114	Sulawesi Tengah	Kota Palu
115	Sulawesi Tengah	Morowali
116	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong
117	Sulawesi Tengah	Poso
118	Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una
119	Sulawesi Tengah	Toli Toli
120	Sulawesi Tenggara	Kolaka Utara
121	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara
122	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari
123	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow
124	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Utara
125	Sulawesi Utara	Kepulauan Sitaro
126	Sulawesi Utara	Kota Bitung
127	Sulawesi Utara	Kota Tomohon
128	Sulawesi Utara	Kotamobagu
129	Sulawesi Utara	Minahasa
130	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan
131	Sulawesi Utara	Minahasa Utara
132	Sumatera Barat	Kep.Mentawai
133	Sumatera Barat	Kota Bukit Tinggi
134	Sumatera Barat	Kota Padang
135	Sumatera Barat	Lima Puluh Koto
136	Sumatera Barat	Pasaman
137	Sumatera Barat	Solok
138	Sumatera Selatan	Empat Lawang
139	Sumatera Selatan	Lahat
140	Sumatera Selatan	Oku Selatan
141	Sumatera Utara	Dairi
142	Sumatera Utara	Humbang Hasundutan
143	Sumatera Utara	Karo
144	Sumatera Utara	Kota Sibolga
145	Sumatera Utara	Langkat
146	Sumatera Utara	Mandailing Natal
147	Sumatera Utara	Nias
148	Sumatera Utara	Nias Selatan

<b>No</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>
149	Sumatera Utara	Padang Sidempuan
150	Sumatera Utara	Pakpak Bharat
151	Sumatera Utara	Simalungun
152	Sumatera Utara	Tapanuli Selatan
153	Sumatera Utara	Tapanuli Utara
154	Sumatera Utara	Toba Samosir



**LAMPIRAN 2. MATRIK INDUK KEGIATAN RENCANA AKSI  
NASIONAL PENGURANGAN RISIKO BENCANA  
(RAN-PRB) TAHUN 2010-2012**





MATRIK RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN RISIKO BENCANA (RAN PRB) 2010-2012

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)		Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2012		
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b>									
<b>PROGRAM A : Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan</b>									
1	Melakukan koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya	Membangun kerjasama dengan pihak perguruan tinggi  Terselenggaranya koordinasi, pembagian tugas dan kewenangan serta sumber daya di setiap tingkat	Seluruh daerah rawan bencana		Meningkatnya harmonisasi antara riset dan operasional  Seluruh pelaku pembangunan ditingkat pusat, propinsi kab/kota, kecamatan ( pengelola program, stakeholder ) melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan, pedoman, standard dan juklak/juknis serta sesuai kewenangannya	200	200	200 APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA  BNPB
	Terbentuk dan berkembangnya Forum DAS	33 Propinsi			Terbentuk dan berkembangnya Forum DAS	1,200	1,200	1,200 APBN	Kem. Kehutanan, Dirjen RUPS
	Lahan daerah penyangga rawan kebakaran hutan dan lahan	Riau Jambi Sumatera Barat Kalimantan Barat kalimantan Timur			Terbinanya kelembagaan masyarakat dan pemerintah dalam pengendalian kebakaran hutan	6,800	7,300	7,800 APBN	Kem. Kehutanan, Dirjen PHKA
	33 Prov	33 prov			Terselenggaranya Kegiatan dekonstruksi ditunjukan untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana alam bidang bantuan sosial sebagai upaya pengurangan risiko bencana melalui kegiatan yang bersifat non fisik seperti pelatihan SDM penanggulangan Bencana (TAGANA), Pelatihan Kemampuan Evakuasi Korban Bencana, Pelatihan Kemampuan Pengelolaan Logistik bagi Korban Bencana. Sedangkan Tugas Pembantuan difokuskan pada kegiatan bantuan yang bersifat fisik, seperti bantuan lauk-pauk dan bantuan stimulan bahan bangunan rumah bagi korban bencana.	98,137,339	117,764,87	141,317,94 APBN	Kem. Sosial, Dinas Sosial/Kesos/Institusi Sosial Provinsi terkait
	Penguatan kapasitas kepakaran multidisiplin di Perguruan tinggi, BPBD, lembaga riset terkait	Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu			tersusun dan terseliasinya dokumen strategi penguatan kapasitas kepakaran dan SDM terkait PRB tingkat nasional dan daerah yang mendukung strategi PB nasional	500	1,000	- APBN	LPI, Puslit Oseanografi

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
	Tervjuhnya Koordinasi Bidang Penanggulangan Kerawanan Sosial dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung			Meningkatnya penanganan tanggap cepat terhadap gangguan kesra yang diukur melalui: Jumlah K/L, NGO, Pemda yang berperan aktif dalam tanggap cepat terhadap gangguan kesra	1,000	1,200	1,200	APBN	KEMENKOKESRA
	Meningkatnya Koordinasi Urusan Dinamika Alam dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Sosial	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung			Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam penanganan bencana alam untuk meningkatkan Ketahanan Sosial	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
	Meningkatnya Koordinasi Urusan Konflik Sosial dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Sosial	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung			Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam penanganan konflik sosial untuk meningkatkan Ketahanan Sosial	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
	Meningkatnya Koordinasi Urusan Pemulihan Lingkungan dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Sosial	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung			Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam penanganan Pemulihan Lingkungan untuk meningkatkan Ketahanan Sosial	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
	Meningkatnya Koordinasi Urusan Dampak Teknologi dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Sosial	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung			Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam penanganan Dampak Negatif Teknologi untuk meningkatkan Ketahanan Sosial	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
	Meningkatnya Upaya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap _an_uan Bencana alam	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung			Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam upaya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap _an_uan Bencana Alam	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
	Meningkatnya Upaya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Konflik sosial	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung			Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam upaya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Konflik sosial	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
	Meningkatnya Upaya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Perubahan Lingkungan	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung			Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam upaya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Perubahan Lingkungan	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
	Meningkatnya Upaya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Dampak Teknologi	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung			Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam upaya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Dampak Negatif Teknologi	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUATA Rp) (6)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
		Meningkatnya Upaya Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat terhadap gangguan kerawanan sosial	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung		Terselenggarakannya sosialisasi pengembangan budaya sadar Gangguan Kerawanan Sosial di Lingkungan K/L terkait	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
		Tersinkronisasinya upaya Pemulihan fisik dan non fisik dalam rangka pengulangan kerawanan sosial	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung		Tertanggunya Pemulihan fisik dan non fisik dalam rangka pengulangan kerawanan sosial	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
		Meningkatnya Upaya pengendalian dampak pengelolaan dan eksploitasi SDA terhadap gangguan Kesejahteraan Rakyat	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung		Terselenggaranya pengendalian dampak pengelolaan dan eksploitasi SDA terhadap gangguan Kesejahteraan Rakyat	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
		Tersusunnya Kebijakan tentang penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung		Terselenggaranya koordinasi Kebijakan tentang penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
		Meningkatnya pemahaman aparaturnya dalam upaya Mitigasi Bencana dan bahaya kebakaran pada Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	20 provinsi		Terciptanya dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah	1.000	1.000	1.000	APBN	KEMDAGRI
		Meningkatnya pemahaman aparaturnya dalam masalah penanganan bencana yang sewaktu-waktu terjadi, sehingga masa kritis pada tahap tanggap darurat bencana dapat diatasi dengan baik	20 provinsi		Terciptanya dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah	1.000	1.000	1.000	APBN	KEMDAGRI
		Memotivasi petugas kebakaran dengan cara memberikan reward	500 kab/kota		Terwujudnya peningkatan kemampuan aparat	2.500	1.000	1.500	APBN	KEMDAGRI
		Mewujudkan pola keterpaduan dalam penanggulangan kebakaran	20 provinsi		Tersusunnya prosedur tetap (protap)	1.500			APBN	KEMDAGRI
		Meningkatnya ketramplilan dan pemahaman masyarakat dalam upaya mitigasi bencana	20 provinsi		Terciptanya masyarakat yang sadar bencana	3.000			APBN	KEMDAGRI

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
	Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana	Jakarta			Tersedianya organisasi direktorat khusus yang menangani keselamatan dengan kewenangan yang dapat menjamin ketaatan (operator sarana dan prasana) terhadap regulasi perkeretaapian yang berlaku	800	-	-	Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian	
	Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana	Jawa dan Sumatera			Terbentuknya unit pengawasan/inspektur untuk pencegahan bencana pada masing-masing Saker di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1.000	1.000	1.000	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian
	Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana	Banten Jabar Jateng DIY Jatim Sumut NAD Sumbang Sumsel Lampung			Tersedianya unit pelaksana teknis dalam pembinaan teknis serta pengawasan dan penegakan hukum di daerah	-	500	-	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian
	Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana	Jawa dan Sumatera			Tersedianya unit pelaksana teknis pengujian prasarana perkeretaapian di daerah	-	500	-	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian
	Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana	Jawa dan Sumatera			Tersedianya unit pelaksana teknis pengujian sarana perkeretaapian di daerah	-	500	-	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian
	Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana	Jawa dan Sumatera			Tersedianya unit pelaksana teknis dalam perawatan dan pengoperasian peralatan serta administrasi pergudangan di daerah	-	500	-	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian
	Pengambil kebijakan di pusat dan daerah	Pusat dan Daerah			Terlaksananya kerjasama penanggulangan bencana yang terintegrasi				APBN	PPK Kementerian Kesehatan
	Menyusun peraturan-peraturan				Tersedianya peraturan-peraturan terkait upaya penanggulangan bencana				APBN	PPK Kementerian Kesehatan

No	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
		Membentuk kelembagaan			Tersedianya unit kerja terkait dengan upaya penanggulangan bencana				APBN	PPK Kementerian Kesehatan
		Sistem mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam mitigasi dan penanganan pasca bencana.	33 provinsi		Tertindakannya sistem koordinasi dan mekanisme kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam mitigasi dan penanganan pasca bencana antara pemerintah pusat dan daerah	5,000	5,000	5,000	APBN	Kem. Diknas, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
		Koordinasi dengan BNPB dan BPBD dan instansi terkait untuk menyusun mekanisme kerja dan merencanakan dukungan sar-pras	Mabes TNI dan Kowil		Terpenuhinya dukungan alpa/sarana, dan kesehatan prasarana PRCPB ditingkat pusat dan daerah (secara bertahap)	12,650	18,245	21,378	APBN	Siog TNI
		Tertindakannya koordinasi dalam perencanaan dan pemantauan Program PRB di tujuh Provinsi	NTT Sumbang Bengkulu Ambon, Maluku Jawa Tengah DIY Sulteng	Kota Palu	Dokumen Perencanaan Program dan terlaksananya kegiatan Pemantuan Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	275	275		PHLN	Bappenas
		Meningkatnya pemahaman Pemerintah Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	NTT Sumbang Bengkulu Ambon, Maluku Jawa Tengah DIY Sulteng	Kota Palu	Tertindakannya Kegiatan sosialisasi Pedoman Penyusunan RPB	350	400		PHLN	BNPB
		Meningkatnya pemahaman Pemerintah Provinsi ttg Mekanisme Penyusunan RTRW Berbasis Mitigasi Bencana	Jawa Tengah DIY Bengkulu NTT Sulteng	Kota Palu	Tertindakannya Kegiatan sosialisasi ttg Perda RTRW Berbasis Mitigasi Bencana	275	275		PHLN	KEMDAGRI kerjasama dgn kem. PU, BNPB dan Pemerintah Daerah Jateng, DIY, Bengkulu, NTT, Maluku dan Kota Palu
		Terbentuk dan meningkatnya kapasitas dari 5 forum tematik dan 7 Forum PRB Daerah dalam hal tugas, kewenangan, dan sumber dayanya terkait dengan PRB.	Sumbang Bengkulu DIY-Jateng Sulteng NTT Maluku Jawa Timur, Jawa Tengah	Gunung Talang Gunung Merapi Das Benneain Gunung Semeru DAS Bengawan Solo Kota Palu	1) Terbentuk dan beroperasinya 5 forum PRB serta 7 forum tematik ; 2) Tersusunnya program kerja yang koheren dan mawadahi kebutuhan antar pemangku kepentingan dengan sumber daya yang saling komplementer; 3) Adanya mekanisme kerja yang jelas antar para pemangku kepentingan.	636	546		PHLN	BNPB (bekerjasama dengan PLANAS dan BPBD serta forum PRB lainnya)

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
	6 BPBD provinsi dan 1 BPBD Kota dapat menjalankan mandatnya (Turfoks) sesuai dengan peraturan daerah dan perundangan yang ada	Sumber NTT Maluku DIY Jateng Sulteng Bengkulu	Kota Palu	Adanya peningkatan kapasitas fungsional (teknis) dan managerial baik dalam aspek kelembagaan maupun SDM	555	565	PHLN	KEMDAGRI, BNPB, (bekerjasama dengan BPBD atau instansi penangungjawab PB di wilayah tsb)		
	Adanya peningkatan kapasitas BNPB (secara kelembagaan dan personal) dalam menjalankan mandatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.	Nasional (BNPB)		1) Teriaksananya pelatihan untuk para pejabat dan staf struktural BNPB dalam aspek fungsional dan managerial sesuai dengan tupoksinya; 2) Terbentuknya Pokja tematik dengan berbagai sektor terkait.	1.390	1.100	PHLN	BNPB		
	Terwujudnya sinkronisasi, kerja sama dan kemitraan antar para pemangku kepentingan dalam mendorong penerapan PRBBK di 6 provinsi lokasi SCDRR melalui penyelenggaraan Konferensi PRBBK VI, pertemuan koordinasi reguler, dan pemantauan ke lapangan	Sumber Bengkulu Di Yogyakarta Jawa Tengah NTT Sulteng Makasar	Kota Palu	1) Adanya mekanisme koordinasi dan sinkronisasi program PRBBK antar pemangku kepentingan; 2) Adanya kerjasama yang terfasilitasi; 3) Adanya kegiatan lokakarya, seminar dan konferensi terselenggarakan; 4) Adanya kegiatan pemantauan ke lapangan yang terjadwal	405	825	PHLN	BNPB, Bappenas, KEMDAGRI		
	CSO s and Government	Jakarta		#of IEC materials produced/guideline for advocacy developed	76.5		PHLN	ECB Indonesia (Care-CRS-Oxfam-World Vision-Save the Children-Mercy Corps-UNICEF-UNLV)		
	District government officers, agencies and other stakeholders	NTT NTB Papua Papua Barat Sulawesi Utara Sulawesi Tengah	Belu, TTU, TTS, Ende, Manggarai, Lembata and 1 more to be determined. Jayawijaya, Nabire Sangihe Donggala	\$ A coordination mechanism is operational in each targeted district.	11.000	10.000	5.000 PHLN	1. Oxfam 2. PMPB (Belu, TTU, TTS) 3. FRD (Ende, Manggarai, Lembata) 4. Perkumpulan Kelola (Sangihe) 5. Yayasan Lambata (Donggala) 6. IDEA 7. IDEP 8. dan sekitar 7 LSM local lain yang akan diidentifikasi		

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
		Local Government (district level)	Kalimantan Barat Sulawesi Tengah Papua NAD		#CP developed and implemented	284.1	284.1	284.1	PHLN, Donors (1 US\$ = 9,470)	World Vision Partners (Local Government)
		Bappeda, BPBD Kabupaten/ Keshbanglinmas, SKPD terkait, dan LSM lokal	Jateng NTT NTB	Rembang dan Groboogan Lembata dan Sikka Dompu	- Terdapatnya RPB, RAD PRB, dan RenKon di tingkat kabupaten dengan anggaran yang cukup	X	X	X	PHLN	Plan Indonesia
		Bappeda, BPBD Kabupaten/ Keshbanglinmas, SKPD terkait, dan LSM lokal	Jateng NTT NTB	Rembang dan Groboogan Lembata dan Sikka Dompu	Terdapatnya Perencanaan Pembangunan yang bersifat efektif PRB di tingkat Kabupaten, Alokasi anggaran Kabupaten untuk PRB	X	X	X	PHLN	Plan Indonesia
		Mainstreaming DRR in regular development and through post- disaster recovery			Support for the mainstreaming of DRR in: (i) sectoral development programs; (ii) regional and local development programs; (iii) World Bank and donor financed development programs and projects	10.101.33	10.101.33	10.101.33	PHLN	National Development Planning Agency (BAPPENAS), Ministry of Public Works, Local Governments, Civil Society, World Bank
					Support to national and local strategy for DRR and CCA linkages	789.17	789.17	789.17	PHLN	National Council for Climate Change (DNPI), National Disaster Management Agency (BNPBP)
		Tingkat yasan Bina Swadaya, unit usaha dan program/kegiatan	Jakarta		Kelembagaan PRB di Bina Swadaya berfungsi					Bina Swadaya
		BDPB tingkat kabupaten/kota, Forum PRB di desa	Bengkulu NTT Kalimantan Timur		Koordinasi dan kerjasama BDPB dengan Forum PRB masyarakat di tingkat desa, Kelembagaan PRB berfungsi					BINA SWADAYA
		Masyarakat desa ring I Kelut	Jawa Timur	Desa ring I Gunung Kelut	terbentuknya forum lokal komunitas Kelut				Swasta/ Masyarakat	Sampoerna, PSMB UPN Jogjakarta, Perkumpulan Skala

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
		Board Members, Staff, Volunteers, DM Village Committee	NAD Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Riau Kalimantan Timur	Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klaten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau- Bau Kutai Kartanegara	DRR institutionalized into PMI structure and function at all levels	2,356	159,730		Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter, PMI Chapter, PMI Branch, Community



No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)		Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUATA Rp)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
		Propinsi	Kab/Kota	Th 2010	Th 2011 (6)		Th 2012				
	Staff	NAD Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Riau Kalimantan Timur	Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang KlATEN, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau-Bau Kutai Kartanegara	Number of Focal point at national, province and district level with authority and resources to co-ordinate all related stakeholders on DRR and CCA	2,359	1,554	1,389	Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter, PMI Chapter, PMI Branch		
	PMI	PMI NHQ.		Ongoing dialogue, coordination and information exchange between DRR disaster managers and development sectors at all levels.	200	200	200	Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter		

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011 (6)	Th 2012		
		KSR (Volunteers Corps), TSR (Skilled Volunteers), CBAT (Community Based Action Team)	NAD Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Riau Kalimantan Timur	Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klaten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau- Bau Kutai Kartanegara	Number of KSR, TSR and CBAT recruited to be mobilized for DRR Activities	274.40	2.55		Swasta/ Masyarakat	PMI NHO, PMI Chapter, PMI Branch, Community, LGU

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUATA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			(7)	(8)
	Board Members, Staff, Volunteers	NAD Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Riau Kalimantan Timur	Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klaten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau-Bau Kutai Kartanegara	Capacity of Board Members, Staff and Volunteers increased	4,166	3,702	3,702	Swasta/ Masyarakat	PMI NHQ, PMI Chapter, PMI Branch	
	PMI's Staff and Volunteers	33 Provinces and 408 Districts		Staff and Volunteers developed DRR/CCA Planning based on comprehensive vulnerability and capacity assessment	34			Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter	
	PMI Staff	PMI NHQ		Logistic Management performed well to support Disaster Response Services	200	200	200	Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter	
	PMI NHQ, PMI Chapter, PMI Branch	PMI NHQ		Central Warehouse and Regional Warehouse in place, managed and functioned properly	1,000	1,000	1,000	Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter	
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 1 (JUATA Rp)</b>					<b>204,463</b>	<b>393,458</b>	<b>255,261</b>			
<b>TOTAL PENDANAAN PROGRAM A (JUATA Rp)</b>					<b>204,463</b>	<b>393,458</b>	<b>255,261</b>			
<b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>										
1	Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana	Seluruh Provinsi dan Kab/Kota melaksanakan pengenalan dan pengkajian ancaman bencana	Daerah rawan bencana	Jumlah kajian ancaman bencana yang dilaksanakan	30,000	36,000	42,000	APBN, APBD, PHLN	BNPB	
	1. Karakteristik geologi dan daya dukung keteknikkan tanah serta zonasi potensi likuifaksi	Banten Bali		Dipergunakannya peta zonasi likuifaksi oleh pemangku kepentingan	290	320	350	APBN	PTLWB BPPT LIPU, Puslit Geoteknologi	

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
		Memfasilitasi daerah dalam upaya Mitigasi Bencana dan bahaya kebakaran.	10 provinsi		Terkumpulnya informasi lokasi rawan bencana dari berbagai instansi terkait dan Pemerintah Daerah.	300		APBN	KEMDAGRI	
		Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanggulangan bencana. Di daerah agar lebih terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.	7 provinsi dan 1 kota		Terkumpulnya informasi lokasi rawan bencana dari berbagai instansi terkait dan Pemerintah Daerah.	4,000		PHLN	KEMDAGRI	
		Terlaksananya kegiatan SCDRR baik di pusat dan daerah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya.	7 provinsi dan 1 kota		Tersosialisasinya kriteria dan kerangka pelaksanaan proyek SCDRR	1,000		APBN	KEMDAGRI	
		Menjadikan posko Depdagri sebagai pusat komunikasi dan koordinasi penanggulangan bencana.	Jakarta		Tersedianya data dan informasi mengenai kebencanaan di daerah di Posko Bencana depdagri	500		APBN	KEMDAGRI	
		Intensifikasi kesehatan prov & kab/kota	Setiap prov & kab/kota		Adanya antipisasi terhadap setiap ancaman bencana yang timbul			APBN	PPK Kementerian Kesehatan	
		1). Tersusunnya Peta Risiko Bencana yang memenuhi kaidah pemetaan, memiliki legitimasi di kalangan pemangku kepentingan dan mudah diakses publik; 2). Adanya penguatan database kebencanaan di tingkat nasional (dan daerah); 3) Tersusun-nya buku data bencana 30 tahun dan buku profile bencana di lima provinsi.	DIY Jawa Tengah Bengkulu Sumbra NTT Sulteng	Kota Palu	1) Adanya Peta Risiko Bencana yang menjadi acuan para pemangku kepentingan dan sinkron antara pusat dan daerah; 2) Adanya database kebencanaan (DIBI) yang menjadi acuan para pemangku kepentingan dan sinkron antara pusat dan daerah; 3) Jumlah buku data bencana 30 tahun dan buku profile bencana per-provinsi yang dicetak (dan terdiseminasikan).	1,468	170	PHLN	BNPB (bekerjasama dengan K/L terkait, PT/PSB, BPBD dan NGOs)	
		ECB members-CBO s-government	Jakarta		CP of ECB members compiled	22.5	45	PHLN	ECB Indonesia (Care-CRS) Oxfam-World Vision- Save the Children-Mercy Corps-MPBI-IMC	
		BNPB dan LSM internasional	Nasional Jakarta		Pelatihan rencana kontinjensi dan KZB berjalan dengan rutin dengan dukungan dari berbagai pihak.	On-going dengan staff yang ada.	-	PHLN	OCHA	
		Staf lembaga pemerintahan dan LSM lokal	Jateng NTT NTB	Rembang dan Grobogan Lembata dan Sikka Dompu	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan studi banding	X	X	X PHLN	Plan Indonesia	

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUITA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			(7)	(8)
		Guru Sekolah	Jakarta Jawa Barat DIY Jateng NTT NTB	Bogor Bantul Rembang dan Grobagan Lembata dan Sikka Dompu	- Modul panduan tersedia untuk guru	X	X	X	PHLN	Plan Indonesia
		masyarakat rawan bencana kebakaran & banjir, pemukiman yg sering terjadi musibah	perumahan padat kota besar Jakarta		berhasil disediakan file tentang bencana didaerah tersebut					PKPU
		Staff Bina Swadaya di tiap unit kerja dan program/kegiatan	Jakarta		Teridentifikasi berbagai jenis ancaman dan sifatnya					BINA SWADAYA
		Staff BDPB, staff pemerintah Desa, anggota Forum PRB dan masyarakat	Bengkulu NTT Kalimantan Timur		Teridentifikasi berbagai jenis ancaman dan sifatnya					BINA SWADAYA
		Pemda dan para pemangku kepentingan tingkat propinsi dan kabupaten/ kota rawan erupsi gunungapi, longsor dan banjir	Jawa Timur DIY		Para pemangku kepentingan mampu mengkaji karakter ancaman di wilayahnya untuk digunakan dalam menyusun rencana penanggulangan bencana dan rencana pengurangan risiko.bencana	100	100	100	Swasia/ Masyarakat	PSMB UPN Veteran dan mitra lokal
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 1 (JUITA Rp)</b>										
2	Melakukan analisis risiko bencana	Seluruh Provinsi dan Kab/Kota melakukan analisis risiko bencana	Daerah rawan bencana		Jumlah dokumen analisis risiko bencana yang dilaksanakan	37.681	36.635	42.450	50.400 APBN, APBD, PHLN	BNPB
		1. Konsep penyusunan tata ruang wilayah berbasis mitigasi bencana	Jawa Tengah		Diterapkannya model/konsep penyusunan tata ruang berbasis mitigasi bencana	280	310	340	APBN	LIPI, Puslit Geoteknologi
		2. Diketuainya model prediksi	Jawa Tengah		Diterapkannya konsep mitigasi tld	285	315	345	APBN	LIPI, Puslit Geoteknologi
		3. Diketuainya parameter curah hujan sebagai pemicu longsor dan berkurangnya korban akibat bahaya tersebut	Jawa Barat Jawa Tengah		Berkurangnya korban dan kerugian akibat bencana longsor	270	300	330	APBN	LIPI, Puslit Geoteknologi
		Terfasilitasinya koordinasi penyelesaian masalah kelembagaan dan ketatalaksanaan bidang kebencanaan di daerah.	7 provinsi		Terselenggaranya kelembagaan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan yang berlaku.	400			APBN	KEMDAGRI
		Instansi kesehatan prov & kab/kota	Setiap prov & kab/kota		Adanya penilaian tingkat kerawanan bencana di setiap kab/kota	1.022	1.175	1.351	APBN	PPK Kementerian Kesehatan
			National Level						APBN	Badan Geologi, KESDM
										UN TWG DRR (Convergence Group)

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
		masyarakat rawan bencana kebakaran & banjir, pemukiman yg sering terjadi musibah Staff Bina Swadaya di tiap unit kerja dan program/kegiatan	Jakarta	Jakarta	berhasil disediakan file tentang bencana di daerah tersebut			PKPU		
		Staff BDPB, staff pemerintah Desa, anggota Forum PRB dan masyarakat	Bengkulu NTT Kalimantan Timur		Teridentifikasi tingkat risiko suatu ancaman berdasarkan tingkat kapasitas dan Kerentanan lembaga menangani PRB di berbagai tingkatan			BINA SWADAYA		
		Pemerintah RI Pemprov NAD Pemda dan para pemangku kepentingan tingkat propinsi dan kabupaten/ kota rawan erupsi gunungapi, longsor dan banjir	Indonesia Indonesia Jawa Timur DIY		Draft Peta Index Risiko Draft hasil risk assessment Para pemangku kepentingan mampu melakukan analisis risiko bencana di wilayah kerjanya untuk digunakan dalam menyusun rencana penanggulangan bencana dan rencana pengurangan risiko bencana	100 100	100	PHLN Swasta/ Masyarakat	PMB-ITB PMB-ITB PSMB UPN Veteran dan mitra loka Veteran	
		Community	NAD Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yo., akarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Riau Kalimantan Timur	Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klanten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yo., akarta Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau-Bau Kutai Kartanegara	PMI research capacity in hazards, risk and disaster studies	300		Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter	
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 2 (JUTA Rp)</b>						<b>38,657</b>	<b>45,400</b>	<b>52,866</b>		

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
3	Identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana	<p>(3)</p> <p>Teridentifikasi tindakan PRB di seluruh Provinsi dan kab/kota</p> <p>Minimalisasi gangguan DFI</p> <p>Penguatan kapasitas Peringatan Dini Bencana(PDB) pada Aparat dan pelaku PRB</p> <p>Meningkatnya pemahaman aparatur penda dalam upaya Mitigasi Bencana dan bahaya kebakaran pada Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>Instansi kesehatan prov &amp;kab/kota</p> <p>Meningkatnya komitmen Pemerintah Daerah dalam PRB melalui kegiatan Sosialisasi dan Advokasi</p> <p>masyarakat rawan bencana kebakaran &amp; kebanjiran, pemukiman yg sering terjadi musibah</p> <p>Staff Bina Swadaya di tiap unit kerja dan program/kegiatan</p> <p>Staff BDPB, staff pemerintah Desa, anggota Forum PRB dan masyarakat</p> <p>Board Members, Staff, Volunteer</p> <p>PMI NHQ, PMI Chapter, PMI Branch, community</p>	<p>(4)</p> <p>Daerah rawan bencana</p> <p>33 Prop.</p> <p>Nasional</p> <p>Sulawesi</p> <p>NTT</p> <p>Papua</p> <p>Sumatera Barat</p> <p>Bengkulu</p> <p>10 provinsi</p>	<p>(5)</p> <p>Jumlah Informasi tindakan PRB kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan</p> <p>Jml. Luas Pertanaman yang terkena gangguan DFI (ha)</p> <p>Terlaksananya pelatihan serta penguatan kapasitas aparat dan pelaku PDB dalam PRB yang didukung perguruan tinggi dan lembaga pendidikan terkait daerah</p> <p>Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah daerah dalam usaha Mitigasi Bencana dan bahaya kebakaran.</p> <p>Adanya hasil evaluasi upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan</p> <p>Adanya sejumlah Perda/Pergub, PerBup/Walikota tentang PRB</p> <p>berhasil disepakati jalur evakuasi &amp; jalur logistik jika bencana berulang</p> <p>Diperoleh tindakan PRB berikut tingkat pelaksanaannya</p> <p>Diperoleh tindakan PRB berikut tingkat pelaksanaannya</p> <p>Number of Relief to Recovery activities which reflect the attainment of DRR and CCA</p> <p>PMI-managed contingency funds (part of or separate from other savings initiatives).</p> <p>Perka BAPETEN tentang desain sistem catu daya darurat pada PLTN</p>	<p>(6)</p> <p>40,000</p> <p>1,500</p> <p>3,000</p> <p>3,000</p>	<p>48,000</p> <p>3,000</p> <p>500</p>	<p>56,000</p> <p>1,000</p>	<p>(7)</p> <p>APBN, APBD, PHLN</p> <p>APBN</p> <p>APBN</p> <p>APBD</p> <p>APBN</p> <p>PHLN</p> <p>PKPU</p> <p>BINA SWADAYA</p> <p>BINA SWADAYA</p> <p>Swasta/ Masyarakat</p> <p>Swasta/ Masyarakat</p> <p>59,164</p> <p>363 APBN</p>	<p>(8)</p> <p>BNPB</p> <p>Kementerian Pertanian</p> <p>LPI, Puslit Oseanografi</p> <p>KEMDAGRI</p> <p>PPK Kementerian Kesehatan</p> <p>BNPB kerjasama dgn Pemerintah Daerah</p> <p>BINA SWADAYA</p> <p>BINA SWADAYA</p> <p>PMI National Headquarter</p> <p>PMI National Headquarter</p> <p>BAPETEN</p>	
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 3 (JUTA Rp)</b>						<b>46,966</b>	<b>53,844</b>	<b>59,164</b>		
4	Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan	<p>Tersusunnya Perka BAPETEN tentang desain sistem catu daya darurat pada PLTN</p>	Jakarta		300	330				

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			(7)	(8)
	perundangan	Tersusunnya Perka BAPETEN tentang desain proteksi kebakaran dan ledakan internal pada PLTN			Perka BAPETEN tentang desain proteksi kebakaran dan ledakan internal pada PLTN					
		Tersusunnya dokumen perencanaan dan peraturan perundangan	Propinsi dan kab/kota		Seluruh pengambil keputusan dan stakeholder mempunyai komitmen untuk menyusun dokumen perencanaan dan peraturan perundangan	12,000	14,400	16,800	APBN, APBD, PHLN	BNPB
		Terlaksananya sosialisasi PDAS	33 Propinsi		Terlaksananya sosialisasi PDAS di 33 Propinsi	1,100	1,100	1,100	APBN	Kem. Kehutanan, Dirjen RUPS
		berfungsinya SSOP di 36 BPDAS	33 Propinsi		berfungsinya SSOP di 36 BPDAS	2,000	2,000	3,200	APBN	Kem. Kehutanan, Dirjen RUPS
		2 kegiatan (Penyusunan Pedoman dan Perencanaan Program)	Jakarta		Terselenggaranya kegiatan penyusunan perencanaan program dan buku pedoman yang terfokus pada Program Utama Depsos dalam sistem PB Nasional yaitu : "CCBDM" (Community Centre Based Disaster Management) atau penanggulangan bencana terpadu yang berbasis masyarakat dengan tujuan meningkatkan kapasitas kemampuan masyarakat secara terpadu agar lebih siap-siaga untuk menghadapi bencana yang akan datang melalui proses early warning system, rapid response dan social recovery	3,744.28	4,493.14	5,391.77	APBN	Kem. Sosial
		Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi untuk memudahkan Pemerintah Daerah apabila terjadi bencana	Jatim Sulut Sumbar Jabar Jateng		Tersusunnya Dokumen Rencana Kontijensi yang dapat diaktifkan untuk tanggap darurat bencana geologi bagi Pemerintah Daerah	703	808	929	APBN	Badan Geologi, KESDM
		Meningkatnya Ketahanan dan Pengetahuan Masyarakat/Lembaga mengenai Kebencanaan Geologi	Jabar Jateng Jatim Sumbar						APBN	Badan Geologi, KESDM



No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUATA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			(7)	(8)
		Terfasilitasinya rencana mitigasi bencana di 30 kawasan	Sumatera Barat Bengkulu Jawa Timur NTT Sulawesi Tenggara Lampung Bengkulu Jawa Tengah Jawa Barat DIY NTB NAD Sulawesi Utara Papua Jawa Timur Maluku Utara Sulawesi Selatan Gorontalo Sulawesi Tengah Maluku Papua Barat		Persentase kawasan pesisir yang mengadopsi mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami dalam perencanaan daerahnya	2,000	4,000	6,000	APBN	Kem. Kelautan & Perikanan
		Terusunnya norma, stantar, prosedur, dan kriteria mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil			Jumlah NSPK tentang mitigasi bencana yang dilengkapi dengan data bencana terkini	200	100	100	APBN	Kem. Kelautan & Perikanan
		Terusunnya 3 dokumen Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berbasis mitigasi bencana	Sumber NTT	2010: Kabupaten Pesisir Selatan (Sumber) dan Kabupaten Alor (NTT); 2011: Kabupaten/Pulau kecil lainnya	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	800	450		PHLN	BNPB bekerja sama dgn Kem. Kelautan & Perikanan
		Terusunnya Kebijakan tentang mekanisme kesiapan dan penanggulangan risiko Gangguan Kesejahteraan Rakyat	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung		Terselenggaranya koordinasi Kebijakan tentang mekanisme kesiapan dan penanggulangan risiko Gangguan Kesejahteraan Rakyat	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
		Terusunnya Kebijakan tentang Kedaruratan Gangguan Kesra	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung		Terselenggaranya koordinasi Kebijakan tentang Kedaruratan Gangguan Kesejahteraan Rakyat	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
		Memantapkan kesamaan tujuan bagi Pemda dalam pembentukan BPBD	5 provinsi		Tersusunnya pedoman penanggulangan bencana bagi daerah dalam pembentukan BPBD	300			APBN	KEMDAGRI
		Meningkatkan kesiapsiagaan aparat Pemda dalam penanggulangan wabah	5 provinsi		Tersusunnya pedoman kesiapsiagaan aparat dalam penanggulangan wabah di daerah.	300			APBN	KEMDAGRI

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
		Penguatan regulasi penanganan kecelakaan kereta api termasuk akibat bencana	Jakarta		Tersedianya Peraturan Menteri tentang standar keselamatan perkeretaapian nasional	400	-	-	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian
		Penguatan regulasi penanganan kecelakaan kereta api termasuk akibat bencana	Jakarta		Tersedianya Peraturan Menteri tentang pedoman audit keselamatan sarana dan prasarana KA	400	-	-	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian
		Penguatan regulasi penanganan kecelakaan kereta api termasuk akibat bencana	Jakarta		Tersedianya peraturan tentang pedoman penelitian, pemeriksaan dan penanganan kecelakaan kereta api termasuk akibat bencana	400	-	-	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian
		Pusat Penanggulangan Krisis	Pusat		Terlaksananya upaya penanggulangan bencana sesuai dengan prosedur yang ada				APBN	PPK Kementerian Kesehatan
		Tersusunnya kebijakan dan strategi Penanggulangan Bencana di Tk Nasional dan sosialisasinya kepada Pemerintah Provinsi	Nasional Jateng DIY Bengkulu Sumbang NTT Maluku Sulteng	Kota Palu	Dokumen Kebijakan dan Strategi PB dan terlaksanakannya kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Strategi PB	450	400		PHLN	BNPB kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jateng, DIY, Sumbang, Bengkulu, NTT, Maluku dan Kota Palu
		Tersusunnya Petunjuk Tehnis Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) ditingkat Nasional dan sosialisasinya pada Pemerintah Provinsi	Nasional Jateng DIY Bengkulu Sumbang NTT Maluku Sulteng	Kota Palu	Petunjuk Tehnis Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) dan Sosialisasinya	250	250		PHLN	BNPB kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jateng, DIY, Sumbang, Bengkulu, NTT, Maluku dan Kota Palu
		Tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Berbasis Mitigasi Bencana Provinsi dan Kota	Jateng Bengkulu NTT Maluku Sulteng	Kota Palu	Jumlah Dokumen RTRW Berbasis Mitigasi Bencana, Tingkat Provinsi dan Kota	600	550		PHLN	KEMDAGRI kerjasama dgn Kem. PU, BNPB, PemProv Jateng, Bengkulu, NTT, Maluku dan Kota Palu

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUATA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
		Tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tingkat Provinsi dan Kota	Jateng Bengkulu NTT Maluku Sulteng	Kota Palu	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tingkat Provinsi dan Kota	600	550	PHLN	KEMDAGRI kerjasama dgn BNPB, PemProv Jateng, Bengkulu, NTT, Maluku dan Kota Palu	
		Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tk Provinsi dan Kota	Jateng Bengkulu NTT Maluku Sulteng	Kota Palu	Jumlah Dokumen Renstra BPBD Tk Provinsi dan Kota	600	550	PHLN	KEMDAGRI kerjasama dgn BNPB, PemProv Jateng, DIY, Bengkulu, NTT, Maluku dan Kota Palu	
		Tersusunnya 5 dokumen RPB, 5 dokumen RAD PRB, 5 dokumen Renkon, dan 5 dokumen rekomendasi pengintegrasian PRB ke dalam dokumen perencanaan jangka panjang/menengah, RTRW dan rencana kerja pembangunan daerah melalui penguatan kapasitas daerah	Sulteng Jawa Tengah Bengkulu Sumbang NTT		1) Jumlah peta risiko bencana tingkat Kab/kota yang tersusun secara partisipatif 2) Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana tingkat Kab/kota, 3) Jumlah RAD PRB tingkat kkabupaten/kota yang tersusun, 4) Jumlah Renkon tingkat kabupaten/kota yang tersusun, 5) Jumlah draft Rumusan Pengintegrasian PRB dalam dokumen perencanaan (RPJPD/RPJM, RTRW, RKPD) yang dihasilkan.	2.500	1.975	PHLN	BNPB	
		Multi-pemangku kepentingan	Nasional Jakarta		Informasi tersebar dan koordinasi berjalan dengan baik.	On-going dengan staff	-	PHLN	OCHA	
			Nasional			6,017,4		PHLN, AusAID, (AUD 2,050,000 between 2008 and 2010)	IFRC/PMI	
		Pekerja Kemanusiaan khususnya yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi: termasuk pemerintah, LSM, PMI dll				Belum bisa diindikasikan	Belum bisa diindikasikan	PHLN	Kem. Kesehatan, NGOs, Palang Merah Indonesia, organisasi profesi dll	
			National Level						UNICEF/BPNB/PMI	

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
					Support to the capacity development of Government of Indonesia's effort to mainstream DRR into rehabilitation and reconstruction framework	2,367.5	2,367.5	2,367.5	PHLN	National Disaster Management Agency (BNPB), UNDP, World Bank
		BDPB Kab/Kota, Pemerintah Desa	Jakarta		Ada konsep dan kegiatan PRB dalam kegiatan pemerintah maupun mitra Bina Swadaya, Ada Perda dan Pesrdes yang disusun bersama masyarakat (Forum PRB)					BINA SWADAYA
		Bengkulu NTT Kalimantan Timur								
		Staff Bina Swadaya di tiap unit kerja dan program/kegiatan	Jakarta		Ada rencana aksi BDPB, pemerintah desa dan Forum PRB/masyarakat					BINA SWADAYA
		Staff BDPB, staff pemerintah Desa, anggota Forum PRB dan masyarakat	Bengkulu NTT		Ada rencana aksi BDPB, pemerintah desa dan Forum PRB/masyarakat					BINA SWADAYA
		Masyarakat di kawasan rawan letusan gunungapi .	Kalimantan Timur Jawa Tengah DIY Jawa Timur NTT		Terdapat pengkajian partisipatif di tingkat komunitas	100	100	100	Swasta/ Masyarakat	PSMB UPN Veteran
		Board Members, Staff, Volunteers	PMI NHQ		PMI DRR policy include strategy and implementation plan, based on clear and clearly stated vision and priorities, with targets	25	25	25	Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUATA Rp) (6)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
		PMI Chapter, PMI Branch	NAD Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Riau Kalimantan Timur	Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang KlATEN, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau-Bau Kutai Kartanegara	Number of PMI DRR Plan of Action integrated into Miusrenbang	605.80	445.82	435.78	Swasta/ Masyarakat	PMI NHQ, PMI Chapter, PMI Branch, Community, LGU
		Board Members, Staff, Volunteers	PMI NHQ		PMI Disaster Risk Reduction Framework for 2010-2014 is in place	100			Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
	Board Members, Staff, Volunteers, CBAT (Community Based Action Team), Community, LGU (local Government Unit)	NAD Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Riau Kalimantan Timur	Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klaten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau- Bau Kutai Kartanegara	Participatory Monitoring and Evaluation systems to assess resilience and progress in DRR	1,624.9	683.4	480.2	Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter, PMI Chapter, PMI Branch, Community	
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 4 (JUTA Rp)</b>						<b>41,687</b>	<b>37,078</b>	<b>38,792</b>		
<b>TOTAL PENDANAAN PROGRAM B (JUTA Rp)</b>						<b>164,991</b>	<b>172,956</b>	<b>193,272</b>		
<b>PRIORITAS: PEMANFAATAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b>										
<b>PROGRAM C : PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>										
4	penelitian tentang budaya sadar bencana akrab dengan bencana	kegiatan penelitian tentang budaya sadar bencana	kegiatan penelitian tentang budaya sadar bencana		kegiatan penelitian yang dilaksanakan komitmen dan dukungan di pusat provinsi dan kab/kota dalam penyelenggaraan budaya sadar bencana dalam PRB	20000	57400	15700	PHLN	UNN
										PTLWB BPPT

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUATA Rp) (6)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
		Meningkatnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana di 30 kawasan	Lampung Jawa Barat DIY NAD NTB Bengkulu Jawa Tengah Sulawesi Utara Papua Jawa Timur Maluku Utara Sulawesi Selatan Gorontalo Sulawesi Tengah Maluku Sumatera Barat Papua Barat Banten		Persentase masyarakat pesisir yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	500	1,000	1,500	APBN	Kem. Kelautan & Perikanan
		Diffusi Pembelajaran Kebencanaan di daerah terkena dampak	NAD Jawa Tengah		Kajian metode efektif dalam difusi pembelajaran kebencanaan	200	200		APBN	LIPI, Puslit Oseanografi
		pemahaman bentuk kearifan lokal di masyarakat berisiko bencana	Sulawesi NTT		Kajian pengalaman bencana serta kaitannya dalam pembentukan kearifan lokal	500	500	500	APBN	LIPI, Puslit Oseanografi
		Pendidikan Kebencanaan melalui Internet di Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset	Seluruh Propinsi		Tersusunnya model pembelajaran E-learning	500	200	200	APBN	LIPI, Dikti-Kem. Diknas, BNPB
		transliterasi sains ke materi pendidikan kreatif bagi masyarakat umum	Nasional NAD Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu		pengembangan alat peraga pendidikan PRB, media campaign	800	1,500	500	APBN	LIPI, Puslit Oseanografi
		Partisipasi pelaku PRB lembaga akademis dalam advokasi PRB			Penguatan jejaring, koordinasi dan komunikasi lembaga riset dan akademis tingkat nasional, regional/internasional	500	500	500	APBN	LIPI, Puslit Oseanografi
		pameran nasional dan daerah oleh pelaku PRB bagi masyarakat umum	Nasional NAD Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu		Terlaksananya pameran Siaga Bencana nasional dan daerah	1,000	1,300	500	APBN	LIPI, Puslit Oseanografi

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
	Meningkatnya upaya pengembangan budaya keselamatan dan ketahanan masyarakat dan petugas di masing masing prov & kab/kota	Jawa dan Sumatera			Teraksananya Safety Management System secara berkelanjutan	-	1,500	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian	
	Masyarakat dan petugas di masing masing prov & kab/kota	Setiap prov & kab/kota			Peningkatan kepedulian dan kepekaan petugas kesehatan dan masyarakat akan risiko bencana			APBN	PPK Kementerian Kesehatan	
	Meningkatnya pemahaman dan kapasitas masyarakat mengenai PRB, melalui penguatan peran media, sektor swasta, LSM dan Pemerintah sebagai agen PRB.	Bengkulu Sumatera Barat DIY NTT Sulteng Jakarta Bali	Kota Palu		1. Jumlah program kerjasama penyadaran publik yang dilakukan oleh media, sektor swasta, LSM dan Pemerintah. 2. Jumlah masyarakat yang paham PRB.	1,500	1,000	PHLN	BNPB	
	Jurnalis Masyarakat Desa dan Kabupaten	Indonesia Jakarta Jawa Barat Jateng NTT NTB	Bogor Rembang, Solo, dan Grobogan Lembata dan Sikka Dompu		- Jumlah jurnalis yang dilatih Jumlah Rencana Kontinjensi yang disusun di tingkat Desa, Jumlah Rencana Kontinjensi yang disusun di tingkat Kabupaten	X	X	X PHLN X PHLN	Plan Indonesia Plan Indonesia	
	Pembuat kebijakan dan pelaku utama respon dalam kondisi darurat masyarakat setempat desa sekitar lokasi IDRR	9 regional Pusat Penanggulangan Krisis Depkes Jawa Barat				Belum bisa diindikasikan	Belum bisa diindikasikan	PHLN	Kem. Kesehatan	
	Staff Bina Swadaya, staff pemerintah Desa, anggota Forum PRB dan masyarakat BDPB, Pemerintah Desa, Masyarakat, Bina Swadaya, LSM, swasta	Bengkulu NTT Kalimantan Timur Bengkulu NTT Kalimantan Timur Sumut Kepri Jakarta Jateng Jatim Bali Sultul Papua			Cerita ttg bencana ada dalam berbagai bentuk kesenian masyarakat Adanya solusi dan pembelajaran antar stakeholder				PKPU BINA SWADAYA BINA SWADAYA	
	Budaya sadar bencana di sekolah dan anak anak sekolah	Kalimantan Timur			800 schools reached & educated, 240,000 students educated	1,482.24	1,482.24	Swasta/ Masyarakat	HOPE worldwide Indonesia (Yayasan Hope Indonesia), Dinas Pendidikan setempat	
	Masyarakat di kawasan rawan bencana letusan gunungapi, banjir dan longsor	Jawa Tengah Jawa Timur DIY			Terlaksananya kerja praktek dan KKN tematis untuk peningkatan kesadaran masyarakat di kawasan letusan gunungapi, banjir dan longsor	50	50	Swasta/ Masyarakat	PSMB UPN Veteran	
	Perubahan perilaku masyarakat setempat	Jawa Barat			Satu program dalam setahun	100		Swasta/ Masyarakat	MAIPARK	



No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUATA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
		Board Members, Staff, Volunteers; CBAT (Community Based Action Team), Community LGU (local Government Unit)	NAD Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Riau Kalimantan Timur	Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klaten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta; Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau- Bau Kutai Kartanegara	Knowledge about Safety and Resilience Community at different groups and levels increased	450	250	160	Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter, PMI Chapter, PMI Branch, Community
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 1 (JUATA Rp)</b>										
2	pemantauan teknologi yang berpotensi menjadi sumber bencana	Pengadaan peralatan sesimik untuk studi prekursor gempa bumi  Penelitian Velocity Model local 15 lokasi  Penelitian seismisitas di berbagai zona sudduksi dan sesar yang ada  Terpentainya penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber bencana 1. Diketahui pola pergerakan dan deformasi kulit bumi berdasarkan pengukuran GPS serta diketahuinya karakteristik keempaan	Sumatera Barat		Tersedianya fasilitas untuk penelitian prekursor gempa bumi dengan metoda sesimik  Meningkatnya Akurasi penentuan lokasi gempa bumi  Meningkatnya pemahaman tentang hubungan antara sistem sesar dan gempa bumi.  Jumlah informasi kegiatan pemantauan penggunaan teknologi berpotensi bencana  Diterapkannya konsep mitigasi thd pengurangan risiko bencana gempa bumi dan tsunami	63,482 6,300	75,182 6,300	83,810 6,600	APBN APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA  BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA  BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA  BNPB PHLN  LPI, Puslit Geoteknologi

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
		Meningkatnya pengawasan dan pemantauan terhadap kondisi prasarana KA pada lokasi rawan bencana	Jawa dan Sumatera		Teraksananya pemeriksaan jalan rel, jembatan dan terowongan 2-3 kali setahun	1,000	1,000	1,000	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian
			Jakarta						PHLN	Institut Teknologi Bandung and Asian Disaster Preparedness Center
			Jakarta						PHLN	Institut Teknologi Bandung and Asian Disaster Preparedness Center
		masyarakat desa sekitar lokasi IDRR	Jawa Barat	Bogor						PKPU
		Staff Bina Swadaya, staff BDPB, anggota Forum PRB	Bengkulu NTT KalTim		Ada laporan hasil pemantauan secara rutin yang didiskusikan					BINA SWADAYA
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 2 (JUTA Rp)</b>						<b>53,425</b>	<b>62,455</b>	<b>71,785</b>		
3	penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan	Terselenggaranya Workshop dan Sosialisasi Fungsi Lembaga terkait budaya keselamatan	Indonesia		Laporan Workshop dan Sosialisasi Fungsi Lembaga terkait budaya keselamatan	300	330	363	APBN	BAPETEN
		Membangun kapasitas operasional			Terjadinya Kesinambungan operasional	900	900	900	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
		Melaksanakan studi untuk mengetahui prekursor gempa bumi menggunakan metoda geofisika secara terpadu			Tersedianya informasi studi untuk menuju preonksi gempa bumi	500	500	550	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
		Setiap desa rawan bencana tersedia tenaga yang kompeten dalam PRB	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah propinsi dan kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan sesuai dengan kriteria	60,000	72,000	84,000	APBN, APBD, PHLN	BNPB
		40 angk berasal dari masy.	Jakarta Jabar		Terselenggaranya Kegiatan ini yang dapat memperkuat dukungan masyarakat secara terlatih dalam penanggulangan bencana terutama aspek-aspek meliputi: Pemahaman, Kesadaran, Tanggungjawab, Komitmen, Rasa memiliki, dan Partisipasi.	6,328.59	7,594.31	9,113.17	APBN	Kem. Sosial

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
		Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM perlindungan	33 Prop.		SDM Perindungan mampu melakukan analisis DFI				APBN	Kementerian Pertanian
		Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Jabar Jateng Jatim Sumbar		Peningkatan Presentasi Kesiapan Masyarakat dalam menghadapi Bencana Geologi				APBN	Badan Geologi, KESDM
		Kepala Bandar Udara dan personil Bandar udara siap menghadapi keadaan darurat akibat bencana alam (banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, tanah longsor dll) baik dalam rangka evakuasi korban maupun distribusi bantuan	Semua bandara yang termasuk kategori daerah rawan bencana		Tertaskannya koordinasi dan kesiapan pengelola bandar udara ketika terjadi bencana alam	300	300	300	APBN	Kem. Perhubungan
		Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana	Jawa dan Sumatera		Tersedianya unit pelaksana teknis pengujian SDM perkeretaapian di daerah	300	-	-	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian
		Peningkatan budaya keselamatan di masyarakat dan operator kereta api	Jawa dan Sumatera		Tertaskannya pendidikan keselamatan kepada masyarakat, awak sarana dan petugas operasi dan perawatan prasarana	1,000	1,000	1,000	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian
		masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana khususnya pada keselamatan dan keamanan perjalanan KA			pada masing-masing wilayah Satker di lingkungan Ditjen Perkeretaapian					Direktorat Teknik Prasarana & Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
	meningkatnya kemampuan personil Polri dalam hal membaca peta khususnya peta sebaran kriminalitas	Mabes Polri dan Bakosurtanal			Adanya peta sebaran kriminalitas pada daerah yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi terhadap peralatan bencana Bakosurtanal sehingga: 1. Polri memiliki pengetahuan pengolahan peta yg dapat dikembangkan lebih lanjut dengan asistensi dari Bakosurtanal 2. Bakosurtanal memiliki peta sebaran kriminalitas yg akan dibagikan ke Polres/Polsek dan Masyarakat 3. Perangkat Bakosurtanal lebih dapat terjaga baik dengan adanya peta yg akan disebarakan ke Polres/Polsek serta masyarakat sekitarnya karena masyarakat merasa memilikinya dan mengerti/paham akan pentingnya alat tersebut		APBN	POLRI, Pusdalops POLRI & Bakosurtanal		
	Masyarakat dan petugas di masing-masing prov& kab/kota	Setiap prov & kab/kota			Peningkatan kemampuan petugas dan masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana		APBN	PPK Kementerian Kesehatan		
	Mengembangkan program bahan ajar yang handal dan sah yang dapat meningkatkan mutu beberapa mata pelajaran yang relevan (Agama, IPA, dan IPS) pada sekolah-sekolah jenjang pendidikan dasar.	Provinsi rawan bencana seperti Papua, NTT, NTB, Jawa, Jateng, DI, Jawa, Sumbang, Bengkulu, NAD	Kabupaten/ kota terpilih untuk uji coba		Tersusunnya bahan ajar tentang risiko bencana untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah	2,250	APBN, PHLN	Kem. Diknas, Ditjen Manajemen Peningkatan Mutu dan Menengah		
	Sekolah-sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah, terutama pada provinsi-provinsi daerah rawan bencana alam	33 provinsi			Terlaksananya pengajaran resiko bencana pada sekolah-sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di provinsi-provinsi rawan bencana	65,500	APBN, PHLN	Kem. Diknas, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah		

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
		1). Meningkatkan kapasitas PSB di 6 Provinsi dan 1 kota diwilayah SCDRR. 2)Terbangunnya jejaring antar PT/PSB sehingga terdapat proses transfer of knowledge dan pertukaran informasi; 3) Meningkatkan kapasitas dari Perguruan Tinggi untuk mampu melakukan riset terkait kebencanaan dengan berdasarkan pada kearifan lokal di masing-masing wilayahnya.	DIY Jawa Tengah, Bengkulu Sumbaw Maluku NTT Sulteng	Kota Palu	1) Jumlah pusat studi bencana di Perguruan Tinggi yang meningkat kapasitasnya di 6 propinsi dan 1 kota; 2) Adanya mekanisme berjejaring yang jelas antar PT/PSB dalam pertukaran informasi dan/atau riset bersama; 3) Adanya hasil-hasil riset inovasi kebencanaan yang berdasarkan local wisdom di wilayah ybs	462	457	PHLN	BNPb (bekerja sama dengan PT/forum PT, lembaga kajian pusat dan PSB)	
		Terlaksananya integrasi PRB ke dalam kegiatan pendidikan di 14 sekolah.	Bengkulu Sumatera Barat DIY NTT Sulteng Jakarta Bali	Kota Palu Kota Jakarta Selatan	1. Terintegrasinya PRB ke dalam mata pelajaran, muatan lokal dan ekstra kurikuler, 2. Tersusunnya pedoman dan materi ajar,3. Terlaksananya pelatihan untuk komunitas sekolah	990	1,045	PHLN	Kem. Diknas	
		ECB members-CBO s-government- universities	Sumatera Barat					PHLN, USAID (Total: \$494,804)	Mercy Corps	
		Anggota Konsorsium Pendidikan Bencana dan pemangku kepentingan lain yang relevan.	Jakarta		Level of capacity identified/type of training identified		45	45 PHLN	ECB Indonesia (Care-CRS Oxfam-World Vision- Save the Children-Mercy Corps-MPBI-IMC)	
		Daerah prioritas yang ditentukan BNPB.	Nasional Jakarta		Masuknya PRB di dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia.	On-going dengan staff yang ada.		PHLN	OCHA	
		BNPb dan LSM internasional.			Berjalannya latihan dan pembelajaran tentang PRB.	On-going dengan staff yang ada.		PHLN	OCHA	

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
	Targeted communities members and village governments, schools teachers and children	NTT NTB Papua Papua Barat Sulawesi Utara Sulawesi Tengah		Belu, TTU, TTS, Ende, Manggarai, Lembat and 1 more to be determined. Jayawijaya, Nabire Sangihe Donggala	\$ 2 Community Organisers (1 male and 1 female) from each village in 15 districts are identified and trained on 3 topics related to DDR.		PHLN	1 Oxfam 2. PNMPB (Belu, TTU, TTS) 3. FIRI (Ende, Manggarai, Lembata) 4. Perkumpulan Kelola (Sangihe) 5. Yayasan Jambata (Donggala) 6. IDEA 7. IDEP 8. dan sekitar 7 LSM local lain yang akan diidentifikasi		
	Community Schools	Sumut Jakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Sulawesi Tengah Maluku Utara NTT Papua		Nias Jakarta Surabaya	#of community trained about DDR, #of schools trained on DDR	189	189	189	PHLN	World Vision Partners
				Nasional (Indonesia) & Region		147,500.5	147,500.5	147,500.5	PHLN	BNPB, AIFDR and other relevant partners, as required
		Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur		Jakarta Barat Magelang Jember		2,641.8			PHLN	Nahdlatul Ulama (NU)
	18 organisasi pemuda desa/rangkap	NAD		Aceh Selatan	168 tokoh pemuda desa damping mengikuti pelatihan tentang management organisasi pemuda. 18 organisasi pemuda desa berperan aktif dalam kegiatan masyarakat yang terkait dengan PRB di desanya.	9,295.90	4,647.95		PHLN, SWASTA/MAS YARAKAT	JRS
	18 desa (360 peserta)	NAD		Aceh Selatan	360 tokoh masyarakat di desa-desa damping mengikuti pelatihan PRB dan terlibat aktif dalam perencanaan kegiatan selanjutnya.					JRS
	18 Desa, (360 peserta)	NAD		Aceh Selatan	360 tokoh masyarakat di desa-desa damping mengikuti pelatihan EPS dan terlibat aktif dalam perencanaan kegiatan selanjutnya.					

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	
		18 Desa (180 peserta tokoh pemuda/desa)	NAD	Aceh Selatan	180 pemuda/i mengikuti pelatihan EPS dan pertemuan rutin untuk pendampingan sebagai tindak lanjut pelatihan				JRS	
		18 Sekolah Dasar & dinas pendidikan (114 peserta guru dan aktor pendidikan)	NAD	Aceh Selatan	114 guru SD dampingan mengikuti pelatihan peace education dan menindaklanjuti hasil pelatihan dalam pengajaran mereka				JRS	
		18 Sekolah Dasar (114 peserta guru dan aktor pendidikan)	NAD	Aceh Selatan	114 guru SD mengikuti pelatihan EPS dan menyusun tindak lanjut dari hasil pelatihan untuk diterapkan di sekolah mereka masing-masing				JRS	
		18 desa dampingan (1.440 pemuda/i desa)	NAD	Aceh Selatan	1.440 pemuda/i mengikuti pelatihan pengelolaan konflik lewat media olahraga dan pertemuan-pertemuan rutin					
		18 Sekolah Dasar (108 guru SD)	NAD	Aceh Selatan	108 guru SD mengikuti pelatihan dan menindaklanjutinya dengan sebuah perencanaan di sekolah masing-masing			PHLN, SWASTA/AMAS YARAKAT		
		Tokoh desa, Kepala Desa, dan Forum Anak Desa	Jawa Tengah NTT NTB	Rembang dan Grobogan Lembata dan Sikka Dompu	Terdapatnya perencanaan desa yang berperspektif PRB, Alokasi Anggaran Dana Desa untuk kegiatan PRB	X	X	X PHLN	Plan Indonesia	
		Guru-guru, Kepala Sekolah, dan staf staf Dinas Pendidikan.	Jakarta Jawa Barat Jateng NTT	Bogor Bantul Grobogan Lembata dan Sikka Dompu	Jumlah penyelenggara pendidikan yang terlibat dalam Forum Sekolah	X	X	X PHLN	Plan Indonesia	
		Masyarakat	Jakarta Jawa Barat DIY Jateng NTT NTB	Bogor Bantul Rembang dan Grobogan Lembata dan Sikka Dompu	Jumlah orang (laki-laki dan perempuan) yang mengikuti kegiatan kampanye	X	X	X PHLN	Plan Indonesia	
		Masyarakat desa dan Kabupaten	Jakarta Jawa Barat DIY Jateng NTT NTB	Bogor Bantul Rembang dan Grobogan Lembata dan Sikka Dompu	- Jumlah simulasi yang dilakukan secara periodik	X	X	X PHLN	Plan Indonesia	
		Pekerja Kemanusiaan khususnya yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi; termasuk pemerintah, LSM, PMI dll	Nasional			Belum bisa diindikasikan	Belum bisa diindikasikan	PHLN	Kem. Kesehatan, NGOs, Palang Merah Indonesia, organisasi profesi dll	

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
		Regional Stakeholders DM (in Indonesia, stakeholders under Ministry of Health)	9 kantor regional Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Departemen Kesehatan	National	Support for the establishment and capacity building of national, provincial and local disaster management agencies, leveraging government and other donor programs	12,626.67	12,626.67	12,626.67	PHLN	National Disaster Management Agency (BNPB), Ministry of Home Affairs, Local Governments
		Capacity building of national and local DRM agencies, including in risk assessment and risk-response								UNICEF and Cluster Members (including Government Counterparts)
		peserta dari relawan bencana dari kantong kantong bencana / berpotensi bencana di kota kot besar	Jawa Barat	Jabodetabek						PKPU
		BDPB, Pemerintah Desa, Masyarakat, Bina Swadaya, LSM, swasta	Bengkulu NTT Kalimantan Timur		Peningkatan kapasitas dan ketahanan individu, keluarga, masyarakat dan Forum PRB serta BDPB					BINA SWADAYA
		Sekolah Dasar	Indonesia	Indonesia	Adanya materi-materi/kurikulum Program Kesiapan Sekolah terhadap Bahaya Gempa				APBN	PMB-ITB
		Pemerintah Daerah	Indonesia	Indonesia	Kegiatan teaching and learning serta small project scale dalam bidang mitigasi bencana				APBD	PMB-ITB (Pemda-Pemda)
		DPRD, Bappeda, BPBD, Dinas Kesehatan, BPLH Provinsi/ Kabupaten/ kota	Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Jawa Timur		1. Terselenggaranya Seminar dan Workshop, 2. Adanya Rekomendasi integrasi Pengurangan risiko bencana akibat perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan daerah, 3. Sinergisasi StakeHolder	400	400	400		Bappenas, BPBN, DNPI, Climate Change Center (C3)
		Siswa dan Guru SMA/SMK	Jawa Barat		1. Terselenggaranya penyuluhan bagi Siswa dan Guru SMA/SMK se-Jawa Barat, 2. Terlibatnya Dinas Pendidikan Provinsi/Kota/Kabupaten	300	300	300		BPBD, Climate Change Center (C3), Dinas Pendidikan, BPLHD Jawa Barat



No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
		Siswa dan Guru SMA/SMK	Jawa Barat		1. Terselenggaranya Pelatihan (TfT) bagi Siswa dan Guru SMA/SMK se-Jawa Barat, 2. Terlibatnya Dinas Pendidikan Provinsi/Kota/Kabupaten, 3. Sinergisasi Stakeholder	350	350	350	BPBD, Climate Change Center (C3), Organisasi Kemahasiswaan	
		BPBD, BPLH, Mahasiswa, Dosen/Akademisi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, LSM	Jawa Barat		1. Terselenggaranya Seminar, 2. Adanya Rekomendasi ilmiah tentang Kerentanan terhadap Bencana yang diakibatkan perubahan iklim, 3. Sinergisasi stakeholder	100		100	BPBD, Climate Change Center (C3), Organisasi Kemahasiswaan, BPLHD Jawa Barat	
		Organisasi Caritas milik Keuskupan Gereja Katolik	Jateng Sumsel Jabar Jatim Sulsel Maluku NTT Kalbar Sulteng	Purwokerto, Palembang, Bandung, Surabaya, Makassar, Arboina, Maumere, Pontianak, Ketapang, Tanjung Karang	a. Identifikasi capaian kinerja institusi dalam 6 area kunci: (1) kebijakan; (2) strategi; (3) perencanaan berbasis karakter kewilayahan; (4) manajemen siklus proyek; (5) relasi eksternal; (6) kapasitas institusi, b. Prioritas aksi yg dipilih untuk meningkatkan capaian area kunci tertentu, c. Hasil Kajian risiko Bencana Partisipatif dan inisiasi kelompok basis PRB, d. Dilakukan pertemuan jejaring dan ditemukan identifikasi kebutuhan penguatan basis organisasi dalam mengurutkan PRB dalam berbagai bentuk aktivitas pengembangan kapasitas organisasi, e. Perencanaan aksi PRB di komunitas basis perintis, f. Dihasilkan rencana pembelajaran, rencana produksi materi pembelajaran dan produk akhir berupa materi-materi pembelajaran dalam bentuk media cetak dan elektronik.	5.200	Belum direncanakan	Belum direncanakan	Swasta/ Masyarakat	KARINA
		pelatihan guru sekolah dalam PRB	Sumut Kep.Riau Jakarta Jateng Jatim Bali Sulut Papua	Medan Batam Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan Semarang Surabaya Denpasar Manado Jayapura	4.000 school teachers trained,				Swasta/ Masyarakat	HOPE worldwide Indonesia (Yayasan Hope Indonesia), Dinas Pendidikan setempat

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
		Masyarakat di kawasan rawan bencana letusan gunungapi, banjir dan longsor	Jawa Tengah Jawa Timur DIY		Teraksana kegiatan kerja praktek dan KKN tematis di bidang pendidikan, penyuluhan dan pelatihan di masyarakat kawasan rawan letusan gunungapi banjir dan longsor	50	50	50	Swasta/ Masyarakat	PSMB UPN Veteran
		Perubahan perilaku masyarakat setempat	Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi (+/- 100 dusun)	Satu program dalam setahun				Swasta/ Masyarakat	MAIPARK
			Jakarta, Jawa						Swasta/ Masyarakat	Skala dan Greenpress
		700 warga ring I Kelut dan organisasi (Setlak, Tagana, PMI Kediri dan Biltar)	Jawa Timur	Biltar kota kediri kab Kediri	terbentuknya tim siaga bencana kelut.				Swasta/ Masyarakat	Sampoerna, PSMB UPN Jogjakarta, Perkumpulan Skala
		300 orang (70% organisasi kebencanaan, PMI, Tagana, 30% akademis)	Sumber Jateng Sulsel Gorontalo	Padang Semarang Makasar Gorontalo Aronbo	Penguatan pengetahuan dasar stakeholders di bidang kebencanaan				Swasta/ Masyarakat	MERC (Medical emergency Rescue Committee), Sampoerna
		300 orang dari 5 propinsi	Sumber Jateng Sulsel Gorontalo Maluku	Padang Semarang Makasar Gorontalo Aronbo	Terbentuknya tim relawan siaga bencana				Swasta/ Masyarakat	MERC (Medical emergency Rescue Committee), Sampoerna
		1100 relawan internal Sampoerna	Sumber Jateng Sulsel Gorontalo Maluku Regional Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi. (total 11 propinsi)	Padang Semarang Makasar Gorontalo Aronbo	Meningkatkan pemahaman stakeholders di dalam situasi bencana				Swasta/ Masyarakat	MERC (Medical emergency Rescue Committee), Sampoerna
		1100 relawan internal Sampoerna	Regional Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi. (total 11 propinsi)		Terbentuknya tim relawan siaga bencana				Swasta/ Masyarakat	Sampoerna Rescue tim dan internal departemen (EHS)
			Regional Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi. (total 11 propinsi)		Meningkatkan pemahaman stakeholders di dalam situasi bencana di kantor				Swasta/ Masyarakat	Sampoerna Rescue tim dan internal departemen (EHS)
		Staff, Volunteers Corps (KSR), Saigana (Disaster Response Team), Red Cross Youth, CBAT (Community Based Action Team), Community	PMI NHQ		ICBRR and DM Training Curriculum and materials updated and incorporate DRR and CCA	308.05			Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)		Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011		
		School Committee, Teachers, Red Cross Youth, School Children, Volunteers Corps	NAD Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Riau Kalimantan Timur	Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klaten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau- Bau Kutai Kartanegara	Number of school conducted Disaster Risk Reduction in School	1,943.86	737,17	470 Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter
		Staff, Volunteers Corps (KSR), Saigana (Disaster Response Team), Red Cross Youth, CBAT	PMI NHQ		PMI Training curriculum updated based on lesson learnt and needs	150	100	Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
		CBAT (Community Based Action Team)	NAD Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Riau Kalimantan Timur	Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klaten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau- Bau Kutai Kartanegara	Community Based Action Team (CBAT) trained relevant skills for DRR	757.08	1243.32	741.88	Swasta/ Masyarakat	PMI NHO, PMI Chapter, PMI Branch, Community, LGU

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JU TA Rp)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
		CBAT (Community Based Action Team), Community, LGU (Local Government Unit)	NAD Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Riau Kalimantan Timur	Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klaten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau- Bau Kutai Kartanegara	Regular disaster response drill or simulation provided	772.91	363.96	502.89	Swasta/ Masyarakat	PMI NHQ, PMI Chapter, PMI Branch, Community, LGU

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
		KSR (Volunteers Corps)	NAD Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Riau Kalimantan Timur	Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klanten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau-Bau Kutai Kartanegara	KRS (Volunteers Corps) trained on Disaster Management	3,032.58	600	600	Swasta/ Masyarakat	PMI NHO, PMI Chapter, PMI Branch, Community, LGU

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JU TA Rp) (6)		Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011		
		KSR (Volunteers Corps)	NAD Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Riau Kalimantan Timur	Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klaten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau- Bau Kutai Kartanegara	KSR (Volunteers Corps) trained relevant skills for DRR	1,787.30	1,319.06	1,017 Swasta/ Masyarakat	PMI NHQ, PMI Chapter, PMI Branch, Community, LGU

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
		KSR (Volunteers Corps)	NAD Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Riau Kalimantan Timur	Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klanten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau-Bau Kutai Kartanegara	Satgana performed quick, accurate and coordinated disaster response activities	3,770.72	965.82	600 Swasta/ Masyarakat	PMI NHO, PMI Chapter, PMI Branch	
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 3 (JUTA Rp)</b>						<b>267,257</b>	<b>327,578</b>	<b>346,750</b>		
<b>TOTAL PENDANAAN PROGRAM C (JUTA Rp)</b>						<b>384,165</b>	<b>465,215</b>	<b>502,345</b>		
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>										
1	pengendalian dan pemantauan risiko bencana	Kajian dinamika pantai, untuk mitigasi dan adaptasi bencana alam monitoring gempa kuat dan perhitungan magnitude mbmg Terpentanya risiko bencana di seluruh Provinsi dan Kab/Kota Minimalisasi gangguan DFI Terpentanya Tingkat Aktivitas Gunungapi secara menerus Peningkatan Kualitas pemantauan Gunungapi	Banten DKI Jabar Jateng Jatim  Seluruh daerah rawan bencana 33 Prop.  Seluruh Wilayah Indonesia  Seluruh Wilayah Indonesia		Tersedianya informasi spasial untuk mitigasi dan adaptasi thd bencana alam (global warming) di Pantura Jawa  Meningkatnya data dan informasi gempa kuat  Jumlah dokumen dan informasi risiko bencana  Jml. Luas Pertanian yang terkena gangguan DFI (ha)  Jumlah Terpentanya tingkat aktivitas Gunungapi per tahun  Jumlah Terpentanya tingkat aktivitas Gunungapi per tahun	532  190  42,000  1,266	600  190  50,400  1,456	700 APBN  190 APBN  58,800 APBN, APBD, PHLN  APBN  1,675 APBN  APBN	Bakosurtanal  BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA  BNPB  Kementerian Pertanian  Badan Geologi, KESDM  Badan Geologi, KESDM	



No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			(7)	(8)
		Pemahaman masyarakat dan keikutsertaan lembaga keagamaan dalam menghadapi bencana	NTT Sumbar Bengkulu	Manggarai, Manggarai Barat Solok Selatan, Pesisir Selatan Bengkulu Utara, Muko-Muko	Terbentuknya kelompok masyarakat siaga bencana dan peningkatan peran serta lembaga keagamaan	500	500	500	APBN	KPDT
		Meningkatnya Upaya Pengendalian dampak negatif penggunaan Teknologi	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung		Tersedianya Laporan dan Evaluasi tentang penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber Kerawanan Sosial	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
		Pemutakhiran data dan informasi mengenai daerah rawan bencana di wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota.	2 provinsi dan 3 kota/kab		Tersusunnya database terbaru diimplementasikan ke dalam bentuk peta daerah rawan bencana dan narasi.	300			APBN	KEMDAGRI
		Terinventarisasinya data dan informasi kebencanaan yang termuat dalam Database Sarpras Kebencanaan dalam kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien di 6 (enam) Provinsi.	Kepulauan Riau Daerah Yogyakarta Sulawesi Utara Kalimantan Selatan Nusa Tenggara Barat Papua	Tersedianya database Sarana Prasarana Kebencanaan di 6 (enam) Provinsi. Database berbasis lokasi yang mudah dibaca dan dipahami pengguna. Database yang dapat diperbaharui ketika ada data baru yang harus dimasukkan	980			APBN	KEMDAGRI	
		Memfasilitasi pemerintah daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui penyusunan panduan informasi dan penyuluhan tentang kebencanaan di daerah.	5 provinsi dan 2 kota		Tersusunnya panduan informasi dan penyuluhan tentang kebencanaan di daerah.	250			APBN	KEMDAGRI
		Mengetahui penyebab kecelakaan dan pembuatan kesimpulan untuk membuat rekomendasi mengenai hal-hal pencegahan	Jawa dan Sumatera		Tersusunnya laporan penelitian termasuk database terkait kecelakaan akibat bencana	400	400	400	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian
		Petugas di masing-masing prov& kab/kota.	Setiap prov & kab/kota		Tersedianya data risiko bencana di setiap prov& kab/kota				APBN	PPK Kementerian Kesehatan
		Community Local NGO Local Government Private sector	Sulawesi Utara Maluku Utara	#of DDR forum established Coordination among stakeholders are built	473.5	473.5	473.5	PHLN		World Vision partners
		Forum Anak Desa dan Mluid Sekolah	Jakarta Jabar Jateng NTT NTB	Bogor, Rembang, Solo, dan Grobogan Lembata dan Sikka Dompu	- Jumlah anak-anak (laki-laki dan perempuan) yang dapat ikut serta dalam pemantauan dan evaluasi.	X	X	X	PHLN	Plan Indonesia

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
	Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI)					675,526.67	675,526.67	675,526.67	PHLN	Government of DKI, MoPW, MoF, BAPPENAS
	masyarakat rawan bencana banjir, masyarakat pinggir kali, pemukiman padat		kota kota besar Jawa Sumatera							PKPU
	BOPB, Pemerintah Desa, Masyarakat, Bina Swadaya, LSM, swasta		Bengkulu NTT Kalimantan Timur Indonesia		Ada data dan up date data tentang risiko bencana					BINA SWADAYA
	Pemerintah RI				Sistem pemantauan bencana yang teruji secara online				APBN	PMB-ITB
	Pemerintah Daerah Jawa Barat		Jawa Barat	Garut	Pemanataan secara berkala dan ter sistematis Gunung Api Guntur				APBN	PMB-ITB
	di 3 desa ring 1 Kelut		Jawa Timur	3 desa ring 1 kelut					Swasta/ Masyarakat	Sampoerna, PSMB UPN Jogjakarta, Perkumpulan Skala
	KSR (Volunteer Corps), CBAT (Community Based Action Team), Community		NAD Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Kalimantan Timur	Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klalten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbaawa Barat Muko-Muko, Kota Utara, Rejang Lebong Sangeihe, Minahasa Majene Konawe Selatan, Bau-Bau Kutai Kartanegara	Vulnerability and Capacity Assessment (VCA) carried out to provide comprehensive pictures of the existing hazards, risk, vulnerability and capacity at the community level	674.23	266.75	380.40	Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter, PMI Chapter, PMI Branch
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 1 (JUTA Rp)</b>						<b>723.693</b>	<b>730.563</b>	<b>739.395</b>		
2	penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana	Terselenggaranya penerapan upaya fisik, non fisik dan peraturan perundangan PB Meminimalisir korban jiwa dan kerugian akibat bencana tanah longsor	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah lokasi upaya penerapan fisik dan non fisik	45,000	54,000	63,000	APBN, ABPD, PHLN	BNPB
			Jateng NTT	Banjarmegara, Manggarai	Bertungsiya peralatan early warning system		300	400	APBN	KPDT

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
		Tervujudnya pemahaman yang sama tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam penanggulangan bencana di daerah.	15 Provinsi		Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi dalam penanggulangan bencana dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah	700			APBN	KEMDAGRI
		Mengurangi penyebab risiko bencana longsor	Jabar Jateng	<b>2010</b> : Sta. Garahan. <b>2012</b> : Cianjur - Padalarang, Purwokerto - Kroya.	Prasarana KA siap dan aman operasi	1.000	-	3.500	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian
		Mencegah faktor penyebab kerusakan terhadap konstruksi terowongan	Jabar	Terowongan Lampegan lintas Sukabumi - Cianjur	Prasarana KA siap dan aman operasi	1.000	-	-	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian
		Mengurangi penyebab risiko bencana akibat gerusan air/dasar sungai	Jabar Jateng Jatim	<b>2010</b> : Soka - Kebumen; Primbong - Butuh; Telawah - Karangsono; Gundih - Surabaya; Cikampek - Padalarang. <b>2012</b> : Cirebon - Kroya.	Pencegahan terhadap bencana akibat gerusan air/dasar sungai	34.500	-	3.500	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian
		Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi laut	Volume kebutuhan pengerukan terhadap total volume rencana areal pengerukan secara nasional.			87.000	0	0	APBN	Kem. Perhubungan, Ditjen Hubla
		Meningkatkan keandalan dan kecukupan prasarana dan sarana transportasi laut yang efektif dan efisien	Jumlah kebutuhan rehabilitasi faspel terhadap kebutuhan rehabilitasi secara nasional			26.300	0	0	APBN	Kem. Perhubungan, Ditjen Hubla
		Memperbaiki Fasilitas Pelabuhan yang rusak akibat gempa	Jumlah rehabilitasi dermaga yang dibangun terhadap jumlah dermaga yang terkena gempa		Saukorem Prov. Papua Barat	10.000	0	0	APBN	Kem. Perhubungan, Kampel Oransbari

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)		Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
		Meincludi dan memperkuat infrastruktur jalan dan jembatan agar tidak rentan terhadap bencana	Tersebar di seluruh Indonesia		Tersedianya Bronjong untuk mengantisipasi longsor	1,500	4,900	APBN	Kem. PU, Ditjen Bina Marga
		Petugas di masing-masing prov& kab/kota.	Tersebar di seluruh Indonesia		Tersedianya Jembatan Darurat (Balley) untuk memperlancar arus transportasi dalam keadaan darurat.	8,000	36,000	APBN	Kem. PU, Ditjen Bina Marga
			Setiap prov & kab/kota		Tersedianya rencana kedaruratan bidang kesehatan di Kab/Kota			APBN	PPK Kementerian Kesehatan
		Terintegrasi pengurangan risiko bencana ke dalam 3 sektor pembangunan (kesehatan, perhubungan, livelihood) dan pengembangan perkotaan dan perdesaan.	Suleng Sulsel Bengkulu NTT Sumbat DI Yogyakarta Jateng NTT NTB Jakarta		1) Jumlah program pengurangan risiko bencana yang terintegrasi ke dalam sektor pembangunan; 2) Jumlah pedoman/kebijakan yang dihasilkan	1,500	1,400	PHLN	BNPB, Bappenas, Kem. Kesehatan, Kem. Perhubungan
						Funding until 2010		PHLN	WFP
						2,000.3	2,000.3	PHLN	AUSAID, RMA Indonesia and HK Logistics
		18 desa (12.240 jiwa)	NAD	Aceh Selatan	Perencanaan Desa jangka menengah dan panjang yang mengintegrasikan PRB dan rencana aksinya, dengan melibatkan semua unsur yang ada di desa masing-masing.			PHLN, SWASTA/AMAS YARAKAT	JRS
		Western Indonesia Road Improvement Project (WINRIP)				2,841,000		PHLN	Ministry of Public Works Directorate General of Highways
		BDPB, Pemerintah Desa, Masyarakat, Bina Swadaya, LSM, swasta	Bengkulu NTT Kalimantan Timur		Ada rencana, SOP dan pelaksanaan penanggulangan bencana				BINA SWADAYA

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011 (6)	Th 2012		
		CBAT (Community Based Action Team), Community	NAD Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Riau Kalimantan Timur	Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klaten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau- Bau Kutai Kartanegara	Small Structural mitigation measures (bronjong, water harvesting tanks, etc.) in place to protect against major hazard, built using local labour, skills, materials	8,860.44	2,726.59	3,118.05	Swasta/ Masyarakat	PMI NHQ, PMI Chapter, PMI Branch, Community, LGU

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011 (6)	Th 2012		
		CBAT (Community Based Action Team), Community, LGU (Local Government Unit)	NAD Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Riau Kalimantan Timur	Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klaten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau- Bau Kutai Kartanegara	Small Structural and non structural mitigation measures in place to reduce health risk using local labour, skills, materials	789,66	351,83	541,78	Swasta/ Masyarakat	PMI NHO, PMI Chapter, PMI Branch, Community, LGU

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUATA Rp)		Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)
		CBAT (Community Based Action Team), Community, LGU (Local Government Unit)	NAD Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Riau Kalimantan Timur	Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klaten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau-Bau Kutai Kartanegara	Number of Small Structural mitigation measures applied good natural resource and environmental management scheme	1,036.31	363.34	464.08	Swasta/ Masyarakat Community, LGU
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 2 (JUATA Rp)</b>									
3	Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana	Menyusun dan mengembangkan basis data rawan bencana	Jawa tengah, jawa timur (2010), Sebagian Sumatera, sebagian Sulawesi (2011), Sebagian Sumatera, sebagian Kalimantan (2012)		Tersusunnya Basisdata Multirawan Bencana alam	3,070,187	80,742	115,425	Bakosurtanal *, Kem. PU, BMKG
	Data management Center, Database gempa dan system data sharing		Jakarta			1,000	500	500	APBN
	Memetakan daerah berisiko getaran gempa kuat		Jakarta		Tersedianya informasi untuk keperluan bangunan tahan gempa dan keperluan lainnya	300	300	300	APBN
	Peningkatan Pelayanan data dan informasi rmagnitbumi		Jakarta		Para pemakai mendapatkan data yang lebih up todate	125			APBN
	Menentukan daerah limpasan tsunami				Kelengkapan system kesiap-siagaan	750	800	800	APBN
									BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
									BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
									BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
									BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011 (6)	Th 2012		
		Tersedianya informasi sumber bahaya atau ancaman bencana	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah informasi sumber bahaya atau ancaman bencana	36,000	43,200	50,400	APBN, APBD, PHLN	BNPB
		Terpetakannya rawan bencana banjir, longsor dan kekeringan	12 Propinsi		Terpetakannya rawan bencana banjir, longsor dan kekeringan	3,000	3,000	3,000	APBN	Kem. Kehutanan, Dirjen RUPS
		Tersedianya informasi Kawasan Rawan Bencana Gunungapi, Gempabumi, Tsunami, dan Zona Kerentanan Gerakan Tanah	KRB Gunungapi: NTT Maluku Lampung Jabar Jatim Sumut		Tersedianya Peta KRB Gunungapi Gempabumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah sejumlah 27 Peta	1,907	2,193	2,522	APBN	Badan Geologi, KESDM
			Gerakan tanah: Bengkulu Jambi NTT Sulut Sulteng Sumsel Jateng Sumut NAD Sumbar Jatim							
			Gempabumi: NTB Bali Jabar Jatim Lampung Jateng Sulsel Sulut Bengkulu Jabar Bariten							
			Tsunami: Banten Jateng Jatim Sulut Sulsel Bengkulu Lampung Sultra Bali Jabar							



No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			(7)	(8)
		Tersedianya informasi Analisa Risiko Gununggapi, Gempabumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah untuk penyusunan Tata Ruang	Banten Jateng Jatim Lampung Sumbar NTT		Tersedianya Peta KRB Gununggapi Gempabumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah sejumlah 27 Peta	1,907	2,193	2,522	APBN	Badan Geologi, KESDM
		Tersedianya informasi Prakiraan Kejadian Gerakan Tanah	Seluruh Wilayah Indonesia		Tersedianya Peta Prakiraan Kejadian Gerakan Tanah sejumlah 396/Tahun	24	24	24	APBN	Badan Geologi, KESDM
		Peran Gender dalam PRB di berbagai tingkat pelaku	Sulawesi NTT Kaltim			500	500	500		LIPi, Puslit Oseanografi
		Meningkatnya upaya penevediaan data dan informasi kerawanan Sosial	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung		Terselenggarakannya penyediaan data dan informasi Gangguan Kerawanan Sosial di Lingkungan K/L terkait	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
		Pusdalops POLRI, Polres dan Polsek	Mabes Polri dan BNPB		Polres/Polsek dapat membaca dan menjelaskan isi peta rawan kebencanaan kepada masyarakat di daerah rawan.bencana				APBN	POLRI, Pusdalops POLRI & BNPB
		Identifikasi bencana sebagai akibat dari gempa tektonik.	Maluku utara NTT	Kota Tuai, Kota Ternate & Tidore, Kota Kalabahi (Alor).	Tersosialisasinya kawasan rawan bencana tsunami, serta upaya untuk menghindari dari bencana sekunder.	7,000	-	-	APBN	Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang,
		Identifikasi bencana sebagai akibat dari gempa tektonik.	Papua Barat	Manokwari	Tersosialisasinya kawasan rawan bencana tsunami, serta upaya untuk menghindari dari bencana sekunder.	2,000	-	-	APBN	Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang,
		18 desa (12.240 jiwa)	NAD	Aceh Selatan	Laporan hasil identifikasi masyarakat desa rentan bencana dan kebutuhan mereka				- PHLN, SWASTA/MAS YARAKAT	JRS
		18 desa (252 peserta)	NAD	Aceh Selatan	252 tokoh masyarakat desa dampingan mengikuti pertemuan-pertemuan dan pelatihan tentang pengelolaan konflik.				- PHLN, SWASTA/MAS YARAKAT	JRS
		Pemerintah Daerah/Pemda	Indonesia		Draft Peta Zonasi Tsunami Indonesia				APBN	PMB-ITB
		Pemerintah RI	Indonesia		Draft Peta Zonasi Gempa Indonesia				APBN	PMB-ITB
		18 desa	NAD	Aceh Selatan	Tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan di 18 desa mengikuti pelatihan dan FGD. Laporan hasil identifikasi masyarakat desa rentan bencana dan kebutuhan mereka, DVD dan media untuk kampanye dan pendidikan PRB.	993.71	430.95	Blm ada rencana program	APBN, SWASTA/MAS YARAKAT	JRS

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011 (6)	Th 2012		
		KSR (Volunteer Corps), CBAT (Community Based Action Team), Community	NAD Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Riau Kalimantan Timur	Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klaten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau- Bau Kutai Kartanegara	Baseline Survey carried out to provide baseline data from the community	472.06	330.22	328.60	Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter, PMI Chapter, PMI Branch

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUATA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator	
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)			
		KSR (Volunteer Corps), CBAT (Community Based Action Team), Community	NAD Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Riau Kalimantan Timur	Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klaten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau-Bau Kutai Kartanegara	Vulnerability and Capacity Assessment (VCA) carried out to provide comprehensive pictures of the existing hazards, risk, vulnerability and capacity at the community level	794.94	890.92	531.68	Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter, PMI Chapter, PMI Branch	
		PMI	PMI NHQ		GIS Database and Map of Hazards & Risks properly updated and used as sources for preparing contingency plan	321	100		Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter	
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 3 (JUATA Rp)</b>											
4	melakukan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana	Terselenggaranya sistim pengawasan terhadap penguasaan dan pengelolaan SDA berpotensi bencana	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah provinsi, kab/kota yang menyelenggarakan sistim pengawasan dan pengelolaan SDA berpotensi bencana	58.994	56.711	64.077	45.000 54.000 63.000	APBN, APBD, PHLN	BNPB
	Teridentifikasi gejala bencana secara dini sebelum menimbulkan bencana.	Tersebar di seluruh Indonesia			Tersedianya Alat DRU (Disaster Relief Unit) untuk mengantisipasi terjadinya bencana.	110.000	140.000	160.000	APBN	Kem. PU, Ditjen Bina Marga	
	Terwujudnya sistem informasi (data dan peta) untuk kawasan rawan bencana di setiap Propinsi dan Kabupaten.	Wilayah Jawa dan Bali.			Sistem Informasi basis data dan peta micro-zonasi.	1.000	-	-	APBN	Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang,	

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
		Tersusunnya 3 dokumen Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berbasis mitigasi bencana	Sumbar NTT	2010: Kabupaten Pesisir Selatan (Sumbar) dan Kabupaten Alor (NTT); 2011: Kabupaten/Pulau kecil lainnya	Ada up date data, Perda, perda, tim pengontrol dan pengelola sumber daya alam.	800	450	PHLN	BNPB bekerja sama dgn Kem. Kelautan & Perikanan	
		BDPB, Desa, Forum PRB	Bengkulu, NTT, Kalimantan Timur						BINA SWADAYA	
		Pemerintah daerah dan masyarakat di kawasan pengelolaan sumberdaya alam berpotensi menimbulkan bencana	Jawa Tengah Di Yogyakarta Jawa Timur NTT		Pemerintah dan masyarakat mengetahui tingkat risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan sumberdaya yang dilakukan	100	100	Swasta/ Masyarakat	PSMB UPN Veteran	
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 4 (JUTA Rp)</b>										
5	Pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang	Terkendalinya penataan ruang sesuai standar	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah Provinsi dan kab/kota yang mengendalkan penataan ruang sesuai standar	156.900	194.550	223.100	BNPB	
		Tersedianya pengembangan sistem monitoring dan audit pemanfaatan ruang dengan remote sensing.	Wilayah Jawa dan Bali.		Sistem monitoring dan audit pemanfaatan ruang dan terkait risiko bencana.	1.000	-	-	Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang,	
		Bina Swadaya, BDPB, Desa, Forum PRB	Bengkulu NTT Kalimantan Timur		Ada rencana dan tim pengontrol tata ruang				BINA SWADAYA	
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 5 (JUTA Rp)</b>										
6	pengelolaan lingkungan hidup	Neraca SDA	Jawa tengah jawa timur (2011)		Tersedianya neraca sumber daya alam terintegrasi	61.000	72.000	84.000	Bakosurtanal	
		Terselenggaranya pengelolaan lingkungan hidup sesuai standar	sebagian Sulawesi sebagian Kalimantan (2012)		Jumlah Provinsi dan kab/kota yang melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai standar	150.000	180.000	210.000	BNPB	
		Terselenggaranya rehabilitasi hutan dan lahan di 33 Propinsi	Propinsi		Terselenggaranya rehabilitasi hutan dan lahan di 33 Propinsi	10.000	10.000	10.000	Kem. Kehutanan, Dirjen RUPS	
		Lahan gambut di Kalimantan Tengah, Jambi, Riau	propinsi		Terlaksananya rehabilitasi lahan gambut dan terwujudnya konservasi tanah dan air	475.000	275.000	200.000	Kem. Kehutanan, Dirjen RUPS	
		Lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan di Cianjur, Bogor, Depok, bekasi dan Jakarta	5 kab		Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan serta terwujudnya bangunan konservasi tanah dan air	365.350	150.450	110.850	Kem. Kehutanan, Dirjen RUPS	

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUATA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			(7)	(8)
		Lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan Wonosobo, Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Temanggung	5 kab		Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan serta terwujudnya bangunan konservasi tanah dan air	168,000	60,670	59,650	APBN, APBD	Kem. Kehutanan, Dirjen RUPS
		Lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo, Surakarta, Ngawi, Bojonegoro	6 kab		Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan serta terwujudnya bangunan konservasi tanah dan air DAS Solo	171,000	50,850	45,680	APBN, APBD	Kem. Kehutanan, Dirjen RUPS
		Lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan kabupaten Bndung Barat, Sumedang, Garut, Kutopanjang	4 kab		Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan serta terwujudnya bangunan konservasi tanah dan air Catchment area waduk Siguling, Jatigede, Kutopanjang dan Masbastari	95,000	30,850	24,250	APBN, APBD	Kem. Kehutanan, Dirjen RUPS
		200 kabupaten/kota yang memiliki lahan kritis lebih dari 20 % dari luas kabupaten	200 kab/kota		Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan serta terwujudnya bangunan konservasi tanah dan air pada 200 kab/kota	500,000	500,000	500,000	APBD	Kem. Kehutanan, Dirjen RUPS
		Lahan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (Riau, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur			Terlaksananya upaya pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan	9,565	7,850	9,250	APBN	Kem. Kehutanan, Dirjen RUPS
		Terwujudnya upaya konservasi air untuk pertanian	33 Propinsi		Tersedianya embung 1.969 unit, Dam Part. 1.646 unit dan Sumur Resapan 7.000 unit	95,650	106,400	113,700	APBN	Kementerian Pertanian, Direktorat Pengelolaan Air, Ditjen. PLA
		mitigasi tsunami di 17 lokasi	Jawa Timur Jawa Tengah Bengkulu DIY Jawa Barat NTT Sulawesi Tenggara Lampung NAD Sulawesi Utara Papua		memiliki vegetasi pelindung pantai untuk mitigasi bencana tsunami	800	2,000	4,000	APBN	Kem. Kelautan & Perikanan
		Tertanamnya vegetasi pantai di 17 lokasi	Jawa Tengah Jawa Timur Banten Jawa Barat NTB		Persentase kawasan pesisir yang memiliki vegetasi pelindung pantai	800	2,000	4,000	APBN	Kem. Kelautan & Perikanan
		Pengembangan data tutupan lahan sebagai informasi dasar pengurangan bencana	Seluruh kabupaten di Indonesia		Data tutupan lahan dan kawasan lindung	1,600	1,600	1,600	APBN	KLH

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
		Pemulihan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang	NAD Pantai Utara Jawa Sulawesi Tengah dan Gorontalo	Simeulue Pantai Utara Jawa Teluk Tomini	Jumlah Demplot untuk Pemulihan Ekosistem	500	500	500 APBN	KLH	
		Penanggulangan dampak kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak di pesisir dan laut	Riau	Dumai	Buku Pedoman	75	75	75 APBN	KLH	
		Tersedianya kebijakan, data dan informasi untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan		Tersedianya data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan mekanisme pencegahan kebakaran hutan	3,000	3,000	3,000 APBN	KLH	
		Kecukupan pangan, kesehatan masyarakat pada daerah rawan kekeringan	Jateng NTT DIY	Banjarnegara, Belu, Gunung Kidul	Terpenuhinya kebutuhan air baku masyarakat daerah rawan kekeringan	250	250	250 APBN	KPDT	
		Berkurangnya dampak abrasi pantai pada daerah pesisir dan lahan kritis	Sulsel Gorontalo Bengkulu Sumatera Barat	Pinrang, Gorontalo, Bulukumba, Bengkulu Utara, Kep. Mentawai	Terbentuknya hutan-hutan mangrove di kawasan rawan abrasi	110	300	300 APBN	KPDT	
		Tersedianya strategi dan program pemulihan fungsi lahan Kawasan Lindung Dataran Dieng.	Jawa Tengah	Kawasan Dataran Dieng.	Sistem Pemantauan risiko bencana dan program pemulihan.	750	-	- APBN	Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang,	
		Pelestarian lingkungan hidup wilayah mangrove, terumbu karang, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi di daerah rawan bencana.	4 Kowil		Terwujudnya kegiatan penghijauan pada zona pesisir rawan abrasi, lindung dan resapan air	240	288	346 APBN	Ster TNI	
			4 Kowil		Terwujudnya kegiatan pelestarian sungai akibat pendangkalan sungsi	100	-	144 APBN	Ster TNI	
			4 Kowil		Terwujudnya kegiatan pelestarian jalur hijau berupa zona hijau bantaran sungai dan penanaman pohon penahan erosi	100	120	144 APBN	Ster TNI	

No	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUATA Rp)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
		18 Sekolah Dasar (2.988 guru dan siswa)	NAD	Aceh Selatan	2.988 guru dan siswa sekolah dasar di daerah dampingan mengelola kebun sekolah yang berwawasan lingkungan				PHLN, SWASTA/AMAS YARAKAT	JRS
		Linking Disaster Risk Reduction and Climate Adaptation			Support to pilot initiatives in climate adaptation and resilience in urban and rural communities to build alliance among the DRR and CCA constituents and programs	11,048.33	11,048.33	11,048.33	PHLN	National Council for Climate Change (DNPI), National Disaster Management Agency (BNPB), Local Governments, Civil Society, World Bank
		BDP, Desa, Forum PRB	Bengkulu NTT Kalimantan Timur		Ada tim dan sistem kontrol yang tertuang dalam Perdes Lingkungan Hidup atau PRB					BINA SWADAYA
		Siswa dan Guru SMA/SMK	Jawa Barat		1. Adanya Program Sistematis Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2. Sinergisasi BPBD, Dinas Pendidikan, BPLH	200	200	200		BPBD, Climate Change Center (C3), Dinas Pendidikan
		Masyarakat (Rumah tangga)	Jakarta Jawa Barat DIY Jawa Timur Sumut Sulsel Kalsel	Jakarta Bandung Yogyakarta Surabaya Medan Makassar Banjarmasin	Reduksi Sampah, Jumlah RW partisipan, Jumlah Kader lingkungan				APBD, Swasta/ Masyarakat	Unilever, Pemkot, Media : Dita, Republika, Rase FM, PR, Sonora DIY, KR, Jawa Pos
		Kab. Pnggaran			Jumlah kelapa yg ditanam				Masyarakat/ Masyarakat	
									Swasta/ Masyarakat	Pemkot, PKK, Unilever, Media, Republika, delta, sonora, KR, Jawa Pos
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 6 (JUATA Rp)</b>						<b>2,059,138</b>	<b>1,394,651</b>	<b>1,310,687</b>		
7	pengaturan pembangunan dan tata bangunan	Ter sosialisasinya peraturan, kebijakan dan pedoman tata bangunan	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah Dokumen keputusan dan stakeholder di pusat, provinsi dan kab/kota mempunyai komitmen untuk menyetujui penganggaran pembangunan dan tata bangunan	120.000	144.000	168.000	APBN, APBD, PHLN	BNPB

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
		Pengurangan risiko dampak kerusakan yang diakibatkan oleh gempa tektonik.	NTT Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Jakarta Jawa Barat Jateng NTT NTB		Berkurangnya dampak kerusakan sarana dan prasarana yang ditimbulkan gempa.	15,500	-	-	APBN	Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang,
		Sekolah Dasar		Bogor Rembang, Solo, dan Grobogan Lembata dan Sikka Dumou	Jumlah Sekolah yang memiliki struktur yang aman.	X	X	X	PHLN	Plan Indonesia
		Mengembangkan standar-bencana bagi gedung sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah	33 provinsi		Tersusunnya dokumen tentang standar bangunan sekolah tahan gempa yang		2,000		APBN	Kem. Diknas, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
		Penerapan standar bangunan sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah tahan gempa			Terlaksananya standar bangunan sekolah tahan gempa pada semua sekolah		65,500	80,000	APBN	Kem. Diknas, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
					Support to implementation of disaster and climate proof building codes and standards and micro zoning	3,156.67	3,156.67	3,156.67	PHLN	Ministry of Public Works, National Disaster Management Agency (BNPB), Local Governments, Civil Society
		Terbangunnya rumah contoh tahan gempa untuk kekuatan gempa skala kota padang	SumBar	Kota Padang	Terbangun 5 banunan rumah sederhana tahan gempa di Kota Padang		3,000		APBN, APBD	Pusat Studi Bencana Universitas Andalas
		Bina Swadaya, BDPB, Desa, Masyarakat	Bengkulu NTT Kalimantan Timur		Ada peraturan dan tim pengontrol tata bangunan					BINA SWADAYA
		CBAT (Community Based Action Team), Community, LGU (Local Government Unit)	33 Provinces, 408 Districts		Promotion of Disaster Risk Reduction/Climate Change Adaptation undertaken using a number of communication channels	859.98	311.08	555.71	Swasta/ Masyarakat	PMI NHO, PMI Chapter, PMI Branch, Community, LGU
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 7 (JUTA Rp)</b>						<b>139,517</b>	<b>214,968</b>	<b>251,712</b>		
8	pembangunan sarana dan prasarana	Pembangunan Sistem Radar Cuaca	Papua Papua Barat Maluku Utara Kalsel Riau	Merauke Manokwari Ternate Banjarmasih Pekabbaru	Data dan Informasi Radar Cuaca di daerah yang berupa fenomena awan-awan hujan, pergerakan awan dan angin	72,000			APBN	BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI



No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			(7)	(8)
	Pembangunan Ground Satellite Receiver	Sumut Papua	Medan	Jayapura	Data dan informasi satelit cuaca yang berupa fenomena awan-awan hujan, pergerakan awan, sst dan estimasi hujan	5,000			APBN	BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI
	Pembangunan Sistem Automatic Weather Station ( AWS )	Daerah Bencana di Sumatra Kalimantan Sulawesi Maluku Papua			Data unsur cuaca secara otomatis	19,440			APBN	BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI
	Pembangunan Sistem Automatic Rain Gauges ( ARG )	Sumatra Kalimantan Sulawesi Maluku Papua			Data curah hujan secara otomatis	990			APBN	BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI
	Pembangunan Pusat Pelayanan Informasi Perubahan Iklim Nasional dan Regional	Kantor Pusat dan 5 Provinsi lain.			Informasi Perubahan Iklim dari skala Nasional hingga skala Kabupaten	16,055			APBN	BMKG DEPUTI BIDANG KLIMATOLOGI
	Pengelblahan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG	Kantor Pusat			Terbangunnya satu Pusat Inventory Gas Rumah Kaca (GRK). Tersedianya Informasi Proyeksi Iklim hingga skala kabupaten berdasar berbagai scenario IPCC. Tersedianya Peta - Peta Kerentanan Perubahan Iklim berbasis pulau/wilayah (Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua).	44,900	47,350	47,350	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG KLIMATOLOGI
	Terbangunnya sarana dan prasarana sesuai standar	Seluruh daerah rawan bencana			Jumlah Provinsi dan kab/kota yang membangun sarana dan prasarana sesuai perencanaan	200,000	240,000	280,000	APBN, APBD, PHLN	BNPB

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
		Terbangunnya sarana struktur rumah bencana di 24 kawasan	Jawa Timur Bengkulu Jawa Tengah Jawa Barat NTB NAD Sulawesi Utara Papua Maluku Utara Sulawesi Selatan Gorontalo Maluku Papua Barat Sumatera Barat Lampung DIY		Persentase kawasan pesisir yang memiliki fasilitas penyelamatan diri dan permukiman tahan terhadap ancaman bencana	40,000	4,000	18,000	APBN	Kem. Kelautan & Perikanan
		33 PROV	33 prov		Kegiatan bantuan stimulan Terselenggaranya kegiatan bantuan stimulan BBR (Bahan Bangunan Rumah) yang dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu Rehabilitasi dan Relokasi, khusus untuk relokasi lahan yang disediakan diarahkan terhindar dari lokasi rawan bencana. Terselenggaranya Santunan untuk meringankan beban psikologis dan meminimalisir terjadinya trauma psikologis	31,600	37,920	45,504	APBN	Kem. Sosial
		Pencegahan bahaya yang ditimbulkan akibat tanah longsor	NTT Sulbar	Manggarai, Flores Timur Polewali Mandar	Terbentuknya talud sebagai penahan bahaya tanah longsor		500	500	APBN	KPDT
		Teridentifikasinya pola kerjasama pemanfaatan sarpras antar daerah dalam rangka penanggulangan bencana dengan menyusun database sarpras penanggulangan bencana sehingga kebutuhan dan kondisi sarpras penanggulangan bencana di daerah dapat diketahui.	9 Provinsi		Tersusunnya database sarpras penanggulangan bencana dengan berkoordinasi antar daerah dalam rangka pemanfaatan sarpras bencana	300	500	700	APBN	KEMDAGRI

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
		Terselenggaranya kegiatan pembangunan gedung kantor pemerintahan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pasca bencana dengan cara yang efisien dan efektif	2 Provinsi 3 Kabupaten 1 Kota		Terbangunnya Sarana Prasarana Pemerintahan di 6 (enam) wilayah (Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kota Pariaman).	14		APBN	KEMDAGRI	
		Terselenggaranya kegiatan pembangunan gedung kantor pemerintahan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pasca bencana dengan cara yang efisien dan efektif.	2 Provinsi 3 Kabupaten 1 Kota		Terwujudnya koordinasi penanganan, pengeloaan serta pertanggung-jawaban/pelaporan dalam kegiatan pembangunan/ rehabilitasi gedung kantor Pemerintahan pasca bencana di Provinsi Jawa Tengah, NTB, Kab. Tanah Datar, Toraja Utara, Lombok Barat dan Kota Pariaman.	200		APBN	KEMDAGRI	
		Meningkatnya pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi faktor penyebab risiko bencana	Jawa dan Sumatera		Tersedianya SIM terkait prasarana KA yang akurat dan mutakhir	2.000	2.000	2.000 APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian	
		Meningkatnya kelancaran operasi perjalanan KA	Jawa Tengah	<p>2010 : Brumbung - Tegowanu; Kaliwungu - Kalibodri; Sta. Semarang Tawang; Jerakah - Kaliwun_u, Kaliwungu - Kalibodri; Sragen - Masaran.</p> <p>2011 : Purwakarta - Padalarang; Cicalengka - Banjar; Gampingan - Jambon; Kumpangbandan - Tanahabang.</p>	Prasarana KA siap dan aman operasi	35.000	41.000	37.000 APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian	

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			(7)	(8)
			Jawa tengah Jawa Timur Jakarta	2012 : Brumbung - Ngoro, Masaran - Madiun; Sidoarjo - Tanggulangin - Porong; Kampungbandan - Tanahabang.						
		Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi laut	Jumlah kebutuhan kapal patroli per luasan wilayah keamanan			276,600	0	0	0 APBN	Kem. Perhubungan, Ditjen Hubla
		Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi laut	Jumlah kapal marine surveyor per luasan wilayah pelayanan			4,100	0	0	0 APBN	Kem. Perhubungan, Ditjen Hubla
		Meningkatkan keandalan dan kecukupan prasarana dan sarana transportasi laut yang efektif dan efisien dan meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi laut	Jumlah kecukupan dan keandalan SBMP per wilayah pelayanan			99,000	0	0	0 APBN	Kem. Perhubungan, Ditjen Hubla
		Pembangunan pengendali banjir untuk membebaskan daerah dari banjir seluas 350.000 Ha.	Tersebar di seluruh Indonesia		Terlindungnya daerah permukiman dari banjir seluas 350.000 Ha	3,800,000	4,000,000	4,500,000	APBN	Kem. PU, Ditjen SDA
		Pembangunan pengendali lahar gunung berapi untuk membebaskan daerah dari lahar seluas 9.620 Ha.	DIY Jateng Jatim		Terlindungnya daerah permukiman dari lahar gunung berapi seluas 9.620 Ha	180,000	100,000	120,000	APBN	Kem. PU, Ditjen SDA
		Penanganan longsoran tebing	Tersebar di seluruh Indonesia		Terlindungnya lalu lintas dari Longsoran tebing	30,000	36,000	44,250	APBN	Kem. PU, Ditjen Bina
		Memperkuat badan jalan dari longsoran.	Tersebar di seluruh Indonesia		Terlindungnya Badan Jalan dari longsoran.	500	4,400	4,850	APBN	Marfa Kem. PU, Ditjen Bina
		Tersedianya peralatan (PA Mobile, Pipa, Hidran Umum, Pompa, Mobil Tanki untuk penanganan darurat bidang air minum dan air limbah.	Kantor Pusat (Dep. PU)		Terpenuhinya prasarana dan sarana untuk pengungsi.	15,000	15,000	15,000	APBN	Kem. PU, Ditjen Cipta Karya
		Tersedianya peralatan (WC, Knock Down, MK Mobile, Alat Berat, Pompa Banjir, Pompa lumpur untuk penanganan darurat bidang penyehatan lingkungan permukiman.	Kantor Pusat (Dep. PU)		Terpenuhinya prasarana dan sarana untuk pengungsi.	12,000	12,000	12,000	APBN	Kem. PU, Ditjen Cipta Karya

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUATA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			(7)	(8)
		Tersedianya peralatan (tenda keluarga, hunian darurat untuk penanganan darurat bidang perumahan dan permukiman. Terbentuknya Satgas penanggulangan darurat dan pelatihan tenaga Satgas bidang Cipta Karya	Kantor Pusat (Dep. PU)		Terperuhnya prasarana dan sarana untuk pengungsi.	12,000	12,000	12,000	APBN	Kem. PU, Ditjen Cipta Karya
		Terbentuknya Satgas penanggulangan darurat dan pelatihan tenaga Satgas bidang Cipta Karya	Kantor Pusat (Dep. PU)		Terperuhnya prasarana dan sarana untuk pengungsi.	1,500	1,500	1,500	APBN	Kem. PU, Ditjen Cipta Karya
		Terfasilitasinya kebijakan dan bantuan stimulan prasarana dan sarana pengembangan kawasan khusus yang terkena bencana	NAD, Riau, Kepri, Jabar, Sumbang, Sulut, Maluku, Papua, NTT, Papua Barat, Sumut		Jumlah Fasilitas Kebijakan dan Bantuan Stimulan Prasarana dan Sarana Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman untuk 19 Kawasan Khusus yang terkena bencana seluas 380 Ha	12,000	21,000	24,000	APBN	Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan
		Terperuhnya kebijakan dan bantuan stimulan Rumah Khusus dalam konteks penanggulangan bencana	Jawa Barat, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu		Jumlah Rumah Pasca Bencana yang terbangun	60,000	40,000	40,000	APBN	Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Deputi Bidang Perumahan Formal
		Terfasilitasinya kebijakan dan bantuan stimulan pembangunan baru perumahan swadaya di kawasan bencana	NAD, Sumbang, Bengkulu, DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulsel, Sulut, Sulteng, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat		Jumlah fasilitas dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya di kawasan bencana	50,000	50,000	50,000	APBN	Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Deputi Bidang Perumahan Swadaya
		Terfasilitasinya kebijakan dan bantuan stimulan peningkatan kualitas perumahan swadaya di kawasan bencana	NAD, Sumbang, Bengkulu, DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulsel, Sulut, Sulteng, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat		Jumlah fasilitas dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya di kawasan bencana	25,000	25,000	25,000	APBN	Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Deputi Bidang Perumahan Swadaya

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
		Terasiliasinya penyediaan prasarana, sarana, utilitas perumahan swadaya yang dapat memstimulasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat di kawasan bencana	NAD, Sumbang, Bengkulu, DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulsel, Sulut, Sulteng, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat		Jumlah fasilitas dan stimulasi PSU perumahan swadaya di kawasan bencana	40,000	40,000	40,000	APBN	Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Deputi Bidang Perumahan Swadaya
			Sulawesi NTB NTT Papua Papua Barat			8,806	8,806	8,806	PHLN	Oxfam
		Masyarakat Desa	Jakarta Jawa Barat Jateng NTT NTB	Bogor Rembang, Solo, dan Grobogan Lembata dan Sikka Dompu	- Jumlah upaya mitigasi di tingkat Desa	X	X	X	PHLN	Plan Indonesia
		National Program for Community Empowerment (PNPM) Rural							PHLN	Ministry of Home Affairs, World Bank
		National Program for Community Empowerment (PNPM) Urban				2,130,750			PHLN	MINISTRY OF SETTLEMENT AND REGIONAL INFRASTRUCTURE
		terbangunnya struktur evakuasi vertikal yang tahan gempa dan layak huni di kawasan bencana di Kota Padang	SumBar	Kota Padang	Terbentuk: 1. Dokumen perencanaan bangunan evakuasi vertikal, 2. Terwujudnya gedung vertikal gempa uari tsunami untuk evakuasi vertikal		1,000	2,000	APBN, APBD, PHLN, Swasta/ IRIAS/ANAKAT	BNPB, PSB Unand, PKB ITB
		Bina Swadaya, BDPB, Desa, Forum PRB	Bengkulu NTT Kalimantan Timur		Ada rencana, tim pelaksana dan partisipasi masyarakat					BINA SWADAYA
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 8 (JUTA Rp)</b>						<b>7,179,855</b>	<b>4,737,526</b>	<b>5,330,460</b>		
<b>TOTAL PENDANAAN PROGRAM D (JUTA Rp)</b>						<b>13,449,283</b>	<b>7,481,712</b>	<b>8,118,856</b>		
<b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b>										
<b>PROGRAM E : PERINGATAN DINI</b>										
1	pengamatan gejala bencana	Kajian risiko Multi-Bencana Terpadu	DIY		Tersedia dan tersosialisasinya model sistem informasi kebencanaan	800	800	800	APBN	Bakosurtanal
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana MEWS	Semua lokasi yang telah terpasang Peralatan MEWS		Sistem beroperasi secara normal	13,000	13,000	13,000	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI
		Pembangunan Gedung MEWS	Sumut Sulsel Bali	Medan Makasar Denpasar	Gedung MEWS sebagai pusat pelayanan peringatan dini cuaca di daerah	990	990	990	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
		Persiapan Operasional Numeric Weather Prediction (NWP)	Jakarta		Fasilitas PC Cluster untuk operasional dan SDM modifikasi model NWP beroperasi	3,000	3,000	3,000	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI
		Sewa Komunikasi Radar Cuaca, AWS dan ARG	Jakarta		Sarana Komunikasi Radar Cuaca, AWS dan ARG beroperasi normal	3,000	3,000	3,000	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI
		Pengadaan sistem monitoring gempa bumi otomatis, 4 remote sta, 1 center, dan sistem komunikasi			Meningkatnya pelayanan data gempa bumi lokal di 9 lokasi	4,000	4,000	4,000	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
		Pengadaan sarana dan prasarana guna monitoring bencana gempa bumi dan tsunami	Jakarta		Tersedianya fasilitas untuk monitoring bencana gempa bumi dan tsunami di 10 Regional Center	1,500	1,500	1,500	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
		Pengadaan sarana dan prasarana guna mengkalibrasi peralatan	Jakarta		Tersedianya fasilitas untuk mengkalibrasi peralatan gempa bumi di masing-masing Balai Besar	1,200	1,200	1,200	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
		Peningkatan Pelayanan data Geomagnet	Banten		Meningkatnya pelayanan magnet bumi di Banten	4,000	2,750		APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
		Peningkatan Pelayanan data magnet bumi	Papua Maluku Yogyakarta Sumbang	Jayapura Ambon Yogyakarta Padang	Peningkatan pelayanan magnet bumi di 4 lokasi (Jayapura, Ambon, Yogyakarta dan Padang Panjang)	2,300	2,300	2,300	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
		Melengkapi peralatan untuk studi prekursor gempa bumi			Tersedianya fasilitas untuk studi prekursor gempa bumi	400	400	400	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
		Penin katan Pelan anan informasi petir			Tersedian a informasi ke adian etir di beberapa lokasi di Indonesia	150	150	150	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
		Mendapatkan lokasi sensor seismik dg kualitas yang baik			Meningkatnya kualitas data seismic dari 25 lokasi	200	200	200	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
		Setiap gejala kejadian bencana dilaporkan secara cepat kepada Pemda dan kemudian diteruskan ke instansi terkait.	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah lokasi pengamatan gejala kejadian bencana yang dilaksanakan	24,000	28,800	33,600	APBN, APBD, PHLN	BNPB

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
		Tersedianya sebagai teknologi pengurangan risiko bencana.	Banten Jawa Barat DKI Jakarta Jawa Tengah Jawa timur Sumatera Barat Kalimantan Selatan Sumatera Selatan Lampung Sumatera Barat Sumatera Hindia Laut Banda Laut Maluku laut Jawa		Dikuasanya kemampuan membangun teknologi sistem peringatan dini yang handal untuk bencana banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan kerusakan perairan dan lingkungan	8,000	10,000	12,000	APBN, APBD, PHLN, SWASTA	PTLWB BPPT
		- Operasionalisasi dan pemeliharaan buoy tsunami dan stasiun penerima data buoy.	Samudera Hindia Laut Banda Laut Maluku laut Jawa		Buoy dan stasiun penerima data beroperasi					PTLWB BPPT
		- Terbangunnya konsep, sistem dan prototype sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat.	Banten Jawa Barat DKI Jakarta Jawa Tengah Jawa timur Sumatera Barat Kalimantan Selatan Sumatera Selatan Lampung Sumatera Barat		Paket teknologi digunakan oleh pemangku kepentingan					PTLWB BPPT
		- Terbangunnya konsep, sistem dan rekayasa teknologi penanggulangan bencana akibat gagal teknologi.	Banten Jawa Barat DKI Jakarta Jawa Tengah Jawa timur Sumatera Barat Kalimantan Selatan Sumatera Selatan Lampung Sumatera Barat		Terbangunnya konsep, sistem dan rekayasa teknologi penanggulangan bencana akibat gagal teknologi					PTLWB BPPT
		Tersedianya dan terpasangnya AWS	6 Propinsi		Tersedianya dan terpasangnya AWS 6 Unit	1,000	2,000	1,500	APBN	Kem. Kehutanan, Dirjen RUPS
		Terpantarnya Tingkat Aktivitas Gunungapi pada level waspada	10 Lokasi (berdasarkan data statistik)		Jumlah Terpantarnya tingkat aktivitas Gunungapi per tahun pada level waspada	971	1,117	1,285	APBN	Badan Geologi, KESDM



No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
		1). Tersedianya informasi hotspot (harian)	Sumatera dan Kalimantan		Informasi pemantauan hotspot, harian yang ter-upload di website SIMBA secara real time setiap hari.	232,6	255	281 APBN	LAPAN	
		2). Tersedianya informasi Sistem Peringatan Dini Bahaya Kebakaran Hutan/SPBK (harian)	Sumatera dan Kalimantan		Informasi pemantauan SPBK harian yang ter-upload di website SIMBA secara real time setiap hari.					
		3). Tersedianya informasi pemantauan daerah potensi banjir (harian)	Indonesia		Informasi pemantauan potensi banjir harian yang ter-upload di website SIMBA secara real time setiap hari.					
		Kajian kapasitas daerah dalam rantai peringatan dini tsunami bagi aparat, masyarakat, interface agencies dan media	Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu		Pemanfaatan pemahaman proses alam dalam PRB	500	500	500 APBN	LIPI, Puslit Oseanografi	
		BDBP, Pemerintah Desa, Masyarakat, Bina Swadaya, LSM, Swasta	Jakarta Bengkulu NTT Kalimantan Timur		Data gejala bencana menurut masyarakat dan menurut BMKG				BINA SWADAYA	
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 1 (JUTA Rp)</b>										
2	melakukan analisis hasil pengamatan gejala bencana	Tersusunnya Laporan Hasil Kajian pengembangan teknik inspeksi kepatuhan kondisi izin pada radiografi industri Tersusunnya Laporan Hasil Kajian penentuan baku tingkat radioaktivitas di lingkungan Laporan Hasil Kajian pedoman penilaian kriteria keberterimaan untuk fasilitas landfill sebagai tempat disposal TENORM Laporan Hasil Kajian pedoman penentuan discharge limit Terciptanya Budaya Keselamatan di INNRR Tersedianya Perka BAPETEN tentang Manajemen Penuaan INNRR Tersedianya Laporan hasil kajian Teknis evaluasi pengawasan INNRR	Jakarta		Laporan Hasil Kajian pengembangan teknik inspeksi kepatuhan kondisi izin pada radiografi industri Laporan Hasil Kajian penentuan baku tingkat radioaktivitas di lingkungan Laporan Hasil Kajian pedoman penilaian kriteria keberterimaan untuk fasilitas landfill sebagai tempat disposal TENORM Laporan Hasil Kajian pedoman penentuan discharge limit Budaya Keselamatan di INNRR Perka BAPETEN tentang Manajemen Penuaan INNRR Laporan Hasil Kajian Teknis evaluasi pengawasan INNRR	69,244	75,962	79,706	605 APBN	BAPETEN
			Jakarta			500	550	413 APBN		
			Jakarta			342	376			



No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			(7)	(8)
		Sekolah Dasar dampingan Plan Indonesia	Jakarta Jawa Barat Jateng NTT NTB	Bogor Rembang, Solo, dan Grobogan Lembata dan Sikka Dompu	- Kajian mengenai Sekolah yang Aman dari Ancaman Bencana tersedia	X	X	X	PHLN	Plan Indonesia
					Technical Assistance for the development of national and regional risk and impact assessment frameworks, tools and methodologies	2,367.5	2,367.5	2,367.5	PHLN	National Development Planning Agency (BAPPENAS), National Disaster Management Agency (BNPb) World Bank
		BOPB, Pemerintah Desa, Masyarakat, Bina Swadaya, LSM, Swasta	Jakarta Bengkulu NTT Kalimantan Timur Kota di Indonesia		Dokumen Hasil analisis					BINA SWADAYA
		Pemerintah Kota	Indonesia		Metoda kajian risiko kegunaan yang Teruji				APBN	PMB-ITB
		Pemprov NAD	Indonesia		Teknis penyusunan dan pemasangan early warning sistem di kawasan rawan tsunami				APBN	PMB-ITB
		Pemerintah daerah dan masyarakat di kawasan pembangunan berpotensi menimbulkan bencana	Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur NTT		Pemerintah dan masyarakat mengetahui tingkat risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan yang dilakukan	100	100	100	Swasta/ Masyarakat	PSMB UPN Veteran
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 2 (JUTA Rp)</b>										
3	pen_ambilan keputusan status ancaman bencana	Setia, hasil analisis diteta, kan status ancaman bencana	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah dokumen ke, utusan status ancaman bencana	29,609	35,993	40,536	28,000 APBN, ABPD, PHLN	BNPB
		Terbangunnya sistem peringatan dini bencana banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem (badai, rob) dan kerusakan perairan dan lingkungan yang handal								PTLWB BPPT
		Kajian kapasitas daerah dalam rantai peringatan dini tsunami bagi aparat, masyarakat, interface agencies dan media	Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu		tersumunya pedoman nasional rantai peringatan dini tsunami	500	500		APBN	BNPB, LIPI, Kem. Kelautan & Perikanan, Kem. RISTEK, BMKG, Kem. Dagri
		BOPB, Pemerintah Desa, Forum PRB	Jakarta, Bengkulu, NTT, Kalimantan Timur		Keputusan jenis status ancaman					BINA SWADAYA
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 3 (JUTA Rp)</b>						<b>28,500</b>	<b>34,100</b>	<b>39,200</b>		

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
4	penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana	Penyediaan informasi spasial indeks kebencanaan/peta multirawan bencana	Jawa Timur, Jawa Tengah Sebagian Sumatera sebagian Sulawesi sebagian Kalimantan		Tersedia dan tersosialisasinya informasi spasial atas dasar indeks kebencanaan	1,200	1,320	1,452 APBN	Bakosurtanal	
		Pembuatan Atlas kebencanaan	Indonesia			238	262	288 APBN	Bakosurtanal	
		Pembangunan Decision Support Sistem MEWS	Sumut Sulse Bali	Medan Makasar Denpasar	Sistem integrasi Radar Mosaic, model prakiraan, display dan disseminasi sesuai harapan	10,000	10,000	10,000 APBN	BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI	
		Pembangunan Sistem Komunikasi dan Integrasi	Sumatra Kalimantan Sulawesi Maluku Papua		Termonitornya seluruh tampilan radar cuaca di kantor pusat	7,500	7,500	7,500 APBN	BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI	
		Pembangunan Teleconference	Sumut Sulse Bali	Medan Makasar Denpasar	Termonitornya alur informasi cuaca	600	600	600 APBN	BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI	
		Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan NDC CTBTO	Jakarta		Tersedianya fasilitas untuk pelayanan informasi CTBTO	500	500	500 APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA	
		Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan AEIC	Jakarta		Meningkatnya pelayanan informasi gempabumi untuk ASEAN	500	500	500 APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA	
		Pengadaan digital seismograph di 15 stasiun Geofisika			Meningkatnya pelayanan informasi gempa lokal	600	600	600 APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA	
		Peningkatan Kerapatan Jaringan Pengamatan temporer magnetibumi			Meningkatnya informasi perubahan tahunan magnetibumi di Indonesia	500	0	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA	
		Peningkatan database di Jakarta dan redundant-Bali			Meningkatnya kelengkapan InaTEWS untuk keperluan Indonesia dan International	400	460	550 APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA	
		Informasi dan warning terkirim dan diterima secara cepat			Terpenuhiya kelengkapan persaratan RTWP	40	40	40 APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA	
		Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan sistem monitoring prekursor gempabumi			Tersedianya informasi prediksi gempabumi	800	800	800 APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA	
		Berfungsinya sistim informasi peringatan bencana yang evidence based di seluruh Indonesia	Seluruh daerah rawan bencana		Dokumen keputusan yang dihasilkan dalam menyelenggarakan peringatan bencana	50,000	60,000	70,000 APBN, APBD, PHLN	BNPB	

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
	33 Prov	33 Prop	33 prov	Terselenggaranya kegiatan studi kebijaksanaan sehingga dapat terpetakan dan terdeteksinya daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi sebagai langkah antisipasi dan terselenggaranya kegiatan kampung Siaga Bencana (KSB)	4,891.67	5,625.42	6,750.50	APBN	Kem. Sosial dan Akademisi	
	Minimalisasi gangguan DFI	33 Prop.		Jml. Luas Pertanaman yang terkena gangguan DFI (ha)				APBN	Kementerian Pertanian	
	Daerah yang rawan terhadap risiko bencana	Provinsi		tersebarunya informasi tentang peringatan dini bencana	2,500	2,500	3,000	APBN	Kem. Kominfo, Direktorat Sarana Teknologi Komunikasi, Ditjen SKDI	
	Tersedianya sistem (baik hardware maupun software) yang dapat mendukung pengolahan data penginderaan jauh guna pemantauan bumi untuk mitigasi bencana.			Informasi pemantauan harian yang terupload di website SIMBA secara real time setiap hari.Sistem informasi pemantauan harian dan bulanan sumberdaya alam dan lingkungan berbasis website.	446.7	491	540	APBN	LAPAN	
	Tersedianya informasi pemantauan cuaca dan iklim, sistem peringatan bahaya kebakaran, banjir/longsor, kekeringan, hotspot, dan ketersediaan pangan di website SIMBA									
	3). Tersedianya informasi bencana alam lainnya, seperti: sebaran kabut asap, dampak letusan gunung api, dampak gempa bumi, dampak tsunami dan lain-lain di website SIMBA									
	Terlaksananya diseminasi informasi penginderaan jauh untuk mitigasi bencana alam melalui kerjasama antar dan inter lembaga dan instansi serta melalui website SIMBA -LAPAN dan media massa									

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
		Kajian kapasitas daerah dalam rantai peringatan dini tsunami bagi aparat, masyarakat, interface agencies dan media	Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu		tersosialisasinya pedoman nasional rantai peringatan dini tsunami	250	500	500	APBN	LPI, Puslit Oseanografi
		Tersedianya panduan dan petunjuk teknis pengurangan risiko bencana.	Wilayah Jawa dan Bali.		Penyebarluasan Panduan dan petunjuk teknis.	1.000	-	-	APBN	Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang,
		Tersedianya dan terlaksananya sistem peringatan dini berbasis komunitas di 3 Provinsi.	Bengkulu Sumatera Barat NTT DIY Sulteng	Kota Palu	1) Jumlah SOP sistem peringatan dini berbasis komunitas yang tersusun di 3 Provinsi.	880	770		PHLN	BMIKG dan BNPP
		Terdokumentasinya bentuk-bentuk kearifan lokal dalam pengurangan risiko bencana ke dalam buku yang disebarluaskan sebanyak 1.000 eksemplar di di 13 kabupaten/kota di 6 provinsi	Jateng DI Yogyakarta Bengkulu Sumbang NTT	Palu Cilacap Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul Mukomuko, Kota Bengkulu Solok Sikka, Alor, Belu	1) Adanya buku tentang kearifan lokal dalam pengurangan risiko bencana yang diterbitkan, 2) Jumlah lembaga terkait penanggulangan bencana yang menerima buku tentang kearifan lokal dalam PRB dan penanggulangan bencana	150	150		PHLN	BNPP
		Multi-pemangku kepentingan	Nasional Jakarta		Informasi tersebar dan koordinasi berjalan dengan baik.	On-going dengan staff			PHLN	OCHA
		Forum Anak Desa dan Murid Sekolah Dasar	Jakarta Jawa Barat Jateng NTT NTB	Bogor Rembang, Solo, dan Grobogan Lembata dan Sikka Dompu	- Jumlah sistem peringatan dini di tingkat desa/ kelurahan	X	X	X	PHLN	Plan Indonesia
		Masyarakat	Jakarta Jawa Barat Jateng NTT NTB	Bogor Rembang, Solo, dan Grobogan Lembata dan Sikka Dompu	- Jumlah media yang dikembangkan	X	X	X	PHLN	Plan Indonesia
		Anak-anak dan Remaja	Jakarta Jawa Barat Jateng NTT NTB	Bogor Rembang, Solo, dan Grobogan Lembata dan Sikka Dompu	Jumlah media kampanye yang dihasilkan	X	X	X	PHLN	Plan Indonesia
		Pekerja Kemusiaan khususnya yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi: termasuk pemerintah, LSM, PMI dll			Belum bisa diindikasikan	Belum bisa diindikasikan	Belum bisa diindikasikan	Belum bisa diindikasikan	PHLN	Kem. Kesehatan, NGOs, Palang Merah Indonesia, organisasi profesi dll
		Tersedianya sarana dan rambu evakuasi tsunami	Sumbang	Kota Padang	1) Tersedianya prasarana di target evakuasi, 2) 100 mahasiswa terlibat, 3) 10 jalur evakuasi siap digunakan	5.000			APBN, APBD	Pusat Studi Bencana Universitas Andalas

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
		BDPB, Pemerintah Desa, Masyarakat, Bina Swadaya, LSM, Swasta	Jakarta Bengkulu NTT Kalimantan Timur		Dokumen Hasil analisis				BINA SWADAYA	
		BDPB, Pemerintah Desa, Masyarakat, Bina Swadaya, LSM, Swasta	Jakarta Bengkulu NTT Kalimantan Timur		Ada berbagai jenis media dan data jumlah penerima informasi dari pelaksana				BINA SWADAYA	
		Sekolah-2 dari tingkat SD, SLTP, SMK dan SMU, Muspida dan Muspika	Bengkulu Jogjakarta		Tersebaranya tools edukasi bencana di 1.332 kantor desa, 79 kantor kecamatan dan 9 kantor kabupaten/kota di Bengkulu, 90 kantor dinas pendidikan dan 1.833 sekolah di Prop.Bengkulu.	4,120	4,120	4,120	ACT	
		Pemerintah RI	Indonesia		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Me-maintain sistem informasi tersebut agar tetap up to date datannya</li> <li>• Penyempurnaan sistem</li> </ul>				APBN	PMB-ITB (Ristek, BMKG)
		Perubahan perilaku masyarakat setempat	Jawa NAD						PHLN	Skala dan CSF
		Masyarakat desa ring I Kelut	Jawa Timur	desa ring I Kelut	terbentuknya radio amatir				Swasta/ Masyarakat	Sampoerna, PSMB UPN Jogjakarta, Perkumpulan Skala

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
	Board Members, Staff, Volunteers, CBAT (Community Based Action Team), Community, Local Government Unit)	NAD Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Riau Kalimantan Timur	Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klaten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau-Bau Kutai Kartanegara	ICBRR/DRR identified as responsibility of all stakeholders (PMI, Community, LGU) with shared commitment and supports	2.28	481.43	187.84	Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter, PMI Chapter, PMI Branch, Community	
	PMI	PMI NHQ			Radio Communication Network established at all levels	460	460	Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter	
	PMI	PMI NHQ			Efficient national EWS include CBEWS in place involving all levels of government, civil society and community based on sound scientific information, risk knowledge, communicating and warning dissemination and community response capacity	33	33	Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter	
	PMI	PMI NHQ			CBEWS SOP, Manual and IEC materials printed and disseminated to 33 PMI Chapters	100	100	Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter	
	PMI Staff	PMI NHQ			DMIS functioned accurately	12	12	Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter	
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 4 (JUTA Rp)</b>						<b>92,724</b>	<b>97,825</b>	<b>108,533</b>		
5	pelaksanaan tindakan terhadap ancaman bencana	Meningkatkan Kerapatan Jaringan repeat station Setiap ancaman bencana tertanggulangi dengan baik			Tersedianya informasi untuk survei gravitasi Jumlah Data dan Informasi kegiatan tindakan bencana yang tertanggulangi	15	15	15 APBN 84,000 APBN, ABPD, PHLN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA BNPB	



No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
		Kajian kapasitas daerah dalam rantai peringatan dini tsunami bagi aparat, masyarakat, interface agencies dan media	Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu		tersosialisasinya pedoman nasional rantai peringatan dini tsunami	250	500	500 APBN	LIPI, Puslit Oseanografi	
		Multi pemangkukepentingan	Nasional Jakarta		Jejaring yang ada terpelihara dengan baik serta bertambah besar.	On-going dengan staff	-	PHLN	OCHA	
		Affected population	Country wide						UNICEF	
		BDPB, Pemerintah Desa, Masyarakat, Bina Swadaya, LSM, Swasta	Jakarta Bengkulu NTT Kalimantan Timur		Ada sistem peringatan dini dan SOP yang disimulasikan				BINA SWADAYA	
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 5 (JUTA Rp)</b>						<b>60,265</b>	<b>72,515</b>	<b>84,515</b>		
<b>TOTAL PENDANAAN PROGRAM E (JUTA Rp)</b>						<b>280,342</b>	<b>316,395</b>	<b>352,490</b>		
<b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada Semua Tingkatan Masyarakat</b>										
<b>PROGRAM F : Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam PRB</b>										
1	Peningkatan pemahaman tentang kerentanan bencana masyarakat	Terselenggaranya promosi kerentanan masyarakat rawan bencana berskala nasional	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah kemiraan dan dokumen dalam penyelenggaraan promosi pemahaman kerentanan masyarakat dalam PRB	26,000	31,200	36,400 APBN, ABPD, PHLN	BNPB	
		- Penyelenggaraan seminar dan lokakarya pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan internasional	Jakarta Banten Lampung Jawa Tengah Sumatera Barat		- Terlaksananya pelatihan pengembangan teknologi pengurangan risiko bencana				PTLWB BPPT	
		Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kelestarian hutan dan lingkungan di 464 Kab/Kota	464 Kab/Kota		Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kelestarian hutan dan lingkungan di Kab/Kota	500	500	500 APBN	Kem. Kehutanan, Dirjen RLPS	
		Meningkatnya pemahaman masyarakat/Lembaga tentang mitigasi bencana geologi	14 Lokasi berdasarkan tingkat aktivitas kegiatan		Peningkatan Persentasi pemahaman Masyarakat/Lembaga	1,050	1,050	1,050 APBN	Badan Geologi, KESDM	
		Meningkatnya pengetahuan Masyarakat/Lembaga Penanganan Bencana mengenai Kebencanaan Geologi	-		Tersedianya bahan untuk sosialisasi dan peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap bencana geologi	720	828	952 APBN	Badan Geologi, KESDM	
		Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana geologi	14 Lokasi berdasarkan tingkat aktivitas kegiatan		Peningkatan Persentasi pemahaman Masyarakat/Lembaga			APBN	Badan Geologi, KESDM	
		Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung		Terselenggaranya sosialisasi pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana	600	750	750 APBN	KEMENKOKESRA	

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			(7)	(8)
		Masyarakat dan petugas di masing-masing prov & Kab/Kota			Adanya kepedulian masyarakat terhadap ancaman potensi bencana				APBN	PPK Kementerian Kesehatan
		Community in village level	Sumatera Barat		#EWS used in community	284.1	284.1	284.1	PHLN, USAID (Total: \$494.804)	Mercy Corps
		18 Sekolah dasar (2.988 guru dan siswa SD)	National		1. Guru-guru SD-SD didampingi masukan perspektif PRB dan pendidikan perdamaiannya dalam praktek pengajarannya di kelas	8,806			PHLN	UNDP
					2. Minimal 3 kali setahun ada pertemuan dengan pihak pemerintah lokal dan dinas terkait untuk berkoordinasi dan komunikasi tentang pentingnya PRB dan peace education dalam pendidikan dasar				PHLN, SWASTA/AMAS YARAKAT	JRS
		Forum Anak Desa dan Muirid Sekolah Dasar	Jakarta	Bogor	3. Mengirim laporan secara rutin (4 bulanan) kepada pemerintah setempat dan dinas-dinas terkait.				X PHLN	Plan Indonesia
		Pekerja Kemanusiaan khususnya yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi: termasuk pemerintah, LSM, PMI dll	Jawa Barat	Rembang, Solo, dan Grobogan	- Jumlah Peta dan Analisis Risiko Bencana di tingkat Desa	X	X	X		
			Jateng	Lembata dan Sikka						
			NTB	Dompu						
		Pekerja Kemanusiaan khususnya yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi: termasuk pemerintah, LSM, PMI dll				Belum bisa diindikasikan	Belum bisa diindikasikan	Belum bisa diindikasikan	PHLN	Kem. Kesehatan, NGOs, Palang Merah Indonesia, organisasi profesi dll
						Belum bisa diindikasikan	Belum bisa diindikasikan	Belum bisa diindikasikan	PHLN	Kem. Kesehatan, NGOs, Palang Merah Indonesia, organisasi profesi dll
						Belum bisa diindikasikan	Belum bisa diindikasikan	Belum bisa diindikasikan	PHLN	Kem. Kesehatan, NGOs, Palang Merah Indonesia, organisasi profesi dll

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUATA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			(7)	(8)
		Terlaksananya simulasi tsunami untuk semua murid sekolah di kota Padang	SumbBar	Kota Padang	Dikuti seluruh sekolah di kota padang yang berada pada zona bahaya			5,000	APBN, APBD, PHLN	Pusat Studi Bencana Unversitas Andalas
		Pemerintah Desa, Masyarakat, Forum PRB	Jakarta Bengkulu NTT KalTim		Ada data kerentanan yang diaupdate					BINA SWADAYA
		Masyarakat di kawasan rawan bencana letusan gunungapi, banjir dan longsor	Jawa Tengah Jawa Timur DI Yogyakarta		Tersusun metodologi kerja praktek dan KKN tematis untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan sadar budaya	50	50	50	Swasta/ Masyarakat	PSMB UPN Veteran
		PMI NHO, PMI Chapter, PMI Branch	NAD Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Riau Kalimantan Timur	Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klaten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau-Bau Kutai Kartanegara	Number of Sector Based Program which reflect the attainment of "Building Safer and More Resilient Communities"	4,311	3,629.8	3,721	Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 1 (JUATA Rp)</b>						<b>42,321</b>	<b>38,292</b>	<b>48,707</b>		
2	perencanaan partisipatif penanggulangan bencana	Tersedianya dokumen perencanaan partisipatif PRB di desa	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah dokumen perencanaan partisipatif PRB  - Terselenggaranya seminar dan lokakarya nasional dan internasional	15,000	18,000	21,000	APBN, APBD, PHLN	BNPB  PTLWB BPPT

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
		Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air/ kelompok tani	33 Propinsi		Terselenggaranya sekolah lapang iklim untuk P3A 720 unit.	4,000	6,500	7,500	APBN	Kementerian Pertanian, Direktorat Pengelolaan Air, Ditjen. PLA
		Tersedianya model pelibatan masyarakat dalam menghadapi bencana.	Wilayah Jawa dan Bali.		Model dan program pelibatan masyarakat.	1,000			APBN	Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang,
		Petugas di masing-masing prov& kab/kota	Setiap prov & kab/kota		Adanya peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana				APBN	PPK Kementerian Kesehatan
			National			Funding contract until			PHLN	IFRC/PMI
		Pemerintah Desa, Masyarakat, Forum PRB	Jakarta Bengkulu NTT KalTim		Ada Rencana Aksi Masyarakat					BINA SWADAYA
		Pemerintah dan masyarakat di kawasan rawan letusan gunungapi	Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur		Masyarakat di kawasan rawan letusan mempunyai rencana pengurangan risiko bencana partisipatif	100	100	100	Swasta/ Masyarakat	PSMB UPN Veteran
		1100 relawan internal Sampoerna	Regional Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi. (total 11 propinsi)		Penguatan pengetahuan dasar stakeholders di bidang kebencanaan				Swasta/ Masyarakat	Sampoerna Rescue tim dan internal departemen (EHS)

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JU TA Rp)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011 (6)	Th 2012		
		Community, LGU (Local Government Unit)	NAD Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Riau Kalimantan Timur	Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang KlATEN, Magelang, Boyolali, Temanggung, Purworejo Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau-Bau Kutai Kartanegara	tools and equipment in place with systems and trained community members for maintenance and operation	100	240	240	Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter, PMI Chapter, PMI Branch

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
	Board Members, Staff, Volunteers, CBAT, Community, LGU	Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Riau Kalimantan Timur	NAD Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klaten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau-Bau Kutai Kartanegara	DRR/CCA planning prioritized problems and solution based on existing hazards, risk, vulnerability and capacity at local level	176.6	254.45	246.36	Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter, PMI Chapter, PMI Branch	
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 2 (JUTA Rp)</b>										
3	peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana	Terwujudnya komitmen semua unsur/stakeholder akan pentingnya PRB berbasis masyarakat Terlalu petugas daerah tentang PDAS	Seluruh daerah rawan bencana 33 Propinsi		Jumlah komitmen stakeholder sebagai pelaku PRB Terlalu petugas daerah tentang PDAS di 33 Propinsi	20.377	25.094	29.086	BNPB APBN, APBD, PHLN	
	Meningkatnya komitmen bersama pemerintah dan stakeholder dalam penanggulangan kerawanan sosial	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung		Terbangunnya komitmen bersama antara Pemerintah dan Stakeholder Dalam Negeri untuk penanggulangan Kerawanan Sosial	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA	
	Petugas di masing-masing prov & kab/kota	Setiap prov & Kab/kota		Adanya komitmen kesepakatan dalam upaya penanggulangan bencana bidang kesehatan				APBN	PPK Kementerian Kesehatan	
	Pendataan dan pengadaan alat transportasi untuk mendukung penanganan korban bencana	Mabes TNI dan Kowil		Terdukungnya alat transportasi / mobil rescue, angkutan dna alat berat	800	-	-	APBN	Slog TNI	

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUATA Rp) (6)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
		Melanjutkan pendataan dan pengadaan alat transportasi untuk mendukung penanganan korban bencana	4 Kowil		Terdukungnya alat transportasi / mobil rescue, angkutan dna alat berat	-	960	-	APBN	Slog TNI
		Melanjutkan pendataan dan pengadaan alat transportasi untuk mendukung penanganan korban bencana	4 Kowil		Terdukungnya alat transportasi / mobil rescue, angkutan dna alat berat	-	-	1,152	APBN	Slog TNI
		Melanjutkan pendataan dan pengadaan alat transportasi untuk mendukung penanganan korban bencana			Terkoordinirnya pemanfaatan alat angkut milik swasta untuk mendukung penanganan bencana			115		Ster TNI
			Jakarta			4,403			PHLN	UNOCHA
	48 Tenaga pendamping JRS		NAD	Tapak Tuan, Aceh Selatan,	48 tenaga pendamping JRS mengikuti berbagai pelatihan yang terkait dengan PRB (DRR, EPS, pengelolaan konflik, PRA, pendidikan perdamaian)				PHLN, SWASTA/MAS YARAKAT	JRS
	18 desa (360 peserta)		NAD	Aceh Selatan	360 tokoh masyarakat desa dampingan mengikuti pelatihan PRB dan menyusun kegiatan tindak lanjut atas pelatihan yang dilakukannya				PHLN, SWASTA/MAS YARAKAT	JRS
	18 desa (360 jiwa)		NAD	Aceh Selatan	360 orang rentan membuat kegiatan bersama yang berawasan PRB dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan desa.				PHLN, SWASTA/MAS YARAKAT	JRS
	18 desa (720 peserta pemuda/i)		NAD	Aceh Selatan	720 pemuda/i mengikuti pelatihan dan kegiatan PRB dan pengelolaan konflik, lewat olahraga, usaha peningkatan pendapatan dan kegiatan lain yang sesuai				PHLN, SWASTA/MAS YARAKAT	JRS
	Masyarakat luas		Indonesia		Sekolah Aman dari Bencana merupakan bagian dari Strategi Kebijakan Nasional	X	X	X	PHLN	Plan Indonesia

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
	Murid Sekolah	Jakarta Jawa Barat Jateng NTT NTB Sumbar	Bogor Rembang, Solo, dan Grobogan Lembata dan Sikka Domau Kota Padang	- Jumlah tim siaga cilik yang terbentuk	X	X	X	PHLN	Plan Indonesia	
	Terbentuknya kelompok trainer sosialisasi evakuasi tsunami			1) 50 orang mahasiswa menjadi trainer , 2) Tersedia bahan ajar untuk sosialisasi evakuasi tsunami Padang	2,000			APBN, APBD	Pusat Studi Bencana Universitas Andalas	
	Pemerintah Desa, BDPB, Forum PRB	Jakarta Bengkulu NTT Kaltim		Peraturan dan SOP yang dipatuhi					BINA SWADAYA	
	Board Members, Staff, Volunteers	PMI NHQ		Institutional mandates & responsibilities for DRR are clearly defined	118.4	3.9	14.82	Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter	
	PMI	PMI NHQ		Number of presentations/ contributions PMI makes at various regional and international forum of Red Cross and Red Crescent Movement	200	200	200	Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter	
	CBAT (Community Based Action Team), Community	DKI Jakarta	Jakarta Barat , Jakarta Timur	Number of cooperative established and managed properly at community levels	1,498.23			PHLN	PMI NHQ, PMI Chapter, PMI Branch, Community, LGU	
	Board Members, Staff, Volunteers, Community	NAD Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Riau Kalimantan Timur	Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klaten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau-Bau Kutai Kartanegara	List of Board Members, Staff and Volunteers participated on exchange and internship program	77.58			Swasta/ Masyarakat	PMI NHQ, PMI Chapter, PMI Branch, Community, LGU	



No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			(7)	(8)
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 3 (JUTA Rp)</b>										
4	penguatan ketahanan sosial masyarakat	Tervujudnya komitmen semua unsur/stakeholders dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat disemua tingkat	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah komitmen dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat	33.697	35.914	39.792	20.000 APBN, APBD, PHLN	BNPB
	Berkembangnya sumber air alternatif skala kecil untuk pertanian	18 Propinsi			Tersedianya 7.208 unit pompa air	91.600	96.080	100.640	APBN	Kementerian Pertanian, Direktorat Pengelolaan Air, Ditjen. PLA
	Peningkatan ekonomi masyarakat pada daerah pasca bencana	SumBar SulBar Maluku	SoloK Polewali Mandar Maluku Tenggara Barat		Terbentuknya lahan usaha yang produktif guna menunjang pemulihan ekonomi masyarakat	300	500	500	APBN	KPDT
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan Kerawanan Sosial	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung			Terjalannya kerjasama antara Pemerintah dan Lembaga Dalam Negeri untuk penanggulangan Kerawanan Sosial	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
	Meningkatkan kemampuan personil	Mabes Polri			Meningkatkan kemampuan personil dalam rangka Penanggulangan Bencana	298			APBN	POLRI, DIT SAMAPTA POLRI
	Melaksanakan gladi posko penanganan bencana	4 Kowil			Terlatihnya mekanisme hubungan komando dan staf PRCPB dalam penanganan bencana	60	72	86	APBN	Ster TNI
	Melaksanakan gladi lapangan penanganan bencana secara terpadu dengan instansi terkait	4 Kowil			Terlatihnya prajurit PRCPB bersama instansi terkait dalam penanganan bencana secara terpadu	95	114	137	APBN	Ster TNI
		4 Kowil			Terbentuknya kesadaran masyarakat dalam membantu proses penanganan bencana	60	72	86	APBN	Ster TNI

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
		Meningkatnya kemampuan masyarakat di 36 desa di 13 kabupaten/kota di 6 provinsi dalam mengurangi risiko bencana yang dihadapi	Sulawesi Tengah DIY Bengkulu Sumbar NTT	tahun 2010 Kota Palu Cilacap Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul Mukomuko, Kota Bengkulu Kab Solok tahun 2011 Sikka, Alor	1) Jumlah pilot project PRBBK (Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas) yang dilaksanakan; 2) Jumlah rencana aksi komunitas yang tersusun dan terlaksana; 3) Jumlah masyarakat yang terlibat	5,250	2,225		PHLN	BNPB
		Pemerintah Desa, BDPB, Forum PRB, Masyarakat	Jakarta Bengkulu NTT KalTim		Ada mekanisme gotong royong dan dana bencana dari pemerintah dan masyarakat	1,820	1,820	1,820		BINA SWADAYA
		Remaja masjid, mahasiswa, pelajar & masyarakat umum, organisasi kepemudaan	300 kota/kabupaten rawan bencana		Terlathinya 15.000 relawan siap pakai dan terbentuknya komunitas masyarakat relawan di 300 kota/kab se Indonesia yg rawan bencana, @ 50 orang	1,820	1,820	1,820		ACT
		Remaja masjid, mahasiswa, pelajar & masyarakat umum, organisasi kepemudaan hasil seleksi dan pelatihan relawan & Pembentukan Komunitas masyarakat relawan seluruh Indonesia	300 kota/kabupaten rawan bencana		Terkelolanya dan terberdayakannya 15.000 relawan dan 300 komunitas masyarakat relawan seluruh Indonesia dalam aktifitas kemanusiaan, penanggulangan bencana	52,500	52,500	52,500		ACT
		Pemerintah dan masyarakat di kawasan rawan letusan gunungapi	Jawa Tengah DI Yogyakarta jawa Timur NTT		Terjadis serangkaian pelatihan penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah	100	100	100	Swasta/ Masyarakat	PSMB UPN Veteran
		komunitas masyarakat	Jawa Timur	Blitar, kota Kediri dan Kab. Kediri	terbentuknya Peringatan dini berdasarkan kearifan lokal				Swasta/ Masyarakat	Sampoerna, PSMB UPN Jogjakarta, Perkumpulan Skala

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUATA Rp)		Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
	Community, LGU (Local Government Unit)	NAD Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Riau Kalimantan Timur	Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klaten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta; Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau- Bau Kutai Kartanegara	EWS based on community knowledge of relevant hazards and risks, of warning signals and their meanings, and of actions to be taken when warnings are issued	33	33	33 Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter, PMI Chapter, PMI Branch	
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 4 (JUATA Rp)</b>						<b>172,716</b>	<b>178,266</b>	<b>184,653</b>	
<b>TOTAL PENDANAAN PROGRAM F (JUATA Rp)</b>						<b>269,111</b>	<b>277,566</b>	<b>302,178</b>	
<b>PROGRAM G : KESIAPSIAGAAAN</b>									
1	Penyusunan mekanisme kesiapan dan penanggulangan risiko bencana	Tersedianya kemampuan penanggulangan ke darurat dari seluruh instansi terkait dalam tugas tanggap darurat	Indonesia		Laporan hasil pelatihan uji coba ke darurat nuklir	665	732	805 APBN	BAPETEN
		Tersedianya dokumen pedoman tanggap darurat sebagai acuan tugas di lapangan dalam penanggulangan ke darurat nuklir/radiologi di Indonesia			Pedoman Kesiapsiagaan dan penanggulangan ke darurat nuklir				
		Terselenggaranya tanggapan BAPETEN atas ke darurat nuklir dan radiologi, serta tersedianya sistem kesiapsiagaan nuklir dan radiologi			Laporan Hasil pengawasan pengawasan dan tanggap darurat nuklir dan radiologi				

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
		Satuan Tanggap darurat BAPETEN yang mampu melaksanakan tugas tanggap darurat secara efektif dan efisien			Laporan pengembangan kapasitas tanggap darurat					
		Meningkatnya koordinasi nasional di antara instansi terkait dalam penanganan Kesiapsiagaan Nuklir, Illicit Trafficking, dan Proteksi Radiasi			Laporan koordinasi nasional dan internasional dalam bidang kedaruratan nuklir, Illicit Trafficking dan proteksi radiasi					
		Tersedianya dokumen komitmen daerah dalam mekanisme dan kesiapan PRB	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah dokumen komitmen daerah dalam kesiapan PRB	20,000	24,000	28,000	APBN, APBD, PHLN	BNPB
		Penerbitan dokumen panduan, jurnal dan buku tentang teknologi pengurangan risiko bencana			- Tersedianya panduan pengembangan teknologi pengurangan risiko bencana					PTLWB BPPT
		Tersedianya acuan analisis dan mitigasi DFI	33 Prop.		Jml. Luas Pertanaman yang terkena gangguan DFI (ha)				APBN	Kementerian Pertanian
		Sekolah Model Siaga Bencana, komunitas sekolah dan pelaku terkait	Aceh Lampung Jakarta Kalim Riau		Kajian, Pengembangan dan Penguatan kapasitas Sekolah Model untuk menjadi sekolah Contoh Siaga Bencana	2,000	1,300	1,300	APBN	LPI, Kem. Diknas, BNPB
		Instansi kesehatan di masing-masing prov&kab/kota.	Setiap prov &kab/kota		Terbentuknya pola penanganan bencana yang sistematis sesuai dengan jenis bencana				APBN	PPK Kementerian Kesehatan
		perencanaan dan kesiapsiagaan penda dalam berkoordinasi dengan para pihak terkait di wilayahnya; 2) meningkatnya efisiensi dan efektifitas dalam mobilisasi/koordinasi sumberdaya yang ada dari para pemangku kepentingan	Jatim NTT	Lampung, Sidoarjo Tanah Bengkah di Kupang	Adanya mekanisme koordinasi yang jelas sebagai acuan dalam mobilisasi/koordinasi sumberdaya yang ada dari para pemangku kepentingan;					ditunjuk sebagai koordinator dengan BPBD dan berbagai instansi terkait, NGO)
		Terbentuknya Pusdalops (EOC) di tingkat nasional dan 2 provinsi yang memiliki kapasitas sebagai pusat koordinasi penanganan dan terintegrasi informasi yang terlengkap dengan sarana audio komunikasi yang memadai	BNPB NTT Sumbar		1. Terbentuknya Pusdalops (EOC) yang operasional dan berfungsi sesuai perannya; 2.) Adanya sarana audio komunikasi yang memadai dan terkoordinasi dengan baik dengan BNPB di tingkat pusat	492	246		PHLN	BNPB (berkerjasama dengan BPBD)

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
		1) Terlaksananya pemetaan Data Base infrastruktur (sumber daya / kapasitas) terkait PB antar sektor di 5 Provinsi dan 1 Kota; 2) Terbangunnya sistem informasi yang terpadu antara pusat dan daerah sehingga koordinasi dan mobilisasi PB menjadi lebih efektif dan efisien.	DIY Jawa Tengah Bengkulu Sumbar NTT Sulteng	Kota Palu	1) Tersumunya Peta Data Base infrastruktur PB (sumber daya / kapasitas) di daerah ybs; 2) Adanya koneksi antara jaringan sistem informasi pusat dengan daerah.	404	444	PHLN	KEMDAGRI, (bekerjasama dengan Pemda dan BN(PB))	
			Sumatra Barat					PHLN, USAID (Total: \$494.804)	Mercy Corps	
		LSM lokal dan internasional	Tergantung kejadian bencana.		Terpenuhiya kebutuhan dasar korban bencana untuk menyelamatkan kehidupan mereka.			PHLN	OCHA	
		Kelompok Masyarakat	Banten Sumatra Barat		Peta risiko Bencana dan rencana kesiapan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dihasilkan	Menunggu persetujuan dari kantor pusat dan donor	Belum	PHLN	Islamic Relief	
					Kapasitas Disaster Management Tim di tingkat desa cukup handal dalam melakukan mitigasi, kesiapsiagaan, dan respon terhadap kemungkinan datangnya bencana					
					Mas, arakat di zona risiko bencana tinggi menyadari akan risiko bencana, mampu melakukan kesiagaan dan mampu melakukan respon terhadap risiko bencana					
					Tingkat kerawanan masyarakat terhadap risiko bencana dapat diturunkan secara significant					
		18 desa (180 pemuda/i)	NAD	Aceh Selatan	180 pemuda/i mengikuti vocational training dan mendiklatujutnya dengan membuat rencana kegiatan untuk meningkatkan pendapatan			PHLN, SWASTA/AMAS YARAKAT	JRS	

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
		Support to comprehensive risk financing strategy linked to DRR actions			Technical Assistance for the development and implementation of comprehensive risk financing framework for Indonesia	5,050.67	5,050.67	PHLN	Ministry of Finance, National Development Planning Agency (BAPPENAS), World Bank	
		Pemerintah Desa, BDPB, Forum PRB, Stakeholder lainnya	Jakarta Bengkulu NTT KalTim		Dokumen mekanisme dan SOP- PRB dihasilkan oleh stakeholder PRB di tingkat desa				BINA SWADAYA	
		Siswa SD, SLTP, SMU & SMK	Bengkulu		Terlathinya 55.602 (25%) siswa se propinsi Bengkulu	2,030	2,030	ACT		
		Masyarakat di kawasan rawan letusan gunungapi .	Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur NTT		Masyarakat di kawasan rawan erusi mempunyai mekanisme kesiapan dan penanggulangan bencana	100	100	Swasta/ Masyarakat	PSMB UPN Veteran	
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 1 (JUTA Rp)</b>										
2	penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Terselenggaranya penyusunan dan uji coba rencana Penanggulangan Kedaruratan bencana	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah dokumen uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana	31,142	34,102	37,286	BNPB	
		Pelatihan teknis dan operasional tentang teknologi pengurangan risiko bencana			- Terbitnya jurnal berkala yang terakreditasi	30,000	36,000	42,000	APBN, APBD, PHLN	
		Personil yang mengawasi posko 24 jam	Mabes Poiri dan BNPB		memiliki SOP Ren Kontinjensi di Bid. Kebencanaan			APBN	POLRI, Pusdalops POLRI & BNPB	
		Personil melakukan uji masyarakat di masing-masing kab/kota.			memiliki SOP Ren Kontinjensi di Bid. Kebencanaan				Kesehatan	
			Nationwide					PHLN	Ambulans 118 and Asian Disaster Preparedness Center	
		Community/government/schools/ media/private sectors	Sumatera Barat		Simulation plan/SOPs for urban and rural areas developed	45	45	45	PHLN	ECB Indonesia (Care-CRS Oxfam-World Vision-Save the Children-Mercy Corps-MPBI-IMC)
		Pemerintah Desa, BDPB, Forum PRB, Stakeholder lainnya	Jakarta Bengkulu NTT KalTim		Simulasi terjadwal oleh Tim PRB tingkat Desa dan Kabupaten				BINA SWADAYA	

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUATA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			(7)	(8)
		Masyarakat di kawasan rawan letusan gunungapi .	Jawa Tengah		Masyarakat di kawasan rawan bencana erupsi gunungapi melakukan kegiatan penguatan penanganan darurat	100	100	100	Swasta/ Masyarakat	PSMB UPN Veteran
		Board Members, Staff, Volunteers	NTT		DR Contingency Plan, SOP and DR Operational Guidelimes updated based on review and lesson learnt	100			Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 2 (JUATA Rp)</b>										
3	pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini	Terselenggaranya pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistim peringatan dini	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah laporan dan dokumen penyelenggaraan pemasangan dan pengujian geladi tanggap darurat	26,000	31,200	42,145	APBN, APBD, PHLN	BNPB
		Instansi kesehatan dan masyarakat di masing-masing kab/kota.			- Terbitnya buku-buku mengenai teknologi penanggulangan bencana					PTLWB BPPT
		Forum Anak Desa dan Murid Sekolah Dasar	Jakarta	Bogor	Meningkatnya kemampuan petugas dan masyarakat dalam merespons bencana yang terjadi				APBN	PPK Kementerian Kesehatan
		Permerintah Desa, BDPB, Forum PRB, Stakeholder lainnya	Jawa Barat	Rembang, Solo, dan Grobogan	Jumlah Peta dan Analisis Risiko Bencana yang dibuat oleh Anak-anak	X	X	X	X	PHLN
		Masyarakat di kawasan rawan letusan gunungapi, banjir dan lon_sor.	Jawa Tengah		Ada kesepakatan dan mekanisme pelaksanaan peringatan dini dari tingkat kabupaten hingga masyarakat	400	400	400	Swasta/ Masyarakat	BINA SWADAYA
			NTT							PSMB UPN Veteran

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
		PMI, Community	NAD Jambi Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta NTT NTB Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Riau Kalimantan Timur	Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang Klanten, Magelang, Boyolali, Temanggung, Karanganyar, Purworejo Kota Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman Alor, Sikka Lombok Timur, Kep. Sumbawa Barat Muko-Muko, Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong Sangihe, Minahasa Selatan Majene Konawe Selatan, Bau-Bau Kutai Kartanegara	Community-based EWS established at local level	100	200		Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter, PMI Chapter, PMI Branch, Community
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 3 (JUTA Rp)</b>						<b>26.500</b>	<b>31.800</b>	<b>36.800</b>		
4	penyediaan dan persiapan barang pemenuhan kebutuhan dasar	Tersedianya barang pasokan kebutuhan dasar	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah laporan dan dokumen tersedianya barang pasokan	120.000	144.000	168.000	APBN, APBD, PHLN	BNPB
	penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar	33 pro dan kab/kota rawan bencana	33 pro dan kab/kota rawan bencana		Terselenggaranya kegiatan darurat pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan sarana pendukungnya sehingga bantuan tersebut dapat menjangkau korban bencana berupa; Bantuan darurat, bantuan evakuasi kit serta kendaraan siaga bencana merupakan komponen kesiapsiagaan yang telah disiapkan di gudang provinsi melalui Dinas Sosial//Kesos/Inststitusi Sosial terkait. Khusus untuk bantuan beras dan mie instan mekanisme penyerahan bantuan melalui sistem D.O (Delivery Order)	126,395,99	151,675,19	182,010,23	APBN	Kem. Sosial



No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			(7)	(8)
		SumSel Jakarta DIY Jatim National	Palembang Jakarta Timur Bantul Lamongan			3,302.2	3,302.2		PHLN	Muhammadiyah
		All stakeholders in Disaster Management	National							UNICEF and Cluster Members (including Government Counterparts)
		Affected population	National							UNICEF through DIM stakeholders
		Pemerintah Desa, Forum PRB, Masyarakat	Jakarta Bengkulu NTT KalTim		Ada mekanisme dana bencana,lambung pangan, pelayanan kesehatan, kegiatan livelihood yang dilakukan masyarakat					BINA SWADAYA
		PMI NHQ	PMI NHQ		a national network of warehouses in place and managed	200	200	200	Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter
		PMI NHQ, PMI Chapter, PMI Branch, community	PMI NHQ Office, 33 Provinces		Relief stock in place, managed by PMI alone or in partnership with other organisations .	300	300	300	Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 4 (JUTA Rp)</b>						<b>250,198</b>	<b>299,477</b>	<b>350,510</b>		
5	pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat	Terselenggaranya pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tanggap darurat di semua daerah rawan bencana  Menguatnya kesiapsiagaan komunitas sekolah SD,SMP, SMA dan SMK di daerah rawan bencana	Seluruh daerah rawan bencana  Bengkulu DIY NTT Sulteng Jakarta	Kota Palu Kota Jakarta Selatan	Jumlah laporan dan dokumen penyelenggaraan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tanggap darurat  1) Jumlah gugus guru yang aktif mengimplementasikan kegiatan PRB di sekolah 2) Jumlah sekolah yang memiliki Rencana Aksi Sekolah 3) Jumlah sekolah yang rutin melaksanakan simulasi drill 4) Jumlah PERDA mengenai kurikulum/muatan lokal PRB 5) Jumlah kader pelatih dan fasilitator Sekolah Siaga Bencana	240,000	288,000	336,000	APBN, APBD, PHLN	BNPB  Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Sekolah

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
	Meningkatnya pemahaman dan menguatkannya kesiapsiagaan komunitas terhadap ancaman bencana di lokasi pilot project	Bengkulu DIY Sumatera Barat NTT Sulawesi	Kota Palu		1) Jumlah kelompok komunitas yang mampu mengidentifikasi dan menyusun peta rawan bencana di lingkungannya 2) Jumlah TOOL KIT (alat komunikasi) mengenai informasi PRB yang tersebar di tingkat komunitas 3) Jumlah Rencana Aksi yang tersusun di kelompok komunitas (kelompok agama, profesi dan lainnya)	1,500	1,500	PHLN	BNPB berkerjasama dengan Pihak ke-tiga	
	All stakeholders in Disaster Management	Nasional							UNICEF/BNPB/MPBI	
	Pemerintah Desa, BDPB, Forum PRB, Stakeholder lainnya	Jakarta Bengkulu NTT KalTim			Ada SOP, data kebutuhan, tim pelaksana, lokasi kumpul				BINA SWADAYA	
	Muspika Dan Perangkat Desa	Propinsi Bengkulu & Jogjakarta			Terlathnya 2.822 orang muspika & perangkat Desa se propinsi Bengkulu & Jogjakarta	3,200	3,200		ACT	
	PMI Staff	Jambi DI Yogyakarta Bali			EOC established at all levels and performed as PMI's standard	396.43		Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter	
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 5 (JUTA Rp)</b>						<b>246,596</b>	<b>294,200</b>	<b>339,200</b>		
6	penyiapan lokasi evakuasi	Tersedianya rencana tempat lokasi evakuasi di daerah rawan bencana	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah laporan Provinsi dan Kab/Kota yang menyediakan tempat lokasi evakuasi di daerah rawan bencana	60,000	72,000	84,000 PHLN	BNPB	

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUATA Rp) (6)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)	
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012			
		Mampu didarati pesawat sekelas F70 / Hercules C130	Sumut NTT NAD Bengkulu Maluku Papua Sulteng Maluku Utara Sulawesi Utara	Lasondre - Nias Selatan (Pulau-pulau Batu) Komodo - Labuhan Bajo Tardamu - Sabu Nias Selatan Baru Kuala Batee - NAD Teuku Cut Ali - NAD Hamzah Fanzuri - Singkil Muko-muko - Bengkulu Gewayantana - Larantuka Namrole - Buru Enalamo - Sula Dobo - Kepulauan Aru Tual Baru - Malra S. Condrongoro - Serui Tojo Una-una - Ampana Wai Oti - Maumere Wonopito - Lembata Baru Bula - Seram Bagian Timur Namiaea - Buru Faliabahaya Mangole - Taliabu Numfor - Biak Numfor	Kemampuan bandara untuk didarati pesawat sekelas F-70 /Hercules C-130 dalam rangka evakuasi dan penanganan bencana	615,500	1,366,171	1,366,171	APBN, APBD	Kem. Perhubungan	
		Pemerintah Desa, Forum PRB, Stakeholder lainnya	Jakarta Bengkulu NTT KalTim		Ada jalur evakuasi, titik kumpul yang aman					BINA SWADAYA	
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 6 (JUATA Rp)</b>											
7	penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana	Tersedianya data, informasi protap tanggap darurat bencana Instansi kesehatan di masing-masing kab/kota. Affected population Pemerintah Desa, BDPB, Forum PRB, Stakeholder lainnya Pemerintah Daerah/Pemda	Seluruh daerah rawan bencana Setiap prov & kab/kota National Jakarta Bengkulu NTT KalTim		Jumlah informasi Provinsi dan kab/kota tentang protap tanggap darurat bencana Adanya peningkatan kualitas respon tanggap darurat dalam upaya penanggulangan bencana Ada data, up date data, SOP dan tim pelaksana tanggap darurat bencana Draft policy paper tentang formulasi dan revisi strategi tanggap darurat bencana	675,500	1,438,171	1,450,171	200,000 240,000 280,000 APBN, APBD, PHLN APBN	BNPB PPK Kementerian Kesehatan UNICEF/BNPB BINA SWADAYA APBN, APBD	

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
		Masyarakat di kawasan rawan letusan gunungapi, banjir dan longsor.	Jawa Tengah			100	100	100	Swasta/ Masyarakat	PSMB UPN Veteran
		NTT								
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 7 (JUTA Rp)</b>										
8	penyediaan dan penyajian bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana	Tersedianya logistik dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah laporan Provinsi dan Kab/Kota yang menyediakan logistik dan peralatan	200,100	240,100	280,100	400,000 APBN, APBD, PHLN	BNPB
		Pemerintah Desa, BDPB, Forum PRB, Stakeholder lainnya	NTT	Belu		3,950			PHLN	UNICEF
		Jakarta								BINA SWADAYA
		Bengkulu								
		NTT								
		KalTim								
		PMI NHQ Office, 33 Provinces				1,563.62	814.23	900	Swasta/ Masyarakat	PMI National Headquarter
		CBAT (Community Based Action Team), Satgas (Disaster Response Team)			Suitable equipment for mobilization of CBAT and Satgas in place					
<b>TOTAL PENDANAAN KEGIATAN 8 (JUTA Rp)</b>										
						405,514	480,814	560,900		
<b>TOTAL PENDANAAN PROGRAM G (JUTA Rp)</b>										
						1,865,795	2,854,810	3,097,112		
<b>TOTAL PENDANAAN (JUTA Rp)</b>										
						16,618,149	11,962,113	12,821,514		

LAMPIRAN 3. MATRIK KEGIATAN KEMENTERIAN DAN  
LEMBAGA (K/L) DALAM RENCANA AKSI  
NASIONAL PENGURANGAN RISIKO  
BENCANA (RAN-PRB) TAHUN 2010-2012



**LAMPIRAN 3**  
**MATRIK RAN-PRB 2010-2012 DARI KEMENTERIAN/ LEMBAGA**

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)		Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)			Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)		Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
		Propinsi	Kab/Kota	Th 2010	Th 2011	Th 2012						
<b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, BAKOSURTANAL</b>												
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b>												
<b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>												
1	pengenalan dan pemantauan risiko bencana	Kajian dinamika pantai, untuk mitigasi dan adaptasi bencana alam	Banten DKI Jabar Jateng Jatim			Tersedianya informasi spasial untuk mitigasi dan adaptasi thd bencana alam (global warming) di Pantura Jawa	532	600	700	APBN	Bakosurtanal	
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>												
<b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>												
3	identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana	Menyusun dan mengembangkan basis data rawan bencana	Jawa tengah, jawa timur (2010), Sebagian Sumatera, sebagian Sulawesi (2011), Sebagian Sumatera, sebagian Kalimantan (2012)			Tersusunnya Basisdata Multirawan Bencana alam	1,300	1,500	1,900	APBN	Bakosurtanal *, Kem. PU, BMKG	
6	pengelolaan lingkungan hidup	Neraca SDA	Jawa tengah jawa timur (2011) Sebagian Sumatera sebagian Sulawesi sebagian Kalimantan (2012)			Tersedianya neraca sumber daya alam terintegrasi	-	1,200	1,700	APBN	Bakosurtanal	

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana / Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)
<b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b>										
<b>PROGRAM E.: PERINGATAN DINI</b>										
1	pengamatan gejala bencana Terpadu	Kajian risiko Multi Bencana DIY			Tersedia dan tersosialisasinya model sistem informasi kebencanaan	800	800	800	APBN	Bakosurtanal
4	penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana	Penyediaan informasi spasial indeks kebencanaan/peta multirawan bencana	Jawa Timur, Jawa Tengah Sebagian Sumatera sebagian Sulawesi sebagian Kalimantan		Tersedia dan tersosialisasinya informasi spasial atas dasar indeks kebencanaan	1,200	1,320	1,452	APBN	Bakosurtanal
		Pembuatan Atlas kebencanaan	Indonesia			238	262	288	APBN	Bakosurtanal
<b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB BAKOSURTANAL</b>						<b>4,070</b>	<b>5,682</b>	<b>6,840</b>		
<b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, BAPETEN</b>										
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b>										
<b>PROGRAM B.: PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>										
4	Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan	Tersusunnya Perka BAPETEN tentang desain sistem catu daya darurat pada PLTN	Jakarta		Perka BAPETEN tentang desain sistem catu daya darurat pada PLTN	300	330	363	APBN	BAPETEN
		Tersusunnya Perka BAPETEN tentang desain proteksi kebakaran dan ledakan internal pada PLTN			Perka BAPETEN tentang desain proteksi kebakaran dan ledakan internal pada PLTN					
<b>PRIORITAS: PEMANFAATAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b>										
<b>PROGRAM C.: PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>										
3	penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan	Terselenggaranya Workshop dan Sosialisasi Fungsi Lembaga terkait budaya keselamatan	Indonesia		Laporan Workshop dan Sosialisasi Fungsi Lembaga terkait budaya keselamatan	300	330	363	APBN	BAPETEN



No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)		Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
				Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
<b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGKAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b>											
<b>PROGRAM E : PERINGATAN DINI</b>											
2	melakukan analisis hasil pengamatan gejala bencana	Tersusunnya Laporan Hasil Kajian pengembangan teknik inspeksi kepatuhan kondisi izin pada radiografi industri		Jakarta		Laporan Hasil Kajian pengembangan teknik inspeksi kepatuhan kondisi izin pada radiografi industri	500	550	605	APBN	BAPETEN
		Tersusunnya Laporan Hasil Kajian penentuan baku tingkat radioaktivitas di lingkungan				Laporan Hasil Kajian penentuan baku tingkat radioaktivitas di lingkungan					
		Laporan Hasil Kajian pedoman penilaian kriteria keberterimaan untuk fasilitas landfill sebagai tempat disposal TENORM				Laporan Hasil Kajian pedoman penilaian kriteria keberterimaan untuk fasilitas landfill sebagai tempat disposal TENORM					
		Laporan Hasil Kajian pedoman penentuan discharge limit				Laporan Hasil Kajian pedoman penentuan discharge limit					
		Terciptanya Budaya Keselamatan di INNRR		Jakarta		Budaya Keselamatan di INNRR	342	376	413	APBN	BAPETEN
		Tersedianya Perka BAPETEN tentang Manajemen Penuaan INNRR				Perka BAPETEN tentang Manajemen Penuaan INNRR					
		Tersedianya Laporan hasil kajian Teknis evaluasi pengawasan INNRR				Laporan Hasil Kajian Teknis evaluasi pengawasan INNRR					

No	Kegiatan	Sasaran		Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana / Koordinator
		(3)	(4)	Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada Semua Tingkatan Masyarakat</b> <b>PROGRAM G. : KESIAPSIAGAAN</b>											
1	Penyusunan mekanisme kesiapan dan penanggulangan gan risiko bencana	Tersedianya kemampuan penanggulangan kedaruratan dari seluruh instansi terkait dalam tugas tanggap darurat	Indonesia		Laporan hasil pelatihan uji coba kedaruratan nuklir	665	732	805	APBN	BAPETEN	
		Tersedianya dokumen pedoman tanggap darurat sebagai acuan petugas di lapangan dalam penanggulangan kedaruratan nuklir/radiologi di Indonesia			Pedoman kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir						
		Terselenggaranya tanggapan BAPETEN atas kedaruratan nuklir dan radiologi, serta tersedianya sistem kesiapsiagaan nuklir dan radiologi			Laporan Hasil pengawasan pengawasan dan tanggap darurat nuklir dan radiologi						
		Satuan Tanggap darurat BAPETEN yang mampu melaksanakan tugas tanggap darurat secara efektif dan efisien			Laporan pengembangan kapasitas tanggap darurat						
		Meningkatnya koordinasi nasional di antara instansi terkait dalam penanganan Kesiapsiagaan Nuklir, Illicit Trafficking, dan Proteksi Radiasi			Laporan koordinasi nasional dan internasional dalam bidang kedaruratan nuklir, Illicit Trafficking dan proteksi radiasi						
<b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB BAPETEN</b>						<b>2,107</b>	<b>2,318</b>	<b>2,549</b>			

No	Kegiatan	Sasaran		Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/Koordinator
		(3)		(4)			Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)					(5)	(6)			(7)	(8)
<b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, BMKG</b>											
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b>											
<b>PROGRAM A : Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan</b>											
1	Melakukan koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya	Membangun kerjasama dengan pihak perguruan tinggi				Meningkatnya harmonisasi antara riset dan operasional	200	200	200	200 APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
<b>PRIORITAS: PEMANFAATAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b>											
<b>PROGRAM C : PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>											
2	penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber bencana	Pengadaan peralatan seismik untuk studi prekursor gempabumi. Penelitian Velocity Model local 15 lokasi	Sumatera Barat			Tersedianya fasilitas untuk penelitian prekursor gempabumi dengan metoda seismik	6,300	6,300	6,300	6,600 APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
						Meningkatnya Akurasi penentuan lokasi gempabumi	400	400	400	400 APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
						Meningkatnya pemahaman tentang hubung antara sistem sesar dan gempabumi.	400	400	400	400 APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
3	penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan	Membangun kapasitas operasional				Terjadinya Kesenambungan operasional	900	900	900	900 APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
		Melaksanakan studi untuk mengetahui prekursor gempabumi menggunakan metoda geofisika secara terpadu				Tersedianya informasi studi untuk menuju prediksi gempabumi	500	500	500	550 APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>											
<b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>											
1	pengendalian dan pemantauan risiko bencana	monitoring gempa kuat dan perhitungan magnitudo Mbmng				Meningkatnya data dan informasi gempa kuat	190	190	190	190 APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
3	identifikasi dan pengenalan secara pasif terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana	Data management Center, Database gempa dan system data sharing  Memetakan daerah berisiko getaran gempa kuat  Peningkatan Pelayanan data dan informasi  Menentukan daerah limpasan tsunami	Jakarta		Terwujudnya pelayanan yang handal data gempa untuk nasional dan internasional  Tersedianya informasi untuk keperluan bangunan tahan gempa dan keperluan lainnya  Para pemakai mendapatkan data yang lebih up todate  Kelengkapan system kesiap-siagaan	1,000	500	500	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
			Jakarta			300	300	300	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
			Jakarta			125			APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
						750	800	800	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
8	pembangunan sarana dan prasarana	Pembangunan Sistem Radar Cuaca  Pembangunan Ground Satelite Receiver  Pembangunan Sistem Automatic Weather Station (AWS)	Papua Papua Barat Maluku Utara Kalsel Biau Sumut Papua	Merauke Manokwari Ternate Banjarmasin Pekanbaru Jayapura	Data dan Informasi Radar Cuaca di daerah yang berupa fenomena awan-awan hujan, pergerakan awan dan angin  Data dan informasi satelit cuaca yang berupa fenomena awan-awan hujan, pergerakan awan, sst dan estimasi hujan  Data unsur cuaca secara otomatis	72,000			APBN	BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI
						5,000			APBN	BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI
			Daerah Bencana di Sumatra Kalimantan Sulawesi Maluku Papua			19,440			APBN	BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI
			Sumatra Kalimantan Sulawesi Maluku Papua		Data curah hujan secara otomatis	990			APBN	BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI
		Pembangunan Pusat Pelayanan Informasi Perubahan Iklim Nasional dan Regional	Kantor Pusat dan 5 Provinsi lain.		Informasi Perubahan Iklim dari skala Nasional hingga skala Kabupaten	16,055			APBN	BMKG DEPUTI BIDANG KLIMATOLOGI

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
		Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG	Kantor Pusat		Terbangunnya satu Pusat Inventory Gas Rumah Kaca (GRK). Tersedianya Informasi Proyeksi Iklim hingga skala kabupaten berdasar berbagai skenario IPCC. Tersedianya Peta - Peta Kerentanan Perubahan Iklim berbasis pulau/wilayah (Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua).	44,900	47,350	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG KLIMATOLOGI	
<b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGKAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b>										
<b>PROGRAM E : PERINGATAN DINI</b>										
1	Pengamatan gejala bencana	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana MEWS	Semua lokasi yang telah terpasang Peralatan MEWS		Sistem beroperasi secara normal	13,000	13,000	13,000	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI
		Pembangunan Gedung MEWS	Sumut Sulsel Bali	Medan Makasar Denpasar	Gedung MEWS sebagai pusat pelayanan peringatan dini cuaca di daerah	990	990	990	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI
		Persiapan Operasional Numeric Weather Prediction (NWP)	Jakarta		Fasilitas PC Cluster untuk operasional dan SDM modifikasi model NWP beroperasi	3,000	3,000	3,000	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI
		Sewa Komunikasi Radar Cuaca, AWS dan ARG	Jakarta		Sarana Komunikasi Radar Cuaca, AWS dan ARG beroperasi normal	3,000	3,000	3,000	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI
		Pengadaan sistem monitoring gempabumi otomatis, 4 remote sta, 1 center, dan sistem komunikasi			Meningkatnya pelayanan data gempabumi lokal di 9 lokasi	4,000	4,000	4,000	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
		Pengadaan sarana dan prasarana guna monitoring bencana gempabumi dan tsunami	Jakarta		Tersedianya fasilitas untuk monitoring bencana gempabumi dan tsunami di 10 Regional Center	1,500	1,500	1,500	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
		Pengadaan sarana dan prasarana guna mengkalibrasi peralatan	Jakarta		Tersedianya fasilitas untuk mengkalibrasi peralatan gempabumi di masing-masing Balai Besar	1,200	1,200	1,200	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)		Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)			Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)		Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
		Propinsi	Kab/Kota	Th 2010	Th 2011	Th 2012						
		Peningkatan Pelayanan datin Geomagnet	Banten			Meningkatnya pelayanan magnet bumi di Banten	4,000	2,750		APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA	
		Peningkatan Pelayanan datin magnet bumi	Papua Maluku Yogyakarta Sumbang	Jayapura Ambon Yogyakarta Padang		Peningkatan pelayanan magnet bumi di 4 lokasi (Jayapura, Ambon, Yogyakarta dan Padang Panjang)	2,300	2,300	2,300	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA	
		Melengkapi peralatan untuk studi prekursor gempa bumi				Tersedianya fasilitas untuk Studi prekursor gempa bumi	400	400	400	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA	
		Peningkatan Pelayanan informasi petir				Tersedianya informasi kejadian petir di beberapa lokasi di Indonesia	150	150	150	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA	
		Mendapatkan lokasi sensor seismik dg kualitas yang baik				Meningkatnya kualitas data seismic dari 25 lokasi	200	200	200	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA	
2	melakukan analisis hasil pengamatan gejala bencana					Memapatkan seismograph dengan sensitivitas tinggi dan Mereduksi tingkat noise yang disebabkan oleh lingkungan geologi setempat	250	1,500	1,650	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA	
		Penelitian tentang zonasi gempa bumi dan perkiraan dampaknya				Berkurangnya kerugian akibat kejadian gempa bumi	400	400	400	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA	
		Pengembangan peralatan seismograph dan accelerometer				Berkurangnya ketergantungan peralatan dari LN	600	600	600	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA	
		Penelitian tentang penyebab dan dampak gempa bumi dan tsunami				Meningkatnya pelayanan info gempa bumi dan tsunami	300	300	300	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA	
		Mencari lokasi pengganti stasiun geomagnet Tangerang	Banten			Tersedianya informasi guna membangun stasiun pengamatan magnet bumi yang representatif di Banten	250			APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA	
4	penyebarluasan informasi tentang	Pembangunan Decision Support Sistem MEWS	Sumut Sulse Bali	Medan Makasar Denpasar		Sistem integrasi Radar Mosaic, model prakiraan, display dan disseminasi sesuai harapan	10,000	10,000	10,000	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI	

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			(7)	(8)
	peringatan bencana	Pembangunan Sistem Komunikasi dan Integrasi	Sumatra Kalimantan Sulawesi Maluku Papua		Termonitornya seluruh tampilan radar cuaca di kantor pusat	7,500	7,500	7,500	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI
		Pembangunan Teleconference	Sumut Sulsel Bali	Medan Makasar Denpasar	Termonitornya alur informasi cuaca	600	600	600	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG METEOROLOGI
		Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan NDC CTBTO	Jakarta		Tersedianya fasilitas untuk pelayanan informasi CTBTO	500	500	500	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
		Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan AEC	Jakarta		Meningkatnya pelayanan informasi gempa bumi untuk ASEAN	500	500	500	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
		Pengadaan digital seismograph di 15 stasiun Geofisika			Meningkatnya pelayanan informasi gempa lokal	600	600	600	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
		Peningkatan Kerapatan Jaringan Pengamatan temporer magnet bumi			Meningkatnya informasi perubahan tahunan magnet bumi di Indonesia	500	0		APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
		Peningkatan database di Jakarta dan redundant-Bali			Meningkatnya kelengkapan InaTEWS untuk keperluan Indonesia dan International	400	460	550	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
		Informasi dan warning terkirim dan diterima secara cepat			Terpenuhinya kelengkapan persaratan RTWP	40	40	40	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
		Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan sistem monitoring prekursor gempa bumi			Tersedianya informasi prediksi gempa bumi	800	800	800	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
5	pelaksanaan tindakan terhadap ancaman bencana	Meningkatkan Kerapatan Jaringan repeat station			Tersedianya informasi untuk survei gravitasi	15	15	15	APBN	BMKG DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
<b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB BMKG</b>						<b>181,545</b>	<b>111,695</b>	<b>111,985</b>		

No	Kegiatan	Sasaran		Lokasi		Indikator Kinerja			Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)		Sumber Pendanaan	Pelaksana / Koordinator
		(3)		(4)		(5)			Th 2010	Th 2011		
<b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, BNPB</b>												
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b>												
<b>PROGRAM A : Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan</b>												
1	Melakukan koordinasi, pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya	Terselenggaranya koordinasi, pembagian tugas dan kewenangan serta sumber daya di setiap tingkat	Seluruh daerah rawan bencana			Seluruh pelaku pembangunan ditingkat pusat, propinsi kab/kota, kecamatan ( pengelola program, stakeholder ) melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan, pedoman, standard dan juklak/juknis serta sesuai kewenangnya	30,000	36,000	42,000	APBN, APBD, BLN	BNPB	
<b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>												
1	Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana	Seluruh Provinsi dan Kab/Kota melaksanakan pengenalan dan pengkajian ancaman bencana	Daerah rawan bencana			Jumlah kajian ancaman bencana yang dilaksanakan	30,000	36,000	42,000	APBN, APBD, BLN	BNPB	
2	Melakukan analisis risiko bencana	Seluruh Provinsi dan Kab/Kota melakukan analisis risiko bencana	Daerah rawan bencana			Jumlah dokumen analisis risiko bencana yang dilaksanakan	36,000	43,200	50,400	APBN, APBD, BLN	BNPB	
3	Identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana	Teridentifikasinya tindakan PRB di seluruh Provinsi dan kab/kota	Daerah rawan bencana			Jumlah informasi tindakan PRB kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	40,000	48,000	56,000	APBN, APBD, BLN	BNPB	



No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/Koordinator
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4	Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan peraturan perundangan	Propinsi dan kab/kota		Seluruh pengambil keputusan dan stakeholder mempunyai komitmen untuk menyusun dokumen perencanaan dan peraturan perundangan	12,000	14,400	16,800	APBN, APBD, BLN	BNPB
		Tersusunnya 3 dokumen Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berbasis mitigasi bencana	Sumber NTT	2010: Kabupaten Pesisir Selatan (Sumbang) dan Kabupaten Alor (NTT); 2011: Kabupaten/Pulau kecil lainnya	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	800	450	0	UNDP	BNPB bekerja sama dgn DKP
<b>PRIORITAS: PEMANFAATAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b>										
<b>PROGRAM C : PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>										
1	pengembangan budaya sadar bencana	Seluruh masyarakat sadar dan akrab dengan bencana	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah kemitraan yang memberikan komitmen dan dukungan di pusat, provinsi dan kab/kota dalam penyelenggaraan budaya sadar bencana dalam PRB	56,000	67,200	78,400	APBN, APBD, BLN	BNPB
2	pemantauan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber bencana	Terpantaunya penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber bencana	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah informasi kegiatan pemantauan penggunaan teknologi berpotensi bencana	45,000	54,000	63,000	APBN, APBD, BLN	BNPB
3	penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan	Setiap desa rawan bencana tersedia tenaga yang kompeten dalam PRB	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah propinsi dan kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan sesuai dengan kriteria	60,000	72,000	84,000	APBN, APBD, BLN	BNPB
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>										
<b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>										
1	pengendalian dan pemantauan risiko bencana	Terpantaunya risiko bencana di seluruh Provinsi dan Kab/Kota	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah dokumen dan informasi risiko bencana	42,000	50,400	58,800	APBN, APBD, BLN	BNPB

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
2	penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana	Terselenggaranya penerapan upaya fisik, non fisik dan peraturan perundangan PB	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah lokasi upaya penerapan fisik dan non fisik	45,000	54,000	63,000	APBN, APBD, BLN	BNPB
3	identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman	Tersedianya informasi sumber bahaya atau ancaman bencana	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah informasi sumber bahaya atau ancaman bencana	36,000	43,200	50,400	APBN, APBD, BLN	BNPB
4	melakukan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan	Terselenggaranya sistim pengawasan terhadap pengelolaan SDA berpotensi bencana	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah provinsi, kab/kota yang menyelenggarakan sistim pengawasan dan pengelolaan SDA berpotensi bencana	45,000	54,000	63,000	APBN, APBD, BLN	BNPB
5	Pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang	Terkendalinya penataan ruang sesuai standard	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah Provinsi dan kab/kota yang mengendalikan penataan ruang sesuai standar	60,000	72,000	84,000	APBN, APBD, BLN	BNPB
6	pengelolaan lingkungan hidup	Terselenggaranya pengelolaan lingkungan hidup sesuai standar	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah Provinsi dan kab/kota yang melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai standar	150,000	180,000	210,000	APBN, APBD, BLN	BNPB
7	pengaturan dan tata bangunan	Tersosialisasinya peraturan, kebijakan dan pedoman tata bangunan	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah Dokumen keputusan dan stakeholder di pusat, provinsi dan kab/kota mempunyai komitmen untuk menyelenggarakan pengaturan pembangunan dan tata bangunan	120,000	144,000	168,000	APBN, APBD, BLN	BNPB

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/Koordinator
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
8	pembangunan sarana dan prasarana	Terbangunnya sarana dan prasarana sesuai standar prasarana	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah Provinsi dan kab/kota yang membangun sarana dan prasarana sesuai perencanaan	280,000 APBN, ABPD, BLN	240,000	200,000	BNPB	
<b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGKAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b>										
<b>PROGRAM E : PERINGATAN DINI</b>										
1	pengamatan gejala bencana	Setiap gejala kejadian bencana dilaporkan secara cepat kepada Pemda dan kemudian diteruskan ke instansi terkait.	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah lokasi pengamatan gejala kejadian bencana yang dilaksanakan	33,600 APBN, ABPD, BLN	28,800	24,000	BNPB	
2	melakukan analisis hasil pengamatan gejala bencana	Setiap pengamatan gejala kejadian bencana dianalisis	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah dokumen analisis risiko bencana yang dilaksanakan	33,600 APBN, ABPD, BLN	28,800	24,000	BNPB	
3	pengambilan keputusan status ancaman bencana	Setiap hasil analisis ditetapkan status ancaman bencana	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah dokumen keputusan status ancaman bencana	39,200 APBN, ABPD, BLN	33,600	28,000	BNPB	
	ancaman bencana	Kajian kapasitas daerah dalam rantai peringatan dini tsunami bagi aparat, masyarakat, interface agencies dan media	Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu		tersusunnya pedoman nasional rantai peringatan dini tsunami	BNPB RISTEK, BMKG, Depdagri	500	500		
4	penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana	Berfungsinya sistem informasi peringatan bencana yang evidence based di seluruh Indonesia	Seluruh daerah rawan bencana		Dokumen keputusan yang dihasilkan dalam menyelenggarakan peringatan bencana	70,000 APBN, ABPD, BLN	60,000	50,000	BNPB	
5	pelaksanaan tindakan terhadap ancaman bencana	Setiap ancaman bencana tertanggulangi dengan baik	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah Data dan Informasi kegiatan tindakan bencana yang tertanggulangi	84,000 APBN, ABPD, BLN	72,000	60,000	BNPB	

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)		Lokasi Kab/Kota (4)	Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
		Propinsi				Th 2010	Th 2011	Th 2012		
<b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada Semua Tingkatan Masyarakat</b>										
<b>PROGRAM F : Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam PRB</b>										
1	Peningkatan pemahaman tentang kerentanan nasional masyarakat	Seluruh daerah rawan bencana	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah kemitraan dan dokumen dalam penyelenggaraan promosi pemahaman kerentanan masyarakat dalam PRB	26,000	31,200	36,400	APBN, APBD, BLN	BNPB
2	perencanaan partisipatif penanggulangan PRB di desa	Seluruh daerah rawan bencana	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah dokumen perencanaan partisipatif PRB	15,000	18,000	21,000	APBN, APBD, BLN	BNPB
3	peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana	Seluruh daerah rawan bencana	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah komitmen stakeholder sebagai pelaku PRB	25,000	30,000	35,000	APBN, APBD, BLN	BNPB
4	penguatan ketahanan sosial masyarakat	Seluruh daerah rawan bencana	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah komitmen dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat	20,000	24,000	28,000	APBN, APBD, BLN	BNPB
<b>PROGRAM G : KESIAPSIAGAAN</b>										
1	Penyusunan mekanisme kesiapan dan penanggulangan risiko bencana	Seluruh daerah rawan bencana	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah dokumen komitmen daerah dalam kesiapan PRB	20,000	24,000	28,000	APBN, APBD, BLN	BNPB

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			(7)	(8)
2	penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Terselenggaranya penyusunan dan uji coba rencana Penanggulangan kedaruratan bencana	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah dokumen uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana	30,000	36,000	42,000	APBN, APBD, BLN	BNPB
3	pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan	Terselenggaranya pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah laporan dan dokumen penyelenggaraan pemasangan dan pengujian geladi tanggap darurat	26,000	31,200	36,400	APBN, APBD, BLN	BNPB
4	penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar	Tersedianya barang pasokan kebutuhan dasar	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah laporan dan dokumen tersedianya barang pasokan kebutuhan dasar	120,000	144,000	168,000	APBN, APBD, BLN	BNPB
5	pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap	Terselenggaranya pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi semua daerah rawan bencana	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah laporan dan dokumen penyelenggaraan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tanggap darurat	240,000	288,000	336,000	APBN, APBD, BLN	BNPB
6	penyiapan lokasi evakuasi	Tersedianya rencana tempat lokasi evakuasi di daerah rawan bencana	Seluruh daerah rawan bencana		Jumlah laporan Provinsi dan Kab/kota yang menyediakan tempat lokasi evakuasi di daerah rawan bencana	60,000	72,000	84,000	APBN, APBD, BLN	BNPB

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)		Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
		Propinsi	Kab/Kota	Th 2010	Th 2011		Th 2012				
7	penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana	Seluruh daerah rawan bencana			Jumlah informasi Provinsi dan kab/kota tentang protap tanggap darurat bencana	200,000	240,000	280,000	APBN, APBD, BLN	BNPB	
8	penyediaan dan penyiapan peralatan untuk bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana	Seluruh daerah rawan bencana			Jumlah laporan Provinsi dan Kab/Kota yang menyediakan logistik dan peralatan	400,000	480,000	560,000	APBN, APBD, BLN	BNPB	
						<b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB BNPB</b>	<b>2,376,300</b>	<b>2,850,950</b>	<b>3,325,000</b>		
<b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, BPPT</b>											
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b>											
<b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>											
1	Pengendalian dan pengkajian ancaman bencana									PTLWB BPPT	
<b>PRIORITAS: PEMANFAATAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b>											
<b>PROGRAM C : PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>											
1	pengembangan budaya sadar bencana									PTLWB BPPT	

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)		Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
				Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
<b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGKAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b> <b>PROGRAM E : PERINGATAN DINI</b>											
1	pengamatan gejala bencana teknologi pengurangan risiko bencana.	Tersedianya berbagai teknologi pengurangan risiko bencana.		Banten Jawa Barat DKI Jakarta Jawa Tengah Jawa timur Sumatera Barat Kalimantan Selatan Sumatera Selatan Lampung Sumatera Barat Sumatera Hindia Laut Banda Laut Maluku laut Jawa		Dikuasainya kemampuan membangun teknologi sistem peringatan dini yang handal untuk bencana banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan kerusakan perairan dan lingkungan	8,000	10,000	12,000	APBN, APBD, BUMN, swasta, Hibah	PTLWB BPPT
		- Operasionalisasi dan pemeliharaan buoy tsunami dan stasiun penerima data buoy.		Samudera Hindia Laut Banda Laut Maluku laut Jawa		Buoy dan stasiun penerima data beroperasi					PTLWB BPPT
		- Terbangunnya konsep, sistem dan prototype sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat.		Banten Jawa Barat DKI Jakarta Jawa Tengah Jawa timur Sumatera Barat Kalimantan Selatan Sumatera Selatan Lampung Sumatera Barat		Paket teknologi digunakan oleh pemangku kepentingan					PTLWB BPPT

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana / Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		- Terbangunnya konsep, desain dan rekayasa teknologi penanggulangan bencana akibat gagal teknologi.	Banten Jawa Barat DKI Jakarta Jawa Tengah Jawa timur Sumatera Barat Kalimantan Selatan Sumatera Selatan Lampung Sumatera Barat		Informasi risiko bencana tersaji dengan cepat dan akurat				PTLWB BPPT	
2	melakukan analisis hasil pengamatan gejala bencana	Tersedianya hasil analisis risiko multi bencana dan sistem informasi untuk perencanaan pembangunan.  Terbangunnya sistem kajian cepat (rapid assessment) multi bencana			Terbangunnya kemampuan dalam pengkajian dan penerapan teknologi untuk mitigasi bencana gagal teknologi				PTLWB BPPT	
3	pengambilan keputusan status ancaman bencana	Terbangunnya sistem peringatan dini bencana banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem (badai, rob) dan kerusakan perairan dan lingkungan yang berdampak							PTLWB BPPT	
<b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada Semua Tingkat Masyarakat</b>										
<b>PROGRAM F : Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam PRB</b>										
1	Peningkatan pemahaman tentang kerentanan masyarakat	- Penyelenggaraan seminar dan lokakarya pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan internasional	Jakarta Banten Lampung Jawa Tengah Sumatera Barat		- Terlaksananya pelatihan pengembangan teknologi pengurangan risiko bencana				PTLWB BPPT	



No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	
2	perencanaan partisipatif penanggulangan bencana				- Terselenggaranya seminar dan lokakarya nasional dan internasional				PTLWB BPPT	
<b>PROGRAM G : KESIAPSIAGAAN</b>										
1	penyusunan mekanisme kesiapan dan penanggulangan risiko bencana	Penerbitan dokumen panduan, jurnal dan buku tentang teknologi penanggulangan bencana			- Tersedianya panduan pengembangan teknologi pengurangan risiko bencana				PTLWB BPPT	
2	penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Pelatihan teknis dan operasional tentang teknologi penanggulangan risiko bencana			- Terbitnya jurnal berkala yang terakreditasi				PTLWB BPPT	
3	pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan				- Terbitnya buku-buku mengenai teknologi penanggulangan bencana				PTLWB BPPT	
<b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB BPPT</b>						<b>8,000</b>	<b>10,000</b>	<b>12,000</b>		

No	Kegiatan	Sasaran		Lokasi	Indikator Kinerja		Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)		Sumber Pendanaan	Pelaksana / Koordinator
		(3)	(3)		(4)	(4)	Th 2010	Th 2011		
<b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN DALAM NEGERI</b>										
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b>										
<b>PROGRAM A : Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan</b>										
1	Melakukan koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya	Meningkatnya pemahaman aparatat pemda dalam upaya Mitigasi Bencana dan bahaya kebakaran pada Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	20 provinsi	20 provinsi	Kab/Kota	(5)	1,000	1,000	1,000 APBN	KEMDAGRI
	Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memahami masalah penanganan bencana yang sewaktu-waktu terjadi, sehingga masa kritis pada tahap tanggap darurat bencana dapat diatasi dengan baik	4 kab/kota					250		APBN	KEMDAGRI
	Memotivasi petugas kebakaran dengan cara memberikan reward	500 kab/kota					2,500	1,000	1,500 APBN	KEMDAGRI
	Mewujudkan pola keterpaduan dalam penanggulangan kebakaran	20 provinsi					1,500		APBN	KEMDAGRI
	Meningkatnya ketrampilan dan pemahaman masyarakat dalam upaya mitigasi bencana	20 provinsi					3,000		APBN	KEMDAGRI
<b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>										
1	Pengenalannya dan pengkajian ancaman	Memfasilitasi daerah dalam upaya Mitigasi Bencana dan bahaya kebakaran.	10 provinsi				300		APBN	KEMDAGRI

No	Kegiatan (1)	Sasaran (2)	Lokasi (3)		Indikator Kinerja (4)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (5)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
	bencana	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanggulangan bencana. Di daerah agar lebih terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan	7 provinsi dan 1 kota		(5)	4,000			PHLN	KEMDAGRI
		Terlaksananya kegiatan SCDRR baik di pusat dan daerah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya	7 provinsi dan 1 kota			1,000			APBN	KEMDAGRI
		Menjadikan posko Depdagri sebagai pusat komunikasi dan koordinasi penanggulangan bencana	Jakarta			500			APBN	KEMDAGRI
2	Melakukan analisis risiko bencana	Terfasilitasinya koordinasi penyelesaian masalah kelembagaan dan ketatalaksanaan bidang kebencanaan di daerah.	7 provinsi			400			APBN	KEMDAGRI
3	Identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana	Meningkatnya pemahaman aparatat pemda dalam upaya Mitigasi Bencana dan bahaya kebakaran pada Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.	10 provinsi			3,000			APBD	KEMDAGRI
4	Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan	Memantapkan kesamaan tujuan bagi Pemda dalam pembentukan BPBD	5 provinsi			300			APBN	KEMDAGRI
		Meningkatkan kesiapsiagaan aparat Pemda dalam penanggulangan wabah	5 provinsi			300			APBN	KEMDAGRI

No	Kegiatan	Sasaran		Lokasi		Indikator Kinerja			Sumber Pendanaan	Pelaksana / Koordinator
		(3)	(4)	(5)	Th 2010	Th 2011	Th 2012			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>										
<b>PROGRAM D. : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>										
1	pengenalan dan pemantauan risiko bencana	Permutakhiran data dan informasi mengenai daerah rawan bencana di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Terinventarisasinya data dan informasi kebencanaan yang termuat dalam Database Serpras kebencanaan dalam kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien di 6 (enam) Provinsi.	2 provinsi dan 3 kota/kab	Kepulauan Riau Daerah Yogyakarta Sulawesi Utara Kalimantan Selatan Nusa Tenggara Barat Papua	Tersusunnya database terbaru diimplementasikan ke dalam bentuk peta daerah rawan bencana dan narasi.	300			APBN	KEMDAGRI
					Tersedianya database Sarana Prasarana Kebencanaan di 6 (enam) Provinsi. Database berbasis lokasi yang mudah dibaca dan dipahami pengguna. Database yang dapat diperbaharui ketika ada data baru yang harus dimasukkan	980			APBN	KEMDAGRI
		Memfasilitasi pemerintah daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui penyusunan panduan informasi dan penyuluhan tentang kebencanaan di daerah.	5 provinsi dan 2 kota		Tersusunnya panduan informasi dan penyuluhan tentang kebencanaan di daerah.	250			APBN	KEMDAGRI
2	penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana	Terwujudnya pemahaman yang sama tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam penanggulangan bencana di daerah.	15 Provinsi		Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi dalam penanggulangan bencana dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah	700			APBN	KEMDAGRI

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
8	pembangunan sarana dan prasarana	Teridentifikasinya pola kerjasama pemanfaatan sarpras antar daerah dalam rangka penanggulangan bencana dengan menyusun database sarpras penanggulangan bencana sehingga kebutuhan dan kondisi sarpras penanggulangan bencana di daerah dapat diketahui.	9 Propinsi		Tersusunnya database sarpras penanggulangan bencana dengan berkoordinasi antar daerah dalam rangka pemanfaatan sarpras bencana	300	500	700	APBN	KEMDAGRI
		Terseleenggaranya kegiatan pembangunan gedung kantor pemerintahan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pasca bencana dengan cara yang efisien dan efektif	2 Propinsi 3 Kabupaten 1 Kota		Terbangunnya Sarana Prasarana Pemerintahan di 6 (enam) wilayah (Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Tanah Datar, kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kota Pariaman).	14			APBN	KEMDAGRI
		Terseleenggaranya kegiatan pembangunan gedung kantor pemerintahan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pasca bencana dengan cara yang efisien dan efektif.	2 Propinsi 3 Kabupaten 1 Kota		Terwujudnya koordinasi penanganan, pengelolaan serta pertanggung-jawaban/pelaporan dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi gedung kantor Pemerintahan pasca bencana di Provinsi Jawa Tengah, NTB, Kab. Tanah Datar, Toraja Utara, Lombok Barat dan Kota Pariaman.	200			APBN	KEMDAGRI
<b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB KEMENTERIAN DALAM NEGERI</b>						<b>20,794</b>	<b>2,500</b>	<b>3,200</b>		

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana / Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	
<b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT</b>										
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>										
<b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>										
8	pembangunan sarana dan prasarana	Terfasilitasinya kebijakan dan bantuan stimulan prasarana dan sarana pengembangan kawasan khusus yang terkena bencana	NAD, Riau, Kepri, Jabar, Sumbang, Sult, Maluku, Papua, NTT, Papua Barat, Sumut		Jumlah Fasilitas Kebijakan dan Bantuan Stimulan Prasarana dan Sarana Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman untuk 19 Kawasan Khusus yang terkena bencana seluas 380 Ha	12,000	21,000	24,000	APBN	Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan
		Terperuhnya kebijakan dan bangunan stimulan Rumah Khusus dalam konteks penanggulangan bencana	Jawa Barat, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu		Jumlah Rumah Pasca Bencana yang terbangun	60,000	40,000	40,000	APBN	Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Deputi Bidang Perumahan Formal
		Terfasilitasinya kebijakan dan bantuan stimulan pembangunan baru perumahan swadaya di kawasan bencana	NAD, Sumbang, Bengkulu, DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulsel, Sult, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat		Jumlah fasilitas dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya di kawasan bencana	50,000	50,000	50,000	APBN	Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Deputi Bidang Perumahan Swadaya
		Terfasilitasinya kebijakan dan bantuan stimulan peningkatan kualitas perumahan swadaya di kawasan bencana	NAD, Sumbang, Bengkulu, DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulsel, Sult, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat		Jumlah fasilitas dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya di kawasan bencana	25,000	25,000	25,000	APBN	Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Deputi Bidang, Perumahan Swadaya

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	
		Terfasilitasinya penyediaan prasarana, sarana, utilitas perumahan swadaya yang dapat menstimulasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat di kawasan bencana	NAD, Sumbang, Bengkulu, DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulsel, Sulut, Sulteng, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat		Jumlah fasilitas dan stimulasi PSU perumahan swadaya di kawasan bencana	40,000	40,000	40,000	APBN	Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Deputy Bidang Perumahan Swadaya
<b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT</b>						<b>187,000</b>	<b>176,000</b>	<b>179,000</b>		
<b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>										
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b>										
<b>PROGRAM A : Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan</b>										
1	Melakukan koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya	Terwujudnya Koordinasi Bidang Penanggulangan Kerawanan Sosial dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung		Meningkatnya penanganan tanggap cepat terhadap gangguan kesra yang diukur melalui: Jumlah K/L, NGO, Pemda yang berperan aktif dalam tanggap cepat terhadap gangguan kesra	1,000	1,200	1,200	APBN	KEMENKOKESRA
		Meningkatnya Koordinasi Urusan Dinamika Alam dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Sosial	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung		Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam penanganan bencana alam untuk meningkatkan Ketahanan Sosial	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
		Meningkatnya Koordinasi Urusan Konflik Sosial dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Sosial	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung		Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam penanganan konflik sosial untuk meningkatkan Ketahanan Sosial	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)		Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
		Propinsi	Kab/Kota	Th 2010	Th 2011		Th 2012				
		Meningkatnya Koordinasi Urusan Pemulihan Lingkungan dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Sosial	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung			Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam penanganan Pemulihan Lingkungan untuk meningkatkan Ketahanan Sosial	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
		Meningkatnya Koordinasi Urusan Dampak Teknologi dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Sosial	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung			Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam penanganan Dampak Negatif Teknologi untuk meningkatkan Ketahanan Sosial	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
		Meningkatnya Upaya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Bencana alam	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung			Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam upaya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Bencana Alam	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
		Meningkatnya Upaya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Konflik sosial	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung			Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam upaya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Konflik sosial	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
		Meningkatnya Upaya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Perubahan Lingkungan	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung			Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam upaya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Perubahan Lingkungan	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA



No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
		Meningkatnya Upaya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Dampak Teknologi	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung		Meningkatnya peran aktif K/L, NGO, Pemda dalam upaya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap gangguan Dampak Negatif Teknologi	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
		Meningkatnya Upaya Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat terhadap gangguan kerawanan sosial	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung		Terselenggarakannya sosialisasi pengembangan budaya sadar Gangguan Kerawanan Sosial di Lingkungan K/L terkait	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
		Tersinkronisasinya upaya Pemulihan fisik dan non fisik dalam rangka pengurangan kerawanan sosial	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung		Tertanganinya Pemulihan fisik dan non fisik dalam rangka pengurangan kerawanan sosial	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
		Meningkatnya Upaya pengendalian dampak pengelolaan dan eksploitasi SDA terhadap gangguan Kesejahteraan Rakyat	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung		Terselenggaranya pengendalian dampak pengelolaan dan eksploitasi SDA terhadap gangguan Kesejahteraan Rakyat	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
		Tersusunnya Kebijakan tentang penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung		Terselenggaranya koordinasi Kebijakan tentang penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat	600	750	750	APBN	KEMENKOKESRA

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)		Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)			Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) Th 2010      Th 2011      Th 2012		Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)		
		Propinsi	Kab/Kota	Th 2010	Th 2011	Th 2012	Th 2010	Th 2011	Th 2012					
<b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>														
4	Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan	Tersusunnya Kebijakan tentang mekanisme kesiapan dan penanggulangan risiko Gangguan Kesejahteraan Rakyat		Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung		Terselenggaranya koordinasi Kebijakan tentang mekanisme kesiapan dan penanggulangan risiko Gangguan Kesejahteraan Rakyat			600	750	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
		Tersusunnya Kebijakan tentang Kedaruratan Gangguan Kesra		Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung		Terselenggaranya koordinasi Kebijakan tentang kedaruratan Gangguan Kesejahteraan Rakyat			600	750	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>														
<b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>														
1	pengenalan dan pemantauan risiko bencana	Meningkatnya Upaya Pengendalian dampak negatif penggunaan Teknologi		Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung		Tersedianya Laporan dan Evaluasi tentang penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber Kerawanan Sosial			600	750	750	750	APBN	KEMENKOKESRA
3	identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman	Meningkatnya upaya penyediaan data dan informasi kerawanan Sosial		Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung		Terselenggarakannya penyediaan data dan informasi Gangguan Kerawanan Sosial di Lingkungan K/L terkait			600	750	750	750	APBN	KEMENKOKESRA

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)		Sumber Pendanaan	Pelaksana/Koordinator
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)
<b>PRIORITAS : Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada Semua Tingkatan Masyarakat</b>									
<b>PROGRAM F : Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam PRB</b>									
1	Peningkatan pemahaman tentang kerentanan masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung		Terselenggaranya sosialisasi pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana	600	750	750 APBN	KEMENKOKESRA
3	peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan an bencana	Meningkatnya komitmen bersama pemerintah dan stakeholder dalam penanggulangan kerawanan sosial	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung		Terbangunnya komitmen bersama antara Pemerintah dan Stakeholder Dalam Negeri untuk penanggulangan Kerawanan Sosial	600	750	750 APBN	KEMENKOKESRA
4	penguatan ketahanan sosial masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan Kerawanan Sosial	Semua Propinsi kecuali Sumatera Selatan DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung		Terjalinya kerjasama antara Pemerintah dan Lembaga Dalam Negeri untuk penanggulangan Kerawanan Sosial	600	750	750 APBN	KEMENKOKESRA
<b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB KEMENTERIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>						<b>12.400</b>	<b>15.450</b>	<b>15.450</b>	
<b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL</b>									
<b>PRIORITAS : Penguatan Risiko Bencana sebagai Prioritas Nasional dan Daerah serta Penguatan Kelembagaan</b>									
<b>PROGRAM A : Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan</b>									
1	Melakukan koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya	Sistem mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam mitigasi dan penanganan pasca bencana.	33 provinsi		Terlaksananya sistem koordinasi dan mekanisme kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam mitigasi dan penanganan pasca bencana antara pemerintah pusat dan daerah	5,000	5,000	5,000 APBN	Kem. Diknas, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah

No	Kegiatan	Sasaran		Lokasi	Indikator Kinerja		Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana / Koordinator
		(3)	(3)		(4)	(5)	(5)	Th 2010	Th 2011		
<b>PRIORITAS: PEMANFAATAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b>											
<b>PROGRAM C : PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>											
3	penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan	Mengembangkan program bahan ajar yang handal dan sahih yang dapat diintegrasikan pada beberapa mata pelajaran yang relevan (Agama, IPA, dan IPS) pada sekolah-sekolah jenjang pendidikan dasar.	Provinsi rawan bencana seperti Papua, NTT, NTB, Jatim, Jateng, DIY, Jabar, Sumbbar, Bengkulu, NAD	Kabupaten/ kota terpilih untuk uji coba	Tersusunnya bahan ajar tentang risiko bencana untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah	2,250	APBN, PHLN			Kem. Diknas, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah	
		Sekolah-sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah, terutama pada provinsi-provinsi daerah rawan bencana alam	33 provinsi		Terlaksananya pengajaran resiko bencana pada sekolah-sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di provinsi-provinsi rawan bencana	65,500	80,500 APBN, PHLN			Kem. Diknas, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah	
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>											
<b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>											
7	pengaturan pembangunan dan tata bangunan	Mengembangkan standar bencana bagi gedung sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah	33 provinsi		Tersusunnya dokumen tentang standar bangunan sekolah tahan gempa yang	2,000	APBN			Kem. Diknas, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah	
		Penerapan standar bangunan sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah tahan gempa			Terlaksananya standar bangunan sekolah tahan gempa pada semua sekolah	65,500	80,000 APBN			Kem. Diknas, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah	
<b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL</b>							-	140,250	165,500		
<b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN KEHUTANAN</b>											
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>											
<b>PROGRAM A : PENGUATAN PERATURAN PERUNDANGAN DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN</b>											
1	Melakukan koordinasi pembagian	Terbentuk dan berkembangnya Forum DAS	33 Propinsi		Terbentuk dan berkembangnya Forum DAS	1,200	1,200 APBN			Kementerian Kehutanan, Dirjen RLPS	

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			(7)	(8)
	tugas, kewenangan, dan sumber daya	Lahan daerah penyangga rawan kebakaran hutan dan lahan	Riau Jambi Sumatera Barat Kalimantan Barat kalimantan Timur		Terbinanya kelembagaan masyarakat dan pemerintah dalam pengendalian kebakaran hutan	6,800	7,300	7,800	APBN	Kementerian Kehutanan, Dirjen PHKA
<b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>										
4	Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan	Terlaksananya sosialisasi PDAS	33 Propinsi		Terlaksananya sosialisasi PDAS di 33 Propinsi	1,100	1,100	1,100	APBN	Kementerian Kehutanan, Dirjen RUPS
		berfungsinya SOP di 36 BPDAS	33 Propinsi		berfungsinya SOP di 36 BPDAS	2,000	2,000	3,200	APBN	Dephut, Dirjen RUPS
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>										
<b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>										
3	identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman	Terpetaknya rawan bencana banjir, longsor dan kekeringan	12 Propinsi		Terpetaknya rawan bencana banjir, longsor dan kekeringan	3,000	3,000	3,000	APBN	Kementerian Kehutanan, Dirjen RUPS
6	pengelolaan lingkungan hidup	Terselenggaranya rehabilitasi hutan dan lahan di 33 Propinsi	Propinsi		Terselenggaranya rehabilitasi hutan dan lahan di 33 Propinsi	10,000	10,000	10,000	APBN	Kementerian Kehutanan, Dirjen RUPS
		Lahan gambut di Kalimantan Tengah, Jambi, Riau	propinsi		Terlaksananya rehabilitasi lahan gambut dan terwujudnya konservasi tanah dan air	475,000	275,000	200,000	APBN	Kementerian Kehutanan, Dirjen RUPS
		Lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan di Cianjur, Bogor, Depok, beksas dan Jakarta	5 kab		Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan serta terwujudnya bangunan konservasi tanah dan air	365,350	150,450	110,850	APBN	Kementerian Kehutanan, Dirjen RUPS
		Lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutanWonosobo, Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Temanggung	5 kab		Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan serta terwujudnya bangunan konservasi tanah dan air	168,000	60,670	59,650	APBN dan DAK Bidang Kehutanan	Kementerian Kehutanan, Dirjen RUPS

No	Kegiatan	Sasaran		Lokasi		Indikator Kinerja			Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)		Sumber Pendanaan	Pelaksana / Koordinator
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Th 2010	Th 2011	Th 2012		
		Lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo, Surakarta, Ngawi, Bojonegoro	6 kab			Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan serta terwujudnya bangunan konservasi tanah dan air DAS Solo	171,000	50,850	45,680	APBN dan DAK Bidang Kehutanan	Kementerian Kehutanan, Dirjen RUPS	
		Lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan kabupaten Bandung Barat, Sumedang, Garut, Kutopanjang	4 kab			Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan serta terwujudnya bangunan konservasi tanah dan air Catchment area waduk Siguling, Jatigede, Kutopanjang dan Masbastari	95,000	30,850	24,250	APBN dan DAK Bidang Kehutanan	Kementerian Kehutanan, Dirjen RUPS	
		200 kabupaten/kota yang memiliki lahan kritis lebih dari 20% dari luas kabupaten	200 kab/kota			Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan serta terwujudnya bangunan konservasi tanah dan air pada 200 kab/kota	500,000	500,000	500,000	DAK Bidang Kehutanan	Kementerian Kehutanan, Dirjen RUPS	
		Lahan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (Riau, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur				Terlaksananya upaya pencegahan, pemadaman, dan penangan pasca kebakaran hutan dan lahan	9,565	7,850	9,250	APBN	Kementerian Kehutanan, Dirjen PHKA	
<b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b>												
<b>PROGRAM E : PERINGATAN DINI</b>												
1	pengamatan gejala bencana	Tersedianya dan terpasangnya AWS	6 Propinsi			Tersedianya dan terpasangnya AWS 6 Unit	1,000	2,000	1,500	APBN	Kementerian Kehutanan, Dirjen RUPS	
<b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada Semua Tingkat Masyarakat</b>												
<b>PROGRAM F : Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam PRB</b>												
1	Peningkatan pemahaman tentang kerentanan masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kelestarian hutan dan lingkungan di 464 kab/kota	464 Kab/kota			Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kelestarian hutan dan lingkungan di Kab/Kota	500	500	500	APBN	Kementerian Kehutanan, Dirjen RUPS	
3	peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana	Terlaksananya petugas daerah tentang PDAS	33 Propinsi			Terlaksananya petugas daerah tentang PDAS di 33 Propinsi	1,000	2,000	2,500	APBN	Kementerian Kehutanan, Dirjen RUPS	
<b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB KEMENTERIAN KEHUTANAN</b>							<b>1,810,515</b>	<b>1,104,770</b>	<b>980,480</b>			

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)		Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
		Propinsi	Kab/kota	Th 2010	Th 2011		Th 2012				
<b>MATRIX RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN KELAUTAN &amp; PERIKANAN</b> <b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b> <b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>											
4	Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan	Tersedianya rencana mitigasi bencana di 30 kawasan		Sumatera Barat Bengkulu Jawa Timur NTT Sulawesi Tenggara Lampung Bengkulu Jawa Tengah Jawa Barat DIY NTB NAD Sulawesi Utara Papua Jawa Timur Maluku Utara Sulawesi Selatan Gorontalo Sulawesi Tengah Maluku Papua Barat	Persentase kawasan pesisir yang mengadopsi mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami dalam perencanaan daerahnya	2,000	4,000	6,000	APBN	Kem. Kelautan & Perikanan	
		Tersusunnya norma, standar, prosedur, dan kriteria mitigasi bencana di wilayah, esisir dan pulau kecil			Jumlah NSPK tentang mitigasi bencana yang dilengkapi dengan data bencana terkini	200	100	100	APBN	Kem. Kelautan & Perikanan	

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana / Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			(7)	(8)
<b>PRIORITAS: PEMANFAATAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b>										
<b>PROGRAM C : PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>										
1	pengembangan budaya sadar bencana	Meningkatnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana di kawasan	Lampung Jawa Barat DIY NAD NTB Bengkulu Jawa Tengah Sulawesi Utara Papua Jawa Timur Maluku Utara Sulawesi Selatan Gorontalo Sulawesi Tengah Maluku Sumatera Barat Papua Barat Banten		Persentase masyarakat pesisir yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	500	1,000	1,500	APBN	Kem. Kelautan & Perikanan
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>										
<b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>										
6	pengelolaan lingkungan hidup	Tertanamnya greenbelt untuk mitigasi tsunami di 17 lokasi	Sumatera Barat NTB Jawa Timur Jawa Tengah Bengkulu DIY Jawa Barat NTT Sulawesi Tenggara Lampung NAD Sulawesi Utara Papua		Persentase kawasan pesisir yang memiliki vegetasi pelindung pantai untuk mitigasi bencana tsunami	800	2,000	4,000	APBN	Kem. Kelautan & Perikanan



No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	
		Tertanamnya vegetasi pantai di 17 lokasi	Jawa Tengah Jawa Timur Banten Jawa Barat NTB		Persentase kawasan pesisir yang memiliki vegetasi pelindung pantai	800	2.000	4.000 APBN	Kem. Kelautan & Perikanan	
8	pembangunan sarana dan prasarana	Terbangunnya sarana struktur ramah bencana di 24 kawasan	Jawa Timur Bengkulu Jawa Tengah Jawa Barat NTB NAD Sulawesi Utara Papua Maluku Utara Sulawesi Selatan Gorontalo Maluku Irian Barat Sumatera Barat Lampung DIY NTT		Persentase kawasan pesisir yang memiliki fasilitas penyelamatan diri dan permukiman tahan terhadap ancaman bencana	40.000	4.000	18.000 APBN	Kem. Kelautan & Perikanan	
<b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB KEMENTERIAN KELAUTAN &amp; PERIKANAN</b>						<b>44.300</b>	<b>13.100</b>	<b>33.600</b>		
<b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN KESEHATAN</b>										
<b>PRIORITAS: PENGUATAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>										
<b>PROGRAM A : PENGUATAN PERATURAN PERUNDANGAN DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN</b>										
1	Melakukan koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya	Pengambil kebijakan di pusat dan daerah			Terlaksananya kerjasama penanggulangan bencana yang terintegrasi			APBN	PPK Kementerian Kesehatan	
		Menyusun peraturan-peraturan			Tersedianya peraturan-peraturan terkait upaya penanggulangan bencana			APBN	PPK Kementerian Kesehatan	
		Membentuk kelembagaan			Tersedianya unit kerja terkait dengan upaya penanggulangan bencana			APBN	PPK Kementerian Kesehatan	

No	Kegiatan	Sasaran		Lokasi		Indikator Kinerja			Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)		Sumber Pendanaan	Pelaksana / Koordinator
		(3)	(3)	Propinsi	Kab/Kota	(5)	Th 2010	Th 2011	Th 2012	(7)		
<b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>												
1	Pengendalian dan pengkajian ancaman bencana	Instansi kesehatan prov & kab/kota	Setiap prov & kab/kota	Propinsi	Kab/Kota	Adanya antispasi terhadap setiap ancaman bencana yang timbul					APBN	PPK Kementerian Kesehatan
2	Melakukan analisis risiko bencana	Instansi kesehatan prov & kab/kota	Setiap prov & kab/kota	Setiap prov & kab/kota	Setiap prov & kab/kota	Adanya penilaian tingkat kerawanan bencana di setiap kab/kota					APBN	PPK Kementerian Kesehatan
3	Identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana	Instansi kesehatan prov & kab/kota	Setiap prov & kab/kota	Setiap prov & kab/kota	Setiap prov & kab/kota	Adanya hasil evaluasi upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan					APBN	PPK Kementerian Kesehatan
4	Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan	Pusat Penanggulangan Krisis	Pusat			Terlaksananya upaya penanggulangan bencana sesuai dengan prosedur yang ada					APBN	PPK Kementerian Kesehatan
<b>PRIORITAS: PEMANFAATAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b>												
<b>PROGRAM C : PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>												
1	pengembangan budaya sadar bencana	Masyarakat dan petugas di masing-masing prov & kab/kota	Setiap prov & kab/kota	Setiap prov & kab/kota	Setiap prov & kab/kota	Peningkatan kepedulian dan kepekaan petugas kesehatan dan masyarakat akan risiko bencana					APBN	PPK Kementerian Kesehatan
3	penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan	Masyarakat dan petugas di masing-masing prov& kab/kota	Setiap prov & kab/kota	Setiap prov & kab/kota	Setiap prov & kab/kota	Peningkatan kemampuan petugas dan masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana					APBN	PPK Kementerian Kesehatan
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>												
<b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>												
1	pengendalian dan pemantauan risiko bencana	Petugas di masing-masing prov& kab/kota.	Setiap prov & kab/kota	Setiap prov & kab/kota	Setiap prov & kab/kota	Tersedianya data risiko bencana di setiap prov& kab/kota					APBN	PPK Kementerian Kesehatan

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/Koordinator
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	
2	penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana	Petugas di masing-masing prov& kab/kota.	Setiap prov &kab/kota		Tersedianya rencana kedaruratan bidang kesehatan di kab/kota			APBN	PPK Kementerian Kesehatan	
<b>PRIORITAS: PENINGKATAN KESIAPAN MENGHADAPI BENCANA PADA SEMUA TINGKATAN MASYARAKAT</b>										
<b>PROGRAM F : PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PRB</b>										
1	Peningkatan pemahaman tentang kerentanan masyarakat	Masyarakat dan petugas di masing-masing prov & Kab/Kota	Setiap prov & kab/kota		Adanya kepedulian masyarakat terhadap ancaman potensi bencana			APBN	PPK Kementerian Kesehatan	
2	perencanaan partisipatif penanggulangan bencana	Petugas di masing-masing prov& kab/kota	Setiap prov & kab/kota		Adanya peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana			APBN	PPK Kementerian Kesehatan	
3	peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana	Petugas di masing-masing prov & kab/kota	Setiap prov & Kab/Kota		Adanya komitmen kesepakatan dalam upaya penanggulangan bencana bidang kesehatan			APBN	PPK Kementerian Kesehatan	
<b>PROGRAM G : KESIAPSIAGAAN</b>										
1	Penyusunan mekanisme kesiapan dan penanggulangan an risiko bencana	Instansi kesehatan di masing-masing prov&kab/kota.	Setiap prov &kab/kota		Terbentuknya pola penanggulangan bencana yang sistematis sesuai dengan jenis bencana			APBN	PPK Kementerian Kesehatan	
2	penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan an kedaruratan bencana	Instansi kesehatan dan masyarakat di masing-masing kab/kota.	Setiap prov &kab/kota		Meningkatnya keterpaduan antar instansi dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana			APBN	PPK Kementerian Kesehatan	

No	Kegiatan	Sasaran		Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana / Koordinator
		(3)	(3)	Propinsi	Kab/Kota		(4)	(4)	Th 2010		
(1)	(2)					(5)	(6)			(7)	(8)
3	pengorganisasi-an, pemasaan, dan pengujian sistem peringatan	Instansi kesehatan dan masyarakat di masing-masing kab/kota.	Setiap prov & kab/kota			Meningkatnya kemampuan petugas dan masyarakat dalam merespons bencana yang terjadi				APBN	PPK Kementerian Kesehatan
7	penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana	Instansi kesehatan di masing-masing kab/kota.	Setiap prov & kab/kota			Adanya peningkatan kualitas respon tanggap darurat dalam upaya penanggulangan bencana				APBN	PPK Kementerian Kesehatan
<b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>											
<b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGKAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b>											
<b>PROGRAM E : PERINGATAN DINI</b>											
4	penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana	Daerah yang rawan terhadap risiko bencana	Provinsi			tersebarinya informasi tentang peringatan dini bencana	2,500	2,500	3,000	APBN	Kem. Kominfo, Direktorat Sarana Teknologi Komunikasi, Ditjen SKDI

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Pelaksana/ Koordinator (8)	
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		Sumber Pendanaan (7)
<b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</b>										
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b>										
<b>PROGRAM A : Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan</b>										
1	Melakukan koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya	Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana	Jakarta		Tersedianya organisasi direktorat khusus yang menangani keselamatan dengan kewenangan yang dapat menjamin ketaatan (operator sarana dan prasarana) terhadap regulasi perkeretaapian yang berlaku	800	-	-	- APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian
	Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana	Jawa dan Sumatera			Terbentuknya unit pengawasan/inspektor untuk pencegahan bencana pada masing-masing Satker di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1,000	1,000	1,000	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian
	Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana	Banten Jabar Jateng DIY Jatim Sumut NAD Sumbang Sumsel			Tersedianya unit pelaksana teknis dalam pembinaan teknis serta pengawasan dan penegakan hukum di daerah	-	500	-	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian
	Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana	Jawa dan Sumatera			Tersedianya unit pelaksana teknis pengujian prasarana perkeretaapian di daerah	-	500	-	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian
	Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana	Jawa dan Sumatera			Tersedianya unit pelaksana teknis pengujian sarana perkeretaapian di daerah	-	500	-	APBN	Dephub, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian

No	Kegiatan	Sasaran		Lokasi		Indikator Kinerja			Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)		Sumber Pendanaan	Pelaksana / Koordinator
		(3)	(3)	Propinsi	Kab/Kota	(5)	Th 2010	Th 2011	Th 2012	(7)		
(1)	(2)	Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana	Jawa dan Sumatera	Sumatera		Tersedianya unit pelaksana teknis dalam perawatan dan pengoperasian peralatan serta administrasi pergudangan di daerah	-	500	-	-	APBN	Dephub, Direktorat Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian
<b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>												
4	Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan	Penguatan regulasi penanganan kecelakaan kereta api termasuk akibat bencana	Jakarta	Jakarta		Tersedianya Peraturan Menteri tentang standar keselamatan perkeretaapian nasional	400	-	-	-	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian
		Penguatan regulasi penanganan kecelakaan kereta api termasuk akibat bencana	Jakarta	Jakarta		Tersedianya Peraturan Menteri tentang pedoman audit keselamatan sarana dan prasarana KA	400	-	-	-	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian
		Penguatan regulasi penanganan kecelakaan kereta api termasuk akibat bencana	Jakarta	Jakarta		Tersedianya peraturan tentang pedoman penelitian, pemeriksaan dan penanganan kecelakaan kereta api termasuk akibat bencana	400	-	-	-	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian
<b>PRIORITAS: PEMANFAATAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b>												
<b>PROGRAM C : PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>												
1	pengembangan budaya sadar bencana keselamatan dan ketahanan	Meningkatnya upaya pengembangan budaya keselamatan dan ketahanan	Jawa dan Sumatera	Sumatera		Terlaksananya Safety Management System secara berkelanjutan	-	-	1,500	-	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian

No	Kegiatan (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
				Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
2	pemantauan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber bencana	Meningkatnya pengawasan dan pemantauan terhadap kondisi prasarana KA pada lokasi rawan bencana	Jawa dan Sumatera			Terlaksananya pemeriksaan jalan rel, jembatan dan terowongan 2-3 kali setahun	1,000	1,000	1,000	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian
3	penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan	Kepala Bandar Udara dan personil Bandar udara siap menghadapi keadaan darurat akibat bencana alam (banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, tanah longsor dll) baik dalam rangka evakuasi korban maupun distribusi bantuan	Semua bandara yang termasuk kategori daerah rawan bencana			Terlaksananya koordinasi dan kesiapan pengelola bandar udara ketika terjadi bencana alam	300	300	300	APBN	Kem. Perhubungan
		Meningkatnya peran lembaga pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi risiko bencana	Jawa dan Sumatera			Tersedianya unit pelaksana teknis pengujian SDM perkeretaapian di daerah	300	-	-	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian
		Peningkatan budaya keselamatan di masyarakat dan operator kereta api	Jawa dan Sumatera			Terlaksananya pendidikan keselamatan kepada masyarakat, awak sarana dan petugas operasi dan perawatan prasarana	1,000	1,000	1,000	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)		Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)			Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)		Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
		Propinsi	Kab/Kota	Th 2010	Th 2011	Th 2012						
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana khususnya pada keselamatan dan keamanan perjalanan KA	Jawa dan Sumatera			Pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan pada masing-masing wilayah Satker di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	5,000	5,000	5,000	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Teknik Prasarana & Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian	
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>												
<b>PROGRAM D.: PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>												
1	pengenalan dan pemantauan risiko bencana	Mengetahui penyebab kecelakaan dan pembuatan kesimpulan untuk membuat rekomendasi mengenai hal-hal pencegahan	Jawa dan Sumatera			Tersusunnya laporan penelitian termasuk database terkait kecelakaan akibat bencana	400	400	400	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Keselamatan dan Teknik Sarana, Ditjen Perkeretaapian	
2	penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana	Mengurangi penyebab risiko bencana longsor	Jabar Jateng	<b>2010</b> : Sta. Garahan. <b>2012</b> : Cianjur - Padalarang; Purwokerto Kroya.		Prasarana KA siap dan aman operasi	1,000	-	3,500	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian	
		Mencegah faktor penyebab kerusakan terhadap konstruksi terowongan	Jabar	Terowongan Lampegan lintas Sukabumi - Cianjur		Prasarana KA siap dan aman operasi	1,000	-	-	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian	



No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
		Mengurangi penyebab risiko bencana akibat gerusan air/dasar sungai	Jabar Jateng Jatim	2010 : Soka - Kebumen; Primbon - Butuh; Telawah - Karangsono; Gundih - Surabaya; Cikampek - Padalarang. 2012 : Cirebon - Kroya.	Pencegahan terhadap bencana akibat gerusan air/dasar sungai	34,500	-	3,500	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian
		Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi laut				87,000	0	0	APBN	Kem. Perhubungan, Ditjen Hubla
		Meningkatkan keandalan dan kecukupan prasarana dan sarana transportasi laut yang efektif dan efisien	Jumlah kebutuhan rehabilitasi faspel terhadap kebutuhan rehabilitasi secara nasional			26,300	0	0	APBN	Kem. Perhubungan, Ditjen Hubla
		Memperbaiki Fasilitas Pelabuhan yang rusak akibat gempa	Jumlah rehabilitasi dermaga yang dibangun terhadap jumlah dermaga yang terkena gempa		Saukorem Prov. Papua Barat	10,000	0	0	APBN	Kem. Perhubungan, Kampel Oransbari
8	pembangunan sarana dan prasarana	Meningkatnya pengawasan dan pemantauan sebagai upaya mengurangi faktor penyebab risiko bencana	Jawa dan Sumatera		Tersedianya SIM terkait prasarana KA yang akurat dan mutakhir	2,000	2,000	2,000	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)		Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
		Propinsi	Kab/Kota	Th 2010	Th 2011		Th 2012				
		Meningkatnya kelancaran operasi perjalanan KA	Jawa Tengah	2010 : Brumbung - Tegowanu; Kaliwungu - Kalibodri; Sta. Semarang Tawang; Jerakah - Kaliwungu; Kaliwungu - Kalibodri; Sragen - Masaran.	Prasarana KA siap dan aman operasi	35,000	41,000	37,000	APBN	Kem. Perhubungan, Direktorat Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian	
		Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi laut	Jumlah kebutuhan kapal patroli per luasan wilayah keamanan			276,600	0	0	APBN	Kem. Perhubungan, Ditjen Hubla	
		Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi laut	Jumlah kapal marine surveyor per luasan wilayah pelayanan			4,100	0	0	APBN	Kem. Perhubungan, Ditjen Hubla	
		Meningkatkan keandalan dan kecukupan prasarana dan sarana transportasi laut yang efektif dan efisien dan meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi laut	Jumlah kecukupan dan keandalan SBNP per wilayah pelayanan			99,000	0	0	APBN	Kem. Perhubungan, Ditjen Hubla	

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)		Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
				Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
<b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada semua tingkatan masyarakat</b>											
<b>PROGRAM G : KESIAPSIAGAAN</b>											
6	penyiapan lokasi evakuasi kelas F70 / Hercules C130	Mampu didarati pesawat kelas F70 / Hercules C130	Sumut NTT NAD Bengkulu Maluku Papua Sulteng Maluku Utara Sulawesi Utara	Lasondre - Nias Selatan (Pulau-pulau Batu) Komodo - Labuhan Bajo Tardamu - Sabu Nias Selatan Baru Kuala Batee - NAD Teuku Cut Ali - NAD Hamzah Fanzuri - Singkil Muko-muko - Bengkulu Gewayantana - Larantuka Namrole - Buru Emalamo - Sula Dobo - Kepulauan Aru Tual Baru - Malra S. Condrongoro - Serui Tojo Una-una - Ampana Wai Oti - Maumere Wonopito - Lembata Baru Bula - Seram Bagian Timur Namlea - Buru Falabahaya Mangole - Taliabu Numfor - Biak Numfor Muting - Papua Sarmi - Papua Miangas - Sulawesi	Kemampuan bandara untuk didarati pesawat kelas F-70 /Hercules C-130 dalam rangka evakuasi dan penanganan bencana	615,500	1,366,171	1,366,171	APBN/APBD	Kem. Perhubungan	
<b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</b>							<b>1,203,000</b>	<b>1,419,871</b>	<b>1,422,371</b>		

No	Kegiatan	Sasaran		Lokasi	Indikator Kinerja		Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)		Sumber Pendanaan	Pelaksana / Koordinator
		(3)	(4)		Propinsi	Kab/Kota	Th 2010	Th 2011		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)		(7)	(8)
<b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN PERTANIAN</b>										
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b>										
<b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>										
3	Identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana	Minimalisasi gangguan DFI	33 Prop.		Jml. Luas Pertanian yang terkena gangguan DFI (ha)				APBN	Kementerian Pertanian
<b>PRIORITAS: PEMANFAATAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b>										
<b>PROGRAM C : PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>										
3	penyelenggara an pengetahuan dan kemampuan SDM penyuluhan, dan pelatihan	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM perlindungan	33 Prop.		SDM Perlindungan mampu melakukan analisis DFI				APBN	Kementerian Pertanian
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>										
<b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>										
1	pengenalan dan pemantauan risiko bencana	Minimalisasi gangguan DFI	33 Prop.		Jml. Luas Pertanian yang terkena gangguan DFI (ha)				APBN	Kementerian Pertanian
6	pengelolaan lingkungan hidup	Terwujudnya upaya konservasi air untuk pertanian	33 Propinsi		Tersedianya embung 1.969 unit; Dam Parit 1.646 unit dan Sumur Resapan 7.000 unit	95,650	106,400	113,700	APBN	Kementerian Pertanian, Direktorat Pengelolaan Air, Ditjen. PLA
<b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGKAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b>										
<b>PROGRAM E : PERINGATAN DINI</b>										
4	penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana	Minimalisasi gangguan DFI	33 Prop.		Jml. Luas Pertanian yang terkena gangguan DFI (ha)				APBN	Kementerian Pertanian

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/Koordinator
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
<b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada semua tingkatan Masyarakat</b>										
<b>PROGRAM F : Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam PRB</b>										
2	perencanaan partisipatif penanggulangan bencana	Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air/ kelompok tani	33 Propinsi		Terselenggaranya sekolah lapang iklim untuk P3A 720 unit.	4,000	6,500	7,500	APBN	Kementerian Pertanian, Direktorat Pengelolaan Air, Ditjen. PLA
4	penguatan ketahanan sosial masyarakat	Berkembangnya sumber air alternatif skala kecil untuk pertanian	18 Propinsi		Tersedianya 7.208 unit pompa air	91,600	96,080	100,640	APBN	Kementerian Pertanian, Direktorat Pengelolaan Air, Ditjen. PLA
<b>PROGRAM G : KESIAPSIAGAAN</b>										
1	Penyusunan mekanisme kesiapan dan penanggulangan an risiko bencana	Tersedianya acuan analisis dan mitigasi DFI	33 Prop.		Jml. Luas Pertanian yang terkena gangguan DFI (ha)				APBN	Kementerian Pertanian
<b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB KEMENTERIAN PERTANIAN</b>						<b>191,250</b>	<b>208,980</b>	<b>221,840</b>		
<b>Matrik RAN-PRB 2010-2012, Kementerian Pekerjaan Umum</b>										
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>										
<b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>										
2	penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan an bencana	Melindungi dan memperkuat infrastruktur jalan dan jembatan agar tidak rentan terhadap bencana	Tersebar di seluruh Indonesia		Tersedianya Bronjong untuk mengantisipasi longsor	1,500	3,600	4,900	APBN	Kem. PU, Ditjen Bina Marga
3	identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau bencana	Identifikasi bencana sebagai akibat dari gempa tektonik.	Maluku utara NTT	Kota Tuai, Kota Ternate & Tidore, Kota Kalabahi (Alor).	Tersedianya Jembatan Darurat (Balley) untuk memperlancar arus transportasi dalam keadaan darurat.	8,000	16,000	36,000	APBN	Kem. PU, Ditjen Bina Marga
4	melakukan kontrol terhadap penguasaan	Identifikasi bencana sebagai akibat dari gempa tektonik.	Papua Barat	Manokwari	Tersosialisasinya kawasan rawan bencana tsunami, serta upaya untuk menghindari dari bencana sekunder.	2,000	-	-	APBN	Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang,
4	melakukan kontrol terhadap penguasaan	Teridentifikasi gejala bencana secara dini sebelum menimbulkan bencana.	Tersebar di seluruh Indonesia		Tersedianya Alat DRU (Disaster Relief Unit) untuk mengantisipasi terjadinya bencana.	110,000	140,000	160,000	APBN	Kem. PU, Ditjen Bina Marga

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana / Koordinator
			Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi	Terwujudnya sistem informasi (data dan peta) untuk kawasan rawan bencana di setiap Propinsi dan Kabupaten.	Wilayah Jawa dan Bali.		Sistem Informasi basis data dan peta micro-zonasi.	1,000	-	-	Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang,	
5	Pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang	Tersedianya pengembangan sistem monitoring dan audit pemanfaatan ruang dengan remote sensing	Wilayah Jawa dan Bali.		Sistem monitoring dan audit pemanfaatan ruang dan terkait risiko bencana.	1,000	-	-	Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang,	
6	pengelolaan lingkungan hidup	Tersedianya strategi dan program pemulihan fungsi lahan Kawasan Lindung Dataran Dieng	Jawa Tengah	Kawasan Dataran Dieng.	Sistem Pemantauan risiko bencana dan program pemulihan.	750	-	-	Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang,	
7	pengaturan pembangunan dan tata bangunan	Pengurangan risiko dampak kerusakan yang diakibatkan oleh gempa tektonik.	NTT Maluku Utara Papua Papua Barat		Berkurangnya dampak kerusakan sarana dan prasarana yang ditimbulkan gempa.	15,500	-	-	Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang,	
8	pembangunan sarana dan prasarana	Pembangunan pengendali banjir untuk membebaskan daerah dari banjir seluas 350.000 Ha.	Tersebar di seluruh Indonesia		Terlindungnya daerah permukiman dari banjir seluas 350.000 Ha	3,800,000	4,000,000	4,500,000	Kem. PU, Ditjen SDA	
		Pembangunan pengendali lahar gunung berapi untuk membebaskan daerah permukiman dari lahar gunung berapi seluas 9.620 Ha.	DIY Jateng Jatim		Terlindungnya daerah permukiman dari lahar gunung berapi seluas 9.620 Ha	180,000	100,000	120,000	Kem. PU, Ditjen SDA	
		Penanganan longsoran tebing	Tersebar di seluruh Indonesia		Terlindungnya lalu lintas dari Longsor tebing	30,000	36,000	44,250	Kem. PU, Ditjen Bina Marga	
		Memperkuat badan jalan dari longsor.	Tersebar di seluruh Indonesia		Terlindungnya Badan Jalan dari longsor.	500	4,400	4,850	Kem. PU, Ditjen Bina Marga	

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	
		Tersedianya peralatan (IPA Mobile, Pipa, Hidran Umum, Pompa, Mobil Tanki untuk penanganan darurat bidang air minum dan air limbah.	Kantor Pusat (Dep. PU)		Terpenuhi prasarana dan sarana untuk pengungsi.	15,000	15,000	15,000 APBN	Kem. PU, Ditjen Cipta Karya	
		Tersedianya peralatan (WC, Knock Down, MK Mobile, Alat Berat, Pompa Banjir, Pompa lumpur untuk penanganan darurat bidang penyehatan lingkungan permukiman.	Kantor Pusat (Dep. PU)		Terpenuhi prasarana dan sarana untuk pengungsi.	12,000	12,000	12,000 APBN	Kem. PU, Ditjen Cipta Karya	
		Tersedianya peralatan (tenda keluarga, hunian darurat untuk penanganan darurat bidang perumahan dan permukiman.	Kantor Pusat (Dep. PU)		Terpenuhi prasarana dan sarana untuk pengungsi.	12,000	12,000	12,000 APBN	Kem. PU, Ditjen Cipta Karya	
		Terbentuknya Satgas penanggulangan darurat dan pelatihan tenaga Satgas bidang Cipta Karya	Kantor Pusat (Dep. PU)		Terpenuhi prasarana dan sarana untuk pengungsi.	1,500	1,500	1,500 APBN	Kem. PU, Ditjen Cipta Karya	
<b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGKAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b>										
<b>PROGRAM E : PERINGATAN DINI</b>										
4	penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana	Tersedianya panduan dan petunjuk teknis pengurangan risiko bencana.	Wilayah Jawa dan Bali.		Penyebarluasan Panduan dan petunjuk teknis.	1,000	-	- APBN	Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang,	
<b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada Semua Tingkatan Masyarakat</b>										
<b>PROGRAM F : Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam PRB</b>										
2	perencanaan partisipatif penanggulangan bencana	Tersedianya model pelibatan masyarakat dalam menghadapi bencana.	Wilayah Jawa dan Bali.		Model dan program pelibatan masyarakat.	1,000		APBN	Kem. PU, Ditjen Penataan Ruang,	
<b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM</b>						<b>4,199,750</b>	<b>4,340,500</b>	<b>4,910,500</b>		

No	Kegiatan	Sasaran		Lokasi	Indikator Kinerja			Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)		Sumber Pendanaan	Pelaksana / Koordinator
		Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012	Th 2010	Th 2011		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN SOSIAL</b>											
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b>											
<b>PROGRAM A : Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan</b>											
1	Melakukan koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya	33 Prov	33 prov	Terselenggaranya Kegiatan dekonsentrasi ditujukan untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana alam bidang bantuan sosial sebagai upaya pengurangan risiko bencana fokus kegiatan yang bersifat non fisik seperti pelatihan SDM penanggulangan Bencana (TAGANA), Pelatihan Kemampuan Evakuasi Korban Bencana, Pelatihan Kemampuan Pengelolaan Logistik bagi Korban Bencana. Sedangkan Tugas Pembantuan difokuskan pada kegiatan bantuan yang bersifat fisik, seperti bantuan lauk-pauk dan bantuan stimulan bahan bangunan rumah bagi korban bencana.	98,137.39	117,764.87	141,317.84	APBN	Kem. Sosial, Dinas Sosial/Kesos/Institusi Sosial Provinsi terkait		
<b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>											
4	Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan	2 kegiatan (Penyusunan Pedoman dan Perencanaan Program)	Jakarta	Terselenggaranya kegiatan penyusunan perencanaan program dan buku pedoman yang terfokus pada Program Utama Depsos dalam sistem PB Nasional yaitu : “CCBDM” (Community Centre Based Disaster Management) atau penanggulangan bencana terpadu yang berbasis masyarakat dengan tujuan Meningkatkan kapasitas kemampuan masyarakat secara terpadu agar lebih siapsiaga untuk menghadapi bencana yang akan datang melalui proses early warning system, rapid response dan social recovery	3,744.28	4,493.14	5,391.77	APBN	Kem. Sosial		



No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)		Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)		Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)	
		Propinsi	Kab/kota	Th 2010	Th 2011 Th 2012						
<b>PRIORITAS : PEMANFAATAN PENGETAHUAN , INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b>											
<b>PROGRAM C : PENELITIAN , PENDIDIKAN , DAN PELATIHAN</b>											
3	penyelenggaraan 40 angk	berasal dari masy.	Jakarta Jabar			Terselenggaranya kegiatan ini yang da	6,328.59	7,594.31	9,113.17	APBN	Kem. Sosial
<b>PRIORITAS : PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>											
<b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>											
8	pembangunan sarana dan prasarana	33 Prov				Kegiatan bantuan stimulan Terselenggara	31,600	37,920	45,504	APBN	Kem. Sosial
<b>PRIORITAS : IDENTIFIKASI, PENGKAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b>											
<b>PROGRAM E : PERINGATAN DINI</b>											
4	penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana	33 Prov				Terselenggaranya kegiatan studi kebijaksanaan sehingga dapat terpetakan dan terdeteksinya daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi sebagai langkah antisipasi dan terselenggaranya kegiatan kampung Siataa Bencana (KSB)	4,891.67	5,625.42	6,750.50	APBN	Kem. Sosial, dan Akademisi

No	Kegiatan	Sasaran		Lokasi		Indikator Kinerja			Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana / Koordinator
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
<b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada Semua Tingkatan Masyarakat</b>													
<b>PROGRAM G : KESIAPSIAGAAN</b>													
4	penyediaan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar	33 pro dan Kab/kota rawan bencana	33 prov dan Kab/kota rawan bencana						126,395.99	151,675.19	182,010.23	APBN	Kem. Sosial
Terselenggaranya kegiatan darurat pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan sarana pendukungnya sehingga bantuan tersebut dapat menjangkau korban bencana berupa; Bantuan darurat, bantuan evakuasi kit serta kenderaan siaga bencana merupakan komponen kesiapsiagaan yang telah disiapkan di gudang provinsi melalui Dinas Sosial/Kesos/Institusi Sosial terkait. Khusus untuk bantuan beras dan mie instan mekanisme penyerahan bantuan melalui sistem D.O (Delivery Order)													
<b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB KEMENTERIAN SOSIAL</b>									<b>271,097.93</b>	<b>325,072.93</b>	<b>390,088</b>		
<b>Matrik RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN ESDM</b>													
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b>													
<b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>													
2	Melakukan analisis risiko bencana								1,022	1,175	1,351	APBN	Badan Geologi, KESDM
4	Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan	Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi untuk memudahkan Pemerintah Daerah apabila terjadi bencana	Jatim Sulut Sumbang Jabar Jateng Jabar dan Pengetahuan Masyarakat/Lembaga mengenai Kebencanaan Geologi						703	808	929	APBN	Badan Geologi, KESDM
Tersusunnya Dokumen Rencana Kontijensi yang dapat diakrifkan untuk tanggap darurat bencana geologi bagi Pemerintah Daerah													
APBN													
Badan Geologi, KESDM													

No	Kegiatan	Sasaran		Lokasi		Indikator Kinerja			Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)		Sumber Pendanaan	Pelaksana/Koordinator
		(3)		Propinsi	Kab/kota	(5)			Th 2010	Th 2011		
(1)	(2)	(6)										
<b>PRIORITAS: PEMANFAATAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b>												
<b>PROGRAM C : PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>												
3	penyelinggaran pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Jabar Jateng Jatim Sumbar			Peningkatan Prosentasi kesiapan Masyarakat dalam menghadapi Bencana Geologi					APBN	Badan Geologi, KESDM
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>												
<b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>												
1	pengenalannya dan pemantauan risiko bencana	Terpantaunya Tingkat Aktivitas Gununggapi secara menerus	Seluruh Wilayah Indonesia			Jumlah Terpantaunya tingkat aktivitas Gununggapi per tahun	1,266	1,456	1,675	APBN	Badan Geologi, KESDM	
3	identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana	Peningkatan Kualitas pemantauan Gununggapi	Seluruh Wilayah Indonesia			Jumlah Terpantaunya tingkat aktivitas Gununggapi per tahun	1,907	2,193	2,522	APBN	Badan Geologi, KESDM	
		Terseadinya informasi Kawasan Rawan Bencana Gununggapi, Gempabumi, Tsunami, dan Zona Kerentanan Gerakan Tanah	KRB Gununggapi: NTT Maluku Lampung Jabar Jatim Sumut			Tersedianya Peta KRB Gununggapi Gempabumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah sejumlah 27 Peta				APBN	Badan Geologi, KESDM	
		Gerakan tanah: Bengkulu Jambi NTT Sulut Sulteng Sumsel Jateng Sumut NAD Sumbar										

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)		Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)			Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
		Propinsi	Kab/Kota	Th 2010	Th 2011	Th 2012	Th 2010	Th 2011	Th 2012				
		Gempabumi: NTB Bali Jabar Jatim Lampung Jateng Sulsel Sulut Bengkulu Jabar											
		Tsunami: Banten Jateng Jatim Sulut Sulsel Bengkulu Lampung Sultra Bali											
		Tersedianya informasi Analisa Risiko Gunungapi, Gempabumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah untuk penyusunan Tata Ruang NIT		Banten Jateng Jatim Lampung Sumbang NIT		Tersedianya Peta KRB Gunungapi Gempabumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah sejumlah 27 Peta			1,907 2,193 2,522			APBN	Badan Geologi, KESDM
		Tersedianya informasi Prakiraan Kejadian Gerakan Tanah		Seluruh Wilayah Indonesia		Tersedianya Peta Prakiraan Kejadian Gerakan Tanah sejumlah 396/Tahun			24 24 24			APBN	Badan Geologi, KESDM

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)		Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)		Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)	
		Propinsi	Kab/kota	Th 2010	Th 2011		Th 2012				
<b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGKAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b>											
<b>PROGRAM E : PERINGATAN DINI</b>											
1	pengamatan gejala bencana	Terpantaunya Tingkat Aktivitas Gunungapi pada level waspada	10 Lokasi (berdasarkan data statistik)			Jumlah Terpantaunya tingkat aktivitas Gunungapi per tahun pada level waspada	971	1,117	1,285	APBN	Badan Geologi, KESDM
<b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada Semua Tingkat Masyarakat</b>											
<b>PROGRAM F : PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PRB</b>											
1	Peningkatan pemahaman tentang kerentanan masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat/Lembaga tentang mitigasi bencana geologi	14 Lokasi berdasarkan tingkat aktivitas kegiatan			Peningkatan Prosentasi pemahaman Masyarakat/Lembaga	1,050	1,050	1,050	APBN	Badan Geologi, KESDM
	Meningkatnya pengetahuan Masyarakat/Lembaga Penanganan Bencana mengenai Kebencanaan Geologi		-			Tersedianya bahan untuk sosialisasi dan peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap bencana geologi	720	828	952	APBN	Badan Geologi, KESDM
	Meningkatnya pemahaman masyarakat/Lembaga tentang mitigasi bencana geologi		14 Lokasi berdasarkan tingkat aktivitas kegiatan			Peningkatan Prosentasi pemahaman Masyarakat/Lembaga			APBN	APBN	Badan Geologi, KESDM
<b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB KEMENTERIAN ESDM</b>							<b>9,569</b>	<b>10,843</b>	<b>12,309</b>		

No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)		Propinsi (4)	Lokasi Kab/Kota (5)	Indikator Kinerja (6)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
							Th 2010	Th 2011	Th 2012		
<b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP</b>											
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>											
<b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>											
6	pengelolaan lingkungan hidup	Pembangunan data tutupan lahan sebagai informasi dasar pengurangan bencana		Seluruh kabupaten di Indonesia		Data tutupan lahan dan kawasan lindung	1,600	1,600	1,600 APBN	KLH	
		Pemulihan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang		NAD Pantai Utara Jawa Sulawesi Tengah dan Gorontalo	Simeulue Pantai Utara Jawa Teluk Tomini	Jumlah Demplot untuk Pemulihan Ekosistem	500	500	500 APBN	KLH	
		Penanggulangan dampak kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak di pesisir dan laut		Riau	Dumai	Buku Pedoman	75	75	75 APBN	KLH	
		Tersedianya kebijakan, data dan informasi untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan		Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan		Tersedianya data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan mekanisme pencegahan kebakaran hutan	3,000	3,000	3,000 APBN	KLH	
<b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP</b>							<b>5,175</b>	<b>5,175</b>	<b>5,175</b>		
<b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL</b>											
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>											
<b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>											
1	pengenaln dan pemantauan risiko bencana	Pemahaman masyarakat dan ketertarikan lembaga keagamaan dalam menghadapi bencana		NTT SumBar Bengkulu	Manggarai, Manggarai Barat Solok Selatan, Pesisir Selatan Bengkulu Utara, Muko-Muko	Terbentuknya kelompok masyarakat siaga bencana dan peningkatan peran serta lembaga keagamaan	500	500	500 APBN	KPDT	

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
2	penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana	Meminimalisir korban jiwa dan kerugian akibat bencana tanah longsor	Jateng NTT	Banjarnegara, Manggarai	Berfungsinya peralatan early warning system	300	400	APBN	KPDT	
6	pengelolaan lingkungan hidup	Kecukupan pangan, kesehatan masyarakat pada daerah rawan kekeringan	Jateng NTT DIY	Banjarnegara, Belu, Gunung Kidul	Terpenuhinya kebutuhan air baku masyarakat daerah rawan kekeringan	250	250	APBN	KPDT	
8	pembangunan sarana dan prasarana	Berkurangnya dampak abrasi pantai pada daerah pesisir dan lahan kritis	Sulsel Gorontalo Bengkulu Sumatera Barat	Pinrang, Gorontalo, Bulukumba, Bengkulu Utara, Kep. Mentawai	Terbentuknya hutan-hutan mangrove di kawasan rawan abrasi	110	300	APBN	KPDT	
8	pembangunan sarana dan prasarana	Pencegahan bahaya yang ditimbulkan akibat tanah longsor	NTT SulBar	Manggarai, Flores Timur Polewali Mandar	Terbentuknya talud sebagai penahan bahaya tanah longsor	500	500	APBN	KPDT	
<b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada Semua Tingkatan Masyarakat</b>										
<b>PROGRAM F : Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam PRB</b>										
4	penguatan ketahanan sosial masyarakat	Peningkatan ekonomi masyarakat pada daerah pasca bencana	SulBar SulBar Maluku	Solo Polewali Mandar Maluku Tenggara Barat	Terbentuknya lahan usaha yang produktif guna menunjang pemulihan ekonomi masyarakat	300	500	500	APBN	KPDT
<b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL</b>						<b>1,160</b>	<b>2,350</b>	<b>2,450</b>		

No	Kegiatan	Sasaran		Lokasi		Indikator Kinerja			Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)		Sumber Pendanaan	Pelaksana / Koordinator
		Propinsi	Kab/Kota	(4)	(5)	Th 2010	Th 2011	Th 2012	(6)	(7)		
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)
<b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, LAPAN</b>												
<b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGEKSTRAKSIAN, DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b>												
<b>PROGRAM E : PERINGATAN DINI</b>												
1	pengamatan gejala bencana	1). Tersedianya informasi hotspot (harian)	Sumatera dan Kalimantan		Informasi pemantauan hotspot, harian yang ter-upload di website SIMBA secara real time setiap hari.	232.6	255	281	APBN	LAPAN		
		2). Tersedianya informasi Sistem Peringatan Dini Bahaya Kebakaran Hutan/SPBK (harian)	Sumatera dan Kalimantan		Informasi pemantauan SPBK harian yang ter-upload di website SIMBA secara real time setiap hari.							
		3). Tersedianya informasi pemantauan daerah potensi banjir (harian)	Indonesia		Informasi pemantauan potensi banjir harian yang ter-upload di website SIMBA secara real time setiap hari.							
2	melakukan analisis hasil pengamatan gejala bencana	1). Tersedianya informasi hotspot (bulanan)	Sumatera dan Kalimantan		Rekapitulasi hotspot yang dikirim dalam bentuk laporan bulanan pada instansi terkait				APBN	LAPAN		
		2). Tersedianya informasi Sistem Peringatan Dini Bahaya Kebakaran Hutan (bulanan)	Sumatera dan Kalimantan		Rekapitulasi SPBK yang dikirim dalam bentuk laporan bulanan pada instansi terkait							
		3). Tersedianya informasi pemantauan daerah potensi banjir (bulanan)	Indonesia		Rekapitulasi kejadian banjir/longsor dan prediksi daerah banjir yang dikirim dalam bentuk laporan bulanan pada instansi terkait							
4	penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana	Tersedianya sistem (baik hardware maupun software, an, da, at mendukung pengolahan data penginderaan jauh guna pemantauan bumi untuk mitigasi bencana	Indonesia		Informasi pemantauan harian yang ter-upload di website SIMBA secara real time setiap hari. Sistem informasi pemantauan harian dan bulanan sumberdaya alam dan lingkungan berbasis website.	446.7	491	540	APBN	LAPAN		



No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)	Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
		Tersedianya informasi pemantauan cuaca dan iklim, sistem peringatan bahaya kebakaran, banjir/longsor, kekeringan, hotspot, dan ketersediaan pangan di website SIMBA								
		3). Tersedianya informasi bencana alam lainnya, seperti: sebaran kabut asap, dampak letusan gunung api, dampak gempa bumi, dampak tsunami dan lain-lain di website SIMBA								
		Terlaksananya diseminasi informasi penginderaan jauh untuk mitigasi bencana alam melalui kerjasama antar dan inter lembaga dan instansi serta melalui website SIMBA - LAPAN dan media massa								
<b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB LAPAN</b>						<b>679.3</b>	<b>746.0</b>	<b>821.0</b>		

No	Kegiatan	Sasaran		Lokasi	Indikator Kinerja		Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana / Koordinator
		Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012	(7)	(8)		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)			(7)	(8)
<b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, LIPI</b>											
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan KELEMBAGAAN</b>											
<b>PROGRAM A : Penguatan PERATURAN PERUNDANGAN DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN</b>											
1	Melakukan koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya	Penguatan kapasitas kepakaran multidisiplin di Perguruan tinggi, BPBD, lembaga riset terkait bencana	Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu		tersusun dan tersosialisasinya dokumen strategi penguatan kapasitas kepakaran dan SDM terkait PRB tingkat nasional dan daerah yang mendukung strategi PB nasional	500	1,000		Bappenas/BNPB	LIPi, Puslit Oseanografi	
<b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>											
1	Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana	1. Karakteristik geologi dan daya dukung tektonikan tanah serta zonasi potensi likuifaksi	Banten Bali		Dipergunakannya peta zonasi likuifaksi oleh pemangku kepentingan	290	320	350	APBN	LIPi, Puslit Geoteknologi	
2	Melakukan analisis risiko bencana	1. Konsep penyusunan tata ruang wilayah berbasis mitigasi bencana 2. Diketahuinya model prediksi penurunan dan amblesan 3. Diketahuinya parameter curah hujan sebagai pemicu longsor dan berkurangnya korban akibat bahaya tersebut	Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah		Diterapkannya model/konsep penyusunan tata ruang berbasis mitigasi bencana Diterapkannya konsep mitigasi thd penurunan dan amblesan Berkurangnya korban dan kerugian akibat bencana longsor	280	310	340	APBN	LIPi, Puslit Geoteknologi	
3	Identifikasi tindakan .en_uran_risiko bencana	Penguatan kapasitas Peringatan Dini Bencana PDB, ada A, arat dan pelaku PRB	Nasional Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu		Terlaksananya pelatihan serta penguatan kapasitas aparat dan . elaku PDB dalam PDB . an_ didukung_ perguruan tinggi dan lembaga pendidikan terkait daerah	1,500	3,000	1,000	Bappenas	LIPi, Puslit Oseanografi	
<b>PRIORITAS: Pemanfaatan PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b>											
<b>PROGRAM C : PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>											
1	pengembangan budaya sadar bencana	Diffusi Pembelajaran Kebencanaan di daerah berkenaan dampak	NAD Jawa Tengah		Kajian metode efektif dalam difusi pembelajaran kebencanaan	200	200		Bappenas	LIPi, Puslit Oseanografi	

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			(7)	(8)
		pemahaman bentuk kearifan lokal di masyarakat berisiko bencana Pendidikan Kebencanaan melalui Internet di Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset	Sulawesi NTT		Kajian pengalaman bencana serta kaitannya dalam pembentukan kearifan lokal	500	500	500	Bappenas	LIPi, Puslit Oseanografi
		Pendidikan Kebencanaan melalui Internet di Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset	Seluruh Propinsi		Tersusunnya model pembelajaran E-learning	500	200	200	Bappenas	LIPi, Dikti-Depdiknas, BNBP
		transliterasi sains ke materi pendidikan kreatif bagi masyarakat umum	Nasional NAD Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu		pengembangan alat peraga pendidikan PRB, media campaign	800	1,500	500	Bappenas	LIPi, Puslit Oseanografi
		Partisipasi pelaku PRB lembaga akademis dalam advokasi PRB			Penguatan jejaring, koordinasi dan komunikasi lembaga riset dan akademis tingkat nasional, regional/internasional	500	500	500	Bappenas	LIPi, Puslit Oseanografi
		pameran nasional dan daerah oleh pelaku PRB bagi masyarakat umum	Nasional NAD Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu		Terlaksananya pameran Siaga Bencana nasional dan daerah	1,000	1,300	500	Bappenas	LIPi, Puslit Oseanografi
2	pemantauan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber bencana	1. Diketahui pola pergerakan dan deformasi kulit bumi berdasarkan pengukuran GPS serta diketahuinya karakteristik kegeompaan	Sumatra Barat bengkulu Sumatera Utara NAD		Diterapkannya konsep mitigasi thd pengurangan risiko bencana gempa bumi dan tsunami	325	355	385	APBN	LIPi, Puslit Geoteknologi

No	Kegiatan	Sasaran		Lokasi	Indikator Kinerja		Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)		Sumber Pendanaan	Pelaksana / Koordinator
		Propinsi	Kab/Kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012	(7)		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)		(7)	(8)
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>										
<b>PROGRAM D. : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>										
3	identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman	Peran Gender dalam PRB di berbagai tingkat pelaku		Sulawesi NTT Kaltim			500	500	500	LIPi, Puslit Oseanografi
<b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGKAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b>										
<b>PROGRAM E. : PERINGATAN DINI</b>										
1	pengamatan gejala bencana	Kajian kapasitas daerah dalam rantai peringatan dini tsunami bagi aparat, masyarakat, interface agencies dan media		Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu		Pemanfaatan pemahaman proses alam dalam PRB	500	500	500	LIPi, Puslit Oseanografi
2	melakukan analisis hasil pengamatan gejala bencana	Kajian kapasitas daerah dalam rantai peringatan dini tsunami bagi aparat, masyarakat, interface agencies dan media		Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu		tersusunnya indeks kapasitas rantai peringatan dini tsunami	500	1.000	500	LIPi, Puslit Oseanografi
4	penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana	Kajian kapasitas daerah dalam rantai peringatan dini tsunami bagi aparat, masyarakat, interface agencies dan media		Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu		tersosialisasinya pedoman nasional rantai peringatan dini tsunami	250	500	500	Bappenas/BNPB
5	pelaksanaan tindakan terhadap ancaman bencana	Kajian kapasitas daerah dalam rantai peringatan dini tsunami bagi aparat, masyarakat, interface agencies dan media		Sulawesi NTT Papua Sumatera Barat Bengkulu		tersosialisasinya pedoman nasional rantai peringatan dini tsunami	250	500	500	Bappenas/BNPB

No	Kegiatan	Sasaran	Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/Koordinator
			Propinsi	Kab/kota		Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			(7)	(8)
<b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada Semua Tingkatan Masyarakat</b>										
<b>PROGRAM G : KESIAPSIAGAAN</b>										
1	Penyusunan mekanisme kesiapan dan penanggulangan an risiko bencana	Sekolah Model Siaga Bencana, komunitas sekolah dan pelaku terkait	Aceh Lampung Jakarta Kalim Riau		Kajian, Pengembangan dan Penguatan kapasitas Sekolah Model untuk menjadi sekolah Contoh Siaga Bencana	2,000	1,300	1,300	Bappenas	LPI, Kem. Diknas, BNPB
<b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB LIPI</b>						<b>10,950</b>	<b>14,100</b>	<b>8,750</b>		
<b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, POLRI</b>										
<b>PRIORITAS: PEMANFAATAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b>										
<b>PROGRAM C : PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>										
3	penyelenggara an pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan	meningkatnya kemampuan personil Polri dalam hal membaca peta khususnya peta sebaran kriminalitas	Mabes Polri dan Bakosurtanal		Adanya peta sebaran kriminalitas pada daerah yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi terhadap peralatan bencana Bakosurtanal sehingga: 1. Polri memiliki pengetahuan pengolahan peta yg dapat dikembangkan lebih lanjut dengan asistensi dari Bakosurtanal 2. Bakosurtanal memiliki peta sebaran kriminalitas yg akan dibagikan ke Polres/Polsek dan Masyarakat 3. Perangkat Bakosurtanal lebih dapat terjaga baik dengan adanya peta yg akan disebarakan ke Polres/Polsek serta masyarakat sekitarnya karena masyarakat merasa memilikinya dan mengerti/paham akan pentingnya alat tersebut				Kementerian Ristek	POLRI, Pusdalops POLRI & Bakosurtanal

No	Kegiatan	Sasaran		Lokasi		Indikator Kinerja			Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)		Sumber Pendanaan	Pelaksana / Koordinator
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Th 2010	Th 2011	Th 2012	(6)		
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>												
<b>PROGRAM D.: PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>												
3	Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman	Pusdalops POLRI, Polres dan Polsek	Mabes Polri dan BNPB		Polres/Polsek dapat membaca dan menjelaskan isi peta rawan kebencanaan kepada masyarakat di daerah rawan bencana						Kementerian Ristek	POLRI, Pusdalops POLRI & BNPB
<b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada semua tingkatan masyarakat</b>												
<b>PROGRAM F.: PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PRB</b>												
4	penguatan ketahanan sosial masyarakat	Meningkatkan kemampuan personil	Mabes Polri		Meningkatkan kemampuan personil dalam rangka Penanggulangan Bencana	298					DIPA DIT SAMAPTA POLRI	POLRI, DIT SAMAPTA POLRI
<b>PROGRAM G.: KESIAPSIAGAAN</b>												
2	penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Personil yang mengawasi posko 24 jam	Mabes Polri dan BNPB		memiliki SOP Ren Kontinjensi di Bid. Kebencanaan						BNPB	POLRI, Pusdalops POLRI & BNPB
<b>TOTAL KEGIATAN RAN-PRB POLRI</b>						<b>298</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

No	Kegiatan	Sasaran		Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinator
		(3)		(4)			Th 2010	Th 2011	Th 2012		
(1)	(2)					(5)	(6)				
<b>MATRIK RAN-PRB 2010-2012, KEMENTERIAN PERTAHANAN/ TNI</b>											
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA Penguatan Kelembagaan</b>											
<b>PROGRAM A : Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan</b>											
1	Melakukan koordinasi dengan BNPB dan BPBD dan instansi terkait untuk tugas, kewenangan, kerja dan merencanakan dan sumber dukungan sar-pras daya	Koordinasi dengan BNPB dan BPBD dan instansi terkait untuk menyusun mekanisme kerja dan merencanakan dukungan sar-pras		Mabes TNI dan Kowil		Terpenuhiya dukungan alpal/sarana, dan kesehatan prasarana PRCPB ditingkat pusat dan daerah (secara bertahap)	12.650	18.245	21.378	APBN	Slog TNI
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>											
<b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>											
6	pengelolaan lingkungan hidup	Pelestarian lingkungan hidup dengan kegiatan konservasi, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi di daerah rawan bencana.		4 Kowil		Terwujudnya kegiatan penghijauan pada zona penyangga kawasan lindung dan resapan air	240	288	346	APBN	Ster TNI
				4 Kowil		Terwujudnya kegiatan pelestarian sungai akibat pendangkalan sungai	100	-	144	APBN	Ster TNI
				4 Kowil		Terwujudnya kegiatan pelestarian jalur hijau berupa zona hijau bantaran sungai dan penanaman pohon penahan erosi	100	120	144	APBN	Ster TNI

No	Kegiatan	Sasaran		Lokasi		Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp)			Sumber Pendanaan	Pelaksana / Koordinator
		(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	Th 2010	Th 2011		
<b>PRIORITAS: Penguatan Kesiapan Menghadapi Bencana pada Semua Tingkatan Masyarakat</b> <b>PROGRAM F : Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam PRB</b>											
3	peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana	Melanjutkan pendataan dan pengadaan alat transportasi untuk mendukung penanganan korban bencana	Mabes TNI dan Kowil			Terdukungnya alat transportasi / mobil rescue, angkutan dna alat berat	800	-	-	- APBN	Slog TNI
		Melanjutkan pendataan dan pengadaan alat transportasi untuk mendukung penanganan korban bencana	4 Kowil			Terdukungnya alat transportasi / mobil rescue, angkutan dna alat berat	-	960	-	- APBN	Slog TNI
		Melanjutkan pendataan dan pengadaan alat transportasi untuk mendukung penanganan korban bencana	4 Kowil			Terdukungnya alat transportasi / mobil rescue, angkutan dna alat berat	-	-	1,152	APBN	Slog TNI
		Melanjutkan pendataan dan pengadaan alat transportasi untuk mendukung penanganan korban bencana				Terkoordinirnya pemanfaatan alat angkut milik swasta untuk mendukung penanganan bencana			115		Ster TNI
4	penguatan ketahanan sosial masyarakat	Melaksanakan gladi posko penanganan bencana	4 Kowil			Terlaksananya mekanisme hubungan komando dan staf PRCPB dalam penanganan bencana	60	72	86	APBN	Ster TNI



No (1)	Kegiatan (2)	Sasaran (3)		Lokasi (4)		Indikator Kinerja (5)	Indikasi Pendanaan (JUTA Rp) (6)			Sumber Pendanaan (7)	Pelaksana/ Koordinator (8)
		Propinsi	Kab/kota	Th 2010	Th 2011		Th 2012				
		Melaksanakan gladi lapangan penanganan bencana secara terpadu dengan instansi terkait	4 Kowil			Terlatihnya prajurit PRCPB bersama instansi terkait dalam penanganan bencana secara terpadu	95	114	137	APBN	Ster TNI
			4 Kowil			Terbentuknya kesadaran masyarakat dalam membantu proses penanganan bencana	60	72	86	APBN	Ster TNI



LAMPIRAN 4. MATRIK USULAN KEGIATAN RAN-PRB  
2010-2012 YANG BELUM TERINDIKASI  
DANA DAN PELAKSANANYA



LAMPIRAN 4  
Matrik Usulan

No	Kegiatan	Sasaran	Provinsi	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN RISIKO BENCANA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SERTA PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
<b>PROGRAM A : PENGUATAN PERATURAN PERUNDANGAN DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN</b>				
1	Melakukan koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya	Terwujudnya Koordinasi urusan pemulihan lingkungan, kesadaran dan kesiapsiagaan serta ketahanan masyarakat dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	Sumatera Selatan, DKI Jakarta Gorontalo, dan Lampung	Meningkatnya partisipasi Pemerintah daerah dan masyarakat dalam urusan pemulihan lingkungan, kesadaran dan kesiapsiagaan serta ketahanan masyarakat dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
<b>PROGRAM B : PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>				
1	Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana	Tersusunnya peta risiko bencana gempabumi yang memenuhi kaidah pemetaan dan memiliki legitimasi	Lampung, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat	Adanya acuan para pemangku kepentingan
		Tersusunnya peta risiko bencana tsunami yang memenuhi kaidah pemetaan dan memiliki legitimasi	Pantai Barat Sumatera, Bali, Maluku dan Maluku Utara	Adanya acuan para pemangku kepentingan
2	Melakukan analisis risiko bencana	Daerah mampu melakukan upaya mitigasi dan adaptasi bencana serta menghitung risiko bencana	Pesisir Sumatera Bagian Barat Pesisir Selatan Jawa	Buku Pedoman
3	Identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana	Teridentifikasinya tindakan pengurangan risiko bencana di sekitar gunungapi	Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat	Terwujudnya upaya-upaya pengurangan risiko bencana di sekitar gunung api

No	Kegiatan	Sasaran	Provinsi	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Penyusunan dokumen perencanaan dan peraturan perundangan	Tersusunnya kebijakan dalam mengurangi risiko banjir yang melibatkan beberapa provinsi	DKI Jakarta Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	Meningkatnya upaya-upaya dalam mengurangi risiko banjir
<b>PRIORITAS: PEMANFAATAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN BUDAYA KESELAMATAN DAN KETAHANAN</b>				
<b>PROGRAM C : PENELITIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>				
1	pengembangan budaya sadar bencana	Masyarakat akan semakin sadar terhadap bahaya bencana gerakan tanah/tanah longsor	Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya bencana gerakan tanah/tanah longsor
2	pemantauan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber bencana	Pemanfaatan teknologi GIS dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan	Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim	Pelatihan pengolahan data hotspot kepada aparat pemerintah daerah
3	penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bencana kekeringan	Banten, Jawa Barat, Jawa, Tengah, Jawa Timur	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bencana kekeringan
<b>PRIORITAS: PENGURANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO BENCANA</b>				
<b>PROGRAM D : PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</b>				
1	pengenalan dan pemantauan risiko bencana	Menghimpun data dan informasi kebakaran hutan dan lahan dan mendistribusikannya ke daerah-daerah rawan kebakaran	Sumatera dan Kalimantan	Tersedianya data hotspot pemantauan kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran asap lintas batas
2	penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana	Terbangunnya sistem peringatan dan deteksi banjir	Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat	Tersedianya sistem peringatan dan deteksi banjir

No	Kegiatan	Sasaran	Provinsi	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana	Percepatan Pembuatan Peta Dasar (Rupabumi) Skala Besar, Penyusunan Data Akurat, Informasi, dan Pemutakhiran Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana	Seluruh Wilayah Indonesia	Tersedianya Peta Dasar yang Menjadi Acuan Pembuatan Peta Operasional Penanganan Bencana
4	melakukan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana	Terbangunnya sistem pengelolaan sumber daya alam	Banten, Jawa Barat, Jawa, Tengah, Jawa Timur	Tersedianya sistem pengelolaan sumber daya alam
5	Pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang	Terbangunnya sistem pengawasan terhadap penyediaan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan Undang-Undang	Seluruh daerah rawan bencana	Tersedianya sistem pengawasan terhadap penyediaan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan Undang-Undang
6	pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kepekaan Lingkungan		Buku Pedoman
7	pengaturan pembangunan dan tata bangunan	Tersusunnya peraturan pembangunan tata bangunan	Seluruh daerah rawan bencana	Adanya peraturan pembangunan tata bangunan
8	pembangunan sarana dan prasarana	Terbangunnya fasilitas umum yang tahan terhadap bencana gempabumi di daerah rawan bencana	Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Bengkulu	Tersedianya fasilitas umum yang tahan terhadap bencana gempabumi di daerah rawan bencana
		Terbangunnya struktur penahan gelombang laut untuk mengurangi dan menahan tekanan tsunami	Pesisir Sumatera Bagian Barat, Pesisir Selatan Jawa, Bali	Tersedianya struktur penahan gelombang laut untuk mengurangi dan menahan tekanan tsunami

No	Kegiatan	Sasaran	Provinsi	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Terbangunnya sistem transportasi yang dapat memfasilitasi evakuasi massal cepat	Seluruh daerah rawan bencana	Tersedianya sistem transportasi yang dapat memfasilitasi evakuasi massal cepat
<b>PRIORITAS: IDENTIFIKASI, PENGKAJIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA SERTA PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI</b>				
<b>PROGRAM E : PERINGATAN DINI</b>				
1	pengamatan gejala bencana			
2	melakukan analisis hasil pengamatan gejala bencana			
3	pengambilan keputusan status ancaman bencana			
4	penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana	membuat dan penyebarluasan potensi daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan	Sumatera dan Kalimantan	Tersedianya Peta rawan kebakaran wilayah Sumatera dan Kalimantan
5	pelaksanaan tindakan terhadap ancaman bencana			
<b>PRIORITAS: PENGUATAN KESIAPAN MENGHADAPI BENCANA PADA SEMUA TINGKATAN MASYARAKAT</b>				
<b>PROGRAM F : PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PRB</b>				
1	Peningkatan pemahaman tentang kerentanan masyarakat	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kebakaran hutan dan lahan	Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim	Sosialisasi dan kampanye bahaya kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat
		Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana	Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Gorontalo, dan Lampung	Terselenggaranya sosialisasi pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana



No	Kegiatan	Sasaran	Provinsi	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	perencanaan partisipatif penanggulangan bencana			
3	peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana	Meningkatkan ketaatan terhadap para pelaku usaha dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim	Pengawasan terhadap pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan
		Meningkatnya komitmen bersama pemerintah dan stakeholder dalam penanggulangan multi bencana	Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Gorontalo, dan Lampung	Terbangunnya Komitmen bersama antara Pemerintah dan Stakeholder untuk penanggulangan multi bencana
4	penguatan ketahanan sosial masyarakat			
<b>PROGRAM G : KESIAPSIAGAAN</b>				
1	Penyusunan mekanisme kesiapan dan penanggulangan risiko bencana	Peningkatan kesiapan masyarakat	Seluruh daerah rawan bencana	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana
2	penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana			
3	pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini	Terbangunnya sistem monitoring dan peringatan terhadap ancaman gerakan tanah/tanah longsor	Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara	Tersedianya sistem monitoring dan peringatan terhadap ancaman gerakan tanah/tanah longsor
4	penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan			

No	Kegiatan	Sasaran	Provinsi	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	kebutuhan dasar			
5	pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat			
6	penyiapan lokasi evakuasi			
7	penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana	Memberi pemahaman pelaksanaan prosedur tetap penanggulangan bencana letusan gunung api	Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat	Meningkatkan pemahaman pelaksanaan prosedur tetap penanggulangan bencana letusan gunung api
8	penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana			